



— BOOK CHAPTER —

KAJIAN GENDER DALAM RAGAM DISIPLIN ILMU

Editor:
Dr. Sofa Marwah, S.IP., M.Si.

Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman

2020

BOOK CHAPTER

KAJIAN GENDER DALAM RAGAM DISIPLIN ILMU

Editor:

Dr. Sofa Marwah, S.IP., M.Si.

Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2020

BOOK CHAPTER

KAJIAN GENDER DALAM RAGAM DISIPLIN ILMU

© 2020 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, Agustus 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Editor Isi:

Dr. Sofa Marwah, S.IP., M.Si.

Editor Bahasa Indonesia:

Gita Anggria Resticka, S. S., M.A.

Editor Bahasa Inggris:

Aidatul Chusna, S.S., M.A.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)
Telp. (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id



Anggota

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Nomor : 003.027.1.03.2018

xx + 178 hal., 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-7144-91-5

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

KETUA ASOSIASI PUSAT STUDI WANITA/GENDER DAN ANAK INDONESIA SELURUH INDONESIA

Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se-Indonesia (ASWGI) lahir, tumbuh dan berkembang agar menjadi organisasi yang mandiri, professional, berdaya dan berhasil guna dengan mewujudkan visi terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak. Secara kelembagaan, ASWGI berdiri sejak tahun 2012, namun diresmikan dengan Akta Notaris pada tahun 2015 pada saat Kongres ASWGI I di Surabaya. Pada awal berdirinya, ASWGI hanya beranggotakan sekitar 40 pusat studi wanita/gender dan anak, pada tahun 2020 anggota ASWGI telah mencapai sekitar 120 pusat studi wanita/gender dan anak dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Perguruan Tinggi Ilmu Keagamaan (PTIK) seluruh Indonesia. Keberhasilan untuk mewadahi pusat studi wanita/gender dan anak seluruh Indonesia merupakan salah satu bentuk kegelisahan dan kepedulian yang sama terhadap masa depan perempuan dan anak-anak Indonesia. Meskipun baru berusia belia, ASWGI secara konsisten berusaha terus-menerus mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak dengan tujuan memperkuat kapasitas anggota ASWGI dan mengintegrasikan isu gender dan inklusi sosial (GESI) dalam setiap kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Setiap upaya yang dilakukan oleh anggota ASWGI untuk terus mengupayakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak dan kelompok marginal berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender, akan terus kita dukung dan kita suarkan.

Pada kesempatan ini, saya selaku ketua ASWGI memberikan apresiasi kepada Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) LPPM Universitas Jenderal Soedirman yang menerbitkan buku dengan tema Kajian Gender dalam Ragam Disiplin Ilmu. Penerbitan buku ini sejalan dengan salah satu misi ASWGI untuk mengembangkan pengetahuan, kajian, advokasi dan publikasi ilmiah untuk isu-isu gender, perempuan dan anak. Kegiatan positif ini juga merupakan salah satu tujuan ASWGI untuk menyediakan kajian strategis untuk isu gender, perempuan dan anak. Untuk itu ASWGI sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota ASWGI dalam hal ini PPGAPM Unsoed untuk mempublikasikan kajian-kajian isu gender, perempuan dan anak.

Buku yang terdiri dari 16 tulisan ini, mengupas berbagai macam isu gender dari berbagai kajian ilmu dan perspektif sesuai keanekaragaman dan minat tim PPGAPM Unsoed yang terdiri dari dosen lintas fakultas dan program studi. Penerbitan buku ini saya harapkan mampu memberi warna kajian akademis tentang isu gender dan inklusi sosial di Indonesia sekaligus menginspirasi gerak langkah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Ketua ASWGI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emy Susanti', written in a cursive style. The signature is underlined with a single horizontal line.

Prof. Dr. Emy Susanti, M.A.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Ketua Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia Seluruh Indonesia	iii
Daftar Isi	v
Kontributor	vii
Catatan Editor	xvi
Sub Chapter I: Studi Perempuan dalam Lintasan Waktu	1
1. Kuasa yang Meminggirkan Perempuan dalam Sejarah (Sofa Marwah)	2
2. Perempuan Pascakolonial : Feminisme dalam Kajian-Kajian Pascakolonial (Hariyadi dan Rili Windiasih)	12
3. Pemimpin Perempuan dalam Penanganan Virus Covid-19 (Sri Wijayanti)	25
Sub Chapter II: Dinamika Isu Gender dalam Ranah Sosial-Ekonomi	35
4. Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Novita Puspasari)	36
5. Ketidaksetaraan Gender pada Puncak Kepemimpinan Perusahaan Publik di Indonesia (Wita Ramadhanti)	44
6. Gender dan Komunikasi (Tyas Retno Wulan)	57
7. Suami Pekerja Migran Indonesia di Banyumas: Puisi dalam Sepi (Hendri Restuadhi)	72
8. <i>Migrant Woman's Experience Matters: Indonesian Domestic Workers' Migrant Activism in Hong Kong as Reflected in Arista Devi's Collection of Short Stories "Empat Musim Bauhinia Ungu"</i> (Tri Murniati)	88
Sub Chapter III: Pengetahuan Perempuan dalam Ekofeminisme	101
9. Perempuan dan Kesehatan Lingkungan (Agnes Fitria Widiyanto)	102
10. Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Aras Lokal (Oktafiani Catur Pratiwi)	108

11. Mengintegrasikan Agenda Lintas Sektoral: Perubahan Iklim, Gender, dan Keamanan Manusia di Indonesia (Ayusia Sabhita Kusuma)	118
Sub Chapter IV: Persinggungan Isu Gender dan Inklusi Sosial	133
12. Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia ditinjau dari Pendekatan Gender: Sebuah Studi Pendahulu (Nurul Azizah Zayzda)	134
13. Implementasi Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Riris Ardhanariswari)	145
Sub Chapter V: Gender, Edukasi, dan Kesehatan	159
14. Peran Remaja Perempuan dalam Pencegahan Kurang Energi Kronik (Ibnu Zaki)	160
15. Remaja dan Pandemi Covid-19 (Eri Wahyuningsih dan Dyah Woro Dwi Lestari)	167
16. <i>New Normal</i>: Sebuah Tantangan Bagi Anak-Anak dan Orang Tua Selama dan Pasca Pandemi (Dyah Woro dan Eri Wahyuningsih)	174

KONTRIBUTOR



Dr. Sofa Marwah, S.IP.M.Si lahir di Kediri, 26 April 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan S2 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, serta S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ia mempresentasikan karya ilmiahnya yang berjudul “Inquiring Into Local Values of Peripheral Javanese Cultural Diversities to Support Democratization” pada International Conference on Politics and International Studies (ICPIS) Universiti Malaysia Sabah, serta “Local Policy Initiatives to Maintain Java Bagelen-Culture: The Absence of Woman Issues International Conference on Contemporary Social and Political (ICOCSPA) di Universitas Airlangga. Publikasi artikelnya pada jurnal internasional terindeks Scopus yaitu “Political Representation for Javanese Women in The Affirmation Policy in Indonesia” yang diterbitkan pada Asia-Pasific Social Science Review, Dela Salle University, Philippines, serta “Women of the South Coast of Java in Politics and Rural Development”, yang diterbitkan pada Journal of International Women’s Studies, Bridgewater State University, USA. Buku yang ditulis antara lain berjudul *Kontestasi Perempuan dan Politik dalam Budaya Banyumas, Perempuan dalam Tradisi Kekuasaan Islam, Pemikiran Politik Indonesia*, serta *Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Jawa Pnggiran*. Ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Ketua Program Studi Berprestasi I Unsoed Tahun 2014 dan Dosen Berprestasi I Bidang Sosial Humaniora Unsoed Tahun 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed.



Hariyadi, MA. Ph.D. lahir pada tanggal 5 Oktober 1975 di Banjarnegara. Ia adalah dosen pada Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed. Ia menempuh pendidikan S1 di FISIP Unsoed dan lulus tahun 1999, pendidikan S2 di Lancaster University dan lulus tahun 2002, serta pendidikan S3 di University of Western Australia dan lulus tahun 2014. Selain menjadi Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed, ia juga menjadi anggota Dewan Pakar Lingkar Kajian Banyumas, Sekretaris Pusat Penelitian Budaya Daerah dan Pariwisata Unsoed, serta Kepala Laboratorium Sosiologi FISIP Unsoed. Ia juga menjadi peneliti pada Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat Unsoed.



Dr. Rili Windiasih yang dilahirkan pada tanggal 28 April 1969 adalah dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed dan pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana Unsoed. Ia menjalani pendidikan S1 di FISIP Unsoed, S2 di Program Studi Ketahanan Nasional UGM, dan S3 di Program Studi Penyuluhan. Pembangunan/ Pembedayaan Masyarakat UNS. Artikel-artikel yang pernah dituliskannya antara lain adalah: Aktualisasi Pembangunan Partisipatif Dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Desa (Jurnal Acta Diurna Vol. 14. No. 1. Tahun 2018), Ex-Prisoners, Correctional System and National Resilience (Prosiding di Annual Civic Education Conference 2018), dan Komunikasi Pembangunan di Era Digital Melalui *E-Government* Dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan (Jurnal Suluh Pembangunan Vol. 1. No.1. Tahun 2019).



Sri Wijayanti, S.IP., M.Si. adalah staf pengajar jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsoed sejak Desember 2008. Pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta dan S2 Hubungan Internasional UGM. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Koordinator Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsoed,

	<p>serta pengurus ASWGI Jawa Tengah. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed</p>
	<p>Novita Puspasari, S.E., M.Sc., Ak., CA. menempuh pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman. Ia menyelesaikan S2 pada Magister Sains Ilmu Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini, ia adalah dosen dan peneliti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (FEB UNSOED). Fokus penelitiannya di area akuntansi sektor publik, koperasi, pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. Ia merupakan peraih penghargaan <i>Best Paper</i> dalam berbagai konferensi, baik nasional maupun internasional. Di tahun 2016, ia mendapatkan beasiswa <i>short course</i> di bidang pengembangan ekonomi lokal dari Erasmus University Rotterdam dan di tahun 2018 mendapat kesempatan yang sama di Wageningen University, Belanda di bidang youth cooperative movement. Tahun 2019, ia menjadi pembicara di konferensi Koperasi Platform terbesar di dunia di The New School University, New York, AS. Saat ini, ia merupakan Kepala Cooperative Innovation Hub FEB UNSOED, koordinator riset di Kopkun Institute, tenaga ahli penyusunan RPJMN 2020-2024 untuk Kementerian PPN/Bappenas dan koordinator riset LPDB-Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed. Ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Dosen Berprestasi I Bidang Sosial Humaniora Unsoed Tahun 2018.</p>



Dr. Wita Ramadhanti, SE., Ak., MSA., CA., CPA., lahir di Malang, 16 Juli 1982. Menghabiskan masa kecil dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 di Malang (Akuntansi Universitas Brawijaya). Sempat mengikuti program Sandwich-Like Dikti 2011 di University of Queensland Australia. Sejak 2006 menjadi Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat LPPM Unsoed. Saat ini penulis tinggal di Purwokerto, menikah dan memiliki 2 orang putri.



Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si. dilahirkan di Solo Jawa Tengah pada tanggal 3 September 1971. Sejak tahun 1995 penulis bekerja sebagai Dosen FISIP UNSOED dan mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial, Metodologi Penelitian Partisipatoris, Gender dan Pembangunan dan Sosiologi Gender. Menjadi Ketua Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) LPPM Unsoed pada tahun 2010-2017 dan sejak tahun 2018-sekarang menjadi Ketua Jurusan Sosiologi Fisip Unsoed. Beberapa tulisan pernah dihasilkan, antara lain ; Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan (Jurnal Sodality, KPM IPB, Bogor, 2007); Reforma Agraria berbasis Gender: dalam Buku: Menggugat Kebijakan Agraria (Pustaka Wirausaha Muda, Bogor 2006); Strategi Pemberdayaan BMP di Hong Kong (Jurnal Agrisepe Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Volume 10, No. 1 September 2009); Feminisasi Kemiskinan dan Upaya Pengentasan (Kompas 18 Juni 2007); Remiten sosial dan Buruh Migran Perempuan (Kompas 10 Maret 2008); Menemukan Remiten Sosial di Hong Kong, Koran SUARA, Hong Kong Januari 2009; Penghentian Pengiriman TKI, Menjadi Solusi atau Masalah, (Kompas 20 Nopember 2009), Buku: Nikah Mut'ah (Posisi Sosial dan Hak Reproduksi Perempuan pengikut Syiah) UGM and Ford Foundation. Buku: Pemberdayaan Perempuan Pedesaan-Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan

	<p>Prof. DR Pudjiwati Sayogyo (2010); Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan (2007) Kondisi dan Perubahan Agraria di desa Ngandagan Jawa Tengah dulu dan sekarang (2013). Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir melalui Desa Peduli Buruh Migran(Desbumi)di Desa Kuripan Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat; Jurnal Sodality Vol 5 No 02 Agustus 2017; “Ayah Tangguh Keluarga Utuh: Pola Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Banyumas” , terbit di Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen (JIKK) IPB Volume 11 No 2 tahun 2018. Penghargaan dan Award yang pernah diraih antara lain: Penerima Anugerah Indonesian Scholarship Dissertation Award (ISDA) dari Ford Foundation dan IIEF pada tahun 2010, Dosen Berprestasi 1 Universitas Jendral Soedirman dan Finalis Dosen Berprestasi Nasional 2014; Peraih Unsoed Award tahun 2018 bidang Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
	<p>Drs. Hendri Restuadhi, MSi., MA (Soc), lahir di Jogjakarta, 2 Nopember 1961. Menghabiskan masa kecil di Jogjakarta. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan di Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta (1986). Sedangkan jenjang pendidikan S2 diselesaikan di UGM Jogjakarta (1998) dan di Flinders University of South Australia (2003). Sejak 1988 hingga saat ini, penulis menjadi Dosen di Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat LPPM Unsoed. Sebagai peneliti, pernah menjadi konsultan bagi FAO (Food and Agricultural Organization) selama satu setengah tahun yaitu dari Januari 2008 hingga September 2009. Saat ini penulis tinggal di Perumahan UNSOED no. 18, Grendeng, Purwokerto.</p>



Tri Murniati, M.Hum., Ph.D. saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menyelesaikan studi S1 Sastra Inggris dan S2 Ilmu Susastra di Universitas Diponegoro dan studi S3 *Comparative Literature and Cultural Studies* di University of Arkansas. Penulis tertarik pada bidang kajian antara lain sastra dan budaya, sastra migran, gender, migrasi dan transnasionalisme. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed.



Agnes Fitria Widiyanto, SKM, M.Sc. Dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Unsoed sejak 2010. Menyelesaikan S1 kesehatan masyarakat Unsoed pada 2005 dan S2 Kesehatan Masyarakat UGM pada 2009. Menikah dengan 2 orang putra. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed.



Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP., M.A. lahir di Tegal, 27 Oktober 1979. Menamatkan pendidikan S1 nya dari Prodi Ilmu Pemerintahan UGM dan S2 Prodi Ilmu Politik di universitas yang sama. Saat ini penulis menjadi staf pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed. Penulis tertarik pada beberapa *field research* antara lain pada isu *governance*, politik lingkungan, dan politik perkotaan. Beberapa tulisannya telah dimuat dalam jurnal dan buku bunga rampai. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed.



Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc. lahir di Pacitan pada tanggal 18 Oktober 1982, kemudian pada kelas 3 Sekolah Dasar bersama orang tua berpindah domisili ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan S2 di National University of Malaysia pada program Security and Strategic Analysis. Penulis memulai mengajar di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2014 dan menjadi peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGA-PM) Universitas Jenderal Soedirman. Penulis mempunyai minat pada kajian-kajian keamanan, gender dan perdamaian. Saat ini penulis berdomisili di Banyumas dan dapat dihubungi melalui email berikut; ayusia.kusuma@unsoed.ac.id atau kusumabumi@gmail.com.



Nurul Azizah Zayzda, S.IP. MA. mengajar di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman. Minat risetnya adalah pada isu-isu migrasi dan hak asasi manusia. Nurul lulus dari program Master in Global Citizenship, Identities and Human Rights, University of Nottingham. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed.



Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. lahir di Purwokerto, 5 Mei 1973. Menamatkan pendidikan S1 nya dari Fakultas Hukum UNSOED dan S2 Ilmu Hukum UI dan S3 dari Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD. Saat ini penulis menjadi staff pengajar di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNSOED. Penulis tertarik pada beberapa *field research* antara lain pada isu ketatanegaraan, *perundang-undangan*, *hak asasi manusia* dan gender. Beberapa tulisannya telah dimuat dalam jurnal dan buku. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed.



Ibnu Zaki, S.Gz., M.Gizi lahir di Indramayu, 05 Nopember 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro dari tahun 2007 - 2011, kemudian melanjutkan S2 di Magister Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro dari tahun 2012 – 2014. Saat ini penulis menjadi staff pengajar di Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2014. Kemudian bergabung dengan tim peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan kepada Masyarakat, LPPM, Universitas Jenderal Soedirman. Area *field research* yang digeluti yaitu gizi pada remaja perempuan.



Eri Wahyuningsih, S.Ked., M.Kes. Adalah dosen di Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, sejak tahun 2005. Lahir di Wangon, Kab. Banyumas, 11 April 1978, Eri menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, tahun 2001; S2 Bidang Kesehatan Reproduksi dari Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2005; dan saat ini sudah menyelesaikan program doctoral di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM. Sejak di Program S2, Eri memperdalam ilmu kesehatan reproduksi remaja sebagai fokus perhatiannya. Dalam penelitian disertasinya, Eri mengkaji permasalahan perilaku kesehatan pada kelompok remaja anak pekerja migran. Selain tugasnya sebagai dosen, Eri juga bergabung dalam Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) di LPPM UNSOED. Bersama PPGAPM Eri melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama di bidang kajian gender dan isu-isu terkait pekerja migran Indonesia.



Dyah Woro Dwi Lestari, S.Psi., M.A.

Perempuan yang akrab disapa Woro ini adalah seorang dosen psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman. Woro menyelesaikan S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2000, dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2014. Woro juga bergabung dalam Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) di LPPM UNSOED. Selain kedua aktivitas tersebut, Woro terlibat aktif dalam HIMPSI Barlingmascakeb, pendampingan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, serta menjadi pembicara di banyak forum ilmiah lainnya.

CATATAN EDITOR

PENGANTAR: MEMAHAMI KERAGAMAN STUDI GENDER

Perjalanan studi tentang gender adalah sebuah proses yang sangat panjang. Ikhwal awal tentang terjadinya ketidakadilan isu gender pun konon juga terjadi hampir setara peradaban manusia hidup di bumi. Setidaknya demikian disebutkan dalam catatan Diana Coole (1993). Menurutnya, perdebatan tentang posisi perempuan sudah dimulai sejak masa Yunani, karena pada saat itu mulai muncul paham *misogyny* terhadap hak-hak perempuan. Menjelang Abad Renaissance, isu tentang perempuan diwarnai oleh persoalan nilai-nilai keagamaan, yaitu subordinasi terhadap perempuan berhubungan dengan “kesalahan” Eva yang menjadikan manusia mendiami bumi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sylvia Walby (dalam Jane Philcher & Imelda Whelehan, 2004) menyatakan bahwa patriarki merupakan sistem dari struktur sosial dan praktik-praktik dalam dominasi, tekanan, serta eksploitasi terhadap perempuan. Setidaknya terdapat enam struktur patriarki dalam catatan Sylvia Walby, yaitu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan upahan, negara, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas dan budaya. Walby menjelaskan patriarki privat didasarkan pada keluarga dan rumah tangga, serta laki-laki yang mengeksploitasi pekerja perempuan. Dalam patriarki publik, perempuan memang tidak dikeluarkan dari kehidupan publik, tetapi mereka berkedudukan tidak setara dan terdiskriminasi didalamnya. Dalam konteks demikian, gerakan feminis merupakan faktor kunci dalam membawa perubahan dari patriarki privat ke publik, melalui perjuangan untuk mendapatkan hak pilih, hak untuk mengakses pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan kesehatan yang layak, dan sebagainya.

Dalam keragaman isu dan studi gender, buku ini ingin menjadikannya sebagai keunggulan tulisan-tulisan yang disajikan. Adapun kelemahannya, tentu potret yang disajikan dalam keragaman itu tidaklah mampu secara utuh menyuguhkan kompleksitas dalam studi gender. Kalaupun tautan-tautan antar masing-masing tulisan seolah masih terpeanggal, adalah semata justru menunjukkan betapa beragamnya isu gender yang terjadi dalam kehidupan kita. Sangat kompleks dalam perjalanan waktunya, juga sangat kompleks dalam isian-isian masalah yang muncul dalam sisi-sisi kehidupan keluarga, masyarakat, maupun kenegaraan. Adalah sangat tepat hal yang dikatakan oleh Pateman (dalam Sullivan, 1998) tentang teori kontrak sosial. Ketika pendekatan kontrak sosial menawarkan hak-hak baru dan kebebasan, sebenarnya kontrak sosial sedang menghasilkan bentuk baru subordinasi patriarki bagi

perempuan. Kontrak dalam teori maupun praktik oleh karenanya mendukung subordinasi perempuan oleh laki-laki.

Berkaitan dengan perjalanan panjang dan kompleksitas isu gender, para peneliti dari Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat LPPM Universitas Jenderal Soedirman telah menunjukkan betapa tidak akan habis ragam isu dan masalah ketidakadilan gender sejak zaman dulu hingga saat ini, masuk dalam banyak aspek kehidupan kita. Kelak pun, masalah subordinasi, kekerasan, marginalisasi, stereotipe, dan lainnya masih membutuhkan banyak tangan yang menopang untuk bersama-sama berupaya mengikisnya. Potret tersebut diawali oleh studi Sofa Marwah yang memperlihatkan bahwa narasi sejarah masyarakat di Indonesia, yang sejak dahulu sudah tidak adil bagi kaum perempuan. Peminggiran yang terjadi terhadap perempuan dalam narasi sejarah tidak bisa dipisahkan dengan faktor interpretasi agama, politik, dan kebudayaan. Tulisan Marwah telah memperlihatkan bahwa kontribusi perempuan sesungguhnya sama penting dengan laki-laki dalam menandai perjalanan sejarah agama, politik, serta berlangsungnya tatanan kebudayaan masyarakat. Namun sejauh ini perempuan pemimpin lebih banyak dikenang karena kecantikannya, bukan dedikasinya, dan hal itu masih mendominasi pengetahuan publik (meminjam istilah Irwan Abdullah).

Masa peradaban yang meminggirkan perempuan terus berlangsung hingga dunia mengenal masa pascakolonial. Studi tentang hal itu mengacu pada kajian tentang dialektika antara Barat dan masyarakat yang terkolonisasi pada periode modern. Dalam konteks ini, Hariyadi menunjukkan bahwa isu feminisme dalam narasi pascakolonial menjadi isu yang cukup menguat, misalnya tentang kritik terhadap kecenderungan etnosentris dan menjajah dari wacana feminis Barat gelombang kedua, ataupun formulasi makro dalam lembaga kebudayaan di negara bekas jajahan yang sekaligus mencakup isu gender dan oposisi terhadapnya. Dalam hal ini, konsepnya tentang perempuan sub-altern begitu menguat sebagai “suara yang terpinggirkan dan bisu”. Dalam semangat yang sama, Sri Wijayanti juga melengkapi tulisan tentang kuatnya kontribusi perempuan dalam satu masa kontemporer. Dalam tulisannya Wijayanti mengambil studi perempuan pemimpin di berbagai negara seperti Selandia Baru, Finlandia, dan Taiwan, hingga menyimpulkan tentang keunggulan sosok perempuan pemimpin sebagai figur yang mempersonifikasikan rasa empati, partisipatif, peduli, dan strategis pada situasi yang kritis.

Bergerak ke lingkup sosial-ekonomi, kompleksitas masalah ketidakadilan gender semakin nampak. Tulisan Novita Puspasari mengawali bagian ini dengan menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam mendapatkan hak-hak ekonomi secara mapan, tidak

setara dengan laki-laki. Puspasari memperlihatkan pentingnya *gender mainstreaming* dalam pengembangan unit-unit ekonomi di aras lokal, sehingga penghidupan perempuan dalam ekonomi lebih baik. Dibutuhkan berbagai strategi pengarusutamaan gender dalam pengembangan ekonomi lokal, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Sejalan dengan deskripsi Puspasari, ketidakadilan gender dalam ranah ekonomi bahkan juga terjadi di lembaga ekonomi yang mapan, yaitu perusahaan. Hal ini menjadi fokus dari studi Wita Ramadhanti. Tulisannya menggambarkan potret sebuah perubahan besar yang diisi oleh mereka yang *well educated*, namun secara riil raihan profesional perempuan juga tidak lekang oleh isu ketidakadilan gender. Padahal dari riset Ramadhanti menunjukkan bahwa ketika perempuan memimpin perusahaan, capaian dan inovasi yang dilakukan juga setara dengan pemimpin laki-laki. Relevan dengan studi Ramadhanti, tulisan Tyas Retno Wulan memperlihatkan bahwa perbedaan gender memberikan implikasi terhadap cara orang berkomunikasi dan mengkomunikasikan dirinya, termasuk dalam ruang kerja atau kantor. Retno Wulan menekankan bahwa perbedaan gender mendorong perbedaan penggunaan bahasa. Penting untuk terus menerus mengkomunikasikan peran gender yang ideal dan sesuai tuntutan masyarakat, dan kelak masalah gender di perkantoran, keluarga, pendidikan, dapat terbantu untuk dipecahkan.

Sungguh, kaum perempuan seringkali menjadi tulang punggung dan harapan untuk penghidupan yang lebih baik bahkan ketika penghargaan terhadap dirinya tidak ia peroleh. Dalam konteks ini, Hendri Restuadhi memperlihatkan bahwa keputusan perempuan bekerja di luar negeri bukanlah menjadi isu personal dirinya untuk mendapatkan upah, tetapi juga meninggalkan suami di rumah dalam sunyi dan sepi. Hal yang unik, kontestasi keadaan para suami pekerja migran ini, dipahami oleh Restuadhi melalui karya puisi yang menjadi tempat mereka menemukan jalan bagi ragam kerisauan yang dihadapi. Sejalan dengan kontestasi masalah yang dialami para pekerja migran, Tri Murniati menyajikan tulisannya melalui telaah novel yang menggambarkan segala pertarungan bagi pekerja migran ketika bekerja di luar negeri. Pengalaman-pengalaman mereka di sana menjadi hal krusial yang dibagikan oleh Murniati dalam tulisannya. Untuk menjadi pekerja migran, bukan hanya soal penguasaan bahasa dan kebudayaan di negeri orang, tapi juga soal pengetahuan atas hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

Ilmu pengetahuan memang masih meminggirkan kemampuan perempuan karena penguasaan yang dikukuhkan didalamnya. Vandana Shiva (1997) menyatakan perlunya pengetahuan berlandaskan *women ways of knowing* atau cara produksi pengetahuan yang berdasar prinsip feminisme. Shiva sedang menempatkan kaum perempuan sebagai pusat proses perubahan serta penciptaan pengetahuan, dikarenakan

pengetahuan perempuan masih tidak dominan mengisi ruang pengetahuan publik. Padahal pengetahuan perempuan sangat penting untuk mempertahankan lingkungan di mana tempat ia tinggal, misalnya. Isu feminisme dalam pengelolaan lingkungan menjadi bagian tulisan ini yang dikaji oleh Agnes Fitria dan Oktafiani Pratiwi. Agnes Fitria menyajikan perempuan pentingnya kontribusi perempuan dalam memelihara kesehatan lingkungan. Dalam konteks ini, kontribusi perempuan dalam mempertahankan kesehatan lingkungannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Oktafiani juga memperlihatkan pentingnya kontribusi perempuan dalam mengelola limbah yang dapat merusak lingkungan. Oktafiani juga menyoroti pentingnya komitmen politik pemerintah untuk menuntaskan isu pengelolaan lingkungan. Dalam konteks sajian yang lebih luas, Ayusia Sabhita mengetengahkan pandangannya tentang perspektif gender yang seharusnya terintegrasi dengan persoalan iklim dan penanggulangan bencana di Indonesia. Artinya dalam perencanaan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, senantiasa memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan, pengetahuan dan pengalaman perempuan pada konteks perubahan iklim.

Dalam perkembangannya, untuk menelaah ketimpangan ataupun kesetaraan, tidak cukup hanya melihat variasi antara jenis kelamin, tetapi perlu memperhatikan varian lainnya, misalnya eksklusifitas. Oleh karenanya untuk mencapai kesetaraan perlu menarik memasukkan kelompok yang teresksusi. Inklusi sosial menunjuk bagaimana kelompok masyarakat yang tertinggal, rentan dan terbelakang menjadi bagian yang penting dari masyarakat dan negara. Kelompok inklusi sosial meliputi perempuan, anak, lansia, disabilitas, korban bencana, dan lainnya (IDPG, 2017). Dalam hal ini, Nurul Azizah menyajikan tentang pentingnya perlindungan yang mengintegrasikan persoalan gender terhadap para pengungsi di lintas batas Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan berbasis gender, baik yang bersifat pencegahan maupun perlindungan untuk penyintas, serta inklusivitas untuk orang dan anak dengan disabilitas. Demikian pula Riris Ardhanariswari juga memperlihatkan, bahwa isu inklusi sosial dapat terjadi di wilayah manapun, yang menunjukkan praktik-praktik diskriminasi terhadap kaum disabilitas. Perhatian terhadap isu diskriminasi terhadap kaum disabilitas sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, namun masih banyak terkendala minimnya anggaran, rumah pelayanan sosial, serta layanan umum untuk mereka.

Sajian terakhir, yang sesungguhnya bukan isu terakhir dalam studi gender, mengetengahkan tentang pentingnya masalah keadilan di bidang kesehatan. Ibnu Zaki menulis tentang pertumbuhan perempuan seringkali terkooptasi dalam cara pandang masyarakat tentang cantik dan tubuh ideal. Oleh karenanya, mereka rentan mengalami masalah pemenuhan

energi karena standar tersebut. Masih membahas isu remaja dalam masalah kesehatan, Eri Wahyuningsih dan Diyah Woro menunjukkan kontribusi remaja dalam mendorong kesehatan masyarakat sangat penting. Mereka mewakili sumber daya dan jaringan yang berharga selama krisis dan darurat kesehatan masyarakat. Posisi strategis mereka adalah menyebarkan informasi yang akurat tentang pandemi, serta mendukung pertukaran informasi untuk meminimalisir risiko kesehatan. Kedua penulis juga melengkapi tulisannya tentang pentingnya kerjasama saling mendukung untuk mengatasi isu kesehatan dalam masa pandemi, serta bagaimana semua anggota keluarga dapat beradaptasi dalam kebiasaan baru didalamnya. Hal yang sangat krusial untuk mengelola kesehatan anggota keluarga agar tetap dapat melakukan aktivitas sosial namun sekaligus terjaga secara kesehatan.

Pengantar buku ini disajikan untuk menjadi semacam pemandu bagi pembaca untuk memahami tulisan buku ini secara utuh. Kiranya celah-celah diantara tulisan yang disajikan dapat terbantu dengan memahami pengantar buku ini. Studi gender memang demikian luas dan kompleks. Sajian dalam buku ini telah memperlihatkan hal itu dan disitulah sesungguhnya letak keutamaannya. Penggalan-penggalan yang masih terlihat juga memperlihatkan kebutuhan atas penelitian lanjutan karena kompleksitas studi gender. Diharapkan juga atas saran dan masukannya. Selamat membaca.

Daftar Pustaka

- IDPG, 2017. *GESI Theory of Change: Rebalancing the Power (International Development Partners Group, Nepal.*
- Philcher, Jane, Whelehan, Imelda, 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication.
- Shiva, Vandana, 1997. *Bebas dari Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Sullivan, Barbara, 1998. "Carole Pateman: Participatory Democracy and Feminism", dalam April Carter dan Geoffrey Stokes, *Liberal Democracy and Its Critics*. Cambridge: Polity Press.

**SUB CHAPTER I:
STUDI PEREMPUAN DALAM
LINTASAN WAKTU**

1. KUASA YANG MEMINGGIRKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH

**Oleh:
Sofa Marwah**

1.1 Pengantar

Dalam perkembangan sebuah masyarakat dan bangsa, sering muncul anggapan bahwa kaum perempuan tidak hadir dan memberi kontribusi dalam kelahiran dan perkembangan suatu masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan pandangan untuk penguatan narasi sejarah perkembangan masyarakat, dalam konteks agama, politik, dan kebudayaan di Indonesia yang lebih berpihak pada perempuan. Kebutuhan untuk mengangkat kontribusi perempuan penting dilakukan selaras dengan studi Vreede-De Stuers (2008) yang menyatakan pentingnya mengetahui perubahan di masyarakat akibat mengadopsi nilai Islam serta sintesis dan permasalahan yang muncul antara adat istiadat dan Islam. Seharusnya kontribusi perempuan dalam perubahan-perubahan di masyarakat juga menjadi bagian penting untuk dikaji.

Catatan kecil ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peminggiran terhadap perempuan dalam narasi sejarah masyarakat di Indonesia, yang tidak bisa dipisahkan dengan faktor agama, politik, dan kebudayaan. Identifikasi tersebut penting untuk mendukung lahirnya historiografi baru yang lebih berpihak pada kaum perempuan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah kelompok masyarakat. Identifikasi tersebut juga penting untuk menunjukkan kedudukan dan kontribusi perempuan yang sesungguhnya sama penting dengan laki-laki dalam menandai perjalanan sejarah agama, politik, serta berlangsungnya tatanan kebudayaan sebuah masyarakat.

Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang, masyarakat di nusantara sudah menganut agama Hindu Budha, yang didahului animisme dan dinamisme. Pada saat itu, di tanah Jawa terdapat banyak kerajaan besar, mulai Kerajaan Mataram Kuno hingga Majapahit. Sejak kerajaan Demak berdiri menandai berkembangnya Islam secara pesat di tanah Jawa, Islam juga mewarnai kehidupan beragama di lingkungan kerajaan. Sebagian mewariskan budaya yang baru, bersemangatkan Islam dan sebagian mewariskan budaya lama. Perkembangan Islam telah menciptakan keraton baru, dinasti baru, dan mewariskan budaya yang juga beragam (Ricklefs, 2011). Islam yang masuk dalam masyarakat Jawa dijabarkan dan diadaptasikan secara mental dan sosial menurut irama tradisi Jawa (Permanadeli, 2015). Anderson (1991) menyebutkan awal perkembangan Islam di tanah Jawa lebih bersifat asimilatif daripada

revolusioner yang disebabkan Islam datang ke Jawa mengiringi perdagangan pada awal Abad ke-13, dan bukan penaklukan.

Dalam konteks Islamisasi di Nusantara, sangat sedikit temuan yang menunjukkan ketokohan perempuan. Salah satu penanda pertama mengenai keberadaan tokoh perempuan adalah ditemukannya batu nisan Islam tertua yang tertera tahun 1082 M di Gresik Jawa Timur dengan bertuliskan Fatimah binti Maimun. Sekelumit kisah keberadaan Fatimah binti Maimun yaitu ia bersama-sama Malik bin Maimun dan Utsman Hambaya membuka perkampungan muslim pertama di Jawa (Ricklefs, 2011).

Sedikitnya penanda kontribusi perempuan dalam penyebaran agama kemudian dilekatkan menjadi esensi sejarah yang berlangsung dari generasi ke generasi. Pertanyaannya, benarkah kontribusi perempuan dalam masa penyebaran Islam hanya sedikit? Apakah hal itu berarti kontribusi tersebut tidak penting untuk dinarasikan dalam sejarah masyarakat? Lalu bagaimana dengan kontribusi perempuan pada masa sebelum Islam masuk di tanah Jawa? Catatan kecil tentang sejarah masyarakat ini akan mengupasnya dalam sudut pandang agama, politik dan kebudayaan.

1.2 Perempuan dalam Sejarah Masyarakat Sebelum Masa Islam

Jauh sebelum Islam berkembang di Jawa, sejarah kita mencatat beberapa ratu sebelum masa Islam, yaitu masa Kalingga hingga Majapahit. Pada masa Kerajaan Kalingga, Ratu Shima berkuasa pada tahun 474-732 M. Dari sedikitnya kisah tentang kepemimpinan Ratu Shima, tetapi tercatat bahwa Ratu Shima adalah seorang pemimpin yang mengembangkan sistem irigasi, bercocok tanam, agama dan kebudayaan (Adji, 2013).

Selanjutnya Sri Pramowardhani menjadi tokoh perempuan yang memerintah Kerajaan Medang pada tahun 838-855 M sebagai putri Wangsa Syailendra (Adji, 2013). Dalam beberapa literatur Kerajaan Medang disebut sebagai Mataram Hindu atau Mataram kuno. Sri Pramowardhani menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Pernikahan keduanya menggambarkan kerukunan beragama ketika itu karena Sri Pramowardhani beragama Budha dan Rakai Pikatan beragama Hindu. Kedua tokoh tersebut mendirikan Candi Plaosan yang bercorak Budha. Namun terdapat versi lain yang menyatakan bahwa Sri Pramowardhani tidak menjadi ratu tetapi putri mahkota, karena ia menyerahkan tahtanya pada suaminya, Rakai Pikatan. Namun demikian tidak diketahui apa penyebab Sri Pramowardhani menyerahkan tahta pada suaminya (Nastiti, 2016).

Selanjutnya ketika masa kekuasaan Mataram kuno, Ratu Sri Isyanatunggawijaya memegang tahta pada tahun 947 M. Pada masa

Majapahit, terdapat Ratu Tribhuwana Wijayatungga Dewi yang berkuasa pada tahun 1328-1350 M. Pada masa pemerintahannya, Tribhuwana Wijayatungga Dewi bersama-sama dengan Patih Gadjah Mada berhasil memadamkan pemberontakan di Sadeng dan Keta. Tribhuwana Wijayatungga Dewi juga menjadi Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan Majapahit. Ketika putranya, Hayam Wuruk menjadi raja, Tribhuwana Wijayatungga Dewi juga menjadi pembimbing putranya yang menjadi raja tersebut (Nastiti, 2016 :300). Kerajaan Majapahit juga memiliki Ratu Suhita yang lebih dikenal sebagai Ratu Kencana Wungu yang berkuasa tahun 1429-1447 M.

Ketika Ken Arok menjadi Raja Singasari (1222-1227 M), masyarakat Jawa tentu mengenal sosok Ken Dedes. Keberadaannya selalu diidentikkan dengan kecantikan seorang permaisuri yang direbut Ken Arok dari penguasa terdahulu, yaitu Tunggul Ametung. Padahal sosok Ken Dedes tidak bisa dipisahkan kekuatannya dari sisi keagamaan Hindu dan nilai-nilai budaya lokal. Tulisan novel yang mengisahkan sosok spiritualis Ken Dedes dapat dibaca dalam novel Pramoedya Ananta Noer (2015) yang berjudul roman *Arok Dedes*.

Selain itu, studi Smith dan Woodmark (2016) menunjukkan bahwa Ken Dedes adalah seorang perempuan spiritualis, di samping Kanjeng Roro Kidul. Kosmologi masyarakat Jawa secara luas menempatkan Kanjeng Roro Kidul sebagai Ratu Laut Selatan (Samudra Hindia). Ken Dedes juga direpresentasikan sebagai *ardhanariswari*, yaitu perwujudan dari keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, dan siapa yang menikahinya akan meraih kekuasaan menjadi raja. Oleh karena itu, Ken Dedes dipercaya sebagai perempuan yang menurunkan raja-raja di Jawa Timur, Singhasari dan Majapahit. Dalam konteks demikian, Andaya (2016) menunjukkan bahwa Ken Dedes adalah “*the princess of the flaming womb*”, seorang putri dengan rahim kandungan yang menyala. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa Ken Dedes adalah seorang perempuan yang dihormati laksana dewa dalam kepercayaan kosmologi Jawa.

Narasi terhadap kedudukan perempuan pada masa sebelum Islam lebih meneropong perempuan di pusat kekuasaan kerajaan-kerajaan besar. Dalam hal ini sangat peran-peran perempuan di wilayah pinggiran yang menjadi bahan kajian. Tulisan ini mencatat studi Nastiti (2016) adalah satu studi yang ditemukan penulis, yang membedah mulai dari peran perempuan di wilayah kekuasaan sampai ke masyarakat biasa. Pada masa Hindu-Budha, perempuan pernah menempati kedudukan yang penting tetapi tampaknya kurang menjadi pengetahuan publik. Hal tersebut juga tampak dalam studi Nastiti (2016), bahwa selain menjadi ratu, masih banyak peran penting yang lain bagi perempuan. Pada masa Jawa kuno tersebut, banyak perempuan sudah menjadi penguasa daerah

dan pejabat desa seperti pada masa kekuasaan Singosari dan Majapahit. Ketika itu peran sosial-ekonomi juga sudah dijalankan oleh kaum perempuan, seperti kegiatan sosial, pelaku upacara, menjadi petani, perajin, industri rumah tangga, pedagang dan lainnya.

Potret perempuan masih jarang diketahui publik dan dikenang sebagai kontribusi penting pada masanya. Banyak kisah sejarah hanya memberi legitimasi pada pusat kekuasaan. Pada saat itu perempuan yang terlihat oleh publik hanyalah perempuan kalangan atas dan itupun narasi sejarahnya tidak dominan. Sejauh ini, sangat sedikit studi yang menceritakan kehebatan Ratu Shima, Sri Pramowardhani, Sri Isyanatunggawijaya, Tribhuwana Wijayatungga Dewi, Kencana Wungu, dan lainnya. Betul bahwa jika melihatnya secara jumlah, dalam tuturan sejarah, perempuan yang menjadi penguasa mungkin juga tidak sebanyak laki-laki. Namun, rasanya semakin tidak adil bila narasi tentang perempuan penguasa juga menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan studi, pemikiran, dan sudut pandang yang melihat kontribusi setiap unsur dalam sistem secara lebih luas.

Narasi sejarah yang dominan pada masyarakat Jawa kuno sebelum Islam masuk, masih didominasi oleh keagungan Prabu Airlangga masa kerajaan Kahuripan, keperkasaan Ken Arok masa kerajaan Singasari, kejayaan Hayam Wuruk dan Gadjah Mada masa Kerajaan Majapahit, dan sebagainya. Alih-alih perempuan dalam masyarakat biasa, mereka yang menjadi pejabat daerah/ desa saja sangat jarang menjadi pengetahuan publik, apalagi misalnya warisan tutur sejarah tentang ketrampilan perempuan dalam berdagang, membuat kerajinan, kemampuan perempuan tentang pertanian, menjaga lingkungan, dan sebagainya, masih menjadi narasi sejarah yang terpinggirkan.

1.3 Narasi tentang Perempuan dalam Masa Perkembangan Islam

Khususnya di tanah Jawa, lembar penyebaran Islam ditandai dengan peran *Walisanga* atau wali sembilan. Dalam hal ini, tidak ada satu pun wali yang terkait proses Islamisasi adalah kaum perempuan. Dari narasi sejarah tentang proses Islamisasi di tanah Jawa oleh *Walisanga*, keberadaan tokoh perempuan lebih banyak ditulis sebagai putri kerajaan atau putri ulama yang menikah dengan tokoh besar dan melahirkan tokoh besar, dalam penyebaran Islam. Padahal studi Ahmad (2011) mencatat bahwa sesungguhnya perempuan ikut mengambil bagian dari proses Islamisasi di tanah Jawa. Menurutnya, perempuan menjadi jembatan yang menghubungkan budaya lama Hindu-Budha sebagai budaya lama dan Islam sebagai budaya baru.

Islam berkembang pesat di tanah Jawa sejak Raden Patah berhasil meruntuhkan Kerajaan Hindu-Jawa Majapahit dengan membentuk Kerajaan Demak pada tahun 1475 M. Adapun pada masa

kekuasaan Demak, sejak Raden Patah bertahta hingga berakhirnya kejayaan Demak yaitu masa Sunan Prawata tidak satu pun pemimpin perempuan. Ketika Kerajaan Pajang berdiri sampai berakhirnya kekuasaan Pajang dan bergesernya tahta menjadi kekuasaan Mataram, juga tidak ada pemimpin perempuan, mulai dari Jaka Tingkir sampai Sultan Benawa (Muljana, 2009).

Ketika Mataram berdiri sejak masa kekuasaan Sutawijaya yang berkuasa tahun 1587 M, hingga pembagian Kerajaan Mataram menjadi Keraton Solo dan Jogjakarta hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755 M, dan sampai pada era politik modern sekarang ini, tidak ada satu pun pemimpin/sultan perempuan. Bahkan hari ini Keraton Jogjakarta masih mengalami polemik terkait dengan keinginan Sultan Hamengkubuwono X yang menginginkan putri sulung GKR Pambayun untuk meneruskan tahta Jogjakarta karena Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki putra laki-laki. Tekad Sultan tersebut menimbulkan pro kontra dalam keluarga karena ada yang mendukung maupun menentang keputusan Sultan tersebut. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan perjalanan Mataram sejak berdiri pada masa Sutawijaya tidak satu pun perempuan yang menduduki tahta Mataram.

Kalau memang demikian, bagaimana tafsir yang kita berikan terhadap kedudukan kaum perempuan masa kekuasaan Islam di tanah Jawa? Apakah betul hal tersebut cukup dilihat dari siapakah yang menjadi pucuk kekuasaan, sehingga terlihat seolah perempuan tidak hadir terlibat dalam membentuk sejarah? Padahal, di saat kerajaan Mataram Islam tidak ada pemimpin perempuan, justru di Kerajaan Aceh banyak memilikinya. Catatan kecil ini akan mengupasnya.

Bila kita menelisik lebih dalam, pada masa kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, terdapat figur perempuan yang luar biasa tetapi sumber sejarah mengenai sepak terjangnya sangat minim. Adalah penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat yang ikut berkontribusi besar berdirinya Kerajaan Pajang. Terjadinya perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak setelah pemerintahan Sultan Trenggana, menyeret nama Ratu Kalinyamat yang menuntut balas atas kematian suami dan saudaranya yang dibunuh oleh Arya Penangsang. Pada akhirnya Arya Penangsang berhasil disingkirkan oleh Jaka Tingkir yang bersekutu dengan Ratu Kalinyamat dan menandai berdirinya Kerajaan Pajang (Wintala, 2016).

Sejauh ini, kisah tentang Ratu Kalinyamat didominasi karena balas dendamnya. Sebut saja studi Wintala (2019) tentang Ratu Kalinyamat, yang bertutur tentang kisah cinta, dendam, dan tahta. Padahal sesungguhnya Ratu Kalinyamat juga menjadi mampu menjadi sosok pemimpin yang menghalau kedatangan Portugis 1551 dan 1574 di Malaka dan berupaya membangun sekutu yang terdiri dari raja-raja di

Malaka untuk mengusir Portugis (Akhyat dan Bahaudin, 2016). Berdasarkan sejarah yang ditulis Portugis, serangan Ratu Kalinyamat di Malaka dapat dipelajari melalui catatan *Diego de Couto*. Sejarahwan Portugis tersebut menyebut Ratu Kalinyamat sebagai *Rainha De Jepara Senora De Rica* yang berarti ratu yang sangat kaya dan berkuasa. Dalam novel Pramoedya Ananta Noer (1995) yang berjudul *Arus Balik* juga menyinggung soal serangan Ratu Kalinyamat tersebut.

Hampir selaras dengan studi di atas, Kumar (2008) juga menunjukkan bukti bahwa perempuan dalam perjalanan sejarah mempunyai peran penting, yaitu sebagai prajurit kerajaan. Kumar melakukan studi terhadap catatan harian anggota korps *prajurit estri* pada masa kerajaan Mataram Islam yaitu masa Raja Mangkunegara I. Keberadaan korps masa Mangkunegara I tersebut hanya meneruskan tatanan lama. Utusan orang-orang Belanda yang mengunjungi istana pada masa Sultan Agung misalnya, juga dikawal oleh para prajurit perempuan. Korps *prajurit estri* diisi oleh seratus lima puluh perempuan sebagai pengawal raja dengan perlengkapan senjata panah, tombak, tulup atau semprit, dan perkakas yang dibutuhkan raja. Sebagai korps *prajurit estri*, mereka juga memiliki kemampuan menari, menyanyi, dan memainkan alat musik. Dalam penjelasan Kumar, korps *prajurit estri* di tanah Jawa merupakan korps yang paling terlatih dan diistimewakan dalam hierarki perempuan di istana.

Keberadaan korps prajurit estri dalam studi Kumar, juga diperkuat oleh studi dari Carey dan Houben (2016) tentang *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*. Keduanya menyebutkan tentang keberadaan prajurit estri di Kasunanan Solo, yang berbaris di bawah tahta Sunan Pakubuwono V dengan bersenjata lengkap, seperti sebilah keris, pedang atau bedil ketika Sunan menerima tamu. Prajurit estri juga menjadi pasukan pengawal raja ketika raja *miyos* atau keluar keraton menemui rakyat atau para bupati. Mereka juga memiliki keterampilan berkuda dan memainkan senjata api. Korps prajurit estri menggunakan seragam resmi bangsawan; sama dengan laki-laki, yaitu *prajuritan*. Kelak ketika Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa (1825-1830) terjadi, keberadaan *prajurit estri* ini menjadi salah satu pasukan pendukung Pangeran Diponegoro yang penting.

Studi yang Carey dan Houben di atas telah memperlihatkan secara cukup lengkap kedudukan dan keterlibatan perempuan pada abad tersebut dari berbagai sisi. Dari studi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan Jawa pada masa itu memiliki peran kuat sebagai penjaga tradisi Jawa, pemelihara wangsa, pembimbing anak, penjunjung agama, dan pujangga. Mereka juga sekaligus memainkan perannya sebagai pengusaha, pewaris, pemelihara pertalian dinasti, dan sebagainya.

Penjelasan Carey dan Houben mengenai keberadaan perempuan sebagai penjaga agama tentu menjadi deskripsi yang menarik. Dalam arti, perempuan juga hadir memberi warna dan dedikasi bagi keyakinan agama yang dipercayainya. Dalam studinya, Carey menunjukkan seorang perempuan sufi yang menjadi pengikut tarikat Satariyyah dikenal sebagai pengajar agama Islam sekaligus praktik spritual Jawa, adalah yaitu Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengku Buwono I. Lebih lanjut, Ratu Ageng juga merupakan komandan pertama korps *prajurit estri* pada masa awal Kasultanan Yogyakarta. Ratu Ageng juga dikenal sebagai nenek buyut Pangeran Diponegoro yang mengasuh dan mengajarkan Diponegoro tentang ajaran Islam dan spiritualisme Jawa.

Seorang perempuan yang luar biasa lainnya dalam *korps prajurit estri*, yang dikenal karena perjuangan dan *laku tapa*-nya adalah Nyai Ageng Serang (1762-1855). Nyai Ageng Serang adalah keturunan Sunan Kalijaga yang sebelum menikah dengan Pangeran Serang, ia menikah dengan Sultan Hamengku Buwono II. Nyai Ageng Serang dikenal memiliki *kesakten* dan sangat dihormati para pengikut Pangeran Diponegoro karena kegigihannya melawan Belanda. Nyai Ageng Serang adalah seorang perempuan pejuang dan pertapa yang mempraktikkan penggunaan jimat dengan ayat-ayat suci Al Qur'an atau *rajah* yang diberikan kepada para pengikutnya. Lama setelah Perang Jawa berakhir, ia dikenal tetap memiliki pengaruh penting di daerah Serang-Demak dan sekitarnya.

Selanjutnya ketika pada masa Mataram Islam tidak ada yang menjadi ratu di Tanah Jawa, hal yang menakjubkan adalah pada masa Kerajaan Aceh pada Abad ke-17. Kita dapat mempelajari studi dari Banu (2017) yang menjelaskan bahwa masa kejayaan Kerajaan Aceh sesungguhnya dicapai pada saat dipimpin perempuan, yaitu Sultanah Safiatuddin yang memerintah Aceh pada 1641-1675. Pada masa itu juga terdapat tiga ribu prajurit perempuan yang bertugas mengawal istana. Mereka bersenjata tombak panjang, tulup, pedang, perisai, dan busur panah. Kekuasaan Sultanah Safiatuddin dilegitimasi oleh Islam dan adat istiadat setempat. Negara-negara tetangga Kerajaan Aceh menyebutkan Aceh lebih ramai, damai, dan berwajah feminim ketika Sultanah Safiatuddin berkuasa. Sultanah juga berjanji memberi kemuliaan bagi siapapun yang mengunjungi Aceh ketika itu. Sher Banu telah menunjukkan bukti adanya kesuksesan seorang perempuan sebagai ratu di kerajaan Islam pertama di Nusantara. Setelah kepemimpinan Sultanah Safiatuddin, konon Kerajaan Aceh berturut-turut dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Sultanah Naqiatuddin (1675-1678), Sultanah Zaqiatuddin (1678-1688), Sultanah Zainuddin Kamalat (1688-1699).

Tulisan ini ingin menyitir apa yang disampaikan oleh Abdullah (2018) bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan, banyak yang tidak

menjadi fungsi legitimasi. Keberadaan perempuan dalam menorehkan sejarah besar sering dianggap tidak legitimet. Padahal fungsi sejarah adalah melegitimasi, sehingga kontribusi perempuan seharusnya juga dapat menjadi sumber legitimasi dan sumber pengetahuan publik. Lebih lanjut Abdullah menjelaskan tidak ada kesinambungan sejarah pada masa lalu yang berlanjut pada kehidupan masyarakat sekarang, bahkan banyak narasi sejarah kita yang dihilangkan. Perkembangan masyarakat dan kekuasaan memiliki orientasi pada pusat kekuasaan, sementara kekuasaan dipegang oleh raja yang didominasi oleh laki-laki. Tentu saja, karena pihak yang berkuasa didominasi oleh laki-laki, maka laki-laki yang kemudian banyak memproduksi pengetahuan. Dampaknya, keberadaan perempuan menjadi tidak tampak dalam perjalanan sebuah kelompok masyarakat seiring berlangsungnya kekuasaan raja.

Kiranya perempuan memiliki dedikasi besar pada sejarah masa lalu yang seharusnya dapat menjadi inspirasi yang menakjubkan pada masa sekarang. Sejauh ini narasi sejarah tentang perempuan pada sebelum Islam masuk dan pada masa perkembangan Islam masih lebih banyak dilihat dari sudut pandang puncak kekuasaan atau perempuan kalangan atas. Ketika upaya penulisan sejarah Indonesia mengenai cakrawala elitis menurut Kartodirdjo (2017) sudah bergeser mencakup berbagai lapisan sosial, sehingga sejarah tidak hanya dalam pusran kekuasaan pimpinan saja.

Menilik dari yang disampaikan sejarahwan Kartodirdjo tersebut, maka sejarah tentang pesan sosial masyarakat hendaknya juga menyangkut kaum perempuan di berbagai lapisan, dari elemen kekuasaan hingga wilayah pinggiran. Saat ini narasi sejarah tentang perempuan di wilayah pinggiran atau masyarakat biasa, masihlah gelap. Menyitir yang disampaikan oleh Saptari dan Holzner (1997), tugas kita sebagai peneliti perempuan adalah mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan yang tersembunyi. Keterlibatan dan kontribusi perempuan di wilayah pinggiran belum diakui dalam sejarah sebagai pihak yang ikut berkontribusi dalam menjaga agama dan masyarakatnya. Seharusnya siapapun bisa dan memungkinkan untuk memproduksi dan memiliki pengetahuan, sebelum Islam masuk atau setelah Islam berkembang, baik oleh mereka yang berkuasa ataupun mereka rakyat biasa. Dari sisi manapun perempuan berada dalam dinamika sebuah masyarakat, tentu perempuan memiliki keterlibatan yang penting dengan caranya masing-masing.

1.4 Penutup

Narasi sejarah yang meminggirkan peran perempuan berkaitan dengan siapa yang memproduksi pengetahuan secara luas. Dalam ranah perkembangan Islam di nusantara yang berkisar berputar di lingkungan

kerajaan, maka kedudukan dan kontribusi perempuan tidak banyak diketahui apalagi diakui oleh publik. Kondisi demikian berkaitan dengan sudut pandang yang dikembangkan lebih menyoal siapa yang memegang pucuk kekuasaan. Oeh sebab itu, yang seringkali terlihat hanyalah mereka yang menduduki posisi puncak. Selanjutnya mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan dianggap tidak penting untuk dihadirkan.

Dominasi sudut pandang demikian untuk selanjutnya berdampingan dengan ideologi yang senantiasa menganggap bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Ideologi tersebut pada titik tertentu akan meminggirkan bentuk-bentuk apapun yang sesungguhnya merupakan kontribusi perempuan untuk keluarganya, masyarakat, agama, dan untuk bangsanya. Bahkan ketika perempuan menjadi pucuk kekuasaan pun, keberadaannya tidak banyak menjadi sumber legitimasi sejarah. Padahal umumnya sejarah diproduksi oleh penguasa. Tetapi ketika penguasa itu adalah perempuan, seperti halnya sulit bagi perempuan untuk menorehkan sejarah tentang kontribusi yang mereka curahkan.

Pada umumnya, seorang pemimpin perempuan akan direduksi menjadi figur utama yang dilihat dan dikenang karena kecantikannya, karena balas dendamnya, atau justru dikenang karena dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Dalam hal ini masih jarang narasi sejarah yang mengakui kontribusi perempuan tidak hanya sebagai tokoh perempuan yang merujuk pada putri kerajaan atau putri ulama yang menikah dan melahirkan tokoh besar dalam perkembangan masyarakat. Padahal selain sebagai putri kerajaan atau putri ulama, perempuan juga bisa menjadi penjunjung tinggi agamanya, bersandingan dengan perannya untuk menjaga tradisi dan kebudayaannya. Dengan demikian, sejarah tentang perempuan di wilayah pinggiran, narasi sejarah tentang mereka tidak semakin kelam.

Daftar Pustaka

- Adji, Khrisna Bayu. 2013. *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Ahmad, Tsabit. 2011. Peran Wanita dalam Islamisasi Jawa Abad XV (The Role of Women in Islamization in Java 15th Century). *Paramita Journal* Vol. 21 No. 1: 1-13.
- Andaya, W.B. 2006. *The Flaming Womb*. Hawai'i: University of Hawai'i Press.
- Anderson, B.R.O.G. 1991. Gagasan tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, dalam *Aneka pemikiran kuasa dan wibawa*, ed. Budiardjo, M. Jakarta : Sinar Harapan.
- Ahyat dan Bahaudin. 2016. "Studi Ratu Kalinyamat ke Portugal Disiapkan" <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/studi-ratu-kalinyamat-ke-portugal-disiapkan> (diakses 21 Oktober 2018).

- Banu, Sher AL. Khan. 2017. *Sovereign Women in A Muslim Kingdom, The Sultanah of Aceh 1641-1699*, Singapore: National University of Singapore Press.
- Carey, Peter dan Hoube. Vincent. 2016. *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Kartodirdjo, Sarjono, 2017. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kumar, Ann. 2008. *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad Ke-18*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Muljana, Slamet, 2009. *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, Yogyakarta : LKiS.
- Permanadeli, Risa. 2015. *Dadi Wong Wadon, Representasi Sosial Perempuan di Era Modern*. Yogyakarta : Ifada.
- Pramoedya Ananta, Toer. 2002. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Pramoedya Ananta, Toer. 2015. *Arok Dedes*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Ricklefs, M.C., 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Graffiti.
- Smith, B.J. dan Woodmark, M. 2016. “Magico-Spiritual Power, Female Sexuality, and Ritual Sex in Muslim Java: Unveiling the Kasekten of Magical Women”. *The Australian Journal of Anthropology* 27 (3): 317-332.
- Surti Nastiti, Titi, 2016. *Perempuan Jawa: Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII-XV*, Bandung: PT Dunia Pustaka.
- Vreede-De Stuers, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Wawancara dengan Prof. Dr. Irwan Abdullah, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2018.
- Wintala, S, 2016. *Politik dalam Sejarah Kerajaan Jawa*. Yogyakarta: Araska.

2. PEREMPUAN PASCAKOLONIAL: FEMINISME DALAM KAJIAN-KAJIAN PASCAKOLONIAL

Oleh :
Hariyadi dan Rili Windiasih

2.1 Pendahuluan

Pada pengertian awalnya, pascakolonialisme mengacu pada munculnya kecenderungan umum dalam kajian sastra yang dikembangkan dari teori-teori sastra Persemakmuran dan kajian tentang Dunia Ketiga yang menganalisa efek-efek global dari kolonialisme Eropa. Meskipun buku dari Edward Said yang berjudul *Orientalism* yang diterbitkan tahun 1978 dipandang luas sebagai salahsatu teks dasar dari kajian pascakolonial, tetapi istilah dan disiplin kajian itu sendiri adalah produk dari tahun 1980-an dan 1990-an. Kajian ini, yang asal-usul dan peristilahannya dilacak antara lain oleh Mishra dan Hodge (1991), telah didefinisikan secara luas dalam *The Empire Writes Back* dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berpengaruh pada 1990-an. Kepopuleran kajian ini diperkuat oleh kesuksesan para penulis semacam Salman Rushdie dengan judul *The Empire Writes Back* sendiri merupakan pinjaman dari suatu artikel surat kabar oleh Rushdie yang juga mengambilnya dari *Empire Strikes Back*, film kedua dari trilogi *Star Wars* yang sangat sukses.

Istilah pascakolonial itu sendiri terkadang agak disalahpahami. Secara umum, pascakolonial tidaklah mengacu pada pengertian harafiahnya yaitu periode sesudah periode kolonisasi. Istilah pascakolonial ini sebenarnya bukanlah periode sesudah terjadinya kemerdekaan di bekas-bekas koloni, melainkan pada periode yang dimulai dari kolonisasi itu sendiri. Selain itu juga yang secara umum yang diacu yaitu kajian tentang interaksi atau dialektika kritis antara bangsa-bangsa Barat dan masyarakat-masyarakat yang dikolonisasi pada periode modern.

Dalam istilah geografis, acuannya adalah himpunan ruang yang amat luas. Ashcroft, Griffiths dan Tiffin (dalam Macey, 2000:34) menjelaskan bahwa pascakolonial mengacu pada semua kebudayaan yang dipengaruhi oleh proses penjajahan mulai dari saat kolonisasi sampai sekarang. Pada masa penjajahan selama beberapa abad sampai dengan Perang Dunia Pertama, imperium Eropa disebut-sebut menguasai sampai dengan 85% wilayah di seluruh dunia. Karena itu kajian pascakolonial berusaha mempelajari berbagai budaya dan sastra India, Afrika, Asia, Amerika Latin, Australia, bahkan juga Kanada dan Selandia Baru. Bahkan Ashcroft, Griffiths dan Tiffin menyatakan bahwa kesusastraan Amerika Serikat juga mestinya dimasukkan dalam kateogri ini karena kesusastraan Amerika abad XIX ditandai suatu usaha untuk

mengkonstruksi suatu 'kanon' yang tidak didominasi oleh kesusatraan klasik Britania. Sementara Kanada sebagai wilayah Britania juga berusaha mendefinisikan identitas kesusastraannya sendiri, banyak kalangan berpendapat bahwa ada kemungkinan akan menjadi wilayah koloni Amerika, setidaknya di tingkatan kerangka pemikiran.

Pascakolonial juga kadang-kadang mencakup negara-negara yang sedang berusaha meraih kemerdekaannya, atau orang-orang di Dunia Pertama yang merupakan minoritas, atau bahkan juga bekas-bekas koloni yang sekarang sedang berhadapan dengan bentuk-bentuk penguasaan neokolonial melalui perluasan kapitalisme dan perkembangan globalisasi. Oleh karena itu, pascakolonial, alih-alih hanya mengindikasikan peristiwa sejarah yang spesifik dan material, sebenarnya menjelaskan paruh pertama abad XX secara umum sebagai suatu periode yang melewati puncaknya kolonialisme sehingga periode ini juga dapat disebut sebagai periode yang masih mengandung kolonialisme meskipun bentuknya berbeda. Pascakolonial juga dipakai untuk menandai suatu posisi yang menentang imperialisme, Erosentrisme, dan Amerikanisme. Cara-cara Barat dalam memproduksi dan menyebarkan pengetahuan di masa lalu dan masa kini menjadi obyek kajian bagi mereka yang mencari cara-cara alternatif dalam melakukan ekspresi. Hal inilah yang memunculkan berbagai macam pengalaman, kebudayaan dan masalah ketika masyarakat-masyarakat non Barat berhadapan dengan Barat.

Pertanyaan-pertanyaan pascakolonial yang biasanya diajukan adalah : Bagaimana pengalaman kolonisasi mempengaruhi yang dijajah dan juga yang menjajah? Bagaimana kuasa kolonial dapat mengendalikan wilayah dunia non Barat yang begitu luas? Jejak apa yang ditinggalkan oleh pendidikan, ilmu, dan teknologi kolonial dalam masyarakat pascakolonial? Bagaimana jejak ini mempengaruhi pembangunan dan modernisasi di bekas-bekas koloni? Apa saja bentuk-bentuk perlawanan terhadap kendali kolonial? Bagaimana ilmu, teknologi, dan pengobatan Barat merubah sistem pengetahuan yang ada? Bentuk-bentuk identitas pascakolonial semacam apa yang muncul setelah perginya para penjajah? Dalam hal seperti apa dekolonisasi (rekonstruksi secara bebas dari pengaruh kolonial) dimungkinkan? Apakah formulasi Barat tentang pascakolonialisme terlalu melebih-lebihkan hibriditas sehingga mengorbankan realitas nyata? Haruskah dekolonisasi terjadi dalam bentuk kembalinya secara agresif ke masa lalu pra kolonial? Apa sajakah bentuk-bentuk baru imperialisme yang menggantikan kolonisasi dan bagaimana munculnya? Bagaimana gender, ras, dan kelas berfungsi dalam wacana kolonial dan pascakolonial?

Dari sekian banyak pertanyaan diatas, yang belum begitu banyak diangkat dan diolah lebih lanjut adalah pertanyaan terakhir, terutama yang terkait dengan isu gender yang dimunculkan oleh feminisme. Dalam

artikel ini, kami mencoba menjawab pertanyaan utama yaitu : bagaimana kajian-kajian pascakolonial mengangkat wacana feminis?

Artikel ini merupakan hasil studi pemikiran yang mendasarkan diri pada teks-teks yang menggambarkan wacana yang dikaji. Yang dijadikan materi utama dari penelitian ini adalah berbagai teks yang dikategorikan sebagai kajian pascakolonial yang signifikan dan didalamnya mengandung unsur feminisme, baik berupa kajian sastra maupun kajian sosial (sosiologi, antropologi, ilmu politik, sejarah, dan lain-lain), terutama yang ditulis oleh para teorisi terkemuka pascakolonialitas dan feminisme yaitu Edward William Said, Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak, dan Chandra Talpade Mohanty. Meskipun demikian, teks dari tokoh-tokoh lainnya juga dikaji sejauh memang memiliki signifikansi terhadap kajian pascakolonial dan feminisme.

Data utama yang diambil adalah teks-teks dengan wacana pascakolonial yang secara langsung terkait dengan isu feminisme. Sementara data pendukungnya adalah teks-teks, baik yang mengandung wacana dan narasi pascakolonial secara umum, maupun yang memetakan, memaparkan, menjelaskan atau berkomentar tentang hal-hal pascakolonialitas dan pascakolonialisme. Teks-teks yang memaparkan feminitas dan feminisme dalam cakupan yang luas juga penting dalam penelitian. Bentuk datanya sendiri berupa cetak (buku, jurnal, artikel ilmiah) maupun elektronik (Internet).

2.2 Pembahasan

2.2.1 Kolonialisme dan Pascakolonialisme

Loomba (2001) telah memaparkan dengan terperinci, baik itu mengenai peristilahan maupun penggambaran, tentang kolonialisme dan pascakolonialisme. Menurutnya, meskipun bukan Edward Said yang pertama kali mempelopori kajian tentang kolonialisme tetapi dialah yang menganalisa bagaimana kolonialisme bekerja melalui mekanisme diskursif. Ia juga yang berhasil menunjukkan hubungan langsung antara bahasa dan bentuk-bentuk pengetahuan yang telah terjadi sepanjang sejarah kolonialisme. Konsep-konsep dan representasi yang digunakan dalam teks-teks novel, catatan perjalanan, dan memoar dapat dianalisa untuk memahami ideologi kolonial yang berbeda-beda antara negara penjajah (Said, 1978 : 24).

Secara sederhana kajian tentang kolonialisme menggugat kemampuan kekuasaan posisi pusat yang selalu didominasi oleh budaya kulit putih atau orang Eropa. Kajian kolonialisme membawa semangat perlawanan kaum marjinal melawan kaum metropolis, kaum pinggiran melawan kaum pusat. Semangat untuk mendekonstruksi narasi yang

dominan dan hegemonis serta penciptaan kembali sejarah yang non-repetitif sangat kental dalam kolonialisme.

Gilles Deleuze dan Felix Guattari, melalui karyanya *Anti Oedipus: Capitalism and Schizophrenia* (dalam Phillipott, 2003: 294) menawarkan cara pandang yang berbeda tentang operasi kolonialisme. *Anti-Oedipus* telah membawa analisis wacana kolonialisme tidak hanya ke Timur saja, tetapi ke permukaan yang lebih global. Di sini yang muncul adalah suatu teorisasi geopolitik material dari sejarah kolonialisme, dan dalam waktu yang bersamaan, suatu narasi tentang nafsu dan ambisi yang menyakitkan. Karya ini sekaligus membawa pada dua hal yang selama ini diabaikan konstruksi diskursif kolonialisme yaitu kapitalisme sebagai motor penentu dalam kolonialisme, dan kekerasan material yang selalu terlibat dalam proses kolonisasi. Secara teoritis, yang menarik dari Deleuze dan Guattari, adalah karena mereka membawa kajian-kajian filsafat, psikoanalisa, antropologi, geografi, ekonomi, ke dalam kajian tentang kolonialisme, bagaimana posisi mereka dalam interaksi ekonomi serta bagaimana dampaknya pada operasi kolonisasi kapitalisme. Menurut Deleuze dan Guattari, *'the desiring machine'* atau roh kolonialisme telah menekan masyarakat lewat mekanisme Oedipus Complex'. Oedipus yang dipinjam dari nama tokoh dalam legenda Yunani Kuno bukanlah hanya struktur kejiwaan normal manusia yang berproses menuju ke arah pendewasaan mental, seksual dan sosial. Ia adalah mekanisme di mana aliran nafsu itu disandakan dan digoreskan. Mekanisme yang seperti itu juga terjadi di Barat, sehingga hubungan antara kolonialisme dan sejarah struktur kapitalisme pun berputar dan berulang, baik di Barat atau di Timur.

Kontribusi dari analisis wacana tentang kolonialisme adalah tersedianya kerangka kerja bahwa semua perspektif kolonialisme haruslah mengacu pada medium-medium yang dipakai dalam kolonialisme itu sendiri. Semua teks kolonialis tidak hanya dilihat sebagai dokumentasi atau kumpulan bukti semata, dan menekankan bahwa keterlibatan kolonialisme tidak hanya dalam kegiatan militer dan ekonomi, tetapi justru lewat bentuk-bentuk pengetahuan yang menegakkan kolonialisme.

Mengenai pascakolonialisme, semula Daring (2000) mendefinisikannya sebagai keinginan menentukan nasib sendiri dari orang-orang yang terkolonisasi demi melindungi kebudayaan mereka dari kolonisasi Barat. Namun dalam perkembangannya pascakolonialisme bukan hanya menyangkut penentuan-sendiri dan otonomi. Dengan munculnya kategori-kategori baru semacam hibriditas, mimikri, dan ambivalensi, ada pandangan bahwa pascakolonialisme telah berkembang ke arah rekonsiliatoris daripada anti kolonialis yang kritis. Meskipun demikian, pascakolonialisme yang bersifat rekonsiliatoris memiliki

kesamaan dengan pascakolonialisme yang bersifat kritis dan anti kolonialis yakni pengakuan bahwa sejarah kebudayaan Barat semenjak abad XVI tidak bisa ditelaah tanpa adanya acuan kepada kolonialisme.

Pascakolonialisme –terlepas dari adanya kontradiksi dalam dirinya- merupakan usaha intelektual untuk menangani periode dengan hubungan politis resmi dari kolonialisme telah berakhir tetapi pengaruh budaya dan intelektualnya masih sangat terasakan. Pascakolonialisme juga dapat dipandang sebagai bentuk pengetahuan yang menyejarah karena memperhatikan dengan saksama dan penuh kepedulian masyarakat-masyarakat tertindas yang dikonstruksikan sebagai tidak modern oleh univeralisme Barat. Tetapi pascakolonialisme tidak akan mengembalikan masyarakat-masyarakat tersebut ke masa sebelumnya dimana mitologi berkuasa. Bagi pascakolonialisme, kategori-kategori yang biasanya diterapkan Barat seperti primitif dan ”terbelakang” telah kehilangan netralitasnya (ibid) dan bahkan perlu digugat. Perayaan akan adanya identitas kebudayaan yang berbeda dari identitas kebudayaan Barat yang diglobalkan melalui kapitalisme mutakhir adalah semacam rekomendasi yang disodorokan pascakolonialisme.

Secara metodologis, kajian pascakolonial diwarnai oleh wacana-wacana teoritis yang terkait dengan pascamodernisme, terutama ‘teori’ dekonstruksi Derrida, psikoanalisis Lacan dan bentuk-bentuk analisis wacana yang sebagian berasal dari pemikiran Foucault. Kajian ini didominasi oleh nama-nama besar semacam Homi Bhabha, Edward Said dan Gayatri Spivak dan tokoh-tokoh lainnya yang rata-rata menyuarakan keraguan terhadap narasi-narasi besar, baik tentang peradaban maupun ilmu. Kajian pascakolonial juga menunjukkan bahwa hubungan pusat-pinggiran jauh lebih kompleks daripada yang biasanya dinyatakan oleh teori-teori Marxis.

Luasnya cakupan ‘pascakolonial’ telah menimbulkan gelombang wacana dan perdebatan yang riuh. Meskipun sebagian intelektual berpandangan bahwa kajian pascakolonial memiliki kelemahan dalam hal ketepatan analisis dan kekurangan dalam hal partikularitas kesejarahan dan material, yang lainnya berargumentasi bahwa sebagian besar bekas koloni masih jauh dari bebas akan pengaruh atau dominasi kolonial dan tidak bisa dikatakan pascakolonial secara harafiah. Dengan kata lain, dirayakannya kemerdekaan secara berlebihan oleh banyak negara menutupi melajunya neokolonialisme dalam bentuk modernisasi dan pembangunan di suatu masa dimana globalisasi, neoliberalisme dan transnasionalisme semakin meningkat; sementara masih ada negara-negara koloni yang berada dalam kendali asing.

Akan tetapi, terkadang penekanan perhatian terhadap hubungan penjajah/ yang dijajah mengaburkan adanya penindasan internal di dalam koloni-koloni. Intelektual-intelektual lain mengkritik kecenderungan

dunia ilmiah Barat yang lebih menerima sastra dan teori pascakolonial yang sesuai dengan formulasi pascamodern tentang adanya hibriditas dan sinkretisasi, serta kurang memperdulikan realisme kritis yang mengkaji adanya penindasan sosial dan rasial tertentu. Pujian terhadap para penulis diasporis semacam Salman Rushdie dipandang sebagai pengistimewaan 'sensibilitas' migran transnasional yang mengabaikan perjuangan-perjuangan pascakolonial yang lebih bersifat lokal. Maka, munculnya kajian pascakolonial di saat bertumbuhnya pergerakan transnasional dari modal, buruh dan budaya dilihat secara skeptis sebagai usaha membelokan perhatian dari realitas nyata eksploitasi, baik di Dunia Pertama maupun Dunia Ketiga.

Meskipun terdapat banyak kritikan, kajian-kajian pascakolonial justru semakin berkembang pesat karena wacana tentang pascakolonialitas juga mengandung semangat kritis baik yang berakar dari tradisi yang dikembangkan dari Mazhab Frankfurt maupun pascamodernisme dan pascastrukturalisme, yang mengarah pada berbagai macam bentuk dominasi dan hegemoni. Kritik pascakolonial inilah mendorong serangkaian penyelidikan atas hubungan-hubungan kuasa dalam beragam konteks. Pembentukan imperium baru, dampak kolonisasi terhadap sejarah, ekonomi, ilmu dan budaya pascakolonial, produksi kebudayaan di masyarakat-masyarakat kolonial, pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan, dan kondisi masyarakat pascakolonial dalam konteks ekonomi dan budaya kontemporer adalah tema-tema luas yang dibahas dalam berbagai kajian pascakolonial.

2.2.2 Gender dan Feminisme

Menurut Heroeputri dan Valentina (2004), gender dan feminisme meskipun sekilas terlihat sama namun memiliki perbedaan yang signifikan. Gender biasanya digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami realitas sosial berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. Dalam banyak kasus gender digunakan bersamaan dengan pisau analisis lainnya, seperti analisis kelas dan analisis struktural. Sedangkan feminisme dipandang sebagai ideologi, bukan wacana. Hal ini dikarenakan hakikat feminisme adalah perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan terutama yang terjadi pada perempuan.

Secara lengkap dapat diuraikan bahwa gender mengacu pada nuansa perbedaan menjadi laki-laki atau perempuan (Macey, 2000). Perbedaan antara 'sex' dan 'gender' mulai muncul di Inggris di tahun 1970an, sebagai dampak dari feminisme dan gerakan pembebasan perempuan. Sex didefinisikan sebagai perbedaan biologis pada genital, kromosom, dan karakteristik seksual lainnya. Sedangkan gender didefinisikan sebagai konstruksi sosial tentang maskulinitas dan feminitas.

Secara sederhana, gender dapat diuraikan lebih lanjut sebagai bentukan sosiologis dan psikologis dengan proses sosialisasi-lah yang membuat seseorang menjadi maskulin atau feminim. Bhasin (2000) menyebutkan bahwa gender menunjuk pada definisi sosial-budaya dari perempuan dan laki-laki, cara masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan, serta menugaskan kepada mereka peran-peran sosial. Sebagai bentukan masyarakat, gender sebenarnya dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat, serta dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja, rata-rata intelektual-perempuan menyebutkan adanya hubungan kuasa yang tidak adil dan seimbang dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan sehingga perubahan dan pertukaran gender menjadi sulit diwujudkan.

Butler (1990) menyebutkan bahwa gender adalah pemaknaan budaya yang dilekatkan pada tubuh manusia dan bukannya perangkat yang memang sudah menempel pada kedirian atau subyektivitas. Makna gender tidak pernah bisa lepas dari berkelindannya kebudayaan dan politik yang menghasilkan dan memelihara perbedaan gender, dan tidak diturunkan secara alamiah dari jenis kelamin secara biologis. Dengan menerapkan karya filosof John Austin mengenai teori 'ujaran-tindakan', Butler menunjukkan bahwa produksi gender adalah soal performativitas. Misalnya saja, ketika seseorang berkata "Kamu itu cewek", maka sejak saat itulah terjadi proses 'girling' yang secara terus-menerus dilakukan melalui ritual dan pemaknaan. Meskipun demikian, menurut Butler, "menjadi laki-laki" atau "menjadi perempuan" adalah hal yang tidak stabil karena hal itu tergantung dari wacana semacam apa yang menimbulkan efek gender sehingga proses men-gender-kan tidak pernah utuh.

Sedangkan mengenai feminisme, meskipun memiliki banyak bentuk, intisarinya adalah suatu prinsip bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan selalu diwarnai ketidakadilan dan penindasan yang kebanyakan terjadi pada perempuan. Semua bentuk feminisme berusaha untuk melakukan identifikasi penyebab ketidakadilan itu dan berusaha mengatasinya dimana isu tentang siapa atau apa yang sebenarnya memproduksi dan mereproduksi hal itu menjadi salah satu perbedaan di antara para feminis (Macey, 2000). Meskipun demikian, ada semacam kesepakatan bahwa keberpihakan feminisme dengan demikian jelas terhadap perempuan sebagai pihak yang dilemahkan dan dirugikan oleh sistem yang ada.

Pemakaian istilah feminisme itu sendiri dapat dilacak pada kata Prancis *feminisme* yang muncul sekitar tahun 1830an, dan istilah ini dipakai oleh sosialis utopian Charles Fourier yang memang melihat bahwa pembebasan perempuan merupakan tindakan emansipasi masyarakat secara menyeluruh. 'Feminisme' mulai diserap dalam bahasa Inggris di sekitar tahun 1851 dimana 40 tahun kemudian, dipersamakan

dengan pembelaan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, pemikiran feminis atau proto-feminis dapat dianggap telah muncul mendahului munculnya istilah feminisme itu sendiri. Hal ini terbukti dari tulisan-tulisan Mary Wollstonecraft, yang mulai diterbitkan tahun 1790an di Inggris, yang berpendapat bahwa perempuan menikah adalah ibarat “burung dalam sangkar”.

Berbagai macam kampanye di tahun 1940an yang menyuarakan hak pilih bagi perempuan dalam pemilihan umum untuk memilih rezim pemerintahan dapat dipandang sebagai gelombang pertama feminisme modern. Sementara yang dianggap sebagai gelombang kedua-nya adalah gerakan pembebasan kaum perempuan yang mulai semarak tahun 1970an. Tahun 1980an biasanya digolongkan sebagai dekade serangan-balik terhadap feminisme atau suatu masa dimana terjadi perang yang tidak dideklarasikan terhadap perempuan yang terutama terjadi di media dengan salah satu tuduhan yakni “feminisme telah berjalan terlalu jauh” (Macey, 2000). Namun pada periode yang bersamaan muncullah kajian perempuan atau kajian gender sebagai salahsatu disiplin akademis yang penting. Selain itu pada periode ini pula, tempat-tempat penerbitan karya-karya feminis mengalami perkembangan pesat dan kesadaran masyarakat mengenai gender juga semakin berkembang pula.

Bagi para feminis di Dunia Ketiga, feminisme bukanlah semata-mata peniruan dari Barat yang asing bagi perempuan di Timur. Feminisme hadir bersamaan dengan kesadaran yang dimiliki perempuan, dalam lingkup personal maupun publik, dengan mereka menyadari ketidakadilan dan mengambil langkah untuk mengubahnya. Feminisme di Asia, misalnya, muncul pada abad XIX dalam konteks kesadaran tentang hak-hak demokratis dan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Kesadaran ini muncul dalam kerangka perjuangan melawan kekuasaan kolonial sekaligus kekuatan despotis dari penguasa lokal. Hal ini dicontohkan oleh Jayawardena (1986) yang menguraikan bahwa perbincangan mengenai hak perempuan dalam pendidikan sudah ada di Cina semenjak abad XVIII.

2.2.3 Feminisme Pascakolonial : Titik-Titik Temu

Feminisme, sebagaimana halnya pascakolonialisme, tidaklah memiliki landasan teoritis yang tunggal sehingga feminisme tidak pernah berwajah tunggal. Berbagai macam tradisi filsafat dan aliran pemikiran sosial mewarnai feminisme. Misalnya saja feminisme-sosialis yang melihat bahwa ketidakadilan antar jenis kelamin disebabkan oleh struktur hubungan sosial dan ekonomi dari kapitalisme. Feminisme-radikal cenderung melihat bahwa struktur ketidakadilan pada perempuan berakar pada ideologi patriarkhi, yaitu ideologi yang mendasarkan diri sepenuhnya pada kekuasaan laki-laki, berpusat pada laki-laki, yang secara sistemik berada dalam lembaga sosial-ekonomi-politik-budaya.

Selanjutnya feminisme liberal melihat bahwa sumber penindasan perempuan adalah belum diperoleh dan dipenuhinya hak-hak perempuan dengan perempuan didiskriminasi hak, kesempatan, dan kebebasannya karena ia perempuan (Heroepoetri dan Valentina, 2004). Aliran-aliran ini, meskipun terlihat memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan, tetapi sebenarnya dapat saling melengkapi sehingga feminisme, baik sebagai wacana maupun ideologi, mampu menjangkau segala ranah kehidupan.

Feminisme sendiri di banyak masyarakat bekas jajahan, termasuk Indonesia, belum banyak dikaitkan dengan pascakolonialitas. Padahal, apabila dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa kajian feminisme memiliki beberapa kesamaan dengan kajian pascakolonial sehingga menurut pandangan kami, keduanya memiliki kesamaan. Pertama, keduanya bersifat politis dalam artian berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Selain itu, keduanya menolak sistem yang hirarkhis dan patriarkhis, yang didominasi oleh laki-laki kulit putih yang hegemonis, dan karena itu menolak supremasi kuasa dan wewenang maskulinitas. Imperialisme, seperti halnya patriarki, adalah ideologi hegemonis-*'phallogentric'* yang menekan dan mendominasi subyek. Dalam pemahaman ini, perempuan sama saja dengan subyek yang terkolonisasi. Para teorisi pascakolonial bereaksi terhadap kolonialisme dalam artian politik dan ekonomi, sedangkan teorisi feminis menolak kolonialisme dalam artian seksualnya.

Upaya untuk merangkai pertemuan antara pascakolonialisme dengan feminisme telah dilakukan oleh Spivak (1988) yang menyediakan kajian budaya sebagai wahana pertemuannya. Pada tahun 1980-an yang masih ditandai adanya pemisahan dan pembedaan pascakolonialisme dan feminisme, kritik terhadap (neo) imperialisme dan kecenderungan hegemonis dari kelompok kulit putih di Barat juga sudah mulai muncul di kalangan feminis di Barat sendiri. Tahun 1990-an menyaksikan usaha-usaha untuk membentuk aliansi dengan praktisi-praktisi feminis pascakolonial dari apa yang disebut Dunia Ketiga berusaha untuk mencari kesatuan dalam keberagaman dan menemukan perhatian bersama dalam bermacam-macam konteks yang nampaknya berbeda (Bose, 2002). Feminisme telah mulai menyoroti sejumlah asumsi yang belum pernah diperiksa di dalam wacana pascakolonial, terutama menyangkut isu tentang hubungan gender yang tidak setara dan tidak adil di negara-negara bekas jajahan. Sementara kajian-kajian pascakolonial juga sudah membawa kesadaran baru pada wacana feminis mengenai hubungan yang tidak terelakan antara kondisi perempuan di negara-negara bekas jajahan yang nasibnya ditentukan oleh industri-industri yang berbasis transnasional yang diidentifikasi sebagai neo kolonialisme.

Dialog antara pascakolonialisme dan feminisme telah mendapatkan momentum dan menjadi lebih kritis secara teoretis pada akhir tahun 1990-an. Teorisi yang dimunculkan oleh pascakolonialisme telah menunjukkan adanya kritik terhadap kecenderungan etnosentris dan menjajah dari wacana-wacana feminis Barat gelombang kedua. Pascakolonialisme juga menunjukkan bahwa beberapa formulasi makro politik seperti bangsa, terus mendominasi praktik, wacana, dan lembaga-lembaga kebudayaan di negara-negara bekas jajahan yang juga menghasilkan wilayah-wilayah kekuasaan para bekas penjajah (termasuk diantaranya hubungan gender yang menjadi kepedulian para feminis) tetapi sekaligus juga menghasilkan perlawanan dan oposisi. Lebih jauh lagi, kajian pascakolonial mempengaruhi teorisi feminis melalui gagasan ‘penjajahan ganda’, dengan menunjukkan bahwa perempuan di negara bekas jajahan dijajah/ditindas, baik oleh ideologi imperialis maupun patriarki. Dalam konteks ini, nama-nama semacam Gayatri Chakravorty Spivak dengan konsepsinya mengenai ‘suara terpinggirkan yang bisu’ maupun Chandra Talpade Mohanty dengan konsepsinya mengenai ‘multisubektivitas’ menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Suatu titik temu yang penting antara feminisme dan pascakolonialisme adalah isu tentang representasi. Pada dirinya sendiri, representasi, menurut Bose (2005) yang mengutip Ato Quayson, memiliki dua pemaknaan. Yang pertama adalah yang terkait isu representasi politik, sedangkan yang kedua adalah yang berada pada wilayah diskursif, yakni cara-cara dimana metafor, gagasan dan konsep digunakan untuk memproyeksikan citra tentang seseorang atau beberapa orang. Representasi diskursif memiliki efek yang serius terhadap wilayah kehidupan sehari-hari dan menetapkan bentuk-bentuk pelaku yang potensial untuk mendefinisikan posisi subyek dalam dunia. Dimensi politis dan wacana dari representasi memiliki relevansi yang tinggi baik bagi feminisme maupun pascakolonialisme. Oleh karena itu, representasi diskursif tentang perempuan Dunia Ketiga merupakan konsekuensi politis dari proyek (neo) kolonialisme.

Akan tetapi, Mohanty (1991) menyatakan penentangannya terhadap kecenderungan feminis Barat untuk melakukan homogenisasi perempuan ‘liyan’ (Dunia Ketiga) yang merupakan akibat dari gabungan tradisi, budaya, dan kepercayaan ‘mereka’ dengan kesejarahan ‘kami’ (Barat). Bahkan menurutnya terbentuknya representasi diskursif tentang perempuan Dunia Ketiga merupakan cara yang digunakan oleh feminis Barat untuk menghadirkan diri mereka sendiri sebagai subyek yang memiliki pengetahuan. Dalam kajian Mohanty (1991), para feminis Barat seringkali memberikan wewenang pada diri sendiri untuk bertindak atas

nama perempuan Dunia Ketiga, seakan-akan mereka merupakan satu kelompok tunggal.

Persoalan-persoalan makro politik juga telah membuat terabaikannya isu kaum perempuan Dunia Ketiga yang memiliki kekhasan dibanding isu perempuan Dunia Pertama. Perempuan Dunia Ketiga menurut Gandhi (2006:108) merupakan korban yang terlupakan dari imperialisme kolonial dan feminisme Barat. Feminisme, seharusnya dapat mengambil manfaat dari kajian pascakolonial yang menekankan karakter-karakter multiplisitas, heterogenitas dan kompleksitas. Dengan demikian wacana feminis juga semestinya memperhatikan tuntutan-tuntutan untuk memperhatikan faktor kesejarahan yang terperinci yang mengungkapkan suara dari mereka yang terpinggirkan. Hal ini diperkuat oleh penegasan Spivak (1993) yang menekankan pentingnya isu marjinalitas dalam kritik budaya kontemporer; suatu hal yang hampir tidak ada dalam wacana feminis liberal. Ia mendesak para feminis di dunia akademik untuk bersedia berbicara kepada bahkan belajar bersama dengan perempuan yang tertindas. Feminis pascakolonial juga harus terus berbicara mengenai keunikan dari perempuan Dunia Ketiga di banyak lokasi yang beragam konteksnya.

2.3 Kesimpulan

Usaha-usaha secara teoritis dan politis untuk mempertemukan feminisme dan pascakolonialisme memang tidaklah mudah. Kaum feminis banyak mempertanyakan secara kritis kemanfaatan dari kajian-kajian pascakolonial. Pertanyaan tersebut didasari antara lain oleh pemakaian istilah pascakolonial itu sendiri yang dipandang cukup bermasalah karena mengandung konsekuensi politis yang bukan hanya dipandang bersifat ambigu dan tidak kritis terhadap kolonialisme tetapi juga mereproduksi kolonialisme. Selain itu, kajian-kajian pascakolonial juga terkadang dianggap melakukan proses homogenisasi terhadap representasi perempuan nonbarat dan menunjukkan adanya superioritas dari para feminis Barat.

Meskipun demikian, pascakolonialisme yang diinspirasi oleh karya-karya Edward Said dan dikembangkan terus-menerus oleh sejumlah pemikir telah mengangkat wacana-wacana feminis baru yang berbeda dari apa yang biasanya dituduhkan. Karena itulah maka feminisme juga telah merespon secara positif kehadiran pascakolonialisme dalam ruang akademis. Kajian-kajian yang dilakukan oleh para pascakolonialis telah memperbaharui kelompok feminis untuk berpikir secara heterogen dan majemuk serta membuka ruang bagi dialog antara perempuan dari berbagai wilayah kebudayaan yang sangat beragam. Lebih jauh lagi, feminisme pascakolonial sudah berusaha untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada suara-suara perempuan yang selama ini tertindas dan tidak

terbunyikan dalam tata global. Di sisi lain, pertemuan dengan feminisme membuat kajian-kajian pascakolonial membuka diri terhadap nuansa gender dan seksualitas yang membuat perempuan memiliki kondisi-kondisi yang sangat berbeda daripada laki-laki.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Sara. 2000. *Strange Encounters : Embodied Others in Post-Coloniality*. Routledge, London
- Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; dan Tiffin, Helen. 1989. *The Empire Writes Back : Theory and Practice in Post Colonial Literatures*. Routledge, London
- Bhabha, Homi. 1994. *The Location of Culture*. Routledge, London
- Bhasin, Kali. 2000. *Understanding Gender*. Kali for Women, New Delhi
- Bose, Brinda. 2005. *Postcolonial Feminisms : Nation, Gender and Sexualities in India* dalam *Feminist Theory* vol. 6 (1) : 87-97. SAGE Publication
- Bracher, Mark. 2005. *Jacques Lacan, Diskursus, dan Perubahan Sosial : Pengantar Kritik-Budaya Psikoanalisis*. Penerjemah : Gunawan Admiranto. Jalasutra, Yogyakarta
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble : Feminism and The Subversion of Identity*. Routledge, London
- During, Simon. 2000. *Postcolonialism and Globalization : Towards A Historicization of Their Inter-Relation*. Cultural Studies, Vol. 14, No.3/4, halaman 385-404. Routledge, London
- Gandhi, Leela. 2006. *Teori Postkolonial : Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Penerbit Qalam, Yogyakarta. Diterjemahkan dari *Postcolonial Theory*. 1998. AllendanUnwin
- Heroepoetri, Arimbi dan Valentina, R. 2004. *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*. Debt Watch Indonesia dan Institut Perempuan, Jakarta
- Jayawardena, Kumari. *Feminism and Nationalism*. Kali for Women and Zed Books Ltd, India
- Jurnal Kebudayaan Kalam. *Pascakolonialisme dan Sastra*. Edisi 14, 1999
- Loomba, Ania. 2002. *Kolonialisme dan Pascakolonialisme*. Penerjemah : Andi Muhammad. Bentang Budaya, Yogyakarta
- Macey, David. 2000. *The Penguin Dictionary of Critical Theory*. Penguin Books, London
- Mishra, Vijay dan Hodge, Bob. 1991. What is (Post) Colonialism? *Textual Practice*, Vol. 5, No. 3, hal. 399-414
- Mohanty, Chandra T. 1991. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses" dalam Chandra T. Mohanty, Ann Russo, dan Lourdes Torres. *Third World Women and The Politics of Feminism* (hal. 51-80). Indiana University Press, Bloomington

- Mohanty, Chandra T.; Russo, Ann; dan Torres, Lourdes (ed). 1991. *Third World Women and The Politics of Feminism*. Indiana University Press, Bloomington
- Phillpott, Simon. 2003. *Meruntuhkan Indonesia : Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Penerjemah : Nuruddin Mhd Ali dan Uzair Fauzan. LKiS, Yogyakarta
- Said, Edward W. 1978. *Orientalism: Western Conception of the Orient*. Routledge dan Kegan Paul, London
- Spivak, Gayatri C. 1988. *In Other World : Essays in Cultural Politics*. Routledge, London
- Spivak, Gayatri C. 1993. *Outside in The Teaching Machine*. Routledge, London

3. PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PENANGANAN VIRUS COVID-19

**Oleh:
Sri Wijayanti**

3.1 Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, di Wuhan, Tiongkok, terjadi wabah penyakit yang disebabkan virus COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Sifat virus yang mudah sekali menular menyebabkan virus ini cepat menyebar di 212 negara di dunia. Hal ini menyebabkan World Health Organization menyatakan bahwa dunia telah terjadi pandemik. Sampai dengan 11 Mei 2020, jumlah kasus virus COVID-19 ini berjumlah 4.193.381 kasus dengan orang yang meninggal dunia dikarenakan virus COVID-19 yaitu 283.992 orang (corona virus pandemic, 2020)

Berbagai langkah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Negara-negara membuat kebijakan antara lain pembatasan aktivitas, menutup akses keluar masuk negara, karantina wilayah, penambahan fasilitas kesehatan dll. Beberapa negara berhasil untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini, tetapi beberapa negara terus mengalami penambahan kasus corona. Negara-negara yang memiliki angka kasus corona yang tinggi yaitu Amerika Serikat dengan lebih dari 94.000 kasus kematian per 20 Mei 2020 (Berger *et al.*, 2020). Selanjutnya angka kematian di negara-negara lain yaitu Spanyol, Inggris, Perancis dan Italia per 5 Mei 2020 yaitu sebesar 26.920 kasus, 32.065 kasus, 26.643 kasus, 30739 kasus (coronavirus, 2020)

Di satu sisi, beberapa negara dinilai berhasil untuk mengendalikan laju penyebaran virus atau menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19. Salah satu indikator keberhasilan sebuah negara untuk dinilai berhasil dalam mengendalikan virus COVID-19 ini adalah dengan menekan angka kematian. Negara tersebut antara lain Jerman, Selandia Baru, Taiwan, Finlandia, Islandia yang kepala negara atau kepala pemerintahannya adalah perempuan. Walaupun secara jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19 cukup tinggi di Jerman, tetapi Jerman dinilai berhasil menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus corona yaitu sebesar 2,82 persen dari total kasus COVID-19 atau 3.804 kasus dari 134.753 kasus (Negara-negara yang sukses, 2020). Para pemimpin perempuan dinilai berhasil dalam menangani COVID-19. Tulisan ini akan membahas tentang keberhasilan para pemimpin perempuan dalam mengatasi persoalan COVID-19 di negara masing-masing dan mengapa mereka berhasil dalam menangani penyebaran virus COVID-19.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kesehatan Personal adalah Hal Politik

Dalam perspektif feminisme, kepemimpinan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, kepemimpinan adalah aktivitas manusia yang tergenderisasi (Dewi, 2020). Pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan dan sensitivitas gender mempengaruhi kepemimpinan dan interaksi manusia serta bagaimana manusia menumbuhkan dan mengembangkan rasa kemanusiaan dalam situasi krisis. Perspektif feminis normatif memberikan kontribusi pada proses pembuatan sebuah kebijakan (*policy oriented*) untuk penyusunan agenda bantuan kemanusiaan, intervensi kemanusiaan dan perlindungan HAM yang tidak bias gender (Hadiwinata, 2018). Oleh karena itu, pemimpin yang sensitivis gender akan menghasilkan sebuah keputusan yang bijak dan tepat.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kepemimpinan seseorang dalam menangani persoalan kesehatan sangat penting. Kesehatan adalah persoalan hak mendasar bagi manusia. Hal ini memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin akses kesehatan, termasuk pendidikan dan informasi yang terkait dengan kesehatan (*human rights and health*, 2017) Kesehatan pada awalnya merupakan sesuatu yang bersifat pribadi; seiring dengan perkembangan negara modern maka kesehatan menjadi isu politik karena persoalan kesehatan dikelola oleh negara melalui berbagai kebijakan yang dibuat, tidak lagi menjadi urusan keluarga (Kumlin, 2004). Negara memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur isu kesehatan bagi warga negaranya. Di satu sisi, negara seringkali digambarkan sangat maskulin (*male power*) yang memiliki sifat agresif sehingga berpotensi menghasilkan konflik atau perang, cenderung kompetitif, egois, cenderung mengejar kekuasaan dan sangat mengutamakan keamanan (Heywood, 2016)

Di sisi yang lain, feminisme menawarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan maskulinitas negara. Bagi perspektif feminis, kemanusiaan (*human security*) menjadi sesuatu yang penting. (Heywood, 20016). Salah satunya adalah persoalan kesehatan yang terkait erat dengan dengan pengalaman perseorangan sehingga persoalan kesehatan ini menjadi sesuatu hal yang bersifat politis, begitu juga sebaliknya. Studi yang dilakukan Hanisch (1969) menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam urusan domestik sebagai *personal problem* perempuan dimana *personal problem* ini tidak membutuhkan *personal solution*, namun yang dibutuhkan adalah aksi kolektif untuk menyelesaikan solusi bersama. Solusi yang bersifat kolektif ini merupakan sebuah aksi politik untuk menyuarkan pengalaman atau persoalan pribadi yang dihadapi perempuan (*personal is political, political is personal*).

3.2.2 Pemimpin Negara Perempuan dalam Penanganan COVID-19

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa pemimpin perempuan di negara-negara yang dinilai berhasil untuk menangani COVID-19 adalah sebagai berikut:

1) Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru)

Jacinda Ardern adalah perdana menteri ke 40 negara Selandia Baru dan juga merupakan ketua partai Buruh di Selandia Baru. Sebelum menjadi perdana menteri, Jacinda aktif dalam berbagai kegiatan partai dan juga aktivisme sosial dalam perjuangan hak pekerja di luar negeri. Karirnya di bidang politik mematangkan dirinya untuk menjadi pemimpin Selandia Baru.

Kasus COVID-19 di Selandia baru diumumkan pada 29 Februari 2020. Perdana Menteri Jacinda Ardern menggunakan platform resmi dan juga platform personal. Jacinda menyadari bahwa penyakit yang disebabkan virus corona ini berbahaya bagi manusia. Sehingga warga negara Selandia Baru wajib untuk mengetahui cara penanganan dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dalam akun resminya di Instagram, Jacinda Arden menginformasikan tentang hal penting yang harus diketahui oleh warga negara Selandia Baru. Ketiga hal penting tersebut adalah cara penularan COVID-19 melalui droplet lewat batuk dan bersin, melakukan karantina mandiri, pengawasan perbatasan yang ketat.

Jacinda kemudian mengajak rakyatnya untuk berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan hal-hal sederhana seperti mencuci tangan, cara bersin yang benar, dan tidak meninggalkan rumah agar virus tidak menular lebih luas. Ajakan untuk cuci tangan, bersin dengan benar dan tinggal di rumah yang dilakukan oleh perseorangan ini jauh dari sifat maskulin. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun di masa pandemik ini, kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang bernilai luar biasa karena dipercaya dapat memutus rantai penyebaran virus yang belum ada obatnya ini. Setiap warga memiliki posisi sangat penting untuk terlibat dalam menghentikan penyebaran virus ini. Jacinda memosisikan setiap orang sebagai pemain kunci dalam ‘pertarungan’ melawan virus COVID-19 di Selandia Baru.

Kebijakan yang dilakukan oleh Jacinda untuk menangani penyebaran Virus COVID-19 adalah pengawasan perbatasan yang ketat dan melarang orang asing untuk memasuki negara Selandia Baru. Kebijakan ini diperlukan karena hampir seluruh negara-negara di dunia telah ditemukan kasus virus COVID-19. Penyebaran virus Covid 19 yang massif ini salah satunya adalah dipengaruhi oleh mobilitas manusia. Sehingga untuk memutus rantai penyebaran virus

ini, pemerintah mengontrol perbatasan dengan ketat. Pemerintah Selandia Baru memutuskan untuk melarang orang asing mengunjungi Selandia Baru. Kebijakan ini bukannya tanpa resiko. Sektor ekonomi akan sangat terguncang mengingat sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang signifikan di Selandia Baru. Kebijakan ini ditandai dengan bunyi alarm yang dihidupkan oleh pemerintah. Untuk mengurangi kekhawatiran rakyat Selandia Baru, Jacinda memakai busana santai (kasual) dan mengumumkan melalui *Facebook Live* miliknya (Taub, 2020). Dalam kesempatan tersebut, Jacinda mengungkapkan bahwa dirinya merasakan kekhawatiran rakyat Selandia Baru dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Selandia Baru karena bunyi alarm yang digunakan untuk memulai kebijakan *lockdown*. Pemilihan kata dan bahasa tubuh yang menunjukkan perasaan empati, pakaian santai (kasual) dan platform komunikasi melalui media sosial merupakan sebuah langkah cerdas untuk meminimalkan jarak antara penguasa dan rakyat, mengurangi rasa panik dan khawatir rakyat yang berada dalam situasi krisis serta menampilkan kesan bahwa pemimpin memahami dan mengerti situasi yang tidak mudah tersebut. Melalui pendekatan komunikasi tersebut, Jacinda menunjukkan bahwa pemerintah adalah pihak yang akan melayani, melindungi dan mengayomi setiap warga yang berada di Selandia Baru.

2) Sanna Marin (Perdana Menteri Finlandia)

Sanna Marin adalah Perdana Menteri Finlandia yang dilantik pada 10 Desember 2019. Sanna Marin pernah menjabat sebagai mantan Menteri Transportasi dan Komunikasi Finlandia dan merupakan Perdana Menteri perempuan termuda dalam sejarah Finlandia. Sanna Marin adalah seorang politikus dari Partai Demokrasi Sosial. Negara Finlandia mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 pada 29 Januari 2020 (*Finland confirms*, 2020). Sejak terkonfirmasi kasus pertama virus COVID-19, kasus orang yang terinfeksi virus COVID-19 terus mengalami kenaikan. Ibukota Helsinki merupakan epicentrum penyebaran virus COVID-19 di Finlandia. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Sanna Marin membuat kebijakan untuk mengkarantina wilayah ibukota dengan ketat yaitu dengan melarang perjalanan dari dan keluar kota Helsinki. Kebijakan ini mampu menekan penyebaran virus COVID-19 yaitu 4000 kasus dengan angka kematian 140 kasus (*are female leaders*, 2020).

Warisan tradisi Finlandia untuk selalu menyimpan barang tetap dipertahankan oleh Sanna Marin. Ketika negara-negara lain mencari kebingungan untuk mencari masker, Finlandia telah siap menyediakan masker (*surgical masks*) dan peralatan medis yang

sangat diperlukan di saat pandemik ini. Hal ini dikarenakan kebijakan negara Finlandia untuk selalu menyimpan hal-hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan situasi yang akan dihadapi (*stockpiles*). Sehingga, walaupun masker itu sudah lama, tetapi masih bisa digunakan oleh tenaga medis (Anderson dan Libell, 2020). Kebiasaan menyimpan barang untuk situasi yang tidak terduga mencirikan karakter feminisme.

Kebijakan untuk berhati-hati dalam penggunaan suatu barang yang dinilai sangat penting dan mendahulukan kelompok prioritas menjadi ciri khas kepemimpinan feminine yang lain. Berbeda dengan anjuran *World Health Organization*, Finlandia hanya melaksanakan tes terhadap kelompok prioritas yaitu para tenaga medis dan kelompok rentan COVID-19. Hal ini dilakukan karena Finlandia menyakini bahwa virus ini tidak akan pernah musnah di dunia ini sehingga melakukan kebijakan sesuai anjuran WHO hanya akan membuat alat kesehatan terbuang sia-sia (Kauranen, 2020). Kebijakan yang terencana dan hanya tertuju pada sasaran, diharapkan dapat efektif dan menghemat alat kesehatan yang jumlahnya terbatas.

Finlandia sebagai salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan yang terbaik di dunia memilih untuk menerapkan kebijakan menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa pandemik COVID-19 dan menggantinya dengan belajar jarak jauh di rumah. Hal ini untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan melindungi anak-anak agar tidak terpapar virus corona.

Selama masa pandemik, beragam informasi yang benar ataupun informasi yang menyesatkan beredar di tengah masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan komunikasi yang dipilih oleh Sanna Marin adalah mengajak para *social media influencers* sebagai agen untuk menyebarkan informasi sehingga masyarakat mengetahui cara penularan dan pencegahan virus ini. Sanna Marin menyadari bahwa tidak setiap orang membaca berita melalui media konvensional seperti majalah atau Koran sehingga para *influencers* ini diharapkan dapat menyebarkan fakta atau informasi yang benar tentang pandemik COVID-19 ini (Wittenberg-Cox, 2020). Pengaruh yang dimiliki oleh para *influencers* ini dimanfaatkan secara optimal oleh Sanna Marin untuk mengedukasi rakyat tentang COVID-19. Kolaborasi ini menjadi pilihan komunikasi yang tepat yang generasi muda lebih tertarik dalam sosial media. Pada akhirnya, ketika semua warga negara Finlandia menerima informasi yang benar tentang COVID-19, maka mereka –secara personal- lebih mudah untuk menghadapi COVID-19 itu dan mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sanna Marin menyadari bahwa partisipasi

rakyat akan meningkat ketika mereka menerima informasi yang benar.

3) Tsai Ingwen

Sejak terpilih pada 20 Mei 2016, Presiden Tsai Ingwen adalah presiden perempuan pertama Republik Tiongkok atau Taiwan. Presiden Tsai Ingwen memiliki latar belakang sebagai politikus dan akademisi. Lokasi negaranya yang dekat dengan Tiongkok (100 mil) dari China membuat Presiden Tsai Ingwen harus berupaya ekstra kuat untuk membendung penyebaran virus dari Tiongkok. Beberapa kebijakan yang dinilai berhasil oleh dunia lebih menitikberatkan tentang bagaimana individu terlindungi dan bagaimana individu harus memiliki peran dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

Sejak kasus virus COVID-19 ditemukan di Wuhan, Pemerintah Taiwan segera memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap mobilitas orang. Sejak pertengahan Januari, Taiwan mewajibkan karantina mandiri terhadap orang yang datang dari Tiongkok dan memberikan denda yang besar bagi yang melanggar peraturan tersebut. Negara menjamin perorangan yang tidak bekerja atau tidak dapat beraktivitas karena melakukan karantina mandiri akan mendapatkan uang saku dari negara (COVID-19 *success stories*, 2020). Hal ini dilakukan agar penyebaran virus COVID-19 dapat dilokasir dan diminimalisir penyebarannya. Pemerintah juga menggunakan perangkat teknologi yaitu pelacakan sinyal telepon seluler yang dimiliki oleh suspect covid-(Lee, Cauley, Abadi, 2020). Sinyal telepon akan mendeteksi di mana keberadaan *suspect* COVID-19 dan dengan siapa saja dia berinteraksi. Sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan *suspect* COVID-19 akan mudah ditelusuri dan diperiksa apakah mereka tertular atau tidak COVID-19.

Optimalisasi perangkat teknologi melalui pelacakan sinyal telepon seluler yang dimiliki oleh individu menjadi salah satu faktor keberhasilan Taiwan. Sinyal telepon akan mendeteksi keberadaan *suspect* COVID-19 dan dengan siapa saja dia berinteraksi. Sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan *suspect* COVID-19 akan mudah ditelusuri dan diperiksa apakah mereka tertular atau tidak COVID-19.

Untuk melindungi perorangan, Presiden Tsai Ingwen, memastikan bahwa setiap orang yang berada di Taiwan memiliki masker yang akan melindungi mereka dari penularan virus COVID-19. Presiden Tsai Ingwen menyuruh perusahaan-perusahaan di Taiwan yang memproduksi masker meningkatkan produksinya agar setiap orang di Taiwan dapat memakai masker tersebut. Peningkatan produksi masker mampu untuk mencukupi kebutuhan rakyat Taiwan, bahkan Taiwan mampu membantu Amerika Serikat dan Eropa yang

membutuhkan masker sebanyak 10 juta masker (Wittenberg-Cox, Avivah, 2020). Bantuan ini merupakan perwujudan perasaan empati kepada orang lain ketika orang lain sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan vitalnya di masa pandemi yaitu masker.

3.3 Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan dalam masa pandemik ini memiliki karakteristik yaitu (1) Detil. Sebelum pandemik, kebiasaan cuci tangan atau memakai *hand sanitizer* untuk menjaga kebersihan tangan dan berdiam di rumah merupakan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Kegiatan yang terkesan biasa ini ternyata memiliki nilai yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari penyebaran virus COVID-19. (2) Partisipatif. Para pemimpin menempatkan rakyat sebagai pemain kunci untuk melawan COVID-19 dengan disiplin memakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa masalah kesehatan yang merupakan masalah personal harus diselesaikan secara bersama (3) Prioritas terhadap pilihan strategis. Pilihan mendahulukan kesehatan dibandingkan dengan ekonomi merupakan pilihan yang tidak mudah karena jika memilih kesehatan maka ekonomi akan terabaikan, begitu juga sebaliknya. Namun masalah kesehatan lebih dipilih karena dengan kondisi setiap warga yang sehat maka mereka akan dapat melakukan kegiatan ekonomi sehingga ekonomi akan berangsur pulih. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan personal menjadi isu prioritas. Oleh karena itu, kebijakan menjaga wilayah melalui *lockdown*, kontrol perbatasan yang ketat dan optimalisasi teknologi menjadi pilihan agar mereka bisa melindungi orang-orang yang ada di dalam wilayahnya (4) Berhati-hati. Budaya yang dilakukan oleh Finlandia untuk selalu menyimpan barang untuk berjaga menghadapi situasi di masa depan yang tidak diketahui ternyata menolong mereka dalam masa krisis. Finlandia tidak terlalu risau ketika stok barang di pasaran langka. Kebiasaan ini tidak pernah berubah karena pemimpinnya melihat bahwa dengan memiliki persediaan mereka akan selalu siap ketika situasi yang tidak diharapkan terjadi. (5) Empati dalam berkomunikasi. Dalam menyampaikan pesan di platform media sosial, baik yang dilakukan sendiri atau berkolaborasi dengan orang lain, mereka menunjukkan perasaan empati atas situasi yang dihadapi rakyatnya. Para pemimpin ini tidak menggunakan mimbar dan berada di ruangan khusus konferensi pers dan lebih memilih menggunakan media sosial yang tidak terlalu formal sehingga rakyat bisa menerima pesan dan mampu menyakinkan rakyat bahwa situasi krisis COVID-19 akan bisa diatasi secara bersama.

Daftar Pustaka

- Amanda Taub, 18 Mei 2020, *Why Are Women-Led Nations Doing Better With COVID-19* (<https://www.nytimes.com/2020/05/15/world/coronavirus-women-leaders.html>/Anderson, Christina and Libell, Henrik Pryser. 5 April 2020. Finland, 'Prepper Nation of the Nordics,' Isn't Worried About Masks Diakses dari <https://www.nytimes.com/2020/04/05/world/europe/coronavirus-finland-masks.html>
- Audrey Wilson, 2 April 2020, The Countries That Are Succeeding at Flattening the Curve. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/2020/04/02/countries-succeeding-flattening-curve-coronavirus-testing-quarantine/>
- Berger, Miriam, Shammas, Brittany, Berman, Mark, Wagner, John, Bucker, Candace, Brice-Saddler, Michael, Itkowitz, Colby, Knowles, Hannah. (23 Mei 2020) Coronavirus may still be spreading uncontrolled in 24 states, study suggests. Washington post. diakses dari <https://www.washingtonpost.com/nation/2020/05/22/coronavirus-update-us/>
- Coronavirus (COVID-19), 2020. Diakses dari (<https://news.google.com/COVID-19/map?hl=en-IDdangl=IDdanceid=ID:en>)
- Corona virus pandemic, 2020. Diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>).
- Dewi, Elizabeth. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Parahiyangan Center For Global Studies. Bandung. 2020. Hal 85-88
- Hadiwinata, Bob Sugeng. Studi dan teori Hubungan Internasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2017.
- Hanisch, C. (1969). The personal is political.
- Heywood, Andrew. Global Politics. Mac Millan. New York. 2011
- Human rights and health, 29 December 2017. Diakses dari (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>).
- Kauranen, Anne 20 maret 2020, Finnish health boss questions WHO coronavirus testing advice Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-finland-who/finnish-health-boss-questions-who-coronavirus-testing-advice-idUSKBN2170ZB>
- Kumlin, S. (2002). *The personal and the political: how personal welfare state experiences affect political trust and ideology*. Department of Political Science Statsvetenskapliga institutionen.
- Negara-negara yang Sukses Bendung Serangan Virus Corona, 16 April 2020. CNNIndonesia diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200416134249-113-494162/negara-negara-yang-sukses-bendung-serangan-virus-corona>

- Wittenberg-Cox, Avivah , 13 april 2020. What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders Forbes diakses dari <https://www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/04/13/what-do-countries-with-the-best-coronavirus-reponses-have-in-common-women-leaders/#72f6c41c3dec>.
- Wen-Yee Lee, Elizabeth Mac Cauley, Mark Abadi, 5 Juni 2020. Taiwan used police surveillance, government tracking, and \$33,000 fines to contain its coronavirus outbreak. Diakses dari <https://www.businessinsider.com/taiwan-coronavirus-surveillance-masks-china-2020-6?r=US&IR=T>
- 29 Januari 2020. Finland confirms its first coronavirus case. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-health-finland/finland-confirms-its-first-coronavirus-case-idUSKBN1ZS27O>
- 16 April 2020. COVID-19 Success Stories: How Taiwan Curbed the Spread of the Virus Diakses dari <https://www.leadersleague.com/en/news/here-s-how-taiwan-succeeded-in-containing-COVID-19>
- 22 April 2020, Finland's coronavirus cases top 4,100 Diakses dari <https://tass.com/world/1148257>
- 28 April 2020. Are female leaders more successful at managing the coronavirus crisis? Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-be-more-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis>

**SUB CHAPTER II:
DINAMIKA ISU GENDER DALAM
RANAH SOSIAL-EKONOMI**

4. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Oleh:
Novita Puspasari

4.1 Latar Belakang

Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development/LED*) merupakan proses yang melibatkan peran pemerintah lokal dan organisasi masyarakat untuk merangsang, mendorong dan mengelola aktivitas ekonomi yang bertujuan penciptaan lapangan pekerjaan (Blakely dan Bradshaw, 2002). LED juga merupakan *platform* yang memberikan kesempatan yang sama, baik untuk perempuan dan laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas bernilai tambah ekonomi. Namun, ketimpangan gender menghambat partisipasi perempuan yang setara dan signifikan dalam proses pengembangan ekonomi lokal ini. *International Labour Organization* (ILO, 2010) mengidentifikasi beberapa hambatan terkait partisipasi perempuan dalam proses pengembangan ekonomi lokal. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah; kurangnya representasi perempuan dalam badan-badan pengambil keputusan, kesempatan pendidikan yang lebih sedikit untuk perempuan, akses yang lebih sedikit terhadap informasi, akses yang terbatas pada jabatan dan posisi tertentu. Hal lain yang digarisbawahi oleh ILO (2010) adalah kesempatan kerja di level lokal yang terbatas bagi perempuan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan perempuan menjadi “*brain drain*”, melakukan migrasi yang berbahaya yang melibatkan praktik-praktik perdagangan perempuan dan pelanggaran hukum lainnya (Vyas-Doorgapersad, 2017).

Sementara itu, United Nations (UN, 2016) memiliki *New Urban Agenda* bertajuk “*leaving no one behind*” yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2030. Lokalisasi dalam bentuk pengembangan ekonomi lokal, menurut UN, akan membuat pendistribusian kemajuan menjadi lebih merata. LED memberikan ruang bagi pemerintah lokal, sektor profit maupun non-profit dan komunitas lokal untuk bekerja sama meningkatkan perekonomian lokal. Fokus LED adalah pada peningkatan kompetisi dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif. Agar efektif, LED perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (*strength, weaknesses, opportunity, threat/SWOT*) yang ada di komunitas dan kemudian merancang strategi yang disetujui bersama. Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh UN, didapatkan hasil bahwa ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki telah menjadi kelemahan sekaligus ancaman di komunitas. Untuk mengubah peran agar

lebih setara sehingga menjadi kekuatan di komunitas, maka perlu dilakukan modifikasi pada strategi-strategi LED yang mengarustumkan gender sehingga benar terjadi tidak ada seorang pun tertinggal (*no one left behind*) dalam pencapaian *sustainable development goals*.

Tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian; bagian pertama adalah latar belakang, bagian kedua merupakan konsep dasar gender dan pengembangan ekonomi lokal, bagian ketiga membahas strategi-strategi pengarusutamaan gender dalam pengembangan ekonomi lokal dan bagian keempat adalah penutup.

4.2 Konsep Gender dan Pengembangan Ekonomi Lokal

4.2.1 Konsep Utama Gender

Berbeda dari konsep “*sex*” yang mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang universal, gender mengacu pada atribut sosial, hubungan dan peluang yang terkait antara perempuan dan laki-laki (ILO, 2010). Atribut, hubungan, dan peluang ini dikonstruksi dan dipelajari secara sosial dalam proses sosialisasi. Ketiganya dapat berbeda dalam konteks ruang dan waktu, antara masyarakat dan budaya. Oleh karena itu, ketiganya bersifat kontekstual dan dapat dimodifikasi. Gender dikonstruksikan oleh masyarakat atau budaya dan dipersepsikan sebagai peran, perilaku dan identitas personal yang “tepat” bagi perempuan dan laki-laki. Karakteristik dan peranan gender mempengaruhi relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dalam semua level dan dapat mengakibatkan ketimpangan dalam kesempatan dan outcome dalam berbagai kelompok. Peranan gender pada perempuan juga seringkali diasosiasikan sebagai feminitas, dan laki-laki dengan maskulinitas. Pada beberapa kelompok masyarakat, maskulinitas seringkali dinilai lebih tinggi (World Bank, 2010).

Praktik ketimpangan gender masih sering terjadi di berbagai kelompok masyarakat, maka agenda kesetaraan gender menjadi utama. Kesetaraan gender tidak berarti perempuan dan laki-laki harus menjadi sama, tetapi hal itu berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama dan peluang yang sama di semua bidang kehidupan. Konsep kesetaraan adalah bagaimana perempuan dan laki-laki dapat menjadi mitra yang setara di rumah, komunitas, dan masyarakat.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi atau proses yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender (ILO, 2010). Ini berarti, di satu sisi, ada kebijakan, program, dan struktur kelembagaan untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang ada dan untuk menjaga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di sisi lain, ini berarti bahwa langkah-langkah untuk mengatasi kebutuhan dan prioritas khusus perempuan dan laki-laki, diadopsi secara terpisah.

Menurut ILO (2010), pengarusutamaan bukan sekedar menambahkan komponen perempuan atau komponen kesetaraan gender ke dalam kegiatan yang ada. Pengarusutamaan gender lebih dari penambahan kuantitas partisipasi perempuan, sebagai tambahan, pengarusutamaan gender berarti melibatkan pengalaman, pengetahuan dan minat baik perempuan maupun laki-laki ke dalam agenda pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah transformasi struktur sosial dan kelembagaan yang tidak setara menjadi struktur yang sama dan adil bagi laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki dan perempuan dapat saling memengaruhi, berpartisipasi dan mendapat manfaat dari proses pembangunan.

4.2.2 Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut *United Cities and Local Government Asia-Pacific* (UCLG-ASPAC, 2016), tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah untuk membangun kapasitas ekonomi area lokal untuk meningkatkan perekonomian di masa yang akan datang dan kualitas hidup untuk semua. LED dapat dilakukan melalui kolaborasi multi pihak, baik sektor public, privat, maupun sektor nonpemerintah lain yang bekerja secara kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih bagi pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Meskipun merupakan strategi ekonomi, LED secara simultan juga mengejar tujuan sosial pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial (ILO, 2010 dan World Bank, 2010). Elemen-elemen fundamental LED mencakup: fisibilitas, ketersediaan sumberdaya, kapasitas, transparansi menyeluruh dan pengaruh budaya. Jika dilihat, elemen-elemen fundamental ini cukup kompleks karena tidak hanya mencakup elemen ekonomi.

UCLG-ASPAC (2016) menyatakan bahwa pendekatan dalam pengembangan ekonomi lokal dapat mencakup; (1) pendekatan kemitraan public-privat yang berfungsi untuk mengukur perbandingan komparatif, (2) pendekatan usaha kecil yang berfungsi untuk inovasi, investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja, (3) pendekatan regional yang berfungsi untuk leveraging sumberdaya sekitar, (4) pendekatan sektor-klaster yang berfungsi untuk mendukung sektor-sektor yang menjanjikan dengan melibatkan dunia bisnis, institusi Pendidikan, organisasi nonprofit dan pemerintah. Pendekatan-pendekatan ini dapat dilakukan jika pra kondisi seperti tingkat Pendidikan dan kesetaraan gender dapat terpenuhi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, pengarusutamaan gender dapat berarti bahwa terdapat kesetaraan partisipasi dalam pemerintahan, dan akses ke kesempatan kerja yang layak dan kondisi kerja, sumber daya, dan layanan, tidak dipengaruhi secara negatif oleh fakta bahwa seseorang adalah pria atau wanita. Pengarusutamaan gender yang berhasil dalam proses pembangunan ekonomi lokal menghasilkan

perubahan mendasar dalam hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

4.3 Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

LED memiliki premis untuk mempromosikan dan mempercepat pembangunan ekonomi, dan menciptakan peluang ekonomi sebagai dasar bagi lebih banyak peluang kerja dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam konteks lokal. Di berbagai negara Eropa, sebuah dokumen berjudul '*Gender Mainstreaming and Female Participation within Local Development Process: Best Practices Catalogue for International Project Women in Development*' yang dikeluarkan oleh European Union (2007) menekankan pada peran sentral perempuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal, bukan hanya atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan reproduksi sosialnya, tetapi juga karena keberadaan perempuan memberikan alternative pendekatan dalam pembangunan daerah.

Di berbagai negara Afrika, LED bertujuan untuk memoderasi tantangan urbanisasi yang cepat dan pengembangan wilayah perkotaan, sehingga pembangunan wilayah lokal perlu dilakukan dengan agenda transformasi terhadap, kemiskinan, ketimpangan, dan produktifitas (Wekwete, 2014 dan Vyas-Doorgapersad, 2017). Di Asia, khususnya Indonesia, beberapa program yang diinisiasi oleh organisasi nonpemerintah yang bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah masih terus berusaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

Menurut ILO (2010), dalam prosesnya, LED membutuhkan enam tahapan yang terdiri dari; aktivitas rintisan dan pembangunan konsensus, pemetaan institusional dan diagnosis territorial, promosi di forum lokal, perancangan strategi dan rencana aksi, pengimplementasian intervensi LED, dan *feedback*, monitoring, evaluasi untuk keberlanjutan LED. Keenam fase ini bersifat sekuensial dan menyerupai siklus. Strategi pengarusutamaan gender dalam pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui keenam tahap ini. Berikut tahapan dalam proses LED:



Gambar 1. Proses Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber: ILO, 2010

4.4 Tahap Perencanaan

Pengarusutamaan gender dalam LED dimulai dari aktivitas rintisan di awal dan pembangunan konsensus. Dalam tahap awal ini, harus benar-benar dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk secara langsung terlibat dalam kelompok inti pemangku kepentingan yang akan memimpin proses LED. Selain itu, baik perempuan dan laki-laki juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan kebutuhan dan opini mereka terkait pembangunan daerah mereka. Namun, di beberapa wilayah yang perempuan seringkali menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi, fasilitator LED dapat mencoba untuk berdiskusi dengan perwakilan perempuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dan membuat kesepakatan dengan mereka. Hasil diskusi dapat dibuat pemetaan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat hambatan-hambatan tersebut untuk mendapat gambaran yang lebih jelas yang berguna bagi pembuatan strategi mengatasi ketimpangan gender selanjutnya.

Selanjutnya di tahap perencanaan dapat dilakukan diagnosis dan pemetaan. Data yang diperoleh dalam tahap penilaian awal harus dipisahkan antara perempuan dan laki-laki untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada tingkat gaji/upah, tingkat pendidikan, akses ke sumberdaya dan sebagainya (data yang bersifat kuantitatif). Kemudian dapat dilakukan analisis atas kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat

local untuk melihat apakah lingkungannya sudah mendukung kesetaraan gender.

Selain data-data kuantitatif tersebut, dapat juga dianalisis data kualitatif yang berupa pemahaman mendalam mengenai isu-isu apa saja yang menjadi perhatian khusus perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut, harapan terhadap pengembangan ekonomi wilayahnya, peranan masing-masing di dalam ekonomi lokal dan sebagainya. Data kuantitatif dan kualitatif ini akan sangat bermanfaat dalam penentuan strategi LED yang berbasis gender.

4.5 Tahap Perumusan Strategi LED

Strategi-strategi LED harus berkontribusi dalam meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan yang lebih baik, mendukung peran perempuan dalam usaha mikro dan kecil serta dalam otoritas pengambil kebijakan. Setiap strategi harus memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga dapat diukur keberhasilan dan keberlanjutannya. Strategi-strategi tersebut juga harus dikembangkan dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia dan keuangan yang tersedia di level lokal.

Dalam mengalokasikan sumberdaya, informasi yang diperoleh lewat analisis dan pemetaan gender sebelumnya akan digunakan untuk meyakinkan apakah kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda dan spesifik dapat difasilitasi dalam proses penganggaran (biasanya disebut penganggaran berbasis gender). Penganggaran berbasis gender dimulai dari pemahaman pengambil kebijakan terhadap isu gender dan anggaran daerah. Menurut ILO (2010), tahap awal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat analisis komparatif mengenai dampak anggaran saat ini terhadap perempuan dan laki-laki dan bagaimana perubahan dalam struktur anggaran akan meningkatkan keterlibatan perempuan dan laki-laki, mengurangi ketimpangan, dan pada gilirannya akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

4.6 Tahap Implementasi

Mitra kunci dalam LED adalah pemerintah daerah. Dalam mengimplementasikan strategi LED diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, institusi publik dan swasta serta organisasi masyarakat sipil. Beberapa area yang dapat menjadi objek implementasi adalah: pengembangan usaha, pengembangan rantai nilai dan pengembangan infrastruktur.

Di area pengembangan usaha, perempuan merupakan penggerak utama sektor mikro dan kecil, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Perempuan yang memiliki dan mengelola aktivitas ekonomi informal tersebut mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda daripada jika laki-laki yang melakukannya. Program-program LED sebaiknya

mendukung perempuan untuk memiliki akses sumber daya yang sama (misalnya kredit bank), dan pengembangan dan peningkatan keterampilan. Jika dirasa belum cukup, maka peranan layanan-layanan pengembangan usaha, asosiasi usaha (seperti Koperasi Wanita) dapat dimaksimalkan untuk mendukung perempuan agar lebih percaya diri dalam mengambil risiko bisnis atau berinovasi dengan usahanya.

Di area pengembangan rantai nilai, perempuan juga harus terlibat pada rantai nilai dari hulu ke hilir. Rantai nilai menggambarkan urutan input yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah produk, dari mulai bahan baku, modal, tenaga kerja, teknologi, informasi dan lain sebagainya. Analisis rantai nilai mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam proses tersebut hingga tercipta harga kesepakatan. Perempuan perlu terlibat pada rantai nilai agar menguasai area-area mana yang bernilai tambah tinggi dan tidak terjebak pada aktivitas bernilai tambah ekonomi kecil.

Di area pengembangan infrastruktur, pemerintah lokal memegang peranan penting. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh sulitnya akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan aktivitas produktif. Komunitas dan pemerintah lokal perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat mengakses infrastruktur fisik dan nonfisik yang sama. Peningkatan akses terhadap infrastruktur ini merupakan prasyarat kondisi LED.

4.7 Penutup

Pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*) merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang dan memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan utama LED adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi bagi warga di wilayah tersebut. LED dapat berhasil diimplementasikan jika tercapai beberapa prakondisi, salah satunya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki di masyarakat.

Untuk mendukung tercapainya kesetaraan, maka perlu dilakukan berbagai strategi pengarusutamaan gender dalam LED, baik dari tahap perencanaan, perumusan strategi, sampai dengan implementasi. Melalui pengarusutamaan gender di LED diharapkan agar perempuan dan laki-laki dapat memiliki kesempatan yang sama dalam membangun dan menerima manfaat dari pengembangan ekonomi lokal sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California, Sage Publications, Inc
- International Labour Organization. 2010. *Gender mainstreaming in local economic development strategies: a guide for LED Programme*. Bureau for Gender Equality. - Geneva
- The World Bank. 2010. *Gender and Development: An Evaluation of World Bank Support 2002-2008*. The World Bank Printing
- United Cities and Local Government Asia-Pacific. 2016. *Introduction to Local Economic Development*. LED Module
- United Nation. 2016. *Gender Mainstreaming in Economic Development*. Available at <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/oecdmainstgrowth.PDF>
- Vyas-Doorgapersad, Shikha. 2017. *Gender Mainstreaming In Local Economic Development Processes: A South African Perspective*. International Journal Of Economics and Finance Studies Vol 9, No 2. ISSN: 1309-8055 (Online)
- Wekwete, K. 2014. *Local Government and Local Economic Development in Southern Africa*. Available at <http://www.clgf.org.uk/userfiles/1/file/Resources/research-reports/Local-Economic-Development-in-Southern-Africa-March2014.pdf>.

5. KETIDAKSETARAAN GENDER PADA PUNCAK KEPEMIMPINAN PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Oleh:
Wita Ramadhanti

5.1 Latar Belakang

Ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) masih menjadi isu di era revolusi industri 4.0. Salah satu isu yang penting adalah masih adanya kesetaraan gender di tempat kerja. Perempuan umumnya dianggap masih belum mendapatkan kesempatan yang sama dibandingkan laki-laki di dunia kerja. Ketidaksetaraan gender ini selanjutnya melahirkan inklusi sosial bagi perempuan. Hal ini karena perempuan tidak hanya kesulitan mencari kerja, tetapi ketika bekerja akan digaji lebih rendah dibanding rekan kerja laki-lakinya. Meskipun saat ini angka partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan telah tinggi, perempuan masih di stigmakan tidak cocok untuk di promosikan sebagai puncak pimpinan di tempat kerja.

Kondisi stigma perempuan di tempat kerja tidak lepas dari pandangan apa yang benar dan tidak benar dalam kerangka pikir dominasi maskulinitas. Secara sosial, perempuan yang baik seharusnya lebih sibuk secara domestik dalam urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak dan bukan bekerja pada ranah publik. Jika secara publik bekerja, maka dianggap bukan sebagai penghasil nafkah utama. Pada sisi pemberi kerja, mempekerjakan perempuan dianggap kurang menguntungkan. Perempuan dibebani pekerjaan rumah tangga sehingga tidak bersedia lembur, dan jika harus dinas luar kota harus mencari pengganti pengurus keluarganya di rumah. Stigma ini yang selanjutnya dianggap tidak efektif. Atas segala ketidak efektifan ini, maka perempuan umumnya akan dibayar lebih rendah dari pada laki-laki (Hirsch, 2010).

Diskriminasi perempuan umumnya bersamaan dengan adanya inklusi sosial lain. Inklusi sosial lain misalnya adalah tingkat pendidikan, ras, kasta, status sosial. Maka banyak orang yang menyangka bahwa permasalahan di tempat kerja ini banyak terjadi pada perempuan dalam kondisi ekonomi lemah dan kurang berpendidikan. Namun demikian, ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi pun kesulitan untuk mencapai puncak jabatan tertinggi dalam pekerjaan.

Pada kondisi dunia yang kapitalis, perusahaan-perusahaan besar merupakan pusat utama dari perekonomian. Perusahaan-perusahaan ini akan mendapatkan dana dari publik dengan menjual sahamnya di bursa efek, sehingga disebut sebagai perusahaan publik. Bursa efek merupakan pusat kerajaan bagi kapitalisme, hampir semua negara di

dunia berlomba-lomba membuka bursa efek dan mempromosikan agar setiap orang dari seluruh dunia menanamkan modal ke negaranya melalui institusi ini. Bursa efek, pengawas pasar modal (contohnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia), dan segala atribut dan sistemnya menjamin transparansi, akuntabilitas dan Tata Kelola yang terbaik untuk perusahaan publiknya. Transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik ini akan tercermin dalam pengungkapan manajemen dana laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan produk dari proses akuntansi perusahaan. Laporan keuangan ini akan diuji kualitasnya melalui proses audit oleh akuntan publik untuk menilai kewajarannya. Penting untuk menganalisis laporan keuangan publik ini untuk mengungkapkan ketidaksetaraan gender (*gender gap*) sekaligus ketidaksetaraan gender pada penggajian (*gender pay gap*).

Beberapa penelitian telah menguji secara kuantitatif tentang gender gap pada eksekutif puncak perusahaan seperti penelitian Rahayu dan Ramadhanti (2017), Amando *et al.* (2018), Baéz *et al.* (2018), serta Rahayu *et al.* (2019). Selama ini penelitian yang menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif terpercaya dan obyektif kala berbicara tentang data. Namun demikian, menurut Hardies dan Khalifa (2018) sebagian besar penelitian akuntansi dengan data sekunder ini hanya menganalisis gender sebagai variabel *dummy*, belum memberikan suara atas kesetaraan gender dan atau menganalisis gender sebagai prinsip dan proses organisasi. Gender sebagai *dummy* berarti hanya melihat apakah jenis kelamin laki-laki dan perempuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap suatu kejadian, bukan sebagai suatu penjelasan apa yang terjadi antara hubungan dinamis maskulin dan feminin tersebut.

Penelitian yang telah menganalisis gender diskriminasi pada eksekutif puncak contohnya adalah Corrigan dan Mills (2017) dengan Teori Feminis dan *Actor-Network Theory*. Namun demikian, penelitian ini sifatnya khusus studi kasus pada suatu perusahaan dan belum dapat digeneralisasi.

Maka artikel ini akan melihat kepemimpinan dan penggajian perempuan dalam manajemen puncak perusahaan publik di Indonesia. Hal ini untuk melihat apakah perusahaan yang diasumsikan bertata kelola paling baik telah benar-benar lepas dari stigma diskriminasi gender. Hal ini juga melihat apakah perempuan ketika mampu mencapai kesetaraan status sosial dan melepaskan atribut inklusi sosial lain seperti tingkat pendidikan akan mendapat penghargaan yang sama dengan rekan laki-lakinya.

Penelitian ini akan mencoba menggabungkan analisis kuantitatif dengan kualitatif agar kondisi ketidaksetaraan gender dapat

akurat secara angka namun juga dapat dimaknai lebih dalam. Penelitian ini secara kuantitatif menganalisis gender sebagai *dummy* sekaligus secara kualitatif memberi kritik atas hasil analisis kuantitatif tersebut. Analisis kualitatif yang akan dilakukan adalah dengan metode kritis dengan teori feminis.

5.2 Teori dan Hipotesis

5.2.1 Teori Feminis

Hewitson (2003) menjelaskan bahwa pada awalnya dikotomi perempuan dan laki-laki adalah adanya perbedaan biologi jenis kelamin, tetapi selanjutnya berkembang menjadi sosiologi seseorang sebagai identitas sosial maskulin atau feminin. Hal inilah yang akan dikritisi oleh teori feminis.

Secara umum pandangan ekonomi positif yang banyak dianut adalah ekonomi neoklasik. Menurut Pujol (2003), ekonomi neoklasik mengkarakteristikan perempuan dengan 5 kriteria:

- 1) Semua perempuan menikah dan akan memiliki anak;
- 2) Semua perempuan harus bergantung secara ekonomi kepada keluarga laki-laki baik suami maupun ayah;
- 3) Perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga, dan kapasitas reproduksinya memiliki spesialisasi terhadap fungsi tersebut;
- 4) Perempuan tidak produktif sebagai tenaga kerja ekonomi industrial;
- 5) Perempuan tidak rasional, tidak cocok sebagai agen ekonomi, dan tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat.

Stigma di atas yang membuat mayoritas pemberi kerja berpendapat bahwa mempekerjakan perempuan lebih merepotkan dari pada laki-laki sehingga layak diganjar dengan kesempatan promosi dan gaji yang lebih rendah (Hirsch, 2010).

Ada beberapa metafora untuk memahami permasalahan perempuan di tempat kerja. Metafora sangat penting karena dapat membantu pemahaman atas suatu kekuatan yang membentuk persepsi sosial serta dapat memanipulasi sikap dan perilaku terhadap orang lain (Carly dan Eagly, 2016). Beberapa metafora tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Glass ceiling* atau atap kaca. Metafora bagi ketidaksetaraan gender dalam penggajian dan promosi *pay gap* dan promosi terutama untuk mencapai posisi tertinggi dalam perusahaan (Carly dan Eagly, 2016). Perempuan ini terlihat dari puncak pimpinan, tetapi untuk bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan puncak harus memecahkan atap kaca (Dowling, 2017)

- 2) *Glass cliff* atau tebing kaca. Darouei dan Pluut (2018) hal ini adalah suatu kondisi dengan perempuan berani menerima tantangan sebagai pimpinan dalam kondisi yang berisiko, dengan biasanya perempuan lebih penghindar risiko dari laki-laki, karena merupakan satu-satunya peluang untuk mendapatkan promosi. Kondisi berisiko misalnya ketika perusahaan akan mengalami perubahan besar atau perusahaan sedang dalam kondisi merugi.
- 3) *Glass slipper* atau sepatu kaca (Simpson dan Kumra, 2016) ketika sindrome cinderela ketika pangeran mengenali cinderela dari ketepatan ukuran sepatunya (sepatu disebut *slipper*). Hal ini dengan perempuan harus menyesuaikan identitas pekerjaan dengan identitas sosial gendernya.
- 4) *Sticky floor* atau lantai yang lengket. Metafora kesulitan perempuan dalam memulai awal karirnya yang seakan lengket di deretan pekerjaan bergaji rendah dan tidak dapat naik pangkat (Xiu dan Gunderson, 2014)
- 5) *Labyrinth* atau labirin adalah suatu konstruksi jalan dan tantangan karir yang dibuat oleh para eksekutif pria, tetapi kesempatan kontemporer bagi perempuan untuk menjadi pemimpin yang meskipun sulit namun bukan berarti tidak mungkin (Carly dan Eagly, 2016).
- 6) *Swimming upstream* atau berenang ke hulu ketika seorang perempuan mampu meningkatkan pendidikan dan kapabilitasnya untuk dapat setara dalam karir dengan laki-laki (Blau dan Kahn, 1997; Fortin *et al.*, 2017)

Adanya stigma serta metofora perempuan di tempat kerja yang umumnya buruk inilah yang akan dikritisi dan perlu diemansipasi menurut teori feminis. Teori kritis feminis ekonomis berusaha memajukan perempuan dengan jargon “personal adalah politik dan politik adalah ekonomi” (Pujol, 2003). Feminis ekonomi juga mengamati bagaimana kehidupan ekonomi dibentuk oleh gender dan mengungkapkan kebutaan gender (*gender blindness*) dalam analisis ekonomi saat ini dan memperdebatkan isu yang selama ini diabaikan (Peter, 2003). Teori kritis feminis ekonomis pada akhirnya melakukan analisis gender sosial dengan dasar bahwa dikotomi bukanlah jenis kelamin pria dan wanita, tetapi feminis yang peduli dan terhubung serta maskulin yang terpisah dan memiliki otonomi (Hewitson, 2003).

5.2.2 Agensi Teori dan Skema Kompensasi

Pasar modal dibangun dalam suatu kerangka teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) yang mendukung adanya pemisahan kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan. Pada teori agensi, pinsipal atau pemegang saham memberikan mandat kepada manajer sebagai agen untuk mengelola perusahaan secara optimal. Agar

agen bekerja dengan baik, maka prinsipal akan memberikan skema kompensasi (remunerasi berbasis kinerja) kepada manajer (Watts dan Zimmerman, 1986).

Salah satu mitos feminisme adalah adanya perbedaan penggajian antara laki-laki dan perempuan (Mahdawi, 2019). Hirsch (2010) menyatakan bahwa pemberi kerja memberikan gaji berbeda pada pegawai pria dengan wanita berdasarkan stigmanya. Penelitian Baéz *et al.* (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan gaji antara eksekutif laki-laki dan perempuan. Amando *et al.* (2018) menyatakan bahwa eksekutif laki-laki dibayar lebih tinggi dari perempuan. Rahayu *et al.* (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan direktur perempuan akan membayar remunerasi lebih besar dibandingkan perusahaan yang hanya terdiri atas direksi laki-laki. Indonesia menggunakan sistem “*double boards*”, suatu sistem dengan pimpinan puncak terdiri atas direksi dan komisaris. Berdasarkan hal ini, maka 3 hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Perusahaan yang memiliki direktur perempuan memiliki besaran remunerasi berbeda dari pada perusahaan yang seluruh direksinya laki-laki
- H2 : Perusahaan memiliki komisaris perempuan membayar kompensasi berbeda dari perusahaan yang tidak memiliki komisaris perempuan
- H3 : Perusahaan yang memiliki komisaris dan direksi perempuan membayar remunerasi berbeda dari pada perusahaan yang seluruh manajemen puncaknya laki-laki.

5.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix method*. Penelitian ini akan menggunakan analisis kuantitatif terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan analisis kualitatif .

Obyek penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2018. Metode penyampelan yang digunakan adalah *purposive*, dengan kriteria memiliki data proporsi direksi perempuan, komisaris perempuan, serta kompensasi eksekutif selama 2011-2018.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan uji beda statistik. Variabel yang diuji beda adalah variabel LnK atau logaritma natural kompensasi direksi dan komisaris.

Variable nominal:

- 1) DP = Jika perusahaan memiliki direksi perempuan maka *dummy* yang digunakan “1”, bila tidak maka “0”.
- 2) KP = Jika perusahaan memiliki komisaris perempuan maka *dummy* yang digunakan “1”, bila tidak maka “0”.

3) DKP = Jika perusahaan memiliki direksi dan juga komisaris perempuan maka *dummy* yang digunakan “1”, bila tidak maka “0”.

Analisis kualitatif dilakukan dengan metodologi kritis. Teori yang digunakan adalah Teori Feminis.

5.4 Hasil dan Pembahasan

5.4.1 Analisis Kuantitatif

Terdapat 119 perusahaan publik yang mengungkapkan data lengkap dalam laporan keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2011-2018. Berdasarkan hal tersebut total data yang dapat diolah secara statistik adalah 952 data panel.

Tabel 5.1
Statistik Deskriptif Remunerasi

		N	%	Rata-rata	Deviasi Standar	KS	Sig.
Direksi Perempuan	Tidak Ada	616	65	22,8944	1,37582	0,038	0,032
	Ada	336	35	23,5983	1,48574	0,054	0,021
	Total	952	100				
Komisaris Perempuan	Tidak Ada	712	75	23,1368	1,44608	0,034	0,047
	Ada	240	25	23,1606	1,48126	0,050	0,20*
	Total	952	100				
Direksi dan Komisaris Perempuan	Tidak Ada	843	89	23,0984	1,44287	0,033	0,034
	Ada	109	11	23,4867	1,50251	0,088	0,037
	Total	952	100				

* data berdistribusi normal jika Sig. > 0,05

Sumber: Data diolah

Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pada sampel 956 tahun perusahaan, terdapat 616 tidak memiliki direksi perempuan dibandingkan dengan 336 yang memiliki. Perbandingan sampel yang tidak memiliki komisaris perempuan 712 data dan yang memiliki sebanyak 240 data. Terdapat 11 perusahaan yang memiliki baik direksi maupun komisaris perempuan pada suatu tahun dibandingkan 89 yang tidak memiliki bersamaan. Seluruh kelompok yang memiliki eksekutif perempuan memiliki rata-rata logaritma natural kompensasi lebih besar dari pada yang hanya terdiri atas pimpinan laki-laki saja. Semua data tidak berdistribusi normal kecuali logaritma natural remunerasi data perusahaan yang memiliki komposisi komisaris perempuan. Namun demikian sesuai dengan *central limit theory* karena

jumlah data lebih besar dari 30 ($n > 30$), maka pengujian dapat dilanjutkan secara parametrik.

Tabel 5.2
Hasil Uji Beda Statistik

Hipotesis	Uji F	Sig. Uji F	Uji T	Sig. Uji T
H1	3,459	0,063*	-7,331	0,000**
H2	2,198	0,139*	-0,219	0,827
H3	1,347	0,246*	-2,631	0,009**
*Asumsi varian setara jika nilai signifikansi uji F > 0,05				
**Ada perbedaan signifikan antar kelompok jika nilai signifikansi uji t < 0,05				

Sumber: Data diolah

Tabel 5.2 menunjukkan hasil uji beda statistik perusahaan dengan eksekutif perempuan dibandingkan dengan perusahaan yang tanpa eksekutif perempuan. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Pertama, hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai uji F adalah 3,459 (signifikansi $0,063 > 0,05$) sehingga diasumsikan varians kedua kelompok yang dibandingkan setara. Maka hasil uji T adalah sebesar -7,331 (signifikansi $0,000 < 0,05$). Hal ini berarti **hipotesis 1** yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki direktur perempuan memiliki total remunerasi berbeda dari pada perusahaan yang seluruh direksinya laki-laki **diterima**. Namun demikian, rata-rata logaritma natural gaji perusahaan yang memiliki direksi perempuan 23,5983 lebih besar dari pada perusahaan yang hanya dipimpin oleh eksekutif laki-laki dengan rata-rata 22,8944.

Kedua, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai uji F adalah 2,198 (signifikansi $0,246 > 0,05$) sehingga diasumsikan varians kedua kelompok yang dibandingkan setara. Maka hasil uji T adalah sebesar -0,219 (signifikansi $0,827 > 0,05$). Hal ini berarti **hipotesis 2** yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris perempuan memiliki total remunerasi berbeda dari pada perusahaan yang seluruh direksinya laki-laki **ditolak**. Meskipun ditolak, tetapi statistik deskriptif menunjukkan rata-rata logaritma natural gaji perusahaan yang memiliki direksi perempuan 23,1606 lebih besar dari pada perusahaan yang hanya dipimpin oleh eksekutif laki-laki dengan rata-rata 23,1368.

Ketiga, hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai uji F adalah 1,347 (signifikansi $0,139 > 0,05$) sehingga diasumsikan varians kedua kelompok yang dibandingkan setara. Maka hasil uji T adalah sebesar -2,631 (signifikansi $0,009 < 0,05$). Hal ini berarti **hipotesis 3**

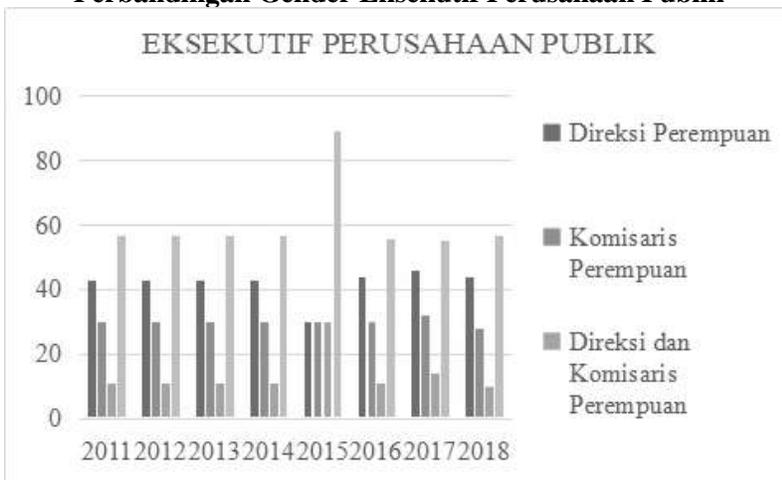
yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki direksi dan komisaris perempuan memiliki total remunerasi berbeda dari pada perusahaan yang seluruh eksekutifnya laki-laki **diterima**. Namun demikian, rata-rata logaritma natural gaji perusahaan yang memiliki direksi dan komisaris perempuan 23,4867 lebih besar dari pada perusahaan yang hanya dipimpin oleh eksekutif laki-laki dengan rata-rata 23,0984.

Hasil diterimanya hipotesis 1 dan 3 yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan eksekutif perempuan membayar gaji lebih besar dari pada yang hanya memiliki eksekutif laki-laki sesuai dengan penelitian Rahayu dan Ramadhanti (2017) serta Rahayu *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi perempuan dalam eksekutif puncak perusahaan, maka semakin besar kinerja perusahaan, yang pada akhirnya akan semakin besar pula remunerasi berbasis kinerja yang diterima oleh para eksekutif puncak secara keseluruhan sebagai tim. Kondisi ini sesuai dengan Burns (2017) bahwa perempuan sesungguhnya hebat di tempat kerja, tetapi masih saja diragukan kemampuannya.

5.4.2 Analisis Kualitatif

Gambar 5.1 menunjukkan perbandingan gender eksekutif perusahaan publik selama kurun waktu 2011-2018. Sebagian besar perusahaan sama sekali tidak memiliki eksekutif perempuan. Jika ada eksekutif perempuan maka umumnya sebagai direksi. Kebanyakan perusahaan sangat sedikit yang memiliki direksi dan komisaris perempuan dalam waktu yang sama, kecuali pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap dilihat dari besaran jumlah perusahaan yang memiliki eksekutif perempuan dan yang hanya laki-laki saja.

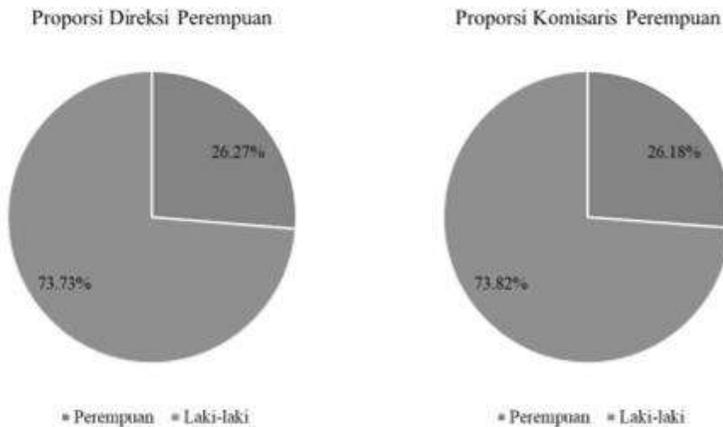
Gambar 5.1
Perbandingan Gender Eksekutif Perusahaan Publik



Sumber: Data Diolah

Gambar 5.2 menunjukkan proporsi direksi dan komisaris perempuan. Ketika suatu perusahaan memiliki eksekutif perempuan, ternyata proporsinya minoritas dibandingkan rekan laki-lakinya. Secara proporsi perusahaan yang memiliki direksi perempuan rata-rata proporsinya hanya 26,27% dari total jumlah dewan direksi. Jika perusahaan memiliki komisaris perempuan, maka proporsinya tidak lebih dari 26,18% dari keseluruhan jumlah dewan komisaris perusahaan.

Gambar 5.2
Proporsi Direksi dan Komisaris Perempuan



Sumber: Data diolah

Namun demikian angka ini berbeda dengan hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki direksi dan komisaris perempuan membayar gaji eksekutif lebih tinggi dari pada yang hanya terdiri atas laki-laki saja. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terjadi gender gap, tetapi tidak terjadi *gender pay gap*.

Melihat hasil ini menunjukkan bahwa terdapat metafora feminis dalam kepemimpinan perusahaan publik di Indonesia. Pertama adalah *glass ceiling* (Carly dan Eagly, 2016) dengan banyak perempuan masuk dalam angkatan kerja, tetapi pimpinan puncak perusahaan masih didominasi oleh laki-laki. Kedua, adanya fenomena *labirin* (Carly dan Eagly, 2016) yang betapapun sulitnya, bukan berarti tidak mungkin perempuan menjadi pimpinan puncak perusahaan publik. Ketiga, adanya fenomena *swimming upstream* (Blau dan Kahn, 1997; Fortin *et al.*, 2017), ketika perempuan mampu untuk meningkatkan pendidikan, kompetensi, dan berkinerja baik, maka dapat menjadi pimpinan puncak perusahaan serta mendapatkan fasilitas gaji yang setara bahkan lebih besar dari laki-laki.

Ketika perempuan ternyata mampu mendobrak kondisi, tidak hanya mampu setara dalam hal penggajian, tetapi mampu mendapat lebih tinggi dari pria. Berdasarkan kritik teori feminis ekonomi perlu dieksplorasi lebih lanjut identitas gender anggota dewan direksi dan komisari dalam perusahaan. Per eksekutif tidak hanya dilihat sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kepribadian maskulin dan feminis. Perlu eksplorasi lebih dalam karena bisa jadi perempuan yang berada dalam dewan eksekutif ternyata memiliki sifat yang maskulin, sehingga cocok dengan pekerjaannya.

Berdasarkan hal penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dan laporan tahunan belum cukup transparan dalam menyampaikan kesetaraan gender. Perusahaan dapat mengurangi ketidaksetaraan gender dengan memberi kuota bagi eksekutif perempuan serta mengungkapkan pemberlakuan standar penggajian yang sama secara gender, baik bagi eksekutif maupun pegawai biasa. Pengungkapan ini perlu dilaporkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Hal ini karena tidak banyak perusahaan yang mengungkapkan *gender pay gap* dengan baik, dari sekitar 500 lebih perusahaan publik 2011-2018 hanya 119 yang memiliki data lengkap.

Perlu pengamatan mendalam juga untuk melihat gender organisasi, jauh lebih dalam dari pada hanya dengan melihat ada tidaknya eksekutif perempuan. Perlu ada kewajiban dari otoritas bursa pengungkapan wajib dalam laporan keuangan tentang usaha pengurangan diskriminasi gender, serta keseimbangan karakteristik maskulin-feminin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan analisis teori feminis ekonomi (Hewitson, 2003) dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan belum sadar gender. Perusahaan ternyata belum transparan menunjukkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan penggajian eksekutifnya. Perusahaan juga belum bertata kelola yang baik dalam hal kesetaraan gender mengingat pimpinan puncak masih didominasi bahkan hampir keseluruhan diisi oleh laki-laki. Apabila perusahaan masih sangat dominan dalam dikotomi pria-wanita, maka bergerak dalam pemahaman maskulin dan feminin mungkin masih cukup berat dan penyetaraannya sangat berat. Praktik ekonomi masih didominasi maskulinitas dan aktor yang mendominasinya adalah laki-laki.

5.5 Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis kuantitatif ada 3 hal, Pertama, perusahaan yang memiliki direktur perempuan memiliki total remunerasi lebih tinggi dari pada perusahaan yang seluruh direksinya laki-laki. Kedua, perusahaan memiliki komisaris perempuan

membayar kompensasi tidak berbeda dari perusahaan yang tidak memiliki komisaris perempuan. Ketiga, perusahaan yang memiliki komisaris dan direksi perempuan membayar remunerasi lebih tinggi dari pada perusahaan yang seluruh manajemen puncaknya laki-laki.

Berdasarkan analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa memang terdapat diskriminasi gender pada perusahaan publik di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, sebagian besar manajemen didominasi oleh laki-laki, Jika ada direksi atau komisaris perempuan maka jumlahnya hanyalah minoritas. Namun demikian ketika perusahaan yang memiliki direksi dan komisaris perempuan, remunerasi yang dibayarkan juga dibayarkan juga relatif lebih tinggi dari perusahaan yang eksekutifnya secara keseluruhan laki-laki. Hal ini berarti terjadi *gender pay gap* pada gaji eksekutif perusahaan publik di Indonesia tetapi dalam perkembangan yang baik. Berdasarkan feminis teori kondisi perusahaan masih maskulin dengan dominasi aktor laki-laki. Namun demikian, ketika perempuan diberi kesempatan memimpin, maka kinerja perusahaan juga mendapat inovasi sehingga kompensasi eksekutif secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang hanya dipimpin oleh laki-laki saja. Hal ini berarti perempuan dapat memecahkan *glass ceiling* dengan melakukan *swimming upstream*.

5.5.2. Keterbatasan dan Saran

Ada banyak perusahaan publik di Indonesia, tetapi kebanyakan tidak melaporkan gender eksekutifnya dan tidak mengungkapkan remunerasi eksekutifnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sebagai sumber utama analisis. Penelitian selanjutnya perlu mencari sumber data primer untuk analisis, misalnya langsung melakukan wawancara pada eksekutif perusahaan publik.

Penelitian ini hanya memandang perbedaan penggajian dari sisi diskriminasi akibat perbedaan ada tidaknya eksekutif puncak perempuan dalam suatu perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan membuktikan adanya diskriminasi penggajian dari sisi maskulin dan feminin sesuai teori feminis ekonomis.

Daftar Pustaka

- Amando, C. A. F., Santos, S. P. dan José., J. M. S. S. 2018. Measuring and decomposing the gender pay gap: A new frontier. *European Journal of Operational Research*, Volume 271, Issue 1, pp. 357-373. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.023>.
- Baéz, A. B., Baéz -García, A. J., Flores-Muñoz, F, Gutiérrez-Barroso. 2018. Gender diversity, corporate governance and firm behavior: The challenge of emotional management. *European Research on Management Economics* 24, 121-129.

- Blau, F. D. dan Kahn, Lawrence. 1997. Swimming Upstream: Trends in the Gender Wage Differential in the 1980s. *Journal of Labor Economics*, Vol. 15, No. 1, Part 1, (Jan., 1997), pp. 1-42. <http://www.jstor.org/stable/2535313>
- Burns, J. 2017. *The Results Are In: Women Are Great For Business, But Still Getting Pushed Out*. Cited from <https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2017/09/22/2016-proved-women-are-great-for-business-yet-still-being-pushed-out/#55afcd62188b> on September 22, 2017.
- Carli, L.L dan Eagly, A., 2016. Women face a labyrinth: an examination of metaphors for women leaders". *Gender in Management: An International Journal*, Vol. 31 Iss 8. <http://dx.doi.org/10.1108/GM-02-2015-0007>
- Corrigan, L.T dan Mills, A.J. 2017. Men on Board: Actor-Network Theory, Feminism, and Gendering the Past. *Insights and Research on the Study of Gender and Intersectionality in International Airline Cultures*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-545-020171009>
- Darouei, M. dan Pluut, H. 2018. The paradox of being on the glass cliff: why do women accept risky leadership positions?, *Career Development International*, Vol. 23 Issue: 4, pp.397-426. <https://doi.org/10.1108/CDI-01-2018-0024>
- Dowling, G. 2017. The glass ceiling: fact or a misguided metaphor?". *Annals in Social Responsibility*. <https://doi.org/10.1108/ASR-05-2017-0002>
- Fortin, N. M., Brian, B., dan Böhm, M. 2017. Top Earnings Inequality and the Gender Pay Gap: Canada, Sweden, and the United Kingdom *Labour Economics* <http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2017.05.010>
- Hardies, K. dan Khalifa, R. 2018. Gender is not “a dummy variable”: a discussion of current gender research in accounting. *Qualitative Research in Accounting dan Management*, <https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2017-0083>
- Hewitson, G. J. 2003. Domestic labor and gender identity: are all women carers? Dalam Barker, D. K. dan Kuiper, E. *Toward a Feminist Philosophy of Economics*. London, Routledge.
- Hirsch, B. 2010. Monopsonistic labour markets and the gender pay gap, theory and empirical evidence. Dalam Beckmann, M. dan Künzi, HP. *Lecture notes in economics and mathematical systems 639*. Springer. DOI 10.1007/978-3-642-10409-1
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics* 3. 305-360.

- Mahdawi, A. (2019, Februari 2). *If the gender pay gap is a 'feminist myth', then why not disclose salaries?.* Diakses dari <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/02/if-the-gender-pay-gap-is-a-feminist-myth-then-why-not-disclose-salaries>
- Peter, F. 2003. *Foregrounding Practice: feminist philosophy of economics beyond rhetoric and realism.* Dalam Barker, D. K. dan Kuiper, E. *Toward a Feminist Phylosophy of Economics.* London, Routledge.
- Pujol, M. A. 2003. *Into the margin!.* Dalam Barker, D. K. dan Kuiper, E. *Toward a Feminist Phylosophy of Economics.* London, Routledge.
- Rahayu, S.M. dan Ramadhanti, W. 2017. *Glass cliff phenomenon on indonesian public companies' executive compensation.* *Middle-East Journal of Scientific Research* 25 (10), 1898-1903. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2017.1898.1903
- Rahayu, S.M., Ramadhanti, W., Rahayu, D. S., Osada, H., dan Indrayanto, Adi. 2019. *Gender stereotypes in indonesian public companies' performance.* *Journal of Applied Management (JAM)* 17 Number 1 March, 1-7. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.01.01>
- Simpson, R. dan Kumra, S. 2016. *The Teflon effect: when the glass slipper meets merit.* *Gender in Management: An International Journal*, Vol. 31 Iss 8 pp. 562 – 576. <http://dx.doi.org/10.1108/GM-12-2014-0111>
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory.* Prentice-Hall, New Jersey.
- Xiu, L. dan Gunderson, M. 2014. *Glass ceiling or sticky floor? Quantile regression decomposition of the gender pay gap in China.* *International Journal of Manpower* Vol. 35 No. 3, pp. 306-326. DOI 10.1108/IJM-01-2012-0017

6. GENDER DAN KOMUNIKASI

Oleh:
Tyas Retno Wulan

Kotak 1

Seorang perempuan produser acara bincang-bincang Hollywood memberi tahu saya bahwa dia terbang bersama ayahnya dengan pesawat pribadi. Kemudian pesawatnya kehabisan bahan bakar, dan ayahnya tidak tahu pasti lokasi tempat pendaratan yang ditujunya. Mulai panik, perempuan itu berkata, "Ayah! Hubungi saja menara kontrol lewat radio dan tanyakan di mana tempat pendaratan". Ayahnya menjawab, "Aku tidak mau mereka mengira aku tersesat". Untunglah kisah ini berakhir dengan menyenangkan, kalau tidak, tentu wanita ini tidak akan dapat menceritakannya pada saya...(Tannen, 2002:40)

Kotak 2

"Tahukah kau kalau aku seorang wanita? Ketika berpikir aku harus berbicara"(Shakespeare, dalam Graddol David dan Swann Joan, 2003:1)

6.1 Pendahuluan

Setiap hari, kita menjalani proses komunikasi yang sangat bervariasi dan terus-menerus berubah. Di dalam perjalanan, di pasar, di kantor, di kelas dan tentu saja di dalam rumah, sehingga bisa dikatakan bahwa intensitas komunikasi kita sangat bervariasi dan tak terhitung jumlahnya. Salah satu bentuk komunikasi yang sering kita lakukan dan sudah kita terima dengan *taken for granted* adalah komunikasi dengan lawan jenis. Kalau kita mengamati, disadari atau tidak, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi dan cara mengkomunikasikan diri. Contoh kasus-kasus pada kotak di atas menunjukkan bahwa komunikasi antara laki-laki dan perempuan seringkali diwarnai dengan stereotipe-stereotipe yang memojokkan cara berkomunikasi dan mengkomunikasikan diri salah satu jenis kelamin, khususnya perempuan. Hal ini tidak lepas dari paham tentang seksisme. Seksisme yang menurut David dan Joan (2003) dimaknai sebagai segala macam diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-laki dikarenakan jenis kelamin mereka dan dibuat dengan alasan-alasan yang tidak relevan. Sekalipun berdasarkan definisi ini, diskriminasi ini mungkin saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan, dalam praktiknya diskriminasi terhadap perempuan dipandang lebih serius. Persoalan ini pada akhirnya berdampak pada proses komunikasi. Pada titik inilah, diskusi tentang

kaitan antara gender dan komunikasi menjadi urgen untuk dilakukan. Untuk itulah, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkaitan di seputar gender dan komunikasi. Untuk kepentingan sistematika, tulisan ini dibagi menjadi lima bagian. **Bagian pertama** adalah pendahuluan ini, **bagian kedua** akan menguraikan persoalan-persoalan stereotipe gender dalam berkomunikasi, **bagian ketiga** akan menjelaskan tentang kaitan antara masyarakat, gender dan komunikasi, **bagian keempat** akan menguraikan tentang hubungan antara bahasa sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan gender dan **bagian kelima (terakhir)** merupakan penutup sekaligus catatan kritis atas semua tulisan ini.

6.2 Stereotipe dan Perbedaan Gender dalam Berkomunikasi

Stereotipe tuturan perempuan dan laki-laki banyak sekali dan agaknya memiliki riwayat yang amat panjang. Stereotipe-stereotipe tersebut mencerminkan kesan umum mengenai bahasa perempuan dan laki-laki, yang muncul melalui peribahasa, lelucon, jurnalisme, sastra dan bahkan melalui para ahli bahasa yang serius (David dan Joan, 2003). Sayangnya dalam realita di lapangan, stereotipe-stereotipe dalam berkomunikasi tersebut lebih sering merugikan perempuan daripada laki-laki. Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang ‘cerewet’, ‘sembrono’, banyak omong, suka menggosip, terlalu sering berbasa-basi, tidak tegas dan stereotipe negatif lainnya sementara di sisi yang lain, laki-laki digambarkan sebagai sosok yang perkasa, kalem dan tenang dalam bertutur. Keadaan ini menjadikan bahasa dan gender menjadi bidang penelitian yang cukup menarik dan terus mengalami perkembangan yang fenomenal.

Berbagai hasil penelitian juga menunjukkan kondisi tersebut. Robin Lakoff dalam bukunya yang berjudul *Language and Women's Place* (dalam Mulyana, 2001) menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kosakata yang berlainan. Salah satu sebabnya adalah sosialisasi mereka yang berbeda khususnya karena minat mereka yang berlainan terhadap berbagai aspek kehidupan. Mungkin karena sering berada dalam dominasi pria, bahasa perempuan dianggap juga tidak setegas laki-laki. Misalnya perempuan lebih sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung ekor tanya (*tag questions*), seperti “*Izul tidak disini? Apakah betul?*” Bukan menggunakan pilihan kalimat yang tegas seperti *Izul ada?*. Isu komunikasi juga dianggap berkontribusi dalam menciptakan halangan bagi kemajuan perempuan dalam organisasi, atau setidaknya menciptakan beragam kesalahpahaman tentang laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja (Barrett dan Davidson 2006; Sulistyono, 2016)

Sementara itu menurut Sarah Trenholm dan Arthur Jensen dalam bukunya *Interpersonal Communication* seperti yang dikutip oleh Mulyana (2001), terdapat perbedaan pragmatik antara bahasa perempuan dan bahasa laki-laki. Perempuan lebih sering menggunakan pembicaraan ekspresif; (untuk menyatakan emosi): *Saya khawatir apakah tugas makalah saya bisa selesai hari ini*, “*Saya benar-benar gelisah menghadapi ujian presentasi besok pagi* dan berorientasi orang: memelihara hubungan, menciptakan itikad baik, menunjukkan dukungan, dan membangun komunitas). Oleh karena itu, perempuan lazim memulai percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti; “*Apakah anda mendengar bahwa...?*” “*Apakah anda tahu bahwa..?*” di samping itu, perempuan juga menggunakan suara-suara yang menunjukkan bahwa mereka sedang mendengarkan seperti: “*Oh ya?*” “*Betulkah..?*”. Pada sisi yang lain, pria lebih banyak menggunakan pembicaraan instrumental (untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain), melaporkan informasi, memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas melalui pertukaran informasi. Dalam konteks ini, kata-kata yang diucapkan perempuan kurang lugas daripada kata-kata yang diucapkan pria. Bahasa pria menggunakan pernyataan lebih kuat yang cenderung menekankan kepatuhan, persetujuan atau kepercayaan pada pendengar.

Dalam berkomunikasi, perempuan juga dianggap tidak percaya diri. Rasa kurang percaya diri ini biasanya diekspresikan lewat kata-kata penguat (*intensifier*) misalnya: *sangat, demikian juga* dan lain sebagainya. Demikian juga penggunaan berbagai frase atau kata yang melemahkan seperti *mungkin, tapi..., sepertinya...*, dan tata bahasa serta ucapan yang hiperkorek (resmi) serta-serta frase yang lebih sopan, seperti *saya sangat menghargai jika saudara....; Apakah anda bersedia....* Ternyata perempuan juga kurang rasa humor, kurang pandai menyampaikan lelucon dan sering tidak paham arti lelucon yang disampaikan pria. Disamping itu, perempuan lebih enggan menyumpah dan memaki.

Untuk mengetahui implikasi penggunaan bahasa yang ‘biasa’ digunakan laki-laki dan perempuan, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui efek aspek-aspek bahasa yang biasa digunakan perempuan (kata dan frase yang melemahkan, frase-frase yang sangat sopan, ekor tanya) yang digunakan dalam ruang pengadilan. Penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa perempuan (terlepas dari apakah digunakan oleh perempuan atau laki-laki) secara konsisten menghasilkan reaksi-reaksi yang merugikan. Ketika bahasa perempuan digunakan, pembicaraannya dinilai kurang meyakinkan, kurang jujur, kurang cakap dan kurang cerdas (Mulyana, 2001).

Deborah Tannen dalam bukunya yang berjudul “*Talking from 9 to 5: Women and Men in the Workplace: Language, Sex and Power yang*

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Bukan itu Maksudku: Seni Berbicara antara Wanita dan Pria di Tempat Kerja (2002)*” menunjukkan beberapa fakta berdasarkan hasil penelitiannya bahwa gender mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Tabel 6.1 berikut ini merangkum hasil temuan Tannen tersebut.

Tabel 6.1. Perbedaan Gender dalam berkomunikasi

Perempuan	Laki-laki
Menjaga kesan kesetaraan	Sering melibatkan penentangan
Mempertimbangkan efek pembicaraan terhadap lawan bicara	Menjatuhkan
Mengurangi kesan berkuasa agar pekerjaan bisa diselesaikan tanpa bersitegang-mengurangi kritik	Menghindari posisi “kalah” dalam interaksi
Sering mengucapkan “maaf”	Mengakui kesalahan bisa dianggap mengambil posisi kalah
Lebih sering mengucapkan terimakasih	Relatif lebih jarang

Sumber: Tannen 2002 (diolah)

Lebih jauh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh antropolog Daniell Matz dan Ruth Borker (dalam Tannen, 2002) dijelaskan bahwa sejak masa kanak-kanak, perempuan belajar untuk melembutkan perkataan mereka agar tidak terdengar terlalu agresif dan ada anggapan bahwa perempuan sepatutnya tidak menampilkan prestasinya. Sementara itu, anak laki-laki cenderung bersaing mendapatkan posisi utama, menantang orang yang mendapatkannya dan menyingkirkan penantangannya. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa ritual permintaan maaf, memperlunak kritik dan berterima kasih bisa digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Namun, kebiasaan ini lebih sering dijumpai dalam percakapan perempuan. Demikian juga dengan kebiasaan memuji yang merupakan salah satu bentuk ritual percakapan. Pujian merupakan bentuk khusus dari umpan balik. Kendati perempuan dan laki-laki menyebutkan bahwa mereka mendapatkan lebih banyak ucapan terima kasih dan pujian dari wanita ketimbang pria, Tannen (2001) mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar orang yang mengatakan bahwa mereka tidak suka dipuji. Pria seringkali tidak memperlumahkan jika mereka tidak mendapat umpan balik, dan perempuan lebih sering memberikan pujian dibanding pria. Kajian Juliano S (2015) menyimpulkan bahwa Kaum feminis lebih menonjolkan dalam hal membangun *relationship* dan menunjukkan responsif, sedangkan kaum maskulin lebih menonjolkan dalam hal penyelesaian

tugas, menyatakan diri, dan mendapatkan kekuasaan, atau secara lebih spesifik wanita berhasrat pada koneksi (kedekatan) sedangkan pria berhasrat untuk status (kekuasaan)

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa perbedaan gender memberikan implikasi terhadap cara orang berkomunikasi dan mengkomunikasikan dirinya. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan kenapa bisa muncul perbedaan gender dalam berkomunikasi.

6.3 Masyarakat, Gender Dan Komunikasi

Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara dan mengembangkan atau mewariskan budaya. Benar kata Edward T Hall bahwa “budaya adalah komunikasi” dan ‘komunikasi adalah budaya’. Pada satu sisi komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horisontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal, dari suatu generasi ke generasi sebelumnya. Pada sisi lain, budaya akan menetapkan norma-norma (komunikasi) yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok tertentu (Mulyana, 2001). Kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena sejatinya masyarakatlah yang menciptakan kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa setiap masyarakat akan memiliki dan menciptakan kebudayaannya sendiri.

Berkaitan dengan gender, masyarakat adalah ‘pencipta’ dan ‘pemelihara’ konstruksi sosial tentang laki-laki dan perempuan tersebut. Istilah gender, bukanlah merupakan istilah yang baru. Konsep ini telah dipakai oleh para ahli bahasa untuk menggambarkan kata benda yang merujuk pada jenis kelamin laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*). Gender adalah “konstruksi” realitas sosial tentang peran laki-laki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka” .Konsep gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat yang menunjuk pada makna peran yang menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin (Fakih, 1996)

Beberapa elemen penting yang terkandung dalam konsep gender adalah: (a) status gender ditentukan secara sosio-kultural. Hanya karena seseorang dilahirkan menjadi perempuan atau laki-laki, dia kemudian diberi peran dan tugas yang berbeda. Karena itu, adanya perbedaan ciri-ciri biologis antara laki-laki dan perempuan maka peran gender

dikonstruksi berbeda dari satu konteks budaya ke budaya lainnya. Umur, ras, dan kondisi ekonomi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan dan peran gender, dan oleh karenanya gender itu dipelajari dan berubah dari waktu ke waktu; (b) gender merujuk pada hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang pada umumnya lebih menguntungkan laki-laki; (c) hubungan kekuasaan yang tidakimbang telah menyebabkan subordinasi status perempuan; (d) subordinasi status perempuan kemudian dipelihara dan dilanggengkan melalui pembagian gender yang tidak adil atas akses dan kontrol sumber daya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan kategori laki-laki dan perempuan yang bersumber pada faktor sosial budaya dan bukan karena faktor perbedaan fisik/biologis. Oleh karena itu, hubungan gender akan berbeda dari satu masyarakat budaya ke masyarakat budaya lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dari satu periode ke periode lainnya.

Berkaitan dengan tulisan ini, istilah gender yang sering digunakan adalah **pelabelan gender** (*gender stereotyping*) yang bermakna pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori gender yang pada umumnya merugikan. Sebagai contoh, perempuan cenderung cengeng, emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif, sementara laki-laki itu kasar, agresif, kejam, dan dominan. Padahal sebenarnya sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan.

Dalam bukunya yang berjudul, *The Second Sex*, Simone de Beauvoir menjelaskan bahwa esensi karakteristik gender adalah bahwa “seseorang tidak dilahirkan, tapi menjadi, seorang perempuan”. Gender merupakan piranti yang lebih dikonstruksikan secara sosial daripada bersifat ‘biologis’-Orang tidak dilahirkan dengan gender, tetapi mempelajari perilaku dan sikap yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Jika kita menyebut masyarakat yang digenderkan, maka yang dimaksud bahwa gender merepresentasikan suatu pembagian penting dalam masyarakat kita (dan mungkin seluruh masyarakat manusia). Apakah seseorang adalah laki-laki atau perempuan bukanlah merupakan sebuah fakta biologis, hal ini juga mengklasifikasikan seseorang dalam keanggotaan pada salah satu dari dua kelompok sosial. Banyak sekali konsekuensi-sosial, ekonomi dan politis yang timbul dari keanggotaan ini. Perempuan maupun laki-laki diperlakukan dengan cara-cara yang secara sistematis berbeda (baik oleh perempuan maupun laki-laki). Mereka memiliki pengalaman yang berbeda di sekolah, tempat kerja maupun di rumah. Mereka mengerjakan hal-hal yang berbeda dan hal-hal yang berbeda juga diharapkan datang dari mereka. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Cara kita berbicara merupakan salah satu aspek yang nyata dari perilaku gender. Bahasa merupakan salah satu keahlian khusus manusia yang

membedakannya dengan komunikasi binatang maupun berbagai macam tingkah laku manusia lainnya. Karena kekuatannya yang demikian, bahasa mempunyai karakteristik yang lengkap. Bahasan di bawah akan menjelaskan tentang sifat-sifat bahasa.

6.3.1 Sifat Bahasa

Dalam linguistik, ada batasan yang jelas antara definisi bahasa sebagai sebuah fenomena sosial dan tuturan seorang individu. Pembagian menjadi dua ini merupakan titik tolak yang bagus dalam pembahasan tentang bahasa dan gender. Berikut ini, ada empat sifat yang melekat pada bahasa:

1) Bahasa bersifat Personal

Dalam pengertian kognitif, bahasa merupakan hal yang bersifat pribadi. Bahasa dikatakan sebagai wahana pemikiran internal dan hasrat kita. Akan tetapi, bahasa kita juga merupakan salah satu bagian penting dari identitas personal dan sosial kita. Kebiasaan linguistik kita mencerminkan perjalanan hidup maupun pengalaman individu kita. Bagaimana pun juga, bahasa merupakan perangkat individu kita

2) Bahasa bersifat Sosial

Secara simultan, bahasa memiliki sebuah eksistensi di luar dirinya. Bahasa mempunyai keadaan pra-ada dan terus ada walaupun kita sudah tidak ada. Bahasa jauh lebih besar dari kita, mencakup kata-kata dan struktur gramatikal yang tidak kita sadari. Dalam pengertian ini, bahasa merupakan sumber daya publik, seperti persediaan air yang melayani sebuah komunitas tutur dan menjadi alat komunikasi di antara berbagai individu-individu yang diperlukan untuk pelestarian sosial. Keselarasan dengan manfaat bagi khalayak lebih jauh lagi

3) Model Saussurean

Perseteruan antara sifat personal dan sosial menjadi tradisi panjang kajian bahasa dunia Barat, tetapi pebedaanya secara khusus erat dikaitkan dengan nama Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa Swiss pada awal abad 20 ini. Menurut Saussure, obyek kajian linguistik kerap kali dianggap bersifat sosial dan bukannya personal, yaitu fakta-fakta bahasa. Sebuah 'bahasa' biasanya dianggap sebagai sebuah sistem abstrak: kosa kata dan seperangkat kaidah tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata digabungkan untuk menghasilkan kalimat. Konsep sebuah sistem lebih bersifat teknis dari apa yang tampak pada mulanya, karena hal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur yang menciptakannya saling terkait secara khusus. Saussure berpendapat bahwa unsur-unsur individual yang menciptakan sebuah sistem bahasa (katakanlah, kata-kata dari sebuah bahasa) memiliki makna dalam pengertian absolut, tetapi

dapat didefinisikan dalam konteks hubungannya satu sama lain. Artinya makna sebuah kata seperti *woman* tidak dapat didefinisikan tanpa menguraikan lawannya dengan kata-kata seperti *man* atau *girl*. Untuk memahami kata-kata semacam itu, seorang penyimak haruslah terlibat dalam apa yang disebut Saussure sebagai “kontrak sosial” yang mengikat seluruh anggota dari sebuah komunitas tutur. Istilah-istilah kontrak ini telah berkembang selama beberapa tahun dan tidak dapat diubah oleh seorang penutur secara individu, tetapi hanya melalui tindakan kolektif. Noam Chomsky menyatakan bahwa aspek penggunaan bahasa sebagai salah satu aspek perilaku individu bukanlah urusan linguistik. Dalam beberapa hal di dalam pembahasan ini tampak jelas adanya persamaan kasar sistem bahasa dengan abstraksi sosial dan penggunaan bahasa dengan perilaku individual tidak mudah dipertahankan. Banyak aspek perilaku percakapan, misalnya yang tak pelak lagi merupakan ciri-ciri penggunaan sebuah bahasa, tetapi juga merupakan perilaku-perilaku yang dilembagakan dan diakui secara sosial. Agaknya perilaku-perilaku tersebut merupakan bagian dari kontrak sosial dan bukannya perilaku tutur yang aneh dari seorang individu.

4) Pendekatan Semiotik

Bahasa verbal hanyalah salah satu dari sekian banyak cara orang mengkomunikasikan identitas gender dan mengetahui identitas gender orang lain. Kita berkomunikasi dengan gerak, isyarat tubuh dengan repertoar dan ritual tindakan menurut pakaian yang kita kenakan, dengan gambar-gambar grafis dan segala macam praktik kultural (Graddol David dan Swann Joan, 2003)

Cara kita berbicara-seperti cara kita dalam hal-hal lain saat menjalani hidup sehari-hari tampak ‘alami’ karena perilaku-perilaku yang menyusun hidup kita diritualkan. Tanpa kita sadari, tumbuh dalam budaya tertentu, kita belajar untuk melakukan segala sesuatunya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Tak ada yang memahami sifat ritual kehidupan sehari-hari lebih baik daripada Erving Goffman, yang memahami pula peran mendasar yang dimainkan oleh gender dalam mengorganisasi ritel kita sehari-hari. Dalam artikelnya “*The Arrangement Between the Sexes*”, Goffman mengatakan bahwa kita cenderung mengatakan berkaitan dengan gender” ketika yang kita maksudkan adalah berkaitan dengan kelompok gender. Ketika mendengar bahwa suatu perilaku itu dijumpai dalam kelompok gender, bukan berarti ada sesuatu yang inheren pada diri pada diri pria atau wanita tentang cara bicara tertentu, bukan pula bahwa setiap pria atau wanita lekat dengan pola itu. Maksud pola perilaku gender, adalah lebih untuk mengamati bahwa sebagean besar wanita atau pria sebagai

kelompok berbicara dengan cara tertentu. Bahwa individu tidak selalu sesuai dengan pola yang dikaitkan dengan gender bukan berarti pola itu tidak khas. Lebih banyak wanita atau pria bicara dengan cara tertentu karena cara itu dikaitkan dengan wanita atau pria-atau sebaliknya, justru lebih banyak wanita atau pria berbicara dengan cara itu karena cara itu dikaitkan dengan gendernya. Setiap pria atau wanita yang berbicara dengan cara yang dilakukan dengan gender lain akan menanggung suatu akibat karena menyimpang dari tuntutan budaya. Baik laki-laki ataupun perempuan harus menanggung suatu risiko kalau mereka tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan dari gender mereka. Pria yang tidak agresif disebut banci, sementara wanita yang tidak agresif disebut “feminin”. Pria yang agresif disebut orang giat, tetapi jika berlebihan dijuluki sombong. Tapi kalau perempuan akan mendapatkan julukan yang lebih kasar, semisal disebut ”jalang”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan dialektis antara masyarakat, gender dan komunikasi. Dalam masyarakat, gender menjadi satu “kebutuhan” untuk tetap dipelihara agar masyarakat tetap eksis. Hal itu dilakukan antara lain dengan terus ‘mengkomunikasikan’ peran gender yang ideal dan sesuai tuntutan masyarakat. Pada pembahasan selanjutnya, hubungan antara bahasa dan gender akan menjadi semakin jelas.

6.4 Hubungan Bahasa Dan Gender

Bagaimanakah tepatnya hubungan antara bahasa dan gender?. Menurut David dan Joan (2003), secara umum, ada tiga macam hubungan antara bahasa dan gender, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahasa hanyalah mencerminkan pembagian sosial dan ketidaksetaraan
- 2) Posisi pembagian dan ketidaksetaraan itu sebenarnya *tercipta* melalui perilaku linguistik yang seksis,
- 3) Pandangan yang mengemukakan bahwa kedua proses tersebut berjalan, dan bahwa segala penjelasan penuh mengenai bahasa dan gender haruslah mengeksplorasi perseteruan dan saling berpengaruh antara keduanya.

6.4.1 Bahasa Mencerminkan Pembagian Gender

Ragam bahasa yang dituturkan seseorang (termasuk aksen dan dialek) banyak mengikuti pola interaksi di dalam sebuah komunitas. Hal ini berkaitan dengan pembicaraannya bersama orang-orang secara rutin dan dengan hubungan status yang dimilikinya di tengah mereka. Kesemuanya ini distrukturkan oleh proses sosial ekonomi yang sedikit sekali kaitannya dengan bahasa. Perbedaan jenis kelamin tertentu dalam perilaku bahasa merupakan efek samping dari pengalaman sosial laki-laki

perempuan yang secara sosial berbeda. Jenis-jenis tuturan tertentu mungkin secara sosial dianggap tepat bagi jenis kelamin tertentu dan mungkin saja dipelajari anak-anak sama seperti ketika mereka mempelajari berbagai macam perilaku gender lainnya. Laki-laki mungkin dianggap lebih pantas untuk berbicara keras dan memaki, sementara perempuan lebih sopan. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan beberapa penelitian yang berkaitan antara stratifikasi sosial dan bahasa, temuan Trudgill (1974) menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menggunakan bahasa yang prestisius dibandingkan laki-laki yang mempunyai latar belakang kelas sosial yang sama. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa meskipun kualitas suara secara khusus terkait dengan gagasan biologis gender dan seksualitas, tetapi penelitian ragam-ragam bahasa mengintrodukir unsur-unsur asosiasi kelas yang kuat dan kondisi ekonomi maupun sosial yang ada kaitannya dengan pembagian gender.

6.4.2 Bahasa menciptakan Pembagian Gender

“Bahasa membantu membentuk batasan-batasan realitas kita. Bahasa merupakan alat penataan, klasifikasi dan manipulasi dunia...Setelah mempelajari bahasa sebuah masyarakat patriarkhal, kita juga telah belajar mengklasifikasi dan menata dunia sesuai dengan tatanan patriarkhal dan mengesampingkan berbagai kemungkinan cara alternatif dalam menalar dunia ini” (Spender dalam Graddol David dan Swann Joan:2003).

Pandangan kedua ini menjelaskan bahwa bahasa tidak semata-mata berfungsi sebagai cerminan masyarakat. Malahan bahasa diimpilikasikan secara kuat dalam konstruksi dan pelestarian pembagian sosial dan ketidaksetaraan. Cara bahasa digunakan di media, atau kebiasaan tutur orang yang tidak reflektif mungkin memproyeksikan suatu evaluasi yang dibiaskan mengenai laki-laki dan perempuan dan karakteristik keduanya, dan dengan demikian mendefinisikan peranan sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, posisi tersebut merupakan posisi yang menentukan, menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan kepribadian kita dibentuk oleh bahasa dan wacana dimana kita terlibat didalamnya. Disadari atau tidak, bahasa yang seksis telah mempengaruhi persepsi para penuturnya tentang dunia.

Berikut ini adalah contoh kata dan kalimat dalam Bahasa Inggris yang menunjukkan bagaimana bahasa berperan dalam menciptakan pembagian gender. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Peranan Bahasa dalam Menciptakan Pembagian Gender

<i>Examples of Stereotyped Language</i>	<i>Possible Alternatives</i>
<i>Cavemen</i>	<i>Cave Dwellers, prehistoric people</i>
<i>Mailman</i>	<i>Mail carrier</i>
<i>Mankind</i>	<i>Personnel, Staf</i>
<i>A farmer and his family</i>	<i>Farmers and their children</i>
<i>The librarian must catalog her books promptly</i>	<i>Librarian must catalog...</i>
<i>A doctor and his dentist wife...</i>	<i>A doctor and dentist who are married</i>
<i>A nurse and her son</i>	<i>Nurse and they family..</i>

Sumber: Stewart Lea P. (1996)

Bahasa dengan berbagai macam cara mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok sosial yang relatif berkuasa, dan laki-laki dapat dipandang memiliki kekuasaan secara relatif terhadap perempuan di dalam masyarakat kita. Lebih jauh dari itu, menurut Kuntjara (2003), proses diskriminasi bahasa ini terjadi hampir di semua bahasa yang bersifat patriarkal sehingga perempuan mengalami kondisi yang dilematis dan sekaligus mengalami diskriminasi bahasa dalam dua hal, yaitu bagaimana mereka diajar untuk berbahasa dan bagaimana bahasa memperlakukan perempuan. “Bahasa telah dimanfaatkan oleh kaum pria untuk menekan kaum perempuan. Kalaupun suatu kata ditujukan pada wanita, ia lebih menunjukkan rendahnya martabat wanita, eufimistik, hiperbolik, dan lebih *powerless*, sedangkan untuk pria lebih inovatif dan *nge-slank*. Dominasi laki-laki semacam ini, dalam bahasa Pierre Bordieu disebutnya sebagai kekerasan simbolik atau kekerasan yang tidak kasat mata. Kekerasan semacam ini oleh korbannya (kaum perempuan) bahkan tidak dilihat atau tidak dirasakan sebagai kekerasan, tetapi sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar. Pada dasarnya kekerasan simbolis ini berlangsung karena ketidaktahuan dan pengakuan dari yang ditindas. Jadi sebetulnya logika dominasi ini bisa berjalan karena prinsip simbolis yang diketahui dan diterima baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis itu berupa bahasa, gaya hidup, cara berpikir, cara bertindak dan kepemilikan yang khas pada kelompok tertentu atas dasar ciri ketubuhan. Wacana laki-laki mendikte cara berpikir, cara bertindak atau bahkan bahasa perempuan. Suatu ketidakpuasan atau protes harus dijelaskan dengan argumen yang melandaskan pada logika yang dibangun oleh laki-laki. Sebuah tangisan tidak cukup bisa melukiskan kepedihan yang dalam. Laki-laki menuntut alasan dan penjelasan. Dengan cara itulah laki-laki selalu menemukan kata-kata untuk membenarkan diri. Dengan debat dan adu argumen, itulah cara laki-laki

memenangkan nilai-nilainya (Haryatmoko, 2003) Maka benar saran Leclerc (2000) ketika mengatakan:”jangan berperang melawan laki-laki. Hal itu justru cara dia memenangkan nilainya. Menyangkal untuk menegaskan diri. Membunuh untuk hidup. Cukup kita kurangi isi nilai-nilainya dengan menertawakannya.

6.4.3 Saling Pengaruh antara Bahasa dan Struktur sosial

“Pembicaraan berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan stereotipe jenis kelamin dan dominasi laki-laki. Tuturan kita tidak hanya mencerminkan ruang kita di dalam kebudayaan dan masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan ruang tersebut”

(Sally Mc Connel-Ginnet dalam Graddol: 2003)

Sintesis semacam itu bukan hanya merupakan sebuah kompromi antara gagasan bahwa bahasa menjadi cerminan, tetapi juga kebalikannya bahwa bahasa menciptakan pembagian jender dan ketidaksetaraan. Dengan mengemukakan bahwa praktik-praktik linguistik dan sosial saling mendukung, ini menunjukkan adanya sebuah mekanisme yang lebih kuat. Kadang kita perlu melihat keluar analisis linguistik untuk mendukung sejumlah mekanisme yang mana sebuah ciri linguistik mendukung sejumlah mekanisme nonlinguistiklain dalam mempertahankan pembagian-pembagian gender. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa bahasa membantu mereproduksi konsep-konsep tradisional ‘feminitas dan maskulinitas’, tetapi untuk memahami mengapa konsep tersebut bersifat opresif terhadap perempuan membutuhkan teori-teori sosial yang sedikit ada kaitannya dengan bahasa.

Teori-teori yang bisa menjelaskan hal ini antara lain:

- 1) Teori Model Struktur dan Agensi. Dikembangkan dari teori Marxis yang menjelaskan dengan baik bagaimana struktur sosial, ekonomi dan kelembagaan mengarah pada kesempatan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dampak proses sosial ekonomi terhadap tuturan laki-laki dan perempuan mungkin nampak jelas dalam berbagai penelitian jaringan sosial. Karya penelitian Lesley Milroy di Belfast misalnya menunjukkan bagaimana cara bertutur seorang laki-laki atau perempuan dipengaruhi oleh kedudukan mereka dalam suatu jaringan sosial-dengan siapa mereka berbicara, seberapa sering, dan dalam kapasitas apa. Penelitian Pamela Fishman terhadap sejumlah pasangan menunjukkan bagaimana pembagian kerja dilestarikan, bahkan dalam percakapan. Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bagaimana cara-cara bertutur tertentu bermakna sosial. Pada tataran selanjutnya bagaimana gaya bertutur memperoleh makna merupakan hasil dari interaksi antara perilaku sosial individu dengan kekangan-kekangan struktur sosial yang

diberikan atas perilaku semacam itu. Hal ini yang disebut sebagai model struktur dan agensi.

- 2) Peranan Ideologi dan Lembaga, khususnya diadopsi dari Althusser (1970) dengan teori Ideological State Apparatus (ISAs). Teori ini melihat bahwa individu-individu diajak untuk memandang perilaku dan pengalaman sosial sebagai sesuatu yang bersifat 'alami' melalui tindak *ideologi*. Perangkat ideologis seperti gereja, sistem pendidikan, keluarga, hukum dan sebagainya yang salah satu fungsi perangkat ideologis semacam itu adalah untuk memilah individu ke dalam kelompok dengan tujuan memberikan perlakuan yang secara sistematis berbeda kepada mereka.

Berdasarkan deskripsi di atas, terungkap bahwa hubungan antara bahasa dan gender sangat rumit dan kompleks. Seorang individu-khususnya-perempuan, ternyata tidak memiliki "kebebasan" untuk berbahasa. Hal ini dikarenakan bagaimanapun sebagai agen, tidak bisa terlepas dari 'struktur' jaringan sosialnya, sekaligus *Ideological state apparatus* yang telah diterimanya tanpa *reserve*.

6.5 Penutup dan Catatan Kritis

Kita semua dilahirkan dalam budaya tertentu dan kebudayaan tersebut memberikan dampak yang signifikan pada komunikasi kita. Gender sebagai satu bentuk konstruksi sosial budaya tentang bagaimana seharusnya seorang laki-laki atau perempuan diharapkan dalam masyarakat, ternyata banyak mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan mengkomunikasikan diri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan dialektis antara masyarakat, gender dan komunikasi. Dalam masyarakat, gender menjadi satu "kebutuhan" untuk tetap dipelihara agar masyarakat tetap eksis. Hal itu dilakukan antara lain dengan terus 'mengkomunikasikan' peran gender yang ideal dan sesuai tuntutan masyarakat tanpa tahunan dipertimbangkan bahwa ada satu jenis kelamin yang lain yang dirugikan (dan ini lebih banyak pada perempuan).

Kajian bahasa dan gender juga menjadi menarik, karena selain dari perspektif akademis, kajian-kajian populer dalam bidang ini dianggap cukup berguna untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari seperti di kantor, di kelas, dalam keluarga, dalam perkawinan dan lain-lain. Berdasarkan penelusuran, kajian tentang tema ini, masih relatif jarang dilakukan di Indonesia, sehingga membuka peluang untuk dikaji lebih lanjut.

Satu poin penting adalah bahwa perbedaan gender hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi gaya berbahasa. Masing-masing orang mempunyai gaya unik, dipengaruhi oleh riwayat pribadi dari banyak hal seperti asal daerah, etnis, kelas sosial, orientasi seksual, pekerjaan, agama

dan usia sama uniknya seperti kepribadian dan jiwa. Menyangkut gender, pola yang digambarkan selalu merupakan tingkatan pada rentang (derajat atau persentase) suatu rangkaian. Bukan suatu perbedaan mutlak (absolut). Begitu pula pengaruh serta pertalian faktor-faktor lainnya. Dengan kata lain cara kita berbicara dipengaruhi oleh semua aspek masyarakat kita. Pada titik inilah menjadi penting untuk mengenal perbedaan, sekaligus terus mengupayakan menghindari penggunaan bahasa yang seksis.

Daftar Pustaka

- Arliss, Laurie P, 1991 *Gender Communication* Prentice Hall Englewood CLIFFS, New Jersey
- Barret M. dan Davidson M.J. 2006. *Gender and communication at work*. Inggris: Ashgate Publishing Limited
- Esther Kuntjara, 2003 *Gender, Bahasa, dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gunung Mulia dan UK Petra Surabaya, 2003
- Fakih, Mansour, 1996 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Graddol, David dan Swan Joan, 2003 *Gender Voices Telaah Kritis Relasi Bahasa-Jender*, Pedati Pasuruan
- Haryatmoko, 2003 *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, dalam Basis No 11-12, Kanisius Yogyakarta
- Jansen, Sue Curry 2002 *Critical Communication Theory: Power, Media, Gender and Technology*, Rowman and Littlefiel Publisher, Inc, America.
- Juliano, Sangra P, 2015 *Komunikasi dan Gender : Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin dan Feminim*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume 5 No 1/Juni 2013
- Mulyana, Dedi 2001 *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, RosdaKarya Bandung.
- Pease, Allan dan Barbara, 2006 *Why Men Don't listen And Women Can't Read Maps: Mengungkap Perbedaan Pikiran Pria dan Wanita agar Sukses Membina Hubungan*, Ufuk Press Jakarta.
- Raharjo Yulfita 1997. *Gender, Population and Development Concepts and Issues*, Jender, Population and Development Staff Training Manual. Jakarta: PPT-LIPI and UNIFPA
- Stewart, Lea P; Cooper Pamela J; Stewart, Alan D, Friedley, Sheryl A 1996 *Communication and Gender third Edition* Gorsuch Scarisbrick, Publisher Scottsdale Arizona.
- Sulistyo, P.A; Aida Vh, Krisnarini Matindas, 2016. *Komunikasi Gender Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Karyawan*, Jurnal Komunikasi Pembangunan Juli 2016 Vol 14, No 2.

Tannen, Deborah 2002 “Bukan itu Maksudku”: Seni Berbicara antara Wanita dan Pria di Tempat Kerja, Qanita Bandung.

Internet:

<http://www.ohioline.asu.edu/flm02/Fs04>

<http://www.bridge.raya.org/conversation.html>

<http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/githens/tannes.htm>

<http://www.findarticles.com/p/articles/mi-m2294>

<http://www.utexas/appsa/22>

<http://www.afirstlook.com/manual/edman/gender>

7. Suami Pekerja Migran Indonesia Di Banyumas: Puisi Dalam Sepi

Oleh:
Hendri Restuadhi

7.1 Pendahuluan

Dalam dunia kajian terhadap perempuan pekerja migran Indonesia (PMI), suami PMI hampir luput dari perhatian. Sebuah kajian memang harus fokus dan memiliki tujuan yang jelas sehingga sarasannya pun mengena. Artinya, ini kajian tentang perempuan PMI bukan suaminya. Sampai di situ, kita akan bersepakat atas argumen tersebut. Namun demikian, dalam waktu bersamaan, kita sadar dan harus mengakui bahwa kajian terhadap perempuan PMI seringkali kemudian dikaitkan dan berkait dengan kajian terhadap anak-anak para perempuan PMI tersebut yang lebih dikenal sebagai *Left Behind Children* (anak-anak yang ditinggalkan). Pada kajian yang sudah “keluar dari fokus” itu karena, bagaimana pun, kajian terhadap *left behind children* bukan lagi mengkaji ibunya, perempuan PMI – masih dapat ditemukan dasar argumennya yaitu ketergantungan dan ikatan anak-anak dengan ibunya sangat tinggi. Dengan demikian, kepergian ibu untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, meninggalkan persoalan pada anaknya, mulai dari kerinduan, pengasuhan, pendidikan, hingga perkembangan kepribadiannya. Urgensi ikatan ibu-anak inilah yang juga terepresentasi dalam hampir semua penelitian dan kajian dengan *heading* “keluarga pekerja migran” jika ditambah dengan persoalan remitensi, pengelolaan uang remiten, dan para pengasuh anak-anak yang ditinggalkan. Meskipun menyertakan kata “keluarga” di situ, tidak berarti suami pekerja migran juga menjadi kajiannya.

Dalam bahasa Georg Simmel, suami PMI adalah *the stranger* (1950). *The stranger* bukanlah orang yang berada di luar kelompok dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok. Ia bukan pula seseorang yang datang dan pergi dalam kelompok. *The stranger* adalah anggota kelompok yang tetap memiliki jarak (*distant*) dengan anggota kelompok yang lain (*native*). Demikian itulah suami PMI, ia ada dan diakui di dalam keluarga PMI tetapi ia tidak diperhatikan atau diperlihatkan. Suami PMI seperti dalam ungkapan, “datang tidak menggenapkan, pergi tidak mengganjilkan”. Di mata pemerhati dan peneliti, suami pekerja migran tampaknya juga bukan subyek yang menarik untuk dikaji. Beberapa yang sempat menyinggung suami PMI, tidak pula menunjukkan kajian khususnya pada suami PMI itu sendiri. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi *et al.* (2018) mengkaji tentang masalah komunikasi dalam keluarga buruh migran Indonesia dan

penyelesaiannya; penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Desintha (2014) tentang pola negosiasi dalam keluarga mantan buruh migran di Magetan, Jawa Timur; penelitian yang dilakukan oleh Utamidewi, *et al.* (2017) tentang pengalaman komunikasi keluarga buruh migran perempuan dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga; penelitian yang dilakukan oleh Jamilah dan Adilla (2013) tentang relasi suami isteri dalam konteks keluarga buruh migran. Bahkan, sebuah artikel yang diterbitkan oleh Puslitbang Kementerian Sosial, ditulis oleh Togiaratua Nainggolan (tanpa tahun) tentang pergeseran pola relasi gender keluarga buruh migran, menunjukkan tereduksinya peran suami PMI secara signifikan. Dalam hasil-hasil penelitian itulah suami PMI dikaji tetapi “hanya” ditempatkan sebagai pasangan hidup dari perempuan PMI itu sendiri. Satu penelitian yang menjadikan suami PMI sebagai subyek penelitian dilakukan oleh Mu’in dan Isgiantika (2018) yang mengkaji tentang kualitas hidup suami PMI. Dengan menggunakan survei deskriptif dan sampel sejumlah 75 orang, ditemukan hasil 2% di antara para suami PMI itu menyatakan kualitas hidupnya sangat baik, 60% menyatakan baik, 35% menyatakan biasa-biasa saja, dan sisanya menyatakan kualitas hidupnya buruk dan sangat buruk. Meskipun metodologi penelitian survei berangkat dari dasar berfikir representativitas (artinya, prosedur kerja dan hasilnya harus mampu menjadi representasi situasi dan kondisi obyek yang dikaji) tetapi, harap diingat bahwa instrumen wawancara telah disiapkan oleh peneliti sendiri. Dengan kata lain, kondisi yang sebenarnya dialami oleh suami PMI justru tidak terepresentasikan dalam wawancara itu. Suami PMI, sebagai sampel penelitian, hanya merespon pernyataan dari peneliti. Ia tidak diberi kesempatan untuk “*ngudo roso*” tentang kehidupannya sebagai suami PMI. Sebenarnya, tidak ada seorang pasangan pun dalam sebuah keluarga suami maupun istri yang begitu saja *lego lilo* melepas pasangannya untuk pergi jauh dalam jangka waktu yang tidak sebentar dan kecil kemungkinan bertemu, walaupun itu demi perbaikan “kualitas” hidup keluarga itu sendiri. Baik pasangan yang ditinggalkan maupun pasangan yang meninggalkan, dapat dipastikan, akan merasa sangat kehilangan. Seperti itu pulalah yang dialami suami dan istrinya yang bekerja sebagai PMI. Hanya saja, banyak yang memberi perhatian kepada istrinya – perempuan PMI – dan anak-anaknya – sebagaimana telah dijelaskan di muka. Pada titik inilah, menarik kiranya untuk mengkaji perasaan suami PMI yang sendirian itu: sendiri karena ditinggal istri belahan jiwanya, sendiri karena menjadi figur yang tidak jelas di dalam keluarganya, dan sendiri karena tidak ada orang yang mencoba memahaminya.

7.2 Suara Hati Suami Yang Ditinggal Istri

Bukan hanya perempuan yang ‘punya perasaan’. Konstruksi sosial gender memang membedakan perempuan dan laki-laki, antara lain, dari sisi pengelolaan perasaan itu. Laki-laki seringkali dipandang sebagai figur yang ‘tidak berperasaan’, kalkulatif, rasional. Akan tetapi, perempuan sebaliknya, ditempatkan sebagai figur yang ‘penuh perasaan’, peka, emosional, dan tidak rasional. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, semua orang tahu benar bahwa konstruksi semacam itu sama sekali tidak seluruhnya benar. Keberangkatan seorang istri menjadi PMI ke luar negeri, sudah barang tentu, bertolak dari pertimbangan yang rasional: tidak mungkin mengubah kondisi ekonomi keluarga jika bertahan hidup di desa sehingga menjadi PMI adalah alternatif yang masuk akal untuk maksud tersebut. Namun demikian, keberangkatan itu pada akhirnya bukan sesuatu yang dilakukan dan dialami dengan begitu saja dan dengan perasaan yang tegar setegar rasionalitas yang mendasari pengambilan keputusan untuk menjadi PMI itu sendiri. Perempuan harus meninggalkan suami dan anak-anak yang dicintainya. Ia pun harus hidup di negeri orang yang sama sekali tidak ia ketahui tradisi dan budayanya. Kehidupan dalam pekerjaan PMI sudah pasti berat. Seorang mantan perempuan PMI yang kini hidup di Gumelar, Banyumas (Restuadi. *et al.* [2], 2017) menyatakan:

“...nek bisa aja nganti maring luar negeri walaupun gaji seberapa pun besar karena memang benar *sih* ya kata, hujan emas di negeri orang dibandingkan hujan batu di negeri sendiri. *Perihe banget gitu loh...*”

Sari, begitu saja kita sebut nama perempuan mantan PMI ini, saat ini menjadi salah satu aktivis perempuan dan juga pemberdaya mantan PMI di Banyumas. Saat diwawancarai, ia menunjukkan sikap khas ‘aktivis perempuan’ yang progresif dan kritis. Namun, tak urung, saat bercerita tentang pengalamannya sebagai PMI, wajahnya berubah menjadi emosional. Sari boleh jadi adalah perempuan mantan PMI yang ‘cukup’ beruntung. Ia pulang dengan ‘utuh’ seperti ketika ia berangkat dan pulang membawa berkah ekonomi bagi keluarganya. Kini Sari hidup mapan secara ekonomi bersama suami dan anaknya. Beratnya ekonomi keluarga sebelum keberangkatan menjadi PMI dan perihnya kehidupan sebagai PMI inilah yang membuat masyarakat luas lembaga-lembaga sosial hingga pemerintah memberikan perhatian kepada perempuan PMI. Apalagi, tidak semua perempuan PMI ‘seberuntung’ Sari. Di antaranya, bahkan, mengalami perlakuan yang buruk seperti, menjadi korban *trafficking*, pelecehan seksual, penyiksaan, *underpaid*, dan atau pulang tinggal jasadnya. Namun, semua itu tidak berarti menjadi legitimasi untuk memalingkan perhatian kepada suami PMI. Sebagaimana anak-anak perempuan PMI yang harus diberi perhatian karena mereka dianggap

sebagai *left-behind children*, demikian pula suami PMI. Mereka adalah *left-behind couple*, pasangan yang ditinggalkan.

Suami PMI hidup dalam kesepian. Ketika istrinya berangkat untuk bekerja menjadi PMI ke luar negeri, semua orang tahu bahwa ada peran yang tak mampu dipenuhi oleh suami. Secara kultural, seorang suami dituntut untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada nafkah ekonomi bagi keluarganya. Keberangkatan istri menjadi PMI menunjukkan kegagalannya karena kondisi ekonomi keluarganya kemudian bergeser dan bergantung sepenuhnya dari remiten istrinya. Dalam kalimat yang lugas, pencari nafkah utama keluarga bukan lagi suami melainkan istri. Tidak semua suami PMI dan warga masyarakat umum siap menerima pergeseran dan perubahan seperti itu. Hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi suami PMI. ‘Kegagalan’ itu juga mengakibatkan tidak dihargainya perasaan seorang suami yang ditinggalkan istrinya. Bagaimana pun, istri adalah pasangan hidup seorang suami. Istri bukan hanya *sexual partner* dan ibu bagi anak-anaknya. Dalam terminologi Jawa, istri adalah *garwo – sigaraning nyowo*, belahan jiwa – bagi suaminya. Menurut seorang suami di Kalibagor, Banyumas (Restuadi, 2016):

“Yaa nek rasane yaa.....sing nggo batir cerita langka. Ibarate nek ana masalah apa, biasane nek bojone nang umah ‘kan curhate ming bojone. Akhire bojone langka ya kadang...curhate ming temen sing, temen deketelah...”

(Jawa: Yaa kalau rasanya yaa....yang menjadi teman bercerita tidak ada. Ibaratnya, kalau ada masalah apa, biasanya kalau ada istri di rumah *kan* dapat curhat kepada istri. Akhirnya, istri tidak ada ya kadang curhatnya dengan teman yang teman dekatlah)

Dalam ungkapan demikian, Maryono – begitu saja kita sebut nama suami PMI tersebut – menempatkan isterinya sebagai *partner*. Hal itu, sesungguhnya, menunjukkan bahwa ia bukanlah tipikal orang Jawa pada umumnya yang seringkali menempatkan isteri sebagai *konco wingking* yang lebih menempatkan isteri sebagai seseorang yang menjadi pembantu untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Sebaliknya, tersirat di balik pernyataan Maryono tersebut, isterinya adalah *partner* dalam menyelesaikan segala persoalan, baik di antara mereka berdua, rumah tangganya, kehidupan masing-masing, dan bahkan, persoalan-persoalan kemasyarakatan. Berangkat dari penempatan isteri seperti itulah, ketiadaan istri di sisi suami, seakan, menimbulkan lubang yang menganga dalam kehidupan suami itu sendiri. Erich Fromm (1900-1980), dalam karyanya *the Art of Loving*, menulis bahwa ikatan cinta kasih antara dua orang mampu meruntuhkan tembok penghalang di antara keduanya, muncul kedekatan, perasaan menyatu (*oneness*), dan pengalaman

semacam itu merupakan sesuatu yang menggetarkan bagi mereka yang mengalaminya. Pernyataan Maryono di atas, dengan demikian, menyiratkan kedekatan, *oneness*, sehingga ia harus “mengganti” peran istri itu dengan orang lain yang sudah barang tentu, tidak benar-benar dapat berperan seperti halnya istrinya. Kesendiriannya pun semakin tampak pekat jika dikaitkan dengan pernyataan Sodikun – nama seorang suami PMI di Gumelar yang disamarkan – berkaitan dengan ‘malam-malam yang sepi’ (Restuadi, *et al.* [1], 2018: 7-8):

“Nah *kiye sing abot banget. Nelangsa. Abot-abote wong kepingin ekonomine mandan ningkat. Resikone ya kudu gelem mbengi-mbengi dewekan, ora nana sing mbatiri turu*”

(Jawa: Nah ini yang sangat berat. Sengsara. Beginilah beratnya orang yang berkeinginan ekonominya agak meningkat. Resikonya ya harus mau malam-malam sendirian, tidak ada yang menemani tidur)

Seksualitas, menurut Ferrante (2015), adalah upaya dan pengalaman seseorang dalam mewujudkan dirinya secara biologis hingga emosi, sosial, dan spiritual. Seperti halnya laki-laki kebanyakan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, Sodikun masih hidup dalam seksualitas yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. Ia sama sekali tidak terdidik untuk akhirnya dapat mengetahui, mengerti, dan memahami seksualitas istrinya. Dalam situasi demikian, Sodikun juga sama sekali tidak mengetahui, mengerti, dan memahami apa itu relasi gender, khususnya dengan istrinya. Akhirnya, Sodikun juga tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami bahwa kepergian istrinya adalah substitusi bagi “ketiadaannya” sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama. Dalam situasi yang demikian, melepaskan hasrat seksualnya dengan perempuan lain, sudah pasti akan dikutuk oleh siapa pun mulai dari masyarakat di sekitarnya, anaknya, istrinya, apalagi, para aktivis mantan PMI dan pemberdaya mantan PMI. Namun demikian, mempertahankan hubungan dengan istrinya sekaligus mempertahankan keutuhan keluarganya, bukan sesuatu yang ringan untuk dijalani. Pada titik yang terakhir itulah, berbagai cara dilakukan oleh suami PMI mulai dari belajar dan mendalami agama, fokus mengasuh anak, hingga mencurahkan kerinduan dan kelelahan menunggu ketidakpastian dalam bentuk puisi.

7.3 Curahan Hati Suami PMI yang Rindu

Berbagai hal dialami oleh para suami PMI. Dalam buku yang disusun oleh penulis, *Suami Buruh Migran, Antara Pelepasan Hasrat Seksual dan Pengetahuannya tentang HIV/AIDS* (2016), berbagai kisah para *left-behind couple* mulai dari yang tidak semestinya terjadi hingga yang harus mengalami tidak ringannya peran sebagai *single parent* yang

tak pernah terbayangkan dan terpikirkan sebelumnya. Dalam buku tersebut, misalnya, ditunjukkan adanya sekelompok suami PMI yang sering menghibur diri di Baturraden, Banyumas. Sekelompok suami PMI yang lain, lebih memprihatinkan lagi, melakukan ‘ngecer’ (dengan vokal ‘e’ dibaca seperti ‘ai’ dalam kata ‘sampai’ dan ‘lunglai’) yaitu terminologi Jawa yang digunakan sebagai *plesetan* untuk mengganti istilah mengundang pekerja seks melalui SMS (*short message service*) dan memberikan layanan hubungan seks di rumah salah satu suami PMI itu. Di samping itu, dalam buku tersebut dikisahkan pula tidak sedikit suami PMI yang menjadi lebih religius karena belajar agama dan menjadi seorang ayah yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Muncul pula dalam buku itu, kisah seorang suami PMI yang menangis saat diwawancarai karena istrinya meminta diceraikan. Suami PMI ini sama sekali tidak habis mengerti, apa yang terjadi dan sedang dialami istrinya di perantauan, sementara suami itu merasa telah menjaga dirinya sebagai suami yang baik dan setia serta menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Beratnya hidup sendirian bagi suami PMI melahirkan berbagai perilaku sebagai upaya mengatasinya. Salah satu yang luput dari perhatian dan hampir tidak diketahui warga masyarakat umum adalah bahwa sebagian kecil dari suami PMI ini mencurahkan hatinya dengan jalan menulis puisi yang diunggahnya di *facebook* (FB).

Banyak orang meyakini bahwa saat ini merupakan era media sosial (medsos). Medsos merupakan perangkat interaksi sosial yang dilakukan – secara umum – melalui *smartphone*. Artinya, interaksi sosial saat ini bergeser atau mungkin tergantikan dari *face to face* menjadi ‘dalam jaringan’ (daring) melalui *smartphone*. Medsos menjadi unik karena ia bukan hanya dipergunakan untuk berinteraksi daring yang artinya bersifat publik tetapi ia juga dapat menjadi sangat personal dan privat oleh sebab hampir semua orang memiliki *smartphone* – karena dapat menjadi perangkat pelepasan dan pelampiasan berbagai hal bagi setiap orang pemilik *smartphone*. Medsos pun tersedia dalam beragam bentuk yang di antaranya, *whatsapp* (WA), *instagram*, *Line*, *Telegram*, dan *FB*. Secara personal, medsos akhirnya menjadi ruang bagi tiap orang untuk mengekspresikan diri. Dalam era medsos ini, seakan, tiap orang tidak menemukan ruang yang cukup dalam interaksi *face to face* untuk menunjukkan jati dirinya, menemukan identitas dirinya, dan memperoleh pengakuan (rekognisi – dalam istilah pemikir kritis Axel Honneth). Melalui medsos – khususnya *FB* – inilah sebagian di antara suami PMI di Banyumas berusaha mencurahkan dan menumpahkan isi hatinya.

Kerinduan suami PMI, sesungguhnya, adalah sifat yang dimiliki oleh setiap orang berkaitan dengan hasrat untuk bertemu yang dikasihi maupun dicintai. Kerinduan adalah manusiawi. Dalam *KBBI* daring/online (diakses pada 03/05/20), arti kata rindu adalah sangat ingin

dan berharap benar terhadap sesuatu. Dalam konteks arti yang demikian, bisa saja orang rindu kepada kampung halaman, rindu kepada masakan ibu, dan seterusnya. Bahkan, Bimbo, sebuah grup band Indonesia yang populer di tahun 1970 hingga 1980-an mengekspresikan kerinduannya kepada Rasul (Muhammad SAW) dalam lagunya berjudul ‘Rindu Rasul’ yang kemudian populer hingga saat ini. Di balik arti kata rindu yang demikian itu, ada yang hilang atau sesuatu yang tidak hadir yaitu segala sesuatu yang dirindukan itu. Bagi suami PMI, sudah tentu, yang tidak hadir dan, oleh karenanya, dirindukan itu adalah isterinya yang bekerja menjadi PMI di luar negeri. Berikut ini kerinduan yang dialami seorang suami PMI di Gumelar, Banyumas, sebut saja namanya Maryoto, yang ditumpahkannya dalam puisi pendek.

Dik,
kembali siang
ini.....
Rinduku padamu
menggerimisi
hati

Maryoto adalah suami PMI yang ‘tidak beruntung’. Saat diwawancarai pada pertengahan tahun 2018, ia tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya. Ia tinggal di rumahnya sendiri, sementara anak-anaknya tinggal bersama *mbahnya*, mertua Maryoto. Hari-harinya ia lalui sendirian di rumahnya. Tidak ada informasi tentang Maryoto dari warga masyarakat di sekitarnya maupun para aktivis mantan PMI di desanya yang menghubung-hubungkannya dengan perempuan lain. Kerinduan bisa hadir setiap saat, tidak mengenal ruang dan waktu, tidak pula hanya hadir dalam sepi malam. *Oneness*, sebagaimana dikemukakan Fromm di muka, yang dialami Maryoto pada isterinya, tampaknya, dihayati dan dialaminya setiap saat. Hal itu pun ditunjukkan dengan penggunaan kata ‘Dik’ dalam puisi tersebut. Dalam perkawinan di masyarakat Jawa, seringkali seorang suami memanggil istrinya baik dengan nama maupun tidak digunakan panggilan ‘Dik’. Kata itu merupakan kependekan dari kata ‘adik’, panggilan seseorang dalam struktur hubungan antara ‘Kakak’ yang lebih tua atau dituakan dengan ‘Adik’ yang lebih muda atau dianggap muda. Dalam struktur rumah tangga dan suami istri Jawa, oleh sebab laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga maka isteri dituntut untuk menghormati suaminya dengan mengawali panggilannya kepada suaminya dengan kata ‘Mas’, dalam hal ini artinya seseorang yang dituakan dan layak memperoleh penghormatannya. Kata ‘Dik’ dalam puisi di atas, dengan demikian, ekspresi dan representasi kemesraan hubungan Maryoto dengan istrinya.

Kerinduan tidak hadir dalam perasaan yang menggebu-gebu. Kemesraan dalam kerinduan semakin kental terasa dalam puisi di atas pada pengandaian ‘menggerimisi’. Dalam novel, lagu, maupun film drama percintaan, seringkali hujan gerimis digambarkan menyertai hubungan laki-laki dan perempuan dalam percintaan yang mesra. Dalam KBBI daring/*online* (diakses pada 03/05/20) gerimis diartikan sebagai hujan rintik-rintik. Dalam bahasa Inggris, gerimis disebut sebagai *shower* karena air yang turun dari langit seperti siraman air melalui *shower* di kamar mandi. Hujan seperti itu biasanya tidak membuat enggan orang untuk sejenak tetap melaksanakan kegiatan yang sedang dilakukan meskipun harus basah kuyup. Hujan seperti itu bukanlah hujan badai yang curahan airnya jauh lebih banyak dan disertai angin kencang serta, sudah pasti, dihindari banyak orang karena bisa berakibat banjir, misalnya. Gerimis, sebaliknya, adalah hujan yang dinikmati. Dalam kaitannya dengan kerinduan, gerimis adalah kerinduan yang mesra dan bertambah syahdu – khidmat, mulia, agung (KBBI daring/*online*. Diakses pada 03/05/20). Kerinduan Maryoto, dalam puisi di atas, adalah representasi kemesraan hubungan cinta-kasihnya yang syahdu dengan isterinya.

Puisi yang mengungkap kerinduan tidak mesti diungkapkan dengan mesra dan syahdu. Hal itu sangat bergantung pengalaman masing-masing individu. Kerinduan dirasakan dan dialami secara berbeda oleh masing-masing suami PMI. Seperti dinyatakan oleh Max Weber (Ritzer, 2000: 271), tindakan seseorang terhadap sesuatu merupakan hasil akhir atau representasi definisinya terhadap situasi di sekitarnya. Seorang suami PMI merasakan dan mengalami keterpisahannya dengan istri secara berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini ungkapan perasaan rindu Supri begitu kita namai seorang suami PMI juga dari desa yang lain di Gumelar dalam puisinya.

Pagiku tak bercelana
Kembali langit mengeluarkan air
seninya
Tanah kuyup dan lusuh
Seikat ilalang mengaduh
Seperti rindu yang terpasung jenuh

Hujan tampaknya masih menjadi fenomena alam yang dikaitkan dengan kerinduan. Namun demikian, kali ini hujan tidak menambah kemesraan dan syahdu melainkan pilu. Dalam KBBI daring/*online* (diakses pada 04/05/20) pilu diartikan sebagai sangat sedih. Syair sebuah lagu tahun 1970-an yang dipopulerkan oleh grup band *Favourite's Group* berjudul ‘Tetes Hujan di Bulan April’ barangkali dapat menggambarkan hal itu: “*Bila hujan turun ke bumi, Terasa sangat pilu dihati, Pada saat sunyi*

begini, Ku teringat padamu.....” (diakses dari ‘hatinusantara7.blogspot.com’ pada 04/05/2020). Kerinduan dalam syair seperti itu adalah ekspresi kehilangan. Merindukan sesuatu yang sudah tidak ada dalam kenyataan. Dalam puisi itu, Supri bukan figur yang pilu sebagaimana yang digambarkan dalam lagu itu. Di balik kepiluan Supri dalam puisi itu adalah kesadarannya bahwa istrinya pergi untuk sebuah tekad memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga yang telah disepakati bersama. Sejak awal, tidak ada upaya Supri sendiri dan istrinya untuk menangguk dan menghambat tekad itu karena keduanya yakin hanya dengan cara itulah isteri menjadi PMI kebahagiaan rumah tangganya akan dapat diraih dan diwujudkan. Supri dan istrinya sadar sepenuhnya, untuk tekad dan upaya itu, keduanya harus mengorbankan kebersamaan mereka.

Namun demikian, kedalaman pengorbanan itulah yang tidak disadari oleh Supri dan isterinya. Menurut Campenhautd, *et al.* (2005), setidaknya, ada 3 (tiga) tahap kepercayaan antarpasangan. *Pertama, courtship-seduction phase* yang intinya adalah interaksi berdasar kepercayaan. Dalam hal ini, Supri dan isterinya dipertemukan dalam cinta kasih yang merupakan ikatan yang didasari saling berbagi kepercayaan yang paling kuat di antara manusia. *Kedua, familiarity phase* merupakan ikatan dimana kedua orang yang berpasangan (*partners*) telah melakukan interaksi seksual sehingga keduanya telah merasa saling mengenal dan telah pula membangun ikatan yang semakin mendekatkan mereka berdua. Dalam fase ini, Supri dan istrinya sudah mencapai tahap ‘*garwo*’, keduanya bukan lagi *sexual partner* melainkan jiwa yang satu. *Ketiga, unravelling stage*. Menurut Campenhaustd, inilah tahap yang mendekatkan dan menampakkan keduanya pada ikatan hubungan yang hampir berakhir. Dalam tahap ini, misalnya dalam pengalaman hidup masyarakat Indonesia dikenal istilah “pisah ranjang” maupun “pisah rumah”. Harus diakui, bagi pasangan Indonesia, pisah ranjang maupun rumah, menjadi penanda berakhirnya hubungan sekaligus interaksi seksual. “....Seperti rindu yang terpasung jenuh....” merupakan ekspresi Supri yang tidak mampu mengatasi kedalaman pengorbanan dan rindunya. Dalam kepiluan itu, Supri menuliskan puisinya yang lain berikut ini.

Maaf rindu,,
Jikalau esok atau lusa
Aku tak lagi menyapamu
Sunyi sepi yang bertahun-tahun
kusenggamai
Telah membuatku lupa bentuk rupa
simpul senyum bibirmu
Yang dulu kau tanggalkan di
beranda rumahku

Keterpisahan atau melemahnya (*unrevelling*) hubungan antara Supri dan istrinya memang tak terhindarkan, justru demi sebuah niat yang masuk akal. Ikatan kontrak kerja PMI biasanya dijalani selama 2 (dua) tahun. Awalnya, jangka waktu seperti itu hanya dibayangkan seperti angka '2' sehingga tidak terpikir bahwa itu 2x12 bulan, 24x30 hari, atau 730x24 jam dan seterusnya. Keterpisahan memang bukan sekedar deret angka seperti itu. Keterpisahan itu menumbuhkan rasa rindu yang penuh kemesraan dan syahdu hingga pilu. Pada titik tertentu, kerinduan akan sampai pada titik seperti sebuah lagu pada tahun 1980-an yang dipopulerkan oleh Diana Nasution, "Benci tapi Rindu". Benci dan rindu adalah dua hal yang berbeda secara mendasar sekaligus tak terpisahkan. Namun, dalam cara berfikir dialektika Karl Marx, untuk mengetahui benci, orang harus tahu dulu tentang rindu, demikian pula sebaliknya. Meskipun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Campenhautd, *et al.* di muka, ketika kerinduan sampai pada tahap *unrevelling* yang disadari oleh Supri dalam bentuk 'pisah ranjang' dan 'pisah rumah' itu, kerinduan ini dapat berubah menjadi kebencian sebagaimana yang diungkapkan Supri dalam puisi di atas, senyum yang ditanggalkan di beranda sudah tidak lagi membuat hatinya penuh cinta dan kasih karena '*sunyi sepi yang bertahun-tahun..... Telah membuatku lupa bentuk rupa simpul senyum bibirmu*'. Mengingat rata-rata usia perkawinan para perempuan PMI masih cukup muda, antara 5-10 tahun dengan usia anak-anak yang juga masih BALITA hingga seusia anak Sekolah Dasar, keterpisahan itu memang rawan dengan isu-isu seksualitas pasangan tersebut. Kedekatan fisik dan geografis pasangan PMI seperti yang dialami Supri memang menjadi persoalan yang mengendap dan seperti bom waktu yang setiap saat mengintai dan meledak menjadi konflik yang tidak dikehendaki. Supri tidak tahu persis kapan akan bertemu dengan istrinya karena tidak semua perempuan PMI beruntung diberi ijin untuk menengok keluarganya di tanah air dalam jangka waktu tertentu.

Saling percaya adalah ikatan yang paling fondasional, sejak awal pernikahan hingga dalam upaya mempertahankan keutuhan pasangan. Ijab kobl adalah akad, sebuah janji untuk sehidup semati dalam perkawinan dan keluarga. Hal itu tidak berarti melalui akad itu perjalanan perkawinan menjadi mulus tetapi semua bentuk persoalan dimuarakan kepada akad perkawinan itu sehingga keluarga tetap dapat dipertahankan dan utuh. Saptana, begitu saja kita samarkan namanya, suami PMI di salah satu desa di Gumelar, Banyumas, harus menghadapi kenyataan pahit atas janji istrinya. Berikut ini kegalauan Saptana yang diungkapkannya dalam puisi berbahasa Jawa.

*Godhong-godhong garing katiup
 angin sasi september
 Kabur kabuncang buncang mbuh ning
 endi tumibane
 Kaya ucap lan pangandikanmu
 ora bisa tak ugem
 Garing,,ngudhari kabeh lempitane
 janji
 tak arep tak antu antu
 Malah kabeh kagubel kandeke lebu
 Jero nunjem ng ati gawe tatu
 Kangen lan tresna
 Mung tembang wayah wengi
 Ngancani sepi
 Awan wengi esuk sore saben wektu
 (Jawa: daun-daun kering tertiupe
 angin bulan september
 Kabur tergoncang-goncang entah dimana
 akan jatuh
 Seperti ucap dan ucapanmu
 yang tidak bisa kupegang
 Kering,,melepaskan semua lipatannya
 janji
 kuharap ku tunggu tunggu
 Malah semua terjebak tebalnya debu
 Dalam menghunjam di hati membuat luka
 Rindu dan cinta
 Hanya lagu di malam hari
 Menemani sepi
 Siang malam pagi sore setiap saat)*

Menurut George Herbert Mead (Ritzer, 2000) bahasa adalah simbol signifikan yang dipertukarkan antarorang dalam mengelola interaksi sosial. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, kalimat yang ditulis maupun diucapkan seseorang memiliki arti yang sama bagi pembaca maupun pendengarnya sehingga meminimalisir salah kelola interaksi sosial. Saptana tentu bukan tidak menguasai bahasa Indonesia tetapi, bagi warga masyarakat Indonesia pengguna aktif bahasa daerah seperti masyarakat Jawa (Tengah dan Timur), penyampaian segala sesuatu melalui bahasa Jawa lebih terasa mengena. Seperti, penggunaan kata “*pangandikanmu*” pada puisi di atas yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “ucapanmu”. Pengertian dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menunjukkan adanya struktur hubungan antara subyek penulis Saptana dengan obyek yang dituju yaitu istri Saptana. Dalam terminologi Jawa, sebaliknya, penggunaan kata *pangandikanmu* hanya ditujukan kepada seseorang yang dihormati yang dalam hal ini, dapat dikatakan, Saptana

sangat menghormati istrinya. Padahal, dalam pola bahasa dalam perkawinan Jawa, suami dapat menggunakan bahasa *ngoko* (stratifikasi paling rendah dalam bahasa Jawa) kepada istrinya. Sebaliknya, istri menggunakan bahasa *kromo pasar* hingga *madyo* (stratifikasi yang lebih tinggi daripada *ngoko*) kepada suaminya. Dalam puisi di atas, Saptana sesungguhnya dapat saja menggunakan kata “*omonganmu*” kepada istrinya, sedangkan kepada Saptanalah istrinya menggunakan kata “*pangandikanmu*”. Di sinilah, bahasa Jawa digunakan Saptana untuk mengekspresikan diri dengan penuh rasa hormat kepada istrinya.

Dalam puisi di atas, dapat dikatakan tersembunyi kegeraman. Dengan demikian, kerinduan bukan hanya memuat kemesraan, kesyahduan, kepiluan maupun benci tapi rindu melainkan juga kegeraman. Sebagaimana telah disinggung di muka, akad adalah bentuk puncak dari ikatan dalam perkawinan. Ikatan ini didasari oleh saling percaya antara suami dan istri. Ketika Saptana tidak memperoleh tanda-tanda (simbol) yang jelas dari istrinya, ia berhenti berharap karena yang ditunggu dengan sepenuh harapan tak kunjung datang. Bahkan, bagi Saptana ketidakjelasan tanda-tanda itu “.....*Jero nunjem ng* (‘ning’/di – pen.) *ati gawe tatu.....*”. *Tatu* adalah luka yang mungkin saja tak seberapa tetapi ia dalam dan, dipastikan, meninggalkan bekas. Dalam hal ini, apa yang dialami oleh Saptana sangat membekas dan tak mudah hilang. Boleh jadi, inilah luka dalam ikatan kepercayaan antara sebagian pasangan PMI yang tidak disadari oleh suami isteri yang mengalaminya sendiri maupun banyak pihak yang memberikan perhatian kepada perempuan dan keluarga PMI.

Ujung dari kerinduan yang beragam warna dan rasa adalah keputusan. Sebagaimana telah diurai di muka, bagi suami di Banyumas, istri bukan sekedar *sexual-partner* maupun *konco wingking*. Istri bukan sekedar pasangan untuk memenuhi hasrat seksual semata. Ia bukan pula seseorang yang disingkirkan dari urusan publik suami. Justru, keberadaan suami dalam ranah publik sangat ditentukan peran istri dalam mendampinginya. Istri, bagi suami, adalah *batir*, teman yang selalu hadir setiap saat, dalam duka maupun suka, dalam urusan rumah tangga, privat, hingga publik. Dalam pemaknaan yang demikian, ketidakhadiran isteri seperti lubang menganga pada diri dan eksistensi suami. Sebagai suami PMI, ia bukanlah seorang duda yang posisinya “lebih beruntung”: duda adalah seorang laki-laki yang pernah menikah kemudian bercerai, hidup maupun mati. Ketidakhadiran isteri dalam hidup seorang duda, setidaknya, dikehendaki dengan sadar oleh suami maupun isteri atau disadari karena adanya proses alamiah – kematian. Dalam posisi seperti itu, duda dapat memulai membangun kehidupan baru. Suami PMI bukan duda. Ia menunggu kehadiran kembali istrinya. Namun, seperti pekerjaan yang digeluti istrinya sebagai PMI, ada ketidakjelasan di situ. Meskipun

sebagai PMI ada kontrak tertulis tetapi pengelolaan atas kontrak itu selanjutnya bergantung kepada pihak yang menerima jasa kerja para migran. Tidak mengherankan kalau kemudian terjadi *underpaid* atau bekerja hampir 24 jam sehari. Tidak sedikit pula dikisahkan bahwa dalam kontrak tertulis mengasuh anak, kenyataannya bukan hanya anak yang diasuh tapi juga lansia. Sedemikian itu pula ketidakjelasan menunggu yang dilakukan oleh suami PMI. Awal-awal bulan kepergian istrinya, Maryoto masih dapat berbalas *chatt* melalui *whatsapp* dengan istrinya tetapi setelah lebih dari 12 bulan, berbalas *chatt* itu sudah jarang terjadi karena istrinya makin jarang membalas. Maryoto bukan tidak paham kondisi kerja istrinya namun kesendiriannya ia hidup sendirian dan hidup terpisah dengan anak-anaknya membuat kerinduan yang pekat menguasai dirinya. Di muka, puisi Maryoto sedemikian romantis tetapi dalam puisi berikut ini mengungkap adanya perubahan dalam dirinya.

Selamat jalan sepi!!!
Kecuplah dulu bibirku
Sebelum kau pergi
Maaf..

Jika ternyata aku telah berselingkuh
mencumbu desing pagi

Menurut pemikiran Keith Hart (Rolis, 2013), pekerjaan sebagai pekerja migran merupakan salah satu bentuk pekerjaan sektor informal di bidang jasa. Jenis pekerjaan seperti itu tidak berorientasi keuntungan selain hanya memperoleh pendapatan. Pekerja sektor informal umumnya tidak terdidik dan tidak memiliki ketrampilan serta tidak dibekali oleh modal selain tenaga fisiknya. Jika yang dicontohkan dalam sektor itu adalah pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, dan pembuang sampah maka akan lebih mudah dibayangkan dan, bahkan, diukur. Namun, jika pekerja migran yang bekerja dalam kegiatan kerumahtanggaan di luar negeri, jauh lebih sulit dibayangkan, apalagi diukur. Tidak dapat dibayangkan seperti apa pekerjaan yang dijalani dan bagaimana pula pekerja migran itu diperlakukan oleh penerima jasa kerjanya. Tidak pula dapat diukur keberhasilannya, baik dalam artian *remitensi* maupun kesejahteraan hidupnya di negeri orang. Maryoto sudah tentu tidak mampu berfikir sampai di situ. Ia adalah tipikal orang Jawa yang disadari atau tidak lebih meresapi “*mangan ora mangan sing penting kumpul*” ketika kepahitan hidup tidak pula kunjung usai meski isterinya telah berjuang di negeri orang demi perbaikan ekonomi keluarga.

Satu hal yang menarik pada puisi yang disusun oleh Maryoto di atas adalah pemberian warna merah pada kata “Selamat” sebagai *highlight*. Warna adalah warna. Biru adalah biru, merah adalah merah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari warna memiliki makna. Artinya,

konstruksi sosial masyarakat melekat hampir setiap warna dengan makna-makna tertentu yang makna-makna itu hampir diketahui semua orang dalam konteks sosial yang sama maupun berbeda. Bagi masyarakat Tiong Hoa, pada setiap perayaan tradisional warna merah selalu mendominasi (Apriliani, 2018). Dalam tatacara seperti itu, warna merah menandakan keceriaan dan kegembiraan. Siswa-siswa SD diajarkan, misalnya, arti warna bendera nasional Indonesia, merah di atas dan putih di bawah. Merah artinya berani dan putih suci. Namun demikian, hampir semua orang juga mengetahui dan mungkin juga mengalami bahwa warna merah digunakan oleh guru-guru SD untuk memberi nilai rendah garapan siswa (sama dengan dan di bawah angka 5 dengan *range* 1-10). Jauh sebelum berkembangnya teknologi informasi, ketika surat-menyurat antarorang masih dominan, tulisan tangan berwarna merah adalah penegasan urgensi tulisan dan atau yang berkaitan dengan ketidaksukaan penulis kepada alamat yang dituju. Makna warna merah dalam puisi Maryoto di muka itulah yang lebih menunjuk kepada makna yang terakhir ditulis itu: urgensi dan ketidaksukaan. Puisi Maryoto di muka menunjukkan kelelahannya menanti kerinduan yang tidak kunjung terlampiaskan. Ia putus asa dan telah sampai pada titik melupakan dan menanggalkan kesepian itu. Dalam terminologi masyarakat Tiong Hoa, dengan warna merah itu, Maryoto juga dapat dikatakan optimis dalam menghadapi upayanya untuk berubah dan meninggalkan kesendiriannya, kesepiannya.

7.4 Kesimpulan

Suami PMI hanyalah manusia biasa. Ia seorang laki-laki yang “tidak beruntung”. Ia tidak beruntung karena tidak mampu menjadi figur utama tempat seluruh anggota keluarganya menggantungkan nafkahnya. Ia juga tidak beruntung karena harus hidup terpisah dengan isteri yang dicintainya demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sebagian di antara suami PMI itu juga tidak beruntung karena dianggap tidak mampu untuk mengasuh anak-anaknya yang juga ditinggalkan oleh ibunya. Tidak semua suami PMI mampu berdiri tegak dan tegar menghadapi itu semua. Sebagian *melacur* pergi bersama PSK sebagian lagi hidup tanpa ikatan perkawinan dengan perempuan lain (berselingkuh) tetapi tidak sedikit pula suami PMI yang menjadi lebih religius dan menjadi orang tua tunggal yang bertanggung jawab sepenuhnya bagi anak-anaknya.

Bagi sebagian kecil suami PMI, puisi adalah tumpahan hati segenap perasaan. Puisi menjadi ruang bagi suami PMI untuk merawat jiwanya sendiri agar tetap waras. Dalam kesendirian dan kesepiannya, berbagai hal menjadi mungkin. Ia tetaplah laki-laki dewasa yang memiliki kuasa atas diri dan kehendaknya sendiri. Ia mungkin saja dapat memutuskan untuk “berbelok” ke kanan atau ke kiri, atau memilih lurus

demis anak dan istrinya, demis keluarganya. Puisi memberinya kesempatan untuk mendefinisikan ulang dunianya: apa, siapa, dan bagaimana istrinya, anak-anaknya, dan keluarga baginya. Bagi suami yang berkumpul bersama istri dan anak-anaknya, ruang definisi semacam itu telah ditentukan secara kultural dengan kuat sehingga ruang definisi individual menjadi sangat sempit dan terbatas, lebih karena kultur mengajarkan bahwa memang seperti itulah seharusnya sebuah keluarga. Bagi suami PMI yang berkesempatan menulis puisi, ruang re-definisi itu menjadi tampak lapang. Rutinitas sehari-hari dapat saja ia hentikan barang sejenak untuk memikirkan dan menimbang ulang segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya. Puisi, bagi suami PMI, bukanlah produk akhir dari sebuah ruang kosong melainkan dari perenungan mendalam dan pengalaman batiniahnya atas kehidupan kesehariannya yang sepi dan sendiri.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, Ahmad, Daniel Susilo, Nurannafi Farni Syam Maela, Irmia Fitriyah. 2018. *Komunikasi Keluarga Buruh Migran Indonesia: Masalah dan Penyelesaian*. JIKE Vol 1, No 2, Juni. Universitas Muhammadiyah, Cirebon.
- Campenhoudt, Luc Van (eds.) (2005). *Sexual Interactions and HIV Risk, New Conceptual Perspectives in European Research*. Taylor dan Francis, London, UK.
- Ferrante, Joan. 2015. *Sociology, A Global Perspective*. Cengage Learning, Stamford, USA.
- Fromm, Eric. *The Art of Loving*. Diakses dari <http://www.apocatastasis.net/occultlibrary/art-of-loving-erich-fromm.html> pada tanggal 31 Desember 2017.
- Hanny Apriliani. 2018. *Muslim Tionghoa: Antara Tradisi dan Agama (Studi tentang Eksistensi Budaya Tionghoa di Kalangan Masyarakat Muslim Tionghoa Banyumas)*. Skripsi, tidak diterbitkan. Jurusan Sosiologi, FISIP, UNSOED, Purwokerto.
- Jamilah dan Rasikh Adilla. 2013. *Relasi Suami Isteri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, bulan Juni, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Moh. Ilyas Rolis. 2013. *Sektor Informal Perkotaan dan Ikhtiar Pemberdayaannya*. Makalah dalam Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2, Oktober. UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Muhammad Mu'in dan Erika O.D Isgiantika. 2018. *Kualitas Hidup Suami Dengan Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Migran*. Journal of Holistic Nursing and Health Science. Volume 1, Nomor 2, Oktober, UNDIP, Semarang.

- Nainggolan, M.Si., Togiartua. (tanpa tahun). *Gender dan Keluarga Migran di Indonesia*. Puslitbang Kemensos RI. Jakarta.
- Restuadhi, Hendri. 2016. *Suami Buruh Migran, Antara Pelepasan Hasrat Seksual dan Pengetahuannya tentang HIV/AIDS*. Diterbitkan atas kerjasama Jurusan Sosiologi FISIP UNSOED, PPGAPM-LPPM UNSOED, dan Penerbit 'Tanah Air Beta', Purwokerto.
- Restuadhi, Hendri, *et al.* (1). 2017. *Pegiat Buruh Migran Di Banyumas dan Praktik Parenting Serta Kesadaran Peran Publik-Domestik pada Suami Buruh Migran Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pola Asuh Terhadap Left-Behind Children*. Laporan Penelitian Riset Institusional, FISIP-LPPM, UNSOED, Purwokerto.
- Restuadhi, Hendri, *et al.* (2). 2018. *Praktik Parenting dan Kesadaran Relasi Gender dan Seksualitas Suami Pekerja Migran Banyumas*. Makalah yang dipresentasikan pada Kongres APSSI III dan Konferensi Nasional Sosiologi VII, Mataram, Lombok, NTB.
- Ritzer, George. 2000. *Sociological Theory*. Sage Pub. Ltd., California, USA.
- Septia Cornia Sari dan Desintha D. A, MA. 2014. *Pola Negosiasi Mantan Buruh Migran Perempuan Dalam Keluarga (Studi tentang Keluarga Mantan Buruh Migran Perempuan di Desa Parang, Magetan, Jatim)*. UGM, Yogyakarta.
- Simmel, Georg. 1950. *The Sociology of Georg Simmel*. Translated by Kurt H. Wolff. Free Press, New York, USA.
- Wahyu Utamidewi, Deddy Mulyana, Edwin Rizal. 2017. *Pengalaman Komunikasi Keluarga pada Mantan Buruh Migran Perempuan*. Jurnal Kajian Komunikasi Vol. 5., No 1., UNPAD, Bandung.

8. Migrant Woman's Experience Matters: Indonesian Domestic Workers' Migrant Activism in Hong Kong as Reflected in Arista Devi's Collection of Short Stories "Empat Musim Bauhinia Ungu"

**Oleh:
Tri Murniati**

8.1 Introduction

Hong Kong government's rule on foreign domestic helper states that foreign domestic helpers are entitled to have a day off every week. This applies to any foreign domestic helpers. However, this is not to say that all of these migrant women are granted a weekly day off. Some of them do not get the chance of having it for various reasons. This is actually a violation of the government rules. This condition is well illustrated in the stories written by the Indonesian Domestic Workers (IDWs) explicating that some employers are not giving their employees the right to enjoy the weekly day off. In addition, their written narratives—which generally portray IDWs' everyday experiences as foreign domestic helpers—illustrate activities that offer a different shade to these women's migratory experience, for instance their participation in migrant [labor] activism.

Arista Devi, an IDW, vividly shares stories of IDWs working in Hong Kong or what she identifies as the country of purple Bauhinia in her written narrative. Later on, in one of her short stories, she clearly mentions that purple Bauhinia is Hong Kong's national flower. Her semi-fiction creations compiled in a collection titled *Empat Musim Bauhini Ungu: The Story of Migrant Workers in Hong Kong* (Four Seasons of the Purple Bauhinia: The Story of Migrant Workers in Hong Kong) in general shares the migratory experiences of IDWs in Hong Kong. Indeed, her stories seem real because of the proximity to the reality of IDWs daily life in Hong Kong. However, there are also stories stemmed completely out of imagination. Thus, her stories are considered to fall between a memoir and fiction. What is interesting about her short stories is how some of her stories highlight IDWs' migrant activism in Hong Kong as part of IDWs' overall migratory experiences.

Furthermore, Devi's stories provide a different perspective on domestic employment and are heavily packed with issues such as common challenges faced by IDWs, migrant [labor] activism advocacy, peer education as well as the imbued notion of solidarity and sisterhood. All of these have brought me to examine her short stories deeper and explore them more by taking the focus on IDWs' daily experiences, migrant activism and migrant woman solidarity. I argue that as expressed

through the selected stories, IDWs' participation on migrant activism is activated by their personal experiences. Experiencing difficulties working as foreign domestic helpers is what encourages these women to contribute more to their migrant community, helping their fellow migrant workers through peer education and advocacy.

In addition, experiencing difficulties in doing their works as foreign domestic helpers pushes them to search for resources and viable solutions in order to minimize problems. These women's personal experiences as migrant labor have brought the main characters a huge shift on their perceptions of what it is like to be a foreign migrant worker to the point that they have become aware of their situation and condition as foreign domestic helpers in Hong Kong. In short, with their newfound knowledge, the main characters are able to execute acts in solving their everyday problems and their success have motivated these women to take part in migrant [labor] activism.

In this short essay, two short stories are selected purposely because of the emphasis on migrant activism deeply embedded in each of the stories. These stories are "Catatan Perempuan Demonstan" (The Diary of a Woman Activist) and "Bangkitlah, Wahai Perempuan" (Rise Thou Women!). In discussing the activism of the main characters, their involvement and impact, I employ Jouni Häkli's and Kirsi Pauliina Kallio's notion of political ordinary which puts emphasis on one's everyday life experience. This particular notion valorizes the seemingly mundane experience. In other words, mundane experience matters. Through this particular personal experience, one is gaining insights and at the same time developing awareness as they change their behaviors or executing acts to overcome problems on their daily life. By applying it to setting of these migrant women, I propose a notion of migrant awareness referring to the newfound consciousness on their everyday migratory experience. Employing a qualitative research method, this essay focuses on data interpretation in the descriptive forms. A primary data source used is the collection of short stories written by Arista Devi and a secondary data source is taken from theory on political subjectivity and other related literatures. First, to collect data that support the argument, I apply close reading. Providing strong reasonings and evidences is the next step in order to elaborate a good discussion and analysis. Lastly, conclusions are displayed to wrap up the discussion by emphasizing the findings made which prove the argument made in the first place.

To contextualize IDWs' migrant awareness depicted in the aforementioned short stories and the main characters' participation in migrant [labor] activism, I start by explicating related views on the notion of political ordinary and the significance of everyday experience. This overview provides background on the importance of one's experience and

how such an experience can lead one to gain insights and develop awareness. The discussion section falls into two subdiscussions. In the first subdiscussion, I provide short summary of the two short stories and discuss the main characters' challenges in their employment and their strategies to overcome the problem which imply the application of what Häkli and Kallio identified as mundane political subjectivity. The second subdiscussion underlines the main characters' changed perspectives and new insights which motivate and encourage them to help their fellow migrants with similar problem. Based a careful analysis, I propose the following conclusions: first, the main characters learn a lot from their everyday migratory experience which poses various difficulties and gain insights from this particular daily experience. Second, the protagonists—motivated and encouraged by the newfound knowledge embodied as migrant awareness—decide to devote themselves in helping their fellow IDWs by joining migrant [labor] organization/union which focuses on helping and advocating foreign domestic helper in Hong Kong.

8.2 Literature Review: Everyday Life Experience and the Notion of Political Ordinary

Experience matters no matter how mundane and trivial it may seem. People can make meaning from their everyday life experience and gain insights. Raymond Williams as quoted in Scott (1988) defines experience as “knowledge gathered from the past events, whether by conscious observation or by consideration and reflection” (p. 60). This is to say that experience has the potential as a source of information and knowledge as individuals reflect on their past experiences and learn from it. In a similar vein, Scott (1988) explicates that knowledge can be generated through people's experience (p. 61). Both scholars underline the significance of life experience as important. Thus, experience matters.

Related to the significance of the experience, Häkli and Kallio (2018) propose a notion of political ordinary which underscores the impact of everyday life experience toward individuals. This mundane life experience according to Häkli and Kallio (2018) provides a space “in which people take up issues that stand out as important to them” (p. 57) to cultivate political subjectivity. It means that everyday life experience serves as the bedrock to foster one's [political] subjectivity by taking everyday life issues seriously as they have something at stake. Häkli and Kallio (2018) further explicate that they introduce the notion of political ordinary “as agency based on the capacity of human beings to carry out acts that are undetermined and unexpected, and thus capable of challenging, opposing, negotiating, maintaining, and readjusting prevailing conditions” (p.57). It means that this particular notion emphasizes on the ability to execute a proper act—whether it is to

challenge, to oppose, to negotiate, to maintain and to readjust—in the condition and situation one has. This notion also implies one’s understanding on the current situation one might have. Mapping the prevailing situation well leads them to be able to think about the best solution to overcome everyday life problems. As a result, they are capable to carry out acts.

The concept of political ordinary brings out an understanding on how dynamic people’s everyday life is and through this mundane life, a political subject emerges who “is constituted by everyday political agency” (Häkli and Kallio, 2018, p. 58). The concept indicates that people not only become a political subject, but they are also created by their “everyday political agency” implying the ability to execute acts in everyday situations. This understanding, according to Häkli and Kallio (2018), is important in developing a greater comprehension of political subjectivity which originally emerges from “everyday experiences that are related to key moments of mundane politicization” (p. 59). Therefore, valorizing everyday experience is the key to this particular notion.

8.3 Discussion

8.3.1 Migratory Experience, IDWs, and the Lesson Learnt

The two short stories discussed in this essay illustrate the everyday migratory experience of the main characters who work as foreign domestic helper in Hong Kong. The first short story titled “Dairy of a Woman Activist” tells about the migratory journey of a nameless main character highlighting her participation in the sphere of labor activism. She opens her story admitting that the job training she had in Indonesia is not enough as she struggles to cope with the domestic work Hong Kong. The main character sees the realities of working in Hong Kong as completely different from what she is trained emphasizing the lack of training she had as well as lack of important information and knowledge on migrant labor rights. The protagonist also has to accept the fact that she is underpaid under the request of the agency staff simply because she is new to her job. Later on, she requests her agency to end the contract and find her a new employer. At first, the agency staff denies her request, but the main character insists that she deserves a better salary. After struggling for a couple time with new employers, the main character finally gets a better employer with a better job condition and salary. Reflecting on her own personal experience, she promises herself to help fellow foreign domestic helpers who face similar problems. The main character fully understands how vulnerable she is as foreign domestic helper and without enough information and knowledge, things are not getting better. That is why she has made up her mind to help educate her peers.

The second story titled “Rise Thou Women!” evokes a similar impression, the struggle to cope with domestic employment in Hong Kong. The main character, also nameless, experiences a difficult situation as she is sexually harassed and worst, she almost gets raped by one of her employer’s family member, the Grandpa. She also has to struggle to clear her name as she is accused of stealing money despite the fact that she almost gets raped. Instead of accepting the accusation, the protagonist gathers her courage and determination to inform the police about what actually happens. To her agency, the main character asks for a contract termination as she could not take it any longer the difficulties in her employment. Her past experience has taught her to be more selective in finding employers. She makes herself aware of foreign migrant’s rights and she decides to spend her day off educating herself by participating in a migrant labor union. After joining the union, the protagonist begins to realize that there are other fellow domestic helpers who have worse working condition than hers. This makes the main character even more determined and motivated to dedicate herself to help her peers.

Vividly pictured in both stories, the main characters are struggling in doing their works as foreign domestic helpers. The difficulties experienced, according to these women, are partly caused by the insufficient training they got before deployed in Hong Kong. Both protagonists admit that the training—which includes language and other skills as well as information about host country and its rules and regulations on foreign domestic helper—is not enough to prepare them for the job in Hong Kong. This concern is clearly illustrated in the following exchanges:

Insufficient information about the host country made me lost in this land of concrete once I arrived in Hong Kong. Even when my first contract was terminated after a few weeks of working made me clueless and confused. I had no ideas where to go and who would help me when things got worse. There was only one answer. I had to listen to and obey what my agency staff wanted to me do, left me no room to argue. (Devi, 2013, p. 38);

First time I came to this host country, I knew little about working situation and condition in Hong Kong. What I knew well were about good employer, light work, high salary, weekly day off, and etc. Most IDWs knew this kind of information. Once I got deployed, I began to doubt any information I got from the broker and the agency. What I had experienced was way different from what I had expected. (Devi, 2013, p. 110).

Both quotes underline the urgency of having sufficient information about the host country in relation to the working condition and situation. Lack of information affects much on how the protagonists cope with the

challenge of working in Hong Kong. When they have problem, for example, they have no ideas how to get a practical solution. This is well illustrated in the first quote. The second quote supports the idea that IDWs should be given sufficient and correct information about the host country.

Without enough information, IDWs are not aware, for example, of any contract violation that might happen in their employment. The main character in “Diary of a Woman Activist” admits that she could not comprehend her own experience whether or not it is right to be paid differently from what it is written in the signed working contract. She shares her thought as follow:

Lack of information provided by the agency made me clueless about what I had been through. Deep inside my heart, I could not take this. I felt that this was a fraudulency! The money I got was not the same amount as what was mentioned in the signed contract. Later on, I realized that what just happened to me was known as underpayment. This kind of problem was no stranger to a migrant worker, like me. (Devi, p. 39)

The above quote indicates the inability of a foreign domestic helper to identify a fraudulent in her employment. One of the reasons mentioned is because she does not have any information about it. The different power relation between the employer and employee also exacerbates the condition and situation. As the employee, a foreign domestic helper might not be able to complain upon this unfair treatment underlining a subordinate and weaker position. Even though the protagonist realizes that there is something wrong as she narrates “I felt that this is a fraudulency,” but she is helpless. To make things worse, the agency staff usually favors the employer. As a result, a contract violation as illustrated in the quote happens, leaving the employee in a disadvantaged position, just like the main character in “Diary of a Woman Activist.”

In a similar vein, the main character in “Rise Thou Women” argues that without a good source of information, a foreign domestic helper like her does not know where to go or what to do when facing problem. During her employment, she experiences sexual harassment from the father of her employer (Grandpa). One day, she almost gets raped by the Grandpa. Luckily, she is able to escape, however this does not mean that she is safe. Later on, when she is accused of stealing money, the main character learns that this is the backlash of the previous event. She admits that it is difficult to solve the problem herself. It drives her crazy. The main character’s distress is shown in the following quote:

I was muddled and did not know where to go and what I should do next. If I told Grandma or my employer, they might not believe me and worse, I might get terminated. I had just finished my seven-month installment. I needed this job and the money for my family back home. Finally, I decided to keep silent. At least, I was safe. I was actually afraid if Grandpa would do that again. I was confused thinking about the best solution for my problem. (Devi, 2013, p. 113)

Helplessness is certainly implied in the above quote. The fear of losing her job prevents the main character to report the sexual harassment to her employer because the main character thinks that her employer may not believe her. Problem with trust emerges amplifying the status of the employee as a foreigner in the host country. It makes the employee feel reluctant to report or complain any discomfort. This, in particular, heightens the existence of the abstract borders—the sociocultural and economy differences, for example—laid between the employer and the employee. Employer as the one who pays the employer has a higher socioeconomic status compared to the employee. In addition, some employers tend to treat their employees as they please. This is also well illustrated in Devi's short stories. In the story "Rise Thou Women" for instance, the main character does not want to take the risk of being terminated because she relies on her employment's income to support her family's daily life as she narrates "I needed this job and the money for my family back home." As a result, she lets her problem unsolved even though it bothers her much.

Nevertheless, problems can no longer be ignored because things might get worse and worse. In short, both of the main characters finally make up their mind and come up with a decision to fight the injustices they experience. Most prominently because their right is at stake, both of them are willing to take the risk of ending their current employment contract. This, of course, invite disagreement from the staff in their agency. In "Diary of a Woman Activist," the decision to resign results in a conflict between the main character and the agency staff, Miss Lam. The main character argues and defends her stance explaining that it is her current situation which pushes her to have no better plan other than to terminate her current working contract. Therefore, the decision does not come from vacuum. The heated argument is seen in the following:

"What? You want to terminate your contract? How stupid you are! You already have a good employer, show some gratitude, will you!" Miss Lam roared at me.

"I am sorry Miss Lam, the reason why I am in Hong Kong is to earn money. What is the point of working here if I don't earn any money? When I return home, can I bring my employer with me?" said I flatly but firm. Some agency staff, fellow IDWs, and employers who were in

the same room were surprised listening to my exchange with Miss Lam. (Devi, 2013, p. 40)

“I am sorry Miss Lam, my employer and I, both pay the agency. Why does the agency treat us differently? If an employer is allowed to look for a new maid while I am still working there, why can I do the same? Unless I don’t need to pay anything, Miss Lam deserves to get mad at me,” I argued and tried to remain calm. (Devi, 2013, p. 42)

The above quotes show that the main character argues that she deserves to have a better payment for her work. She sees no point of continuing her contract if she does not get the salary she deserves. Because she realizes that it is a contract violation, the main character understands that her right is violated. Therefore, she fights against this unfair treatment. Observing and learning from her own experience, the main character finally recognizes and comes to an understanding that having sufficient knowledge on migrant rights can be a leverage to have a better employer and to gain a better bargaining position in the eyes of the agency.

The second short story, “Rise Thou Women” also illustrates the same fighting spirit. After the helplessness, the main character realizes that she could not let things become worse. She has herself at stake. This encourages her to take action and decides to fight for the injustices. She briefly narrates below:

All of sudden, I got my courage as I could not take it anymore. I had to work hard with a small payment and then had to deal with Grandpa. To make it worse, I got accused of stealing which they did not have any proof that I stole their money. *If I did not fight back and defend myself, who else would help me.* (Devi, 2013, p. 114, italicized from the original)

The narration above shows the main character’s determination to change her current situation. This means she does not want to let the problem getting worse. It implies insights she gains from her experience. What is interesting from the above quote is the italicized part. I interpret this as if the author (Arista Devi) would like to emphasize the idea of survival. If you want to survive, you need to be able to fight for yourself. A calling for IDWs to stand for themselves appears in the above quote.

Both main characters have shown how they observe, understand, and make meaning of their migratory experiences. The ability to comprehend what is going on around them is clearly needed in order to be able to map out the problem in their employment and finally to find the best solution which underlines any actions taken. Their actions exemplify Häkli’s and Kallio’s notion of political ordinary, the way in which the protagonists take the daily issue in their employment seriously

because they have something at stake. In the stories, these women are able to challenge the injustices and perform negotiation with any parties involved. Both decide to end their contracts. Despite the fact that they come to Hong Kong to secure a job, these women are willing to take the risk of ending their employment. This is clearly a hard decision to make. However, according to the main characters, this is the best thing to do in order to solve their problems in their employments. Both stories present a happy ending, the main characters are able to secure new employments with better employers and they commit to actively participate in migrant activism. The latter will be discussed shortly.

8.3.2 Migrant Awareness and Migrant [Labor] Activism

The first subdiscussion has illustrated IDWs' migratory experiences as represented in the two selected short stories. Both main characters in the stories are shown to have experienced difficulties especially at the beginning of their employment. Portrayed in both stories, as their working condition is getting better, the main characters pledge to share their knowledge to help their peers who might have similar problem and situation. In my observation, this is their first step to get involved in migrant [labor] activism. These women—having applied what Håkli and Kallio identified as political ordinary—are capable of unleashing actions to solve their current problem. In my opinion, what is shown by the two main characters is a consciousness which I prefer to identify it as “migrant awareness.” In a way, this awareness is what encourages and motivates the main characters to share their newfound knowledge to others.

In short, the newfound awareness brings the main characters to join migrant organizations/unions as volunteers. Actively participating in the organization/union also opens their eyes to the hardships experienced by other IDWs. This, in particular, cultivates empathy toward others. In addition, their partaking in the organization/union helps these women to know and understand migrant laws, rules and regulations. These women's involvement also serves as a medium to learn how to educate and advocate their peers who have problems. Such insights also help the main characters to cultivate and foster solidarity among IDWs community. Thus, the notion of sisterhood is strongly highlighted. These women's involvement is vividly illustrated in the following quotes:

Thinking about my past experience dealing with both employers and the agency staff encouraged me to share it to my fellow IDWs. Therefore, I used my weekly day off to volunteer in one of IDW organizations. Since then, I became enlightened and even shocked. I came to realize that everything I have dealt with was not as bad what my fellow IDWs experienced. (Devi, 2013, p. 43);

Considering my past experience, I tried to spend my day off well by joining worker union organization so that I would get more information about [migrant] labor laws and know how to help fellow Indonesian migrant workers who have problem, especially female migrant workers. (Devi, 2013, p. 115).

Both quotes emphasize on the significance of experience. The two main characters are clearly shown to have learned from their experiences and indicated of acquired awareness which has helped them to solve problem in their employment. This, in a sense, exemplifies what Williams and Scott previously explained that experience is the source of knowledge. The awareness achieved also puts the main characters to critically evaluate their government's system of managing migrant domestic workers and how IDWs are positioned both in the host and home country. Such a concern is seen in the quotation below:

Reflecting on my own experience, listening and observing my fellow IDWs' problems with their employers and agency staff, my empathy grew deeper and deeper. It proved that IDWs not only needed protection by the law and their government, but they also needed courage and the spirit to fight back. It was natural that I finally took part as a woman activist. I did it to convey the demand of justice and my empathy to my fellow IDWs. Although working as foreign domestic helper, IDWs deserved to have a true freedom. This was urgent especially when there was little protection and concern from their home country government. (Devi, 2013, p. 43).

Clearly mentioned in the above quote, concern on the issue of migrant protection is raised. This indicates that such protection is not yet achieved. The main character also underlines the importance of self-reflection and learning from personal experience. In addition, the demand to appreciate and valorize migrant workers in this case IDWs who work as foreign domestic helper in Hong Kong is also emphasized. However, not only relying on a good law or government, IDWs also need to be able to speak up and stand for themselves. Similar closing is also found in the second short story, "Raise Thou Women." At the end of her story, the main character expresses her deepest concern that all women workers have to unite and work together hand in hand to combat injustice treatments in their employment. She narrates her concerns in the following quote:

For migrant workers who are mostly women; as a woman, do not bring our 'nrimo' culture. Be aware, together we unite and fight acts of violence and harassment to our pride as a woman. Do not let yourself

being used by the agency, the employers, and the brokers. Together we voiced out and fought for our rights and assertions.
Indonesian women! Rise and fight! (Devi, 2013, p. 119).

From the quote above, readers can easily sense the fighting spirit endorsed by the main character. She calls out any fellow migrant workers to raise consciousness especially to be more aware of their surroundings and be vigilant for any injustices that might happen. This refers to any violence and harassment happen in domestic employment. However, the particular concern does come out of thin air. Through the process of reflecting and taking lesson from mundane experience, the main character gains knowledge and insights. Supported by her participation in migrant organization/union, her [migrant] activism comes into being.

This part of discussion has underlined the awareness gained and the dedication to participate in migrant [labor] activism. Both main characters in the selected short stories have clearly illustrated that they take lesson from their experiences and it leads them to share the insight they have by taking part in organization/union. The representation of IDWs' everyday as illustrated in the short stories will provide the readers a room to think that these women are not just workers who simply do their employers' domestic chores. These women deserve respect and appreciation as expressed by the main character in the story "Rise Thou Woman!"

8.4 Conclusion

This essay has demonstrated that migrant woman's experience matters. Taken a representation of IDWs' day to day migratory experiences in the form of short stories by Ariesta Devi, this essay highlights the importance of seemingly mundane experiences of foreign domestic helpers in Hong Kong illustrated in two stories "Diary of a Woman Activist" and "Rise Thou Women!" Through the main characters' personal experiences in dealing with the hardships of working as domestic workers, these women are taking lesson and gaining insights which are embodied in a newfound knowledge, proposed as migrant awareness. This particular consciousness implies the ability to map out problems and execute acts to minimize conflicts that follow. The ability to map out problems helps these women to understand their situation and take the best action to solve the problem. In addition, what is shown by the main characters in both stories best exemplifies what Häkli and Kallio identified as political ordinary.

Both stories also underline the fact that sufficient information and knowledge on migrant right is crucial and a critical need for any foreign domestic helpers. Knowing the rights of a migrant worker is equally important as knowing and mastering host country language, for example.

This, in particular, helps them to cope with any difficulties during in their employment. In addition, as the main characters gain insights, they are determined to help others by educating peers and advocacy. These women have gained migrant awareness which is characterized by their ability to solve problems and participating in migrant worker union/organization. This participation becomes the conduit to foster solidarity and sisterhood among IDWs community. The migratory experiences and the migrant activism represented in both stories can serve as food for thought for the readers to explore more on how the actual IDWs strive to cope with their everyday challenge working as foreign domestic workers in Hong Kong. Hopefully, this will help us to better appreciate and valorize IDWs.

References

- Devi, A. 2013. "Catatan Perempuan Demonstan." *Empat Musim Bauhinia Ungu: The Story of Migrant Workers in Hong Kong* (pp: 37-44). Yogyakarta: LeutikaPrio
- Devi, A. 2013, "Bangkitlah, Wahai Perempuan!" *Empat Musim Bauhinia Ungu: The Story of Migrant Workers in Hong Kong* (pp: 108 – 119). Yogyakarta: LeutikaPrio
- Häkli, J. and Kallio, K.P. 2018. On Becoming Political: The Political in Subjectivity. *Subjectivity*, 11, 57-73
- Scott, Joan A. 1988. "Experience." In Smith, S. dan Watson, J (Eds.) *Women, Autobiography, Theory: A Reader* (57-71). Wisconsin: The University of Wisconsin Press

**SUB CHAPTER III:
PENGETAHUAN PEREMPUAN
DALAM EKOFEMINISME**

9. PEREMPUAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Oleh:
Agnes Fitria Widiyanto

Kesehatan lingkungan merupakan kondisi sekeliling kita baik secara fisik, kimia dan mikrobiologi yang mampu mendukung derajat kesehatan masyarakat. Peran perempuan dalam penanganan kesehatan lingkungan sangatlah penting. Bisa kita kaji peran ibu rumah tangga dan perempuan lain dengan sifatnya yang lebih telaten dapat memberikan kontribusi dalam hal penyehatan lingkungan. Lingkungan memegang peranan penting dalam berbagai sektor kehidupan, kita bisa melihat baik lingkungan rumah, air dan tanah serta udara mutlak perlu kita perhatikan dan kita kendalikan. Sosok perempuan sebagai sekolah bagi anak-anaknya akan memberikan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang pengendalian lingkungan secara baik.

Dampak negatif dari keadaan lingkungan adalah munculnya bahan buangan. Limbah atau bahan buangan termasuk sampah merupakan bahan sisa (Widiyanto, 2016a). Limbah menjadi momok dalam lingkungan karena jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penyakit. Keseharian kita akan kita jumpai limbah dari rumah tangga, dapur serta kamar mandi dan WC. Limbah ini banyak dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk berbagai hal seperti, pemilahan dan menjual barang yang masih memiliki nilai jual, memanfaatkan kembali, serta bisa menyusun produk yang bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan limbah juga dilakukan untuk menghidupi perkumpulan social seperti perkumpulan pengajian dan kelompok PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Beberapa masyarakat menganggap tindakan penting yang dapat dilakukan antara lain memilah atau memisahkan sampah sehingga bisa memberikan manfaat sosial pada petugas pengangkut jika akan menjual kembali. Melalui tangan perempuan limbah yang sebelumnya berbahaya bisa menjadi bahan yang bermanfaat dan berkah.

Perempuan turut terlibat terhadap pengelolaan limbah (Widiyanto, 2014a; Widiyanto, 2018a). Limbah yang terbanyak dihasilkan di Indonesia adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga komposisinya bervariasi antara limbah organik dan non organik. Limbah rumah tangga banyak dihasilkan dari sampah dapur berupa sisa makanan. Perilaku masyarakat konsumtif akan lebih menghasilkan limbah yang banyak dan menjadikan barang-barang menjadi memiliki umur pendek sehingga sampah akan semakin banyak.

Pengelolaan limbah rumah tangga banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga. Penggunaan media dalam pengelolaan sampah penting dilakukan agar efisien dalam pengelolaannya. Sampah juga ada yang berdampak celaka seperti sampah medis dan sampah dari benda tajam (Widiyanto, AF, 2014b). Pengetahuan tentang karakteristik lingkungan menjadi hal penting untuk diketahui karena kita bisa menilai bahwa lingkungan yang kita kelola terdapat karakteristik yang menyebabkan celaka seperti pada kondisi panas, benda tajam dan benda yang memiliki bahan kimia berbahaya.

Terdapat biota yang dikonsumsi manusia terakumulasi limbah sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat (Widiyanto, 2014c; Widiyanto, 2015c; Widiyanto, AF, 2015d). Dalam hal kesehatan lingkungan menyediakan bahan makanan terkait sanitasi makanan dan minuman penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penyediaan makanan seringkali dilakukan oleh kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pemeliharaan kesehatan tubuh manusia.

Permasalahan lingkungan dapat menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan disekitarnya baik cemaran air, tanah maupun udara. Namun demikian, terdapat cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya edukasi terhadap kaum perempuan (Widiyanto, 2015e). Media edukasi kesehatan lingkungan dapat menggunakan leaflet, booklet dan poster. Media ini akan dikomunikasikan melalui penyebaran informasi pada masyarakat. Media yang sering dilakukan untuk penyebaran informasi adalah terkait media digital. Era pandemik saat ini banyak menggunakan media untuk menyebarkan informasi. Seperti kita ketahui bersama masyarakat akan lebih mudah menerima informasi pada era digital manakala menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana serta singkat.

Pemasaran sosial mengenai media tentang kesehatan lingkungan penting dilakukan agar program pengelolaan lingkungan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Kaum perempuan perlu menambah informasi untuk menambah akses informasi tentang berbagai hal (Widiyanto, 2015f). Selain itu, yang tidak kalah penting dalam pengelolaan lingkungan adalah partisipasi komunitas dalam masyarakat terutama dari kaum perempuan. Selain itu bisa juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran pemerintah dan peran masyarakat. Pengelolaan sampah penting dilakukan untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan terutama penyakit yang diakibatkan karena faktor lingkungan. Di lingkungan banyak vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoa serta mendatangkan tikus. Penyakit yang dapat disebabkan karena sampah antara lain ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), diare dan penyakit kulit (Widiyanto, 2016b; Widiyanto, 2016c; Widiyanto, 2017a;

Widiyanto, 2017b) . Dampak dari berbagai masalah kesehatan adalah efek terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat yang optimal akan memberikan efek yang positif terhadap kondisi masyarakat.

Zaman sekarang banyak perempuan telah berpartisipasi dalam sektor publik. Namun hal ini dapat menimbulkan konflik pembagian waktu bagi perempuan, yaitu dalam tugas domestik dan aktivitas sosial sebagai perempuan. Perempuan dianggap sebagai golongan yang tidak produktif dari sisi ekonomi. Bila kita cermati permasalahan lingkungan banyak didukung oleh kaum perempuan. Baik pelaksanaan *higine* sanitasi rumah, sampai permasalahan aspek ekonomi dan social budaya dari tingkat rumah tangga. Perempuan juga turut serta melalui serentetan kegiatan ekonomi untuk membantu kelangsungan perekonomian rumah tangga. Banyak perempuan era masa kini memiliki cukup alasan penting untuk tetap bekerja selain banyaknya pekerjaan domestik yang seharusnya mereka lakukan demi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarganya. (Mayaswari Dan I, 2015) Perempuan akan melakukan kegiatan untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Segala kegiatan akan dilakukan perempuan untuk memenuhi segala kebutuhan.

Perempuan memiliki komitmen positif dalam dunia kerja. Walaupun tugas dan tanggung jawab keluarga harus diembannya. Hasil penelitian menunjukkan, di tingkat akses dan kontrol, perempuan telah membuat kemajuan, meskipun posisi pria yang cenderung superior. Bagi orang-orang yang sama, mereka telah saling tergantung dan didukung peran mereka di antara suami dan istri. Dukungan kesehatan lingkungan mutlak diraih dengan kerja sama kaum laki-laki dan perempuan. (Farikhah, 2016) Semakin dukungan baik terhadap lingkungan terjadi maka akan semakin baik kondisi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketika menyangkut aspek sosial budaya, perempuan akan lebih dihargai jika produktif di lingkungan keluarga, tempat kerja maupun masyarakat. Kesehatan lingkungan secara sosial bisa jadi lebih baik jika dibandingkan perempuan yang tidak memiliki akses perawatan terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat. Di dalam masyarakat, menemukan status baru, dan dapat memainkan peranan dalam masyarakat. Selain itu, mereka menemukan jaringan hubungan dengan orang-orang lain yang tidak mereka kenal sebelumnya, dan mereka juga merasa menemukan dunia lain di luar desa yang menunjukkan suasana berbeda dengan keadaan sehari-hari lingkungannya. (Wiasti, 2011) Kondisi lingkungan yang memberikan dukungan dengan segala kegiatan yang akan dilakukan.

Aktivitas yang banyak dilakukan oleh kaum perempuan adalah berdagang. Perdagangan pasar sangat identik dengan kaum perempuan,

karena memang selain aktivitas berdagang merupakan kegiatan yang (mudah dimasuki), dan tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi. Selain itu pekerjaan berdagang merupakan kegiatan yang memerlukan keuletan, kehalusan, dan ketelitian yang cocok dilakukan oleh kaum perempuan. Kaum perempuan dalam berdagang membutuhkan pengetahuan dan perilaku serta wawasan kesehatan lingkungan. Wawasan masyarakat terkait aspek sanitasi lingkungan agar dapat bekerja secara bersih dan menjual barang yang bermanfaat untuk kesehatan. (Syaifullah dan Dwi, 2013) Sanitasi lingkungan yang baik akan menjadikan nilai estetik lingkungan menjadi baik. Kita bisa melihat jika suasana di lingkungan banyak tumpukan sampah dan kotor maka akan menjadikan kita enggan untuk berlama-lama dilokasi tersebut. Suasana yang enak dipandang, nyaman, cerah dan sejuk serta aroma yang segar menjadi ciri kondisi sanitasi lingkungan baik.

Persaingan dan konflik serta kiat penguasaan situasi lingkungan menyangkut keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan (Rosa, Yurkaldi, dan Rinel, 2017). Berkaitan dengan semangat (kewirausahaan) seringkali muncul ketika kita membuat perbandingan, misalnya di antara suku nonpribumi. Suku Minang dan Suku Bugis dikenal sebagai suku-suku pedagang. Dari profesi yang mereka tekuni inilah orang melihat bahwa kedua suku ini mempunyai jiwa. Kedua suku ini dikenal sebagai perantau di berbagai daerah, sehingga peranan mereka dalam kegiatan ekonomi kerap kali dianggap istimewa dan menonjol. Kegiatan yang dilakukan oleh perempuan menyangkut berbagai hal. Kita bisa memahami kondisi perempuan pada kondisi tertentu. Misal pada saat kehamilan dan proses melahirkan seorang wanita akan memiliki kondisi fisik yang kurang prima. Saat kondisi ini terjadi akan ada kemungkinan banyak terinfeksi angka kuman dari sanitasi lingkungan.

Kaum perempuan dalam kegiatan sehari-hari membutuhkan aspek relasi positif. Relasi suami istri yang sama-sama bekerja berlangsung lebih terbuka dan egaliter daripada di kalangan menengah atas terutama di kalangan priyayi. (Sutarso dan Ahmad, 2012) Aspek relasi positif akan memberikan makna yang baik dalam berbagai hal kehidupan. Baik secara aspek mental dan social seseorang.

Dukungan dan aktivitas di tunjang dengan terjalinnya hubungan yang harmonis dalam keluarga. Antara suami istri, antara ibu dan anak, dan antara ayah anak selalu terjalin komunikasi yang intensif. (Ruswinarsih, S, 2013) Peran keluarga dalam keberlangsungan ini akan memberikan makna positif dari setiap akses kehidupan.

Daftar Pustaka

- Farikhah. 2016. Etos Kerja Dan Kuasa Perempuan Dalam Keluarga : Studi Kasus Keluarga Nelayan, Di Brondong, Lamongan, Jawa Timur. *Palastren: Jurnal Studi Gender*. 2016;8(1):145-164 Doi 10.21043/Palastren.V8i1.938.
- Mayaswari Dan I. 2015. Peran Ganda Pedagang Perempuan Di Pasar Mertha Nadi Legian, Bali. *Populasi*. 2015;23(2):71-84 Doi 10.22146/Jp15696.
- Rosa, Yurkaldi dan Rinel. 2017. Diamika Perempuan Pedagang Makanan Di Sicincin. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. 2017;2 (2):60-73 Doi. 10.22202/Mamangan.1370.
- Ruswinarsih, S. 2013. Aktivitas Domestik Dan Publik Perempuan Kerja (Studi Terhadap Perempuan Pedagang Kelontong Di Pekapuran Raya Banjarmasin). *Kafa'ah: Journal Of Gender Studies*. 2013;3(1):89-106 Doi 10.15548/Jk.V3i1.71.
- Sutarso dan Ahmad. 2012. Profil Dan Potensi Ekonomi Perempuan Di Pasar Tradisional Surakarta Sebagai Basis Perekonomian Rakyat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 2012;22(1):1-9.
- Syaifullah dan Dwi. 2013. Strategi Pemberdayaan Kaum Pedagang Perempuan Di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Sosial Budaya*. 2013;10(1):14-26 DOI 10.24014/Sb.V10i1.1389.
- Wiasti. 2011. Perempuan Berpeluh Yang Tak Mengeluh: Studi Tentang Perempuan Pedagang Sayur Di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali. *Piramida Vol 7 No 1*.
- Widiyanto, AF. 2014a. Pengaruh Pelatihan Pembuatan Media Cetak Kesehatan Lingkungan Terhadap Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa UKM Plakat Jurusan Kesehatan Masyarakat *Kesmas Indonesia Vol 7 No 1 2014*.
- Widiyanto, AF. 2014b. Evaluasi Pengelolaan Limbah Klinis Tajam di RSUD Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kesmas Indonesia. Vol 6 No 3 2014*.
- Widiyanto, AF. 2014c. IBM Forum Kesehatan Desa Wilayah Kerja Puskesmas I dan II Baturraden untuk Mengatasi Permasalahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. *Laporan Penelitian IBM Dikti (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.
- Widiyanto, AF. 2015c. IBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas I dan II Baturraden. *Laporan Penelitian IBM Dikti (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.
- Widiyanto, AF. 2015d. Aplikasi Teknologi Pengelolaan Sampah Mandiri Model Komunal Sebagai Alternatif Pengolahan Sampah Domestik Melalui Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Masyarakat. *Laporan Pengabdian Berbasis Riset (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.

- Widiyanto, AF. 2015e. Pengaruh Konseling Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Tentang Kesehatan Lingkungan . *Jurnal Kesmas Indonesia Vol 7 No 3 2015*.
- Widiyanto, AF. 2015f. Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga. *Jurnal Kemas Vol 10 No 2 2015*.
- Widiyanto, AF. 2016a. Efektivitas Aerasi, Sedimentasi, dan Filtrasi Untuk Menurunkan Kekeuhan dan Kadar Besi (Fe) Dalam Air. *Jurnal Kesmas Indonesia Vol 8 No 1 2016*.
- Widiyanto, AF. 2016b. IbM Pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terintegrasi Sejak Dini Pada Anak di PAUD Tunas Harapan Desa Karangmangu dan PAUD Kasih Ibu Desa Kemutug Kidul di Wilayah Kerja Puskesmas II Baturaden Kabupaten Banyumas. *Laporan Pengabdian Dikti (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.
- Widiyanto, AF. 2016c. Pemanfaatan Sampah Plastik Bernilai Ekonomi di kelurahan Grendeng. *Laporan Pengabdian Penerapan IPTEK (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.
- Widiyanto, AF. 2017a. Aplikasi Model Kampung Sampah Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Laporan Pengabdian Berbasis Riset (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.
- Widiyanto, AF. 2017b. Community participation in bank of garbage : Explorative case study in Banyumas Regency. *MKP UNAIR Vol 9 No 1 2017*.
- Widiyanto, AF. 2018a. Aplikasi Teknologi Metamodeling Sebagai Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Laporan Pengabdian Penerapan IPTEK (Tidak Dipublikasikan)*. LPPM UNSOED. Purwokerto.

10. PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ARAS LOKAL

**Oleh:
Oktafiani Catur Pratiwi**

10.1 Pendahuluan

Sampah tidak hanya identik dengan masyarakat kota. Namun, sampah telah menjadi masalah masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan sebagai akibat dari kegiatan produksi dan konsumsi. Konsumsi menghasilkan limbah organik dan non organik. Limbah identik dengan kotor, bau, barang bekas, dan penyakit. Namun, sampah masih dianggap bukan masalah serius. Sampah dianggap sebagai masalah serius ketika sampah menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi, bencana alam, dan bencana sosial. Jadi, masyarakat cenderung membuang sampah sesegera mungkin.

Sesungguhnya persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu aktor tetapi juga melibatkan banyak aktor. Mereka adalah aktor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sebelum sampah menimbulkan banyak masalah, negara dianggap memikul tanggung jawab paling besar dalam pengelolaan sampah. Ketika sampah menjadi persoalan lingkungan, sampah tidak semata-mata menjadi murni persoalan lingkungan tapi sudah menjadi persoalan politik yang penyelesaiannya membutuhkan intervensi politik dari penguasa formal.

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang mengalami persoalan sampah hingga pemerintah lokal menyatakan darurat sampah pada tahun 2014. Kabupaten ini memiliki populasi sekitar 1.620.918 orang pada tahun 2014. Di Banyumas, populasi ini menghasilkan sampah dalam jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2005, produksi sampah di Kabupaten Banyumas mencapai 700 m³ per hari, lima tahun kemudian, pada 2010 meningkat menjadi 1.100 m³ per hari (rata-rata volume sampah per hari menurut kabupaten / kota di Jawa Tengah (BPS, 2014).

Hasil survei yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang di Banyumas menghasilkan sekitar 0,3 kg sampah per hari. Jika dihitung berdasarkan populasi di Banyumas yang mencapai dua juta per orang, populasi Banyumas akan menghasilkan 600 ton sampah per hari. Sementara tempat pembuangan sampah hanya dapat menampung 30 persen dari volume sampah yang terbuang yaitu sekitar 270 ton setiap hari. Sisanya, sebanyak 200 ton sampah masih dibuang ke lingkungan dengan cara dibuang begitu saja atau dibakar (Widiatno, 2018).

Deskripsi singkat ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus segera diintervensi terutama dalam pengelolaan limbah. Dalam konteks *governance*, tanggung jawab untuk mengelola sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. *Governance* terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah (Dwiyanto, 2015). *Governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan (Kurniawan, 2007). Dalam intervensi ini, masyarakat diharapkan melakukan lebih aktif karena pada kenyataannya, masyarakat adalah penyumbang terbesar sampah rumah tangga yang menjadi masalah lingkungan di Kabupaten Banyumas (Satelit Pos, 2017).

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi aktor perempuan dan negara dalam pengelolaan limbah. Perempuan dipilih menjadi fokus studi karena perempuan adalah salah satu aktor strategis di komunitas masyarakat, terutama dalam masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Data yang disajikan dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian mini (*mini research*) dalam metode penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan data sekunder khususnya studi dokumentasi dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas.

10.2 Sampah dalam Dimensi Kebijakan

Pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan volume, jenis dan karakteristik limbah. Dengan demikian, pengelolaan limbah yang komprehensif harus mencakup ketiga faktor ini dari hulu ke hilir dengan cara yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan (Marfai, 2005). Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah, pemerintah telah merumuskan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kegiatan perencanaan dengan meletakkan beberapa hasil analisis masalah dalam draf kebijakan pemerintah. Lester dan Stewart menjelaskan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga otoritatif yang menciptakan dan berdampak kepada publik dan ditujukan kepada masalah publik (Kusumanegara, 2010). Kebijakan publik diidentikkan pada semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Wahab, 2008).

Kebijakan dirancang untuk mengatasi persoalan di masyarakat. Idealnya, kebijakan yang diformulasikan harus berpijak pada data (*policy based on research*). Kebijakan terkait dengan kepentingan kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Kebijakan pemerintah tidak

dapat dipisahkan dari peran aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi setiap kebijakan. Aktor yang berkuasa adalah yang paling berhasil dalam memprakarsai atau menentang keputusan yang diusulkan.

Kebijakan tentang pengelolaan limbah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang sistematis, kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan termasuk pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18/2008). Regulasi pengelolaan sampah di level lokal dengan sendirinya harus mengacu pada produk hukum di atasnya. Peraturan dibuat untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab di antara otoritas pemerintah, pemerintah daerah, peran masyarakat, dan bisnis dalam pengelolaan sampah. Singkatnya, peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta sesuai dengan prinsip dalam *governance*.

Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alami dalam bentuk padat. Sampah dapat diproduksi oleh orang dan /atau karena proses alami yang menghasilkan tumpukan sampah. Di tingkatan masyarakat, sampah dipahami dengan berbagai cara oleh masyarakat. Secara umum, hasil wawancara dengan informan, sampah dipahami sebagai barang bekas/barang sisa, barang kotor, bungkus makanan ringan, dan dedaunan. Agar sampah tidak menimbulkan masalah maka harus dikelola.

Pengelolaan sampah, menurut undang-undang tentang pengelolaan sampah, mencakup limbah rumah tangga, sampah rumah tangga, dan limbah khusus. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari tidak termasuk tinja dan sampah khusus. Limbah rumah tangga terdiri dari area komersial, kawasan industri, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas publik, dan fasilitas lainnya. Limbah spesifik adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun, limbah yang dihasilkan bencana, puing konstruksi, puing-puing yang tidak dapat diolah secara teknis, dan limbah berkala (UU No. 8/2010).

Beberapa masalah penting yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pengelolaan limbah adalah: pertama, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memastikan kelestarian dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah harus menindaklanjuti hal ini dengan menerbitkan peraturan daerah untuk memberikan jaminan dan kerangka hukum tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Banyumas merespons dengan merumuskan Peraturan Daerah Nomor 6/2012 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Secara hukum, pemerintah daerah memiliki

beberapa tugas dalam pengelolaan sampah yaitu: (1) mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, (2) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, (3) memfasilitasi, mengembangkan dan menerapkan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan (4) mengimplementasikan manajemen sampah dan memfasilitasi infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah, (5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat pengolahan sampah, (6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang dikembangkan untuk masyarakat lokal guna mengurangi dan mengelola sampah, serta berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah.

Kedua, dalam peraturan daerah ini, pemerintah daerah juga memiliki otoritas dalam pengelolaan sampah, yaitu: (1) merumuskan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (2) mengatur pengelolaan sampah dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, (3) melakukan bimbingan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh lembaga lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pemrosesan sampah terintegrasi, dan tempat pemrosesan akhir sampah; (5) pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan untuk lokasi pembuangan akhir terminal yang beroperasi selama 20 tahun dengan sistem pembuangan terbuka yang ditutup, serta (6) merumuskan dan menerapkan sistem respons pengelolaan darurat sampah sesuai dengan kewenangannya.

Ketiga, pemberian insentif dan disinsentif. Insentif diberikan oleh pemerintah kepada semua orang yang melakukan pengelolaan sampah. Sementara disinsentif diberikan kepada setiap orang yang tidak mengurangi sampah. Insentif dan disinsentif ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP RI No. 46/2017) tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup.

10. 3 Relasi Perempuan dan Negara dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Semua aktor terlibat dalam pengelolaan sampah dan harus terkait dengan peran mereka masing-masing dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Hubungan tersebut merupakan interaksi antara pelaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga terutama antara perempuan dan pemerintah daerah. Aktor merupakan orang ataupun kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan (Kusumanegara, 2010). Interaksi antar aktor yang dimaksud adalah interaksi aktor dalam implementasi kebijakan. Menurut Pressman dan Wildavsky (Nakamura dan Smallwood, 1980), implementasi

merupakan proses melaksanakan, mencapai, memenuhi, menghasilkan dan menyelesaikan kebijakan. Interaksi terjadi sebagai syarat utama kegiatan sosial. Gillin dan Gillin menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan antara orang, antara kelompok orang dan antara orang dan kelompok orang (Soekanto, 1990).

Interaksi sosial memungkinkan individu dapat menggabungkan diri dengan keadaan sekitarnya, atau individu dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan yang diinginkan individu (Walgito, 2002). Bentuk interaksi sosial yang diusulkan oleh Kimball Young termasuk oposisi, kerja sama dan diferensiasi. Oposisi termasuk kompetisi dan konflik. Kerjasama menghasilkan akomodasi. Diferensi adalah suatu proses dengan orang per orang dalam masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain dalam masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin dan pekerjaan (Soekanto, 1990).

Interaksi antara perempuan dan pemerintah dalam pengelolaan limbah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Meregulasi Pengelolaan Sampah

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran utama untuk meregulasi dan juga memberikan fasilitas agar regulasi nantinya dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan membutuhkan konsistensi dan kepatuhan dalam langkah implementasi, terutama penegakan aturan yang telah diamanatkan oleh hukum dan peraturan daerah. Sehingga secara kelembagaan, instrumen implementasi seharusnya juga harus disiapkan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini memberikan jaminan dan kerangka hukum bagi para pelaku kebijakan untuk menjalankan peran mereka masing-masing termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka satu sama lain dalam pengelolaan sampah.

Fasilitasi dilakukan pemerintah dengan menyediakan tempat pembuangan sampah yang memiliki fungsi utama pengelolaan sampah. Pada tahapan implementasi kebijakan, penegakan aturan telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Ada banyak contoh ketidakkonsistenan dalam penegakan peraturan daerah dapat dilihat sebagai berikut: pertama, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik. Sampah masih dikelola dengan cara *open dumping* di TPA Gunung Tugel sampai ditutupnya TPA ini pada tahun 2014. Dalam peraturan tentang pengelolaan sampah, lokasi pembuangan akhir yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun dan telah ditutup harus dievaluasi dan monitoring setiap 6 bulan sekali untuk

menjamin proses penutupan TPA permanen aman bagi lingkungan dan tidak membahayakan lingkungan.

Tempat pembuangan akhir terminal Gunung Tugel ditutup karena telah beroperasi lebih dari 20 (duapuluh) tahun serta tidak layak lagi untuk beroperasi karena kapasitasnya yang relatif kecil yang hanya mampu menampung 30 % dari total sampah yang dihasilkan dan telah menyebabkan beberapa pencemaran lingkungan akibat sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) yang saat ini tidak lagi diperbolehkan dalam pengelolaan sampah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus berpikir untuk menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Meskipun secara resmi ditutup, kenyataannya lokasi pembuangan akhir terminal Gunung Tugel sebenarnya masih beroperasi bahkan TPA Gunung Tugel diprediksi masih mampu menampung sampah sampai lima tahun ke depan (NN, 2016). Alasan TPA Gunung Tugel masih dioperasikan dikarenakan dua lokasi terminal pembuangan sampah di Kecamatan Ajibarang dan Kalibagor belum siap. Kebijakan yang sangat elitis dalam penentuan tempat pembuangan akhir di dua kecamatan ini menyebabkan konflik antara warga di sekitar lokasi TPA dan pemerintah daerah. Konflik antara warga dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyebabkan pemblokiran area TPA oleh warga sehingga truk sampah tidak bisa membuang sampah di TPA Kaliore dan Ajibarang. Hal ini menimbulkan persoalan baru dengan terjadinya penumpukan sampah mulai dari tingkatan rumah tangga.

Pada bulan Mei 2018, Pemerintah Banyumas menyatakan Banyumas Darurat Sampah sehingga masyarakat harus melakukan pengelolaan mandiri dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup dan RT di lingkungan masing-masing. Dalam situasi krisis ini, perempuan juga merasakan dampak paling besar. Ketika suatu daerah ditentukan dalam kondisi darurat, ada keharusan dari negara untuk hadir untuk menangani masalah sampah karena ada dana tanggap darurat yang dapat digunakan untuk kegiatan manajemen bencana lingkungan. Situasi ini bagi aktor politik seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk meningkatkan citra positif dalam mengelola pemerintahan. Nyatanya, tidak demikian. Pemerintah Banyumas menunjukkan citra negatif dalam pengelolaan sampah. Salah satu indikasinya adalah penumpukan sampah di titik-titik tertentu di pinggir-pinggir jalan yang bukan peruntukannya selama sehari-hari. Selain itu, Pemerintah Banyumas berusaha lepas tangan dalam pengelolaan sampah dengan melimpahkan urusan pengelolaan sampah kepada individu secara mandiri dikoordinir oleh RT/RW di lingkungan masing-masing melalui surat edaran dari Badan Lingkungan Hidup. Hal ini sempat membuat masyarakat memberikan

penilaian buruk atas kinerja pemerintah dalam mengatasi sampah meskipun di periode kedua kepala daerah petahana masih terpilih kembali sebagai Bupati Banyumas.

Dalam persepsi pemerintah, masalah sampah sebenarnya adalah masalah yang dibuat oleh masyarakat karena orang yang menghasilkan sampah setiap hari adalah individu di rumah tangga. Sehingga sudah sewajarnya ketika terjadi darurat sampah, maka masyarakat harus terlibat penuh untuk mengelola sampah yang dihasilkannya sendiri. Ketika negara tidak hadir maka ada konsekuensi yang harus diemban oleh perempuan yang akan mengalami peningkatan beban sebagai pengelola rumah tangga baik secara fisik maupun mental.

Ketidakkonsistenan kedua adalah belum diimplementasikannya PP No. 46/2007 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang salah satunya mengatur tentang insentif / disinsentif pemerintah bagi masyarakat yang melakukan pengurangan sampah / tidak mengurangi sampah. Sehingga masyarakat belum begitu tertarik untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri secara intensif. Ketiga adalah sanksi yang tidak ditegakkan, terutama bagi pelaku pelanggaran, kelompok atau pengelola kawasan perumahan yang tidak mengelola sampah sesuai aturan karena tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas dalam penegakan peraturan daerah. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakkan peraturan pengelolaan limbah secara tidak langsung memberi tanggung jawab kepada perempuan untuk mengambil alih peran negara dalam menegakkan aturan dengan semangat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah mereka.

2) Perempuan dalam Pengelolaan Sampah

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Berdasarkan perspektif pemerintah, membangun kesadaran publik dalam pengelolaan sampah dibebankan kepada perempuan dengan beberapa pertimbangan: pertama, perempuan adalah manajer rumah tangga yang dianggap memiliki tanggung jawab utama perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Kedua, konstruksi sosial yang ada melekat pada peran perempuan sebagai 'penjaga' kebersihan rumah. Ketiga, konstruksi gender pada wanita sebagai ulet, tidak memprotes, *multi-tasking* dan cocok untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan kesabaran.

Identifikasi tersebut merupakan pertimbangan Pemerintah Banyumas untuk menargetkan perempuan dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Dalam kegiatan pengurangan sampah, kegiatan yang dimandatkan oleh undang-undang adalah pembatasan untuk

menghasilkan sampah, daur ulang sampah dan penggunaan kembali sampah. Fasilitasi sebagai peran yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan kepada perempuan melalui beberapa kegiatan yaitu: pertama, pelatihan pemilahan sampah untuk mendukung gerakan 3R (mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang) dan kampanye. *Reduce* adalah kegiatan pengurangan limbah, *reuse* dipahami sebagai aktivitas menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Kemudian daur ulang adalah kegiatan daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomis bagi perempuan. Kedua, pelatihan pembuatan kompos yang dilakukan oleh komunitas di PKK. Ketiga, pelatihan daur ulang bahan bekas menjadi bahan berharga seperti membuat tas dari bungkus minuman instan, sabun cuci, dan pewangi pakaian.

Tiga kegiatan yang telah disediakan oleh pemerintah ini diberikan kepada kelompok-kelompok perempuan melalui kegiatan PKK, posyandu dan kegiatan sosial lainnya. Inisiasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Jika perempuan membutuhkan pelatihan, perempuan dalam kelompok dapat meminta Badan Lingkungan Hidup untuk memberikan pelatihan pengelolaan sampah. Pelatihan diberikan kepada perempuan untuk memiliki pengetahuan yang baik dalam pengelolaan sampah sehingga bisa berdaya saat menghadapi masalah sampah. Keempat, pelatihan Bank Sampah. Bank sampah merupakan salah satu rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Kampanyenya adalah melalui bank sampah, sampah tidak hanya dilihat sebagai barang kotor, bau dan tidak berharga tetapi sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ada beberapa bank sampah yang didirikan di Kabupaten Banyumas yang sebagian besar dikelola oleh perempuan. Di antaranya ada Bank Sampah Tunas Bakti di Desa Bantar Soka, Bank PAS (Peduli Sampah) di Desa Arcawinangun dan Bank Sampah Sumber Berkah di Purwokerto Utara. Dengan kemajuan media yang ada, saat ini Banyumas sudah menerapkan program sampah online (salinmas) atau sampah online Banyumas di tiga kelurahan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat (Effe, 2019).

Hubungan perempuan dan negara dalam beberapa kasus, seringkali formal dan digerakkan oleh proyek. Sehingga ketika pelatihan sudah diberikan di tahun anggaran itu, program dianggap selesai. Sangat jarang kemudian pemerintah berpikir soal keberlanjutan program. Gerakan mengelola sampah dari perempuan justru tumbuh atas kesadaran perempuan dalam mengelola sampah.

Bagi perempuan, kesadaran kolektif perempuan dalam pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai protes terhadap perusakan lingkungan dan menghentikan penindasan terhadap alam dan perempuan dengan mengembangkan kepekaan kesadaran etis-ekologis dan menghilangkan berbagai struktur penindasan yang ada di masyarakat.

Hal yang kemudian dilupakan dalam pengelolaan sampah adalah sinergi pihak swasta khususnya produsen makanan dan minuman dengan kemasan plastik yang kurang didorong untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan. Sehingga pengurangan sampah khususnya sampah anorganik dapat ditekan secara massif dari hulu ke hilir. Kampanye sampah plastik berbayar yang dilakukan oleh dua gerai mini market tidak cukup efektif untuk merubah perilaku masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik karena harganya yang sangat murah yaitu 200 rupiah. Program inipun akhirnya tidak berlanjut.

10.4 Penutup

Masalah pengelolaan sampah adalah masalah bersama yang harus diatasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah lebih dibebankan pada rumah tangga karena rumah tangga dianggap sebagai penghasil sampah terbesar di Banyumas. Untuk mengatasi persoalan sampah membutuhkan komitmen politik dari pemerintah sebagai bentuk hadirnya negara sehingga beban atas pengelolaan sampah nantinya tidak banyak dibebankan kepada perempuan semata.

Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas. 2014. Banyumas dalam Angka Tahun 2014.
- Dunn, W. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: UGM Press.
- Effe, Hermiana. 2019. Program Sampah Online diterapkan Tiga Kelurahan di Banyumas. Cendana News, 23 Oktober 2019. <https://www.cendananews.com/2019/10/program-sampah-online-diterapkan-tiga-kelurahan-di-banyumas.html>
- Hanya 30 Persen Sampah Terangkut ke TPA. (2017). Satelit Post, 23 Agustus 2017.
- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7, 16-17.

- Kusumanegara, S. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik Yogyakarta: Gava Media.
- Marfai, M. Aris. 2005. Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan. Yogyakarta: Wahana Hijau, pp.108-114.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, New York; St. Martins Press.
- N.N., Umur TPA Gunung Tugel tinggal lima tahun lagi. 2016. Radar Banyumas, 3 Maret 2016.
- N.N. ASN diminta kurangi sampah rumah tangga. 2018. Radar Banyumas, 26 Mei 2018.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2012. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Soekanto, S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Walgito, B. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. 2002. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, Abdul dan Solikhin. 2008 . Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

11. Mengintegrasikan Agenda Lintas Sektoral: Perubahan Iklim, Gender, dan Keamanan Manusia di Indonesia

**Oleh:
Ayusia Sabhita Kusuma**

11.1 Pendahuluan

Agenda keamanan pasca perang dingin menunjukkan perkembangan yang cakupannya semakin luas, bukan lagi berbicara ancaman keamanan dan kedaulatan negara dalam lingkup militer, tetapi juga ancaman keamanan nonmiliter termasuk kerusakan lingkungan (Baldwin, 1995; Archarya, 2008). Isu kerusakan lingkungan mulai menjadi perhatian global pasca terjadinya bencana Chernobyl di tahun 1986 dan kebakaran hutan di Amazon tahun 1989 (Myers, 1989). Sedangkan isu perubahan iklim sudah dibicarakan di tingkatan institusi internasional sejak tahun 1974 ketika WMO (*World Meteorological Organizations*), -badan dibawah PBB-, dan *International Council of Scientific Union* (ICSU) mengadakan pertemuan untuk mempelajari dampak-dampak yang kompleks dari perubahan iklim. Isu tersebut mendapat perhatian luas dari para peneliti dan aktivis sehingga diadakan pertemuan global KTT Bumi di Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan rezim perubahan iklim pertama yaitu Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Framework Convention on Climate Change /UNFCCC*). Tujuan konvensi ini adalah menyepakati upaya-upaya untuk menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar tidak membahayakan iklim.

Sejak tahun 1824 hingga pertengahan 1980an, beberapa peneliti mulai mengkaji adanya kenaikan emisi karbondioksida akibat “gas rumah kaca” dan efek pembakaran batu bara yang berkontribusi pada kenaikan suhu bumi (Vlassopoulos, 2012; Brunner, 2001). Efek negatif peningkatan suhu bumi tersebut memicu serangkaian krisis yaitu kenaikan air laut yang signifikan, hilangnya keanekaragaman hayati yang cepat, iklim yang ekstrim, gelombang panas dan badai, banjir dan hujan lebat, serta kebakaran hutan (Webersik, 2010). IPCC (2011) juga menyebutkan adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara perubahan iklim dengan semakin bertambahnya intensitas bencana hidro-meteorologi (banjir, badai dan kekeringan), dan bencana-bencana yang lain. Perubahan iklim juga menimbulkan efek multilayer seperti memicu kelangkaan sumber daya alam dan meningkatkan kerentanan kemiskinan pada masyarakat agraris pada sebagian besar negara-negara berkembang (Webersik, 2010), bahkan bisa memicu terjadinya kenaikan pengungsi lintas batas atau migrasi antar benua (Brauch, 2005).

Indonesia juga mengalami dampak perubahan iklim. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2015, dengan emisi karbonnya sebagian besar berasal dari penggundulan dan kebakaran hutan atau lahan gambut (carbonbrief.org, 2019). Banyaknya bencana akibat perubahan iklim cukup dirasakan oleh Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data di tahun 2017 memperlihatkan sekitar 2.341 insiden bencana alam terjadi di Indonesia (Nugroho, 2017). Rincian tersebut terdiri dari banjir (sebanyak 787 kali), tornado (716 kali), tanah longsor (614), kebakaran hutan (96), banjir dan longsor (76), kekeringan (19), gempa bumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), gunung meletus (2). Dari data tersebut, BNPB mengklaim sekitar 99% nya adalah bencana hidro-meteorologi, artinya, bencana yang dipengaruhi oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur udara, dan angin. Bahkan dari sebanyak 34 provinsi di Indonesia, ada 27 provinsi yang menurut BNPB mempunyai Indeks Rawan Bencana yang tinggi (BNPB, 2011).

Selain mengalami kerentanan bencana karena dampak perubahan iklim, Indonesia juga mengalami kerentanan bencana karena aspek geografis. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah Cincin Api Pasifik atau *Pacific "ring of fire"*. Cincin api pasifik berada di jalur lingkaran Samudra Pasifik sepanjang kurang lebih 25.000 mil yang melintas dari kepulauan Tonga di Pasifik Selatan, melewati Indonesia, Filipina, Jepang, Amerika Utara dan berakhir di Pegunungan Andes, Amerika Selatan. Daerah Cincin Api menandakan wilayah yang mempunyai aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi dengan Indonesia merupakan wilayah yang menjadi pertemuan empat lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Samudra Pasifik di sebelah Timur, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan (lipi.go.id). Sebagai tempat pertumbukan dan pergerakan empat lempeng tektonik dunia, wilayah ini sehingga rawan bencana gunung meletus, gempa bumi dan tsunami.

Dampak perubahan iklim mengancam kelangsungan ekosistem dan terutamanya mengancam keamanan manusia. Kajian Bogardi (2004) dan Brauch (2003) menyebutkan lebih lanjut tentang hubungan antara keamanan manusia dan perubahan iklim, bahwa manusia bisa sebagai penyebab dan juga sebagai korban dari ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Di satu sisi, dampak dari perubahan iklim sesungguhnya tidak netral gender. Laki-laki dan perempuan mengalami dampak yang berbeda dari perubahan iklim karena diferensiasi gender. Beberapa perbedaan misalnya level pendidikan, akses terhadap sumber daya, peran sosial dan politik, kebutuhan, hingga perbedaan kemampuan atau kapasitas dalam mengatasi bencana seringkali menjadi permasalahan jika pendekatan isu kebencanaan tidak sensitif gender. Perhatian dan

pengakuan tentang relevansi perspektif gender dalam perubahan iklim turut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan beberapa rezim perubahan iklim UNFCCC (*United Nations Framework Convention On Climate Change*). Dalam Protokol Kyoto yang mengikat negara-negara maju di tahun 1997, sudah dimulai usaha untuk melibatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pengambilan kebijakan tentang perubahan iklim. Pengintegrasian gender dalam rezim perubahan iklim juga dapat ditelusuri pada dokumen-dokumen COP (*Conference of the Parties*) ke 7 tahun 2001, COP ke 16 tahun 2010, COP 18 tahun 2012, COP 20 tahun 2014 dan selanjutnya COP 21 tahun 2015 melalui Perjanjian Paris (UNWOMEN.org).

Lalu bagaimana dengan kebijakan nasional Indonesia? Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan respon positif dengan melaksanakan beberapa ratifikasi bahkan sejak rezim perubahan iklim internasional pertama kali disahkan. Indonesia meratifikasi konvensi perubahan iklim UNFCCC tahun 1992 melalui UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Indonesia juga meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Pada tahun 2007, Indonesia bahkan menjadi tuan rumah COP UNFCCC ke 13 di Bali dan menghasilkan *Bali Roadmap*. Indonesia juga meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengeluarkan Perka (Peraturan Kepala) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanganan Bencana. Perka ini tujuannya untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta elemen nonpemerintah dalam penanganan bencana.

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini hendak melihat keterkaitan tiga wacana yaitu gender, keamanan manusia dan perubahan iklim. Artikel ini juga hendak menganalisis sejauhmana perspektif gender dan keamanan manusia diintegrasikan dalam kebijakan perubahan iklim, serta bagaimana implementasinya di Indonesia?

11.2 Perubahan Iklim, Gender dan Keamanan Manusia

International Panel on Climate Change (IPCC) secara khusus menyoroti dampak perubahan iklim terhadap masyarakat miskin. Menurut IPCC, masyarakat miskin menderita dampak perubahan iklim yang paling buruk saat terpapar bencana (IPCC, 2007). Di sisi lain, masyarakat miskin seringkali dikaitkan dengan perempuan atau

“berwajah perempuan” karena sekitar 70% masyarakat miskin dunia adalah perempuan (UNDP, 1995). Dampak perubahan iklim tersebut mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda karena beberapa hal menyangkut peran dan status sosial dalam masyarakat, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, kurangnya akses terhadap ekonomi dan pengambilan keputusan, serta feminisasi kemiskinan (Kisauzi, 2012). Differensiasi gender terkait peran sosial, serta akses yang berbeda terhadap pemenuhan sumber daya berdampak terhadap perbedaan kapasitas perempuan dan laki-laki menghadapi perubahan iklim. Seringkali perempuan menjadi kelompok rentan karena kurangnya kapasitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim (Babugura, 2010; Nelson, 2011). Perempuan yang terutama dari kelompok miskin, lanjut usia, maupun kelompok minoritas berisiko paling tinggi menghadapi dampak bencana alam serta mengalami keterbatasan dalam strategi penanganan bencana (KEMENPPPA, 2011). Dampak perubahan iklim yang merusak lingkungan serta menyebabkan kelangkaan sumber daya, kelangkaan pangan dan kelangkaan air juga selanjutnya menimbulkan konflik sosial yaitu meningkatkan gelombang pengungsi atau migrasi. Pada kajian tahun 2009 *World Environmental Network*, data menunjukkan bahwa sekitar 20 juta dari 26 juta orang yang mengungsi akibat dampak perubahan iklim adalah perempuan (World Environmental Network, 2010).

Dampak negatif dari perubahan iklim juga mengancam keamanan manusia. Meskipun bencana tidak disebutkan secara spesifik sebagai salah satu dimensi dari konsepsi Keamanan Manusia menurut UNDP, namun bencana adalah bagian dari aspek Keamanan Lingkungan, yang merupakan salah satu dimensi dari keamanan manusia. Konsep “keamanan manusia” sendiri adalah muncul dari perluasan aspek keamanan dari keamanan militer yang lebih *state-centered* ke keamanan nonmiliter yang lebih *people-centered*. Konsep keamanan manusia diperkenalkan pertama kali pada kajian *Human Development Report* (HDR) pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*). Pendekatan ini mempunyai tujuh dimensi yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, keamanan kesehatan, keamanan politik. Meskipun keamanan manusia adalah “*contested concept*”, aspek dari keamanan manusia seperti yang dijelaskan UNDP (1994) adalah pertama, bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) akan ancaman-ancaman yang mengganggu kehidupannya seperti kekerasan, perang, represi. Kedua, adalah bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki dan berkeinginan (*freedom from want*) memenuhi kebutuhan dasarnya seperti ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan, politik dan dimensi yang lain. Selanjutnya adalah *freedom to live in dignity*, yaitu

kebebasan untuk hidup secara bermartabat. Perspektif keamanan manusia bersifat *people-centered*, multisektoral, komprehensif, spesifik pada konteks, dan berorientasi pencegahan (UN, 2009). Masing-masing penjelasan dari konsepsi tersebut ialah, pertama, konsep keamanan manusia menempatkan individu sebagai pusat analisis (*people-centered*) alih-alih fokus keamanan tradisional yang menempatkan negara sebagai pusat (*state-centered*). Kedua, konsepsi keamanan manusia bersifat komprehensif, berarti bahwa berbicara keamanan manusia berarti berbicara mengenai pendekatan yang menekankan perlunya respon kooperatif dan menyeluruh yang menyatukan agenda keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia. Ketiga, pendekatan keamanan manusia bersifat multisektoral, berarti pendekatan keamanan manusia membutuhkan interkoneksi dari berbagai lintas bidang dan *stakeholders*, untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif dan juga berorientasi *people-centered*. Kemudian, pendekatan keamanan manusia harus bersifat spesifik pada konteks, hal ini berarti konsep keamanan manusia mengakui bahwa latar belakang, dan akar penyebab konflik atau situasi ketidakamanan adalah bervariasi sehingga penanganan masalah keamanan harusnya bersifat kontekstual, sebab tidak ada solusi yang sama atau *one fits all*. Selanjutnya terakhir, dalam menangani situasi ketidakamanan berorientasi kepada pencegahan, dengan berfokus pada dua hal yaitu perlindungan dan pemberdayaan (UN, 2009:12)

Konsep keamanan manusia dapat dijadikan level analisis, maupun menjadi suatu konsep untuk dijadikan sebagai alat analisis riset yang berbasis pada manusia (Brauch, 2005). Meskipun banyak kritik yang dialamatkan kepada konsep keamanan manusia ini karena dianggap terlalu luas untuk dijadikan alat pengambilan kebijakan (Archarya, 2008), perspektif ini menjadi pendekatan yang mengadopsi kebijakan keamanan yang lebih *bottom-up* dan kaya akan perspektif aktor selain negara. Pengakuan akan aktor-aktor selain negara ini juga menunjukkan bahwa perspektif keamanan manusia dapat digabungkan dengan perspektif gender dalam studi keamanan. Mengingat, pendekatan keamanan manusia adalah termasuk pendekatan yang buta gender (Zeitlin dan Mpomou, 2004). Sehingga advokasi integrasi perspektif gender ke dalam konsepsi keamanan manusia diasumsikan dapat melengkapi dan memperkaya analisis keamanan manusia (Brauch, 2005). Jika pendekatan keamanan manusia adalah *people-centered*, maka setiap individu termasuk perempuan yang marginal dan subordinat dengan berbagai latar belakang seharusnya juga mendapat perhatian. Setiap individu mempunyai identitas yang beragam, sedangkan identitas serta latar belakang setiap individu tersebut mempengaruhi konsepsi, ide dan persepsi mereka yang berbeda tentang keamanan. Di satu sisi, ketika

berbicara identitas, maka pembicaraan tentang gender tidak bisa dikecualikan (Tripp, 2014).

Argumen selanjutnya ialah perlunya partisipasi seluruh individu atau “people” berbasis gender dalam merumuskan beberapa aspek agar mencapai analisa yang komprehensif. Integrasi perspektif gender dalam pendekatan keamanan manusia dapat menghasilkan data dan analisis yang komprehensif untuk mengkaji dan menangani beberapa isu seperti konflik, kemiskinan, hingga perubahan iklim. Dalam pengintegrasian perspektif gender dalam keamanan manusia juga akan didapatkan analisis “spesifik konteks” yang memungkinkan “people” yang subordinat dan marginal menikmati kesetaraan, mendapatkan manfaat yang sama dari strategi perlindungan dan pemberdayaan, serta berorientasi pencegahan dengan mendasarkan pada akar penyebab permasalahan. Analisis gender memberikan kesempatan pada perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi aktif dan setara, dengan mengintegrasikan pengalaman, pengetahuan, serta kebutuhan mereka dalam setiap upaya penanganan perubahan iklim. Perempuan (dan laki-laki) juga bisa menjadi agen perubahan untuk memberikan partisipasi aktif pada program adaptasi, program mitigasi dan kebijakan perubahan iklim.

Meskipun Kerangka Kerja PBB dalam Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto belum mempunyai referensi konsepsi keamanan manusia, beberapa rezim perubahan iklim sudah mengintegrasikan perspektif gender. Integrasi gender dalam perubahan iklim dimulai dari *the Hyogo Framework for Action* pada tahun 2005 yang dihasilkan dari Konferensi PBB dalam Pengurangan Bencana. Kerangka kerja tersebut menjelaskan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke semua kebijakan manajemen bencana, rencana-rencana dan proses pengambilan kebijakan, termasuk pada penilaian resiko, deteksi dini, manajemen informasi, pelatihan dan pendidikan (ISDR, 2005: 4). Instrumen lain yang menjadi tonggak penting ialah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2015 yaitu *Paris Agreement* yang menetapkan bahwa program-program adaptasi dalam perubahan iklim harus disesuaikan dengan perspektif kesetaraan gender, dan aksi-aksi adaptasi di tingkat nasional pada seluruh negara mesti sensitif gender. Keterkaitan antara perubahan iklim dan gender tersebut ditunjukkan dalam pembukaan (*preamble*) dan juga dalam pasal 7 pada *Paris Agreement* (UNFCC, 2015).

11.3 Pengintegrasian Perspektif Gender, Keamanan Manusia, dan Perubahan Iklim di Indonesia

Kebijakan responsif gender telah dibuat pemerintah sebagai hasil ratifikasi Indonesia terhadap *Beijing Platform of Action* tahun 1995 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

(PUG) pada Pembangunan Nasional. Upaya pengarusutamaan gender tersebut adalah melakukan seluruh proses pembangunan dari mulai perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan perspektif gender. Perempuan dan laki-laki terlibat dalam semua proses pembangunan secara setara, dan juga setara sebagai penerima hasil dan manfaat pembangunan. Kebijakan PUG tersebut penting untuk dijadikan landasan awal dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk terkait upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Adopsi perspektif gender dalam bangunan pengetahuan dan kebijakan menawarkan identifikasi pengalaman khas yang berbasis jenis kelamin, adanya pengakuan hak, kapasitas dan kapabilitas yang setara antara perempuan dan laki-laki, serta upaya untuk menemukenali resistensi dan resiliensi yang menjadi strategi pemberdayaan maupun langkah afirmasi perempuan dan laki-laki.

Dalam pembuatan kebijakan penanggulangan bencana, Indonesia cukup aktif dalam merespon rezim internasional. Sebagai contoh, Indonesia turut meratifikasi *Hyogo Framework for Action* (Kerangka Kerja Hyogo) tahun 2005-2015 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menetapkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pada pasal 3 ayat (1) huruf c. Artinya bahwa dalam ketentuan penanggulangan bencana, tidak boleh membeda-bedakan latar belakang termasuk gender. Di dalam UU ini dijelaskan upaya mendukung perlindungan serta partisipasi dalam perencanaan, akses terhadap bantuan, dan pengambilan keputusan yang tidak diskriminatif untuk warga negara. Himbuan secara jelas untuk melakukan pengarusutamaan gender juga ditunjukkan dalam UU ini. Namun, sesuai laporan kemajuan pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo tahun 2009, belum ada kemajuan institusional dan perhatian khusus terhadap pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan *framework* manajemen resiko bencana (KEMENPPA, 2011).

Beberapa kajian terkait upaya integrasi gender dalam kebijakan perubahan iklim juga dapat dilihat melalui dokumen Kertas Kerja Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim yang dibuat oleh Kementerian Perencanaan Nasional/BAPPENAS bekerjasama dengan UN *Women* dan UNDP di tahun 2012. Dalam kertas kerja tersebut disebutkan bahwa perubahan iklim tidak netral gender oleh karena itu membutuhkan analisis gender. Selain itu, perubahan iklim juga mengancam keamanan manusia sehingga membutuhkan kerangka pendekatan keamanan manusia. Lebih lanjut disebutkan bahwa kerangka keamanan manusia membentuk alat analisis penting dalam melakukan identifikasi dampak perubahan iklim pada semua aspek keamanan

manusia, -selain diferensiasi gender-, sehingga mempengaruhi strategi dan opsi kebijakan adaptasi (BAPPENAS, 2012).

Selanjutnya regulasi khusus terkait penanggulangan bencana dan gender juga dapat dilihat melalui Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. Perka ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga non pemerintah dalam upaya PUG bidang penanggulangan bencana baik saat prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Penyesuaian dengan PUG dapat dilihat pada pasal 4 Perka yang memberikan indikator penanggulangan bencana yaitu adanya akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan kebijakan, serta manfaat dari kebijakan dan program. Pasal 5 juga menyebutkan analisis gender diperlukan sebagai penyedia data terpilah maupun sebagai metode alur kerja analisis. Lebih lanjut, data terpilah juga dibutuhkan pada kajian risiko saat prabencana, selain memperhatikan pengetahuan dan persepsi perempuan, perbedaan risiko yang dialami, hingga melibatkan organisasi-organisasi komunitas.

Permasalahan di sini adalah belum adanya data terpilah yang cukup representatif yang semestinya diperbaharui setiap tahun oleh BNPB. Selain itu, data terpilah yang dimaksudkan dalam kebijakan Perka hanya ditujukan untuk keperluan perencanaan (pasal 5) serta tahap prabencana (pasal 12). Padahal dalam kerangka analisis gender, semestinya data terpilah disediakan dari sejak prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini untuk memastikan intervensi tanggap darurat dan pasca bencana lebih terarah, efektif dan efisien bagi para korban dan penyintas. Keperluan data terpilah disini penting sebagai pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan maupun laki-laki dalam memperoleh akses dan kesempatan partisipasi, kontrol, maupun mendapatkan manfaat yang adil dan setara atas beragam kebijakan dan program dari penanggulangan bencana. Analisis gender dalam pemetaan data dan pembuatan data terpilah juga bermanfaat dalam pendistribusian dan manajemen bantuan sosial atau kompensasi terhadap mereka yang terdampak bencana alam, misalnya menyangkut perbedaan kebutuhan bantuan sosial antara korban perempuan dan laki-laki. Beberapa fakta di lapangan bahkan menyebutkan bahwa beberapa perempuan korban bencana alam mendapatkan kekerasan dan atau pelecehan seksual saat darurat bencana dan pasca bencana seperti contohnya yang terjadi di Sulawesi Tengah (Primastika, 2019). Oleh karena itu, perspektif gender dalam penanggulangan bencana mesti diimplementasikan secara komprehensif, sejak pra hingga pasca bencana serta dipastikan perspektif gender sudah terinternalisasi kepada mereka yang bertugas dalam penanganan bencana.

Regulasi selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang ini disebutkan pada pasal 7:

“para pihak mengakui bahwa aksi adaptasi perlu mengikuti pendekatan yang bersumber dari negara sendiri, responsif terhadap gender, partisipatif dan sepenuhnya transparan dengan mempertimbangkan kelompok, komunitas dan ekosistem yang rentan...”

Berbeda dengan rezim perubahan iklim yang sebelum-sebelumnya, Perjanjian Paris yang bersifat mengikat ini menjadi sebuah rezim yang menggabungkan pendekatan *top-down* yang ambisius dan akuntabel serta *bottom-up* yang mengajak partisipasi lebih luas dalam mewujudkan komitmen jangka panjang UNFCCC (Zuhir et al, 2017). Salah satu wujud pendekatan *bottom-up* adalah adanya penyerahan dokumen mengenai komitmen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Intended Nationally Determined Contributions/INDCs*) oleh masing-masing negara yang akan melakukan ratifikasi. Sebagai contoh di Indonesia, dalam dokumen *the first Nationally Determined Country* (NDC) yang disampaikan pemerintah Indonesia, menjelaskan komitmen Indonesia untuk membuat rangkaian kebijakan dan aksi yang lebih menekankan pada partisipasi kelompok rentan termasuk perempuan agar langkah-langkah implementasi lebih efektif dan adil (INDC, 2016). Dalam INDC pertama ini disebutkan bahwa pemerintah sudah membuat langkah signifikan dalam upaya pengurangan emisi karbon melalui moratorium pembukaan hutan primer. Langkah selanjutnya adalah adanya upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan hutan rakyat yang juga menuntut partisipasi beberapa elemen termasuk kelompok rentan yaitu perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaannya (Zuhir et al, 2017). Permasalahannya adalah, data-data di lapangan menunjukkan tidak adanya pengurangan deforestasi tetapi sebaliknya ada penambahan sebanyak 25% kawasan hutan yang hilang (Zuhir et al 2017). Hal ini menunjukkan lemahnya perwujudan komitmen pemerintah untuk melindungi hutan sebagai salah satu cara mengurangi emisi karbon, apalagi upaya melindungi kelompok rentan perempuan dan masyarakat adat yang menggantungkan kebutuhan dasarnya pada kelestarian hutan rakyat.

Lalu bagaimana dengan konteks perspektif keamanan manusia? Dalam regulasi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, gagasan keamanan manusia tersirat secara implisit. Hal ini ditunjukkan melalui pasal 26 ayat 1(a) mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial

dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Kalimat ini berkorelasi dengan prinsip keamanan yang berpusat pada manusia (*people-centered*) dengan keamanan seluruh individu terutamanya kelompok rentan dapat dijaga keamanan dan perlindungan sosialnya dalam upaya penanganan bencana. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga sudah menerbitkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Tahun 2012 yang beberapa isinya secara substantif berkorelasi dengan penanganan dampak perubahan iklim. Dalam pasal 46 bagian ke sebelas menyebutkan tentang Penanggulangan Keadaan Bencana, meskipun baru diatur mengenai bantuan kemanusiaan oleh asing di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Konsepsi keamanan manusia juga diadaptasi dalam pasal 1 ayat 4 RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Dalam RUU ini menyebutkan tentang definisi keamanan manusia,--di RUU diistilahkan keamanan insani-, menyebutkan bahwa “keamanan insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional”. Definisi keamanan manusia/keamanan insani ini tidak secara eksplisit sesuai dengan definisi dari UNDP, dan belum ada penjabaran lebih lanjut tentang hak-hak dasar setiap individu yang dimaksud. Akan tetapi, keamanan insani adalah termasuk dari salah satu yang menjadi ruang lingkup keamanan nasional, bersama dengan lingkup yang lain yaitu keamanan publik, keamanan ke dalam, dan keamanan di luar, yang disebutkan dalam pasal 5 RUU Kamnas tentang Ruang Lingkup keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keamanan nasional yang tersirat dalam RUU tersebut meletakkan perspektif keamanan manusia sejalan dengan keamanan publik atau keamanan masyarakat, dan penjaminan keamanan insani menjadi bagian dari terjaminnya keamanan nasional. Akan tetapi lagi-lagi, RUU Kamnas juga bersifat netral gender. Tidak ada satu kata pun dalam RUU tersebut yang menyebutkan gender dan atau perempuan, sehingga mengasumsikan bahwa kebutuhan dan keamanan semua individu adalah dianggap sama, tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, latar belakang pendidikan dan ekonomi, kondisi atau posisinya di dalam masyarakat.

Di sisi lain, yang perlu diapresiasi adalah, Bappenas sudah mengembangkan kajian tentang cara pengukuran Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) pada tahun 2015 (Bappenas, 2015). Pengembangan IKMI ini didasarkan pada penggabungan dimensi UNDP dengan aspek ke-Indonesiaan sehingga mengandung 4 dimensi yaitu dimensi keamanan dari bencana, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, keamanan dari kekerasan, dan pemenuhan kesejahteraan sosial. Dalam kajian tersebut, pengukuran indeks didasarkan pada dimensi, variabel, indikator dan sumber data yang secara konseptual

sudah bagus. Dalam kajian IKMI terutama dalam dimensi perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan juga sudah memasukkan aspek gender sebagai salah satu atribut variabel kebebasan dari diskriminasi, meskipun kelemahannya adalah, aspek gender dimasukkan hanya sebagai atribut atau identitas, bukan sebagai alat analisis. Apabila aspek gender digunakan sebagai alat analisis, maka semua dimensi dari kajian IKMI adalah saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Perspektif gender menjadi alat ukur mencakup semua dimensi yaitu keamanan dari bencana, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan, keamanan dari kekerasan, dan pemenuhan kesejahteraan sosial. Penyusunan variabel, data dan indikator keamanan manusia juga akan menyesuaikan pespektif gender. Hal ini menjadi masukan penulis terhadap kajian IKMI untuk ditingkatkan kualitas pengukuran, ditambahkan perspektif analisis gender dan tentu saja perlu diuji lebih lanjut untuk diterapkan di Indonesia.

11.4 Kesimpulan

Dampak perubahan iklim yang tidak netral gender membutuhkan pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Upaya pengarusutamaan gender melalui beberapa kebijakan perubahan iklim dan penanggulangan bencana di Indonesia sudah terlihat, tetapi belum berjalan optimal dan efektif. Ada beberapa kekurangan dalam pengadopsian PUG di tingkat kebijakan sehingga PUG tersebut belum dimasukkan dalam setiap tahap penanggulangan bencana dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Semestinya upaya pengintegrasian gender dimasukkan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan, pengetahuan dan pengalaman perempuan pada konteks perubahan iklim. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan kerentanan yang dialami perempuan akibat dampak perubahan iklim dan juga dampak kebijakan yang kurang responsif gender. Di sisi lain, adopsi pendekatan keamanan manusia yang berperspektif gender juga penting dimasukkan dalam kebijakan-kebijakan perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Mengingat konsepsi keamanan manusia dapat memberikan analisis terkait dampak, potensi dan persepsi ancaman terhadap individu, serta menawarkan pendekatan dalam mengatasi rasa ketidakamanan akibat ancaman perubahan iklim melalui kebijakan multisektoral, komprehensif, *people-centered*, kontekstual dan berorientasi pencegahan. Kebijakan dalam perubahan iklim dan penanggulangan bencana juga perlu mengintegrasikan kedua perspektif ini karena isunya saling berkaitan. Kita tidak bisa melihat isu dan fenomena perubahan iklim hanya melalui lensa gender saja, atau melalui lensa keamanan manusia saja. Kedua perspektif gender dan keamanan manusia dapat saling

melengkapi dan memperkaya basis analisis dalam pembuatan kebijakan terkait perubahan iklim dan penanggulangan bencana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Archarya, Amitav. (2008) (4th ed.) "Human Security" dalam Baylis et al. (Eds.) *The Globalization of World Politics*. New York: Oxford University Press
- Babugura, A. (2010). *Gender and Climate Change: South Africa Case Study*. Southern Africa: Heinrich Boll Stiftung.
- Baldwin, David A. "Security Studies and the End of the Cold War". *World Politics*, Vol. 48, No. 1 (Oct., 1995), pp. 117-141.
- BAPPENAS, 2015. "Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015", Diambil dari laman [[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf)], diakses 30 Mei 2020.
- BAPPENAS. 2012. "Policy Paper on Gender Mainstreaming in Climate Change Adaptation".
- BNPB. (2011). *Indeks Rawan Bencana Indonesia*: Jakarta.
- Bogardi, Janos. (2004) "Hazards, risks and vulnerabilities in a changing environment: The unexpected onslaught on human security?", *Global Environmental Change*. 14,4: 361-365.
- Brauch, Hans Günter. (2003) "Security and Environment Linkages in the Mediterranean: Three Phases of Research on Human and Environmental Security and Peace", dalam Brauch, Hans Günter et al. (Eds.): *Security and Environment in the Mediterranean. Conceptualising Security and Environmental Conflicts* (Berlin-Heidelberg: Springer 2003): 35-143.
- Brauch, Hans Günter. (2005) "Environment and Human Security: Towards Freedom from Hazard Impacts". *Intersections* No. 2/2005.
- Brunner, Ronald D. (2001). "Science and the Climate Change Regime". *Policy Sciences*. Vol. 34, No. 1 (Mar 2001) pp. 1-33.
- Carbonbrief.org. "Country profiles, the carbon brief profile: Indonesia", 27 Maret 2019. Diambil dari laman [<https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia>], diakses 10 Mei 2020.
- Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pembangunan Nasional
- IPCC. (2001). *Climate change 2001*. Synthesis report. Cambridge University Press.
- IPCC. (2007). "Working Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and

- Vulnerability, Summary for Policymakers, 6 April 2007. Diambil dari laman [<http://www.ipcc.ch/SPM6avr07.pdf>]. Diakses 19 Mei 2020.
- ISDR. (2005). Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. Extract from the report of the World Conference on Disaster Reduction. United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Geneva.
- KEMENPPPA, 2011. “Gender dalam Bencana Alam dan Adaptasi Iklim”, *Kertas Kebijakan*. Diambil dari laman [<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3b33-6.-gender-dalam-bencana-alam-dan-adaptasi-iklim.pdf>], diakses 17 Mei 2020.
- Kisauzi, T, (2012). “Gender Dimensions of Farmers’ Perceptions and Knowledge on Climate Change in Teso-Sub Region, Eastern Uganda”. *African Crop Science Journal*. 2, 275-286.
- LIPI. 25 Agustus 2018. “Viral Pesan Gempa Jawa LIPI ingatkan untuk Waspada dan Jangan Mudah Panik”. Diambil dari laman [<http://lipi.go.id/berita/viral-pesan-gempa-jawa-lipi-ingatkan-untuk-waspada-dan-jangan-mudah-panik/21036>]. Diakses 17 Mei 2020.
- Myers, Norman, 1989: “Environment and Security”. *Foreign Policy*. 74 (Spring): 23-41.
- Nelson, V. 2011. *Gender, Generations, Social Protection dan Climate Change; A Thematic Review*. London, UK: Overseas Development Institute.
- Nugroho, P.S. 2017. “2.341 Kejadian Bencana, 377 Tewas dan 3,5 Juta Jiwa Mengungsi dan Menderita Akibat Bencana Tahun 2017”. Diambil dari laman [<https://www.bnppb.go.id/2341-kejadian-bencana-377-tewas-dan-35-juta-jiwa-mengungsi-dan-menderita-akibat-bencana-tahun-2017>], diakses 12 Mei 2020.
- Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana
- Primastika Widya, 2 September 2019. Diambil dari laman [<https://tirto.id/57-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-saat-bencana-sulawesi-tengah-ehpi>], diakses 20 Mei 2020.
- Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2012
- Tripp, Aili. (2014). “Toward a Gender Perspective on Human Security”. *Gender, Violence, and Human Security*, (2014) pp.3-32.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UNFCCC. (2016). *Intended Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Diambil dari laman
- United Nations Development Programme. (1995). *Human Development Report 1995*. New York: OUP.
- United Nations. 17 November 2015. “UN Calls on Countries to Protect Health Impacts Climate Change”. Diambil dari laman [<https://news.un.org/en/story/2015/11/515752-un-calls-countries-protect-health-impacts-climate-change>], Diakses 18 Mei 2020.
- United Nations. 2009. “Human Security in Theory and Practice”. Diambil dari laman [<https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf>]. diakses, 20 Mei 2020.
- Vlassopolous, Chloe Anne. “Competing definition of Climate Change and the post-Kyoto Negotiations” *International Journal of Climate Change Strategies and Management*. Vol. 4 No.1 (2012) pp. 104-118.
- Webersik, Christian. (2010). *Climate Change and Security: A Gathering Storm of Global Challenges*. Santa Barbara, CA: Praeger.
- Women’s Environmental Network. (2010). *Gender and the Climate Change Agenda: The Impacts of Climate Change on Women and Public Policy*.
- Zeitlin, June dan Doris Mpoumou. (2004) “No Human Security Without Gender Equality”. *Social Watch*. Diambil dari laman [http://www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/en/genderequality2004_eng.pdf], diakses 17 mei 2020
- Zuhir, Mada Apriandi et al. “Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, Nomor 2, April 2017.
- https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf, diakses 13 Mei 2020.

**SUB CHAPTER IV:
PERSINGGUNGAN ISU GENDER DAN
INKLUSI SOSIAL**

12. Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Ditinjau dari Pendekatan Gender: Sebuah Studi Pendahuluan

Oleh:
Nurul Azizah Zayzayda

12.1 Latar Belakang

Refugees atau pengungsi lintas batas meninggalkan negara asalnya dan pergi ke negara lain karena berbagai situasi yang memaksa mereka untuk berpindah. Situasi ini bisa berupa perang, konflik dalam negeri, vertikal maupun horizontal yang menyebabkan nyawa mereka terancam, pemerintahan yang represif atau diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas. Kondisi memaksa ini bisa juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam, atau masalah sosial lainnya yang menyebabkan tidak mungkin untuk tetap tinggal di tempat asalnya. Tidak semua yang pindah menjadi pengungsi lintas batas karena bila mereka hanya berpindah di dalam batas negara, mereka menjadi *internally displaced persons* (IDPs) atau pengungsi internal.

Terdapat perjanjian internasional yang mengatur agar pengungsi lintas batas dapat diterima di negara lain, mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang layak dengan perlakuan manusiawi. Perjanjian internasional ini adalah konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi Lintas Batas dan Protokol pelengkapinya tahun 1967. Namun, tidak semua pengungsi lintas batas masuk ke dalam kategori konvensi tersebut. Pengungsi yang berpindah karena masalah lingkungan dan kemiskinan serta bencana alam tidak disebutkan di dalam kategori pengungsi. Komisi Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memiliki mandat untuk memastikan perlindungan ini dan untuk menentukan status pengungsi.

Pengungsi yang berada di Indonesia saat ini terdiri atas mereka yang sudah ditentukan statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR dan mereka yang masih dalam proses (mulai saat ini akan disebut sebagai pencari suaka). Para pengungsi berada di Indonesia bukan karena mendapat penempatan permanen tetapi tengah menunggu penempatan permanen di luar negeri. Bersama-sama, pengungsi dan pencari suaka berada di Indonesia untuk 'transit' sebelum kejelasan penempatan di negara lain, bagi pengungsi dan kejelasan status mereka, bagi pencari suaka. Mengapa penempatannya bukan di Indonesia? Konvensi 1951 menimbulkan kewajiban negara untuk menjadi negara penempatan atau disebut juga negara ketiga hanya bila negara menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia tidak menandatangani tetapi membuat kebijakan yang mengizinkan pengungsi dan pencari suaka untuk tinggal

di Indonesia selama transit. Indonesia juga menerapkan kebijakan untuk tidak memulangkan pencari suaka walau mereka masuk wilayah Indonesia tanpa dokumen, konsisten dengan prinsip *non-refoulement* dalam konvensi.

Telah banyak dilakukan kajian maupun diskusi ilmiah mengenai pengungsi di Indonesia. Beberapa menceritakan pengalaman pengungsi di Indonesia sebagai negara transit, dan lainnya mengenai kebijakan di Indonesia (Lihat Missbach, 2015; Tan, 2016, Sampson, Gifford dan Taylor, 2016; Tricesaria, Zayzda dan Prabaningtyas, 2015; Missbach, Adiputra, Prabandari, Cantika, Swastika dan Darningtyas, 2018). Hingga bab ini ditulis, masih sangat sulit untuk menemukan analisis gender pada kehidupan pengungsi di Indonesia maupun kebijakan pemerintah, walaupun terdapat artikel-artikel yang mendokumentasikan pengalaman mereka. Tulisan ini memberikan pengantar mengenai Indonesia sebagai negara transit dan konteks politik domestik dan internasional yang mengatur kehidupan pengungsi. Dengan menggunakan tinjauan pustaka mengenai riset terdahulu yang melakukan analisis gender dalam isu pengungsi, tulisan ini memetakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan mengenai interaksi antara kebijakan dan pengungsi di Indonesia dalam kerangka berpikir analisis gender.

12.2 Tinjauan Pustaka

Sudah banyak dilakukan studi mengenai pengungsi baik itu yang berfokus kepada kebijakan nasional, perjanjian internasional, bantuan kemanusiaan, aktivitas organisasi nonpemerintah maupun kehidupan pengungsi selama proses migrasi. Beberapa analisis gender berfokus pada pengalaman, kerentanan dan *agency* perempuan, dan yang lainnya menggunakan analisis gender untuk mempelajari pengalaman pengungsi secara utuh, laki-laki dan perempuan, kepala keluarga ataupun yang belum menikah, serta pengungsi muda yang bepergian sendirian. Memang pendekatan gender dalam isu kemanusiaan tidak berarti berangkat hanya perempuan yang mungkin mengalami kerentanan. Krystalli, Hawkins dan Wilson (2018) melalui penelitian multi-sitenya memetakan berbagai bentuk kerentanan lintas gender dan usia dalam semua proses mengungsi, mulai dari berangkat hingga sampai di negara tujuan. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dengan perempuan, dengan laki-laki lebih mungkin mengalami kekerasan fisik. Perempuan sementara itu rentan menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, kesulitan hidup akibat minimnya bantuan kemanusiaan yang diterima laki-laki muda dapat menyebabkan terseret dalam transaksi seks (Krystalli, Hawkins dan Wilson, 2018).

Sebuah studi yang spesifik mempelajari pendampingan pengungsi oleh organisasi nonpemerintah oleh Szczepanikova (2009) menunjukkan bagaimana pendekatan gender bisa disalahartikan dan berbalik membuat pengungsi tidak berdaya. Studi kasus yang diberikan adalah mengenai pendampingan oleh aktivis organisasi nonpemerintah yang mendampingi pengungsi di Republik Cech. Pengungsi yang dipelajari mendapatkan pendampingan berupa *support group* atau kelompok dukungan berbasis gender. Pada kelompok dukungan perempuan ini, kerangka untuk aktivitas didominasi dengan aktivitas berbagi cerita atau pengalaman. Di satu sisi aktivitas ini membangkitkan semangat pengungsi perempuan dengan mereka merasa saling terkait satu sama lain. Namun bila dilihat secara utuh, tidak terjadi pemberdayaan yang berarti disana karena; pertama, agenda diatur oleh organisasi yang mendampingi para pengungsi ini sehingga tercipta relasi yang tidakimbang dan kedua, kegiatan *sharing* pengalaman terbatas pada definisi-definisi tradisional mengenai peran perempuan.

Studi lain oleh Olivius (2014) menekankan kepada peran aktif pengungsi perempuan dalam program bantuan kemanusiaan. Dengan menggunakan konsep *governmentality* sebagai kerangka analisis, Olivius menggarisbawahi bagaimana program kemanusiaan yang dilakukan di *camp* pengungsian di Bangladesh dan Thailand merepresentasikan ide-ide neoliberal. Di *camp* pengungsian Bangladesh, program kemanusiaan ini diiringi dengan pelanggaran subordinasi perempuan, karena mereka menjalankan program yang terkait semata dengan urusan rumah tangga. Partisipasi mereka menegaskan stereotype gender mengenai perempuan yang perannya terbatas dalam ranah reproduksi dan bahwa tanggung jawab untuk kesehatan anak-anak adalah tanggung jawab perempuan semata. Hal serupa tidak ditemukan di *camp* Thailand, aktivis pengungsi perempuan telah menjadikan program kemanusiaan ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Analisis gender dalam isu pengungsi menunjukkan bahwa cakupan perlindungan tidak terbatas pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya. Laki-laki dan perempuan memiliki berbagai kerentanan dalam berbagai fase mengungsi dan mencari suaka. Di samping itu perlu diperhatikan dalam bantuan kemanusiaan juga mengenai pemberdayaan mereka sebagai pemegang *agency* dalam politik dan kebijakan perlindungan pengungsi, dengan cara keluar dari konstruksi tradisional mengenai peran perempuan.

12.3 Pembahasan

12.3.1 Global Compact on Refugees dan Kebijakan Nasional Indonesia mengenai Pengungsi

Terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur perlindungan pengungsi lintas batas dan pencari suaka. Instrumen yang utama adalah konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi Lintas Batas dan Protokol pelengkapinya tahun 1967. Protokol ini melengkapi Konvensi tersebut dan memperluas definisi pengungsi tidak terbatas pada pengungsi di Eropa yang berpindah karena peristiwa sebelum tahun 1951. Kemudian pada tahun 2016 dikeluarkan Deklarasi PBB bernama *The New York Declaration for Refugees and Migrants*, yang di dalamnya terdapat naskah *Global Compact on Refugees* (GCR). Naskah GCR ini diselesaikan dan disepakati tahun 2018 dan berisikan kerangka kerja komprehensif untuk respons pada pengungsi melalui berbagi tanggung jawab antara pemerintah, organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnya. Bila Konvensi bersifat mengikat negara-negara yang mengadopsinya, GCR merupakan kesepakatan antar-negara untuk komitmen HAM-nya.

GCR menyediakan panduan untuk aktivitas perlindungan dengan memperhatikan usia, gender dan keberagaman atau *age, gender and diversity* (AGD) mulai dari saat menerima pencari suaka yang baru datang, selama proses transit, hingga pemberangkatan ke negara ketiga. Dalam pasal 13 mengenai *Program of Action* untuk implementasi kerangka kerja komprehensif tertulis:

“*Programme of Action* didasari oleh kemitraan dan pendekatan partisipatoris yang kuat, melibatkan pengungsi dan masyarakat setempat, serta pertimbangan-pertimbangan usia, gender dan diversitas, termasuk: mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan; mengakhiri semua bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender, perdagangan manusia, eksploitasi dan pelecehan seksual, dan praktik-praktik yang membahayakan; memfasilitasi partisipasi orang-orang muda, orang dengan disabilitas, dan orang-orang lanjut usia; menjamin kepentingan anak terpenuhi; dan memerangi diskriminasi.” (United Nations, 2018).

Karakter dari *Programme of Action* di GCR seperti dijelaskan di atas adalah pelaksanaannya yang bukan hanya negara, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat sasaran yang tidak hanya komunitas pengungsi, serta juga *host communities*- masyarakat setempat. Dapat dimaknai bahwa GCR ingin menekankan bahwa inklusivitas kebijakan untuk pengungsi hanya terwujud dengan inklusivitas pada semua kelompok rentan dalam masyarakat setempat.

Langkah-langkah implementasi PoA berbasis AGD ini dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya. Misalnya pasal 72 menjelaskan sistem kesehatan nasional yang perlu ditingkatkan agar bersifat inklusif sehingga dapat melindungi pengungsi dan masyarakat setempat. Pasal 74 melakukan dua hal sekaligus. Pertama, pasal ini menyoroti hambatan-hambatan terkait gender yang mungkin dialami perempuan dan anak perempuan dan pentingnya untuk memberdayakan mereka. Kedua, digarisbawahi kembali bahwa kebutuhan dan situasi spesifik yang dialami laki-laki dan anak laki-laki juga harus dipertimbangkan. Pasal 76 secara lebih khusus menjelaskan kategori-kategori anak yang rentan, yaitu semua anak laki-laki dan anak perempuan, anak dengan disabilitas, anak dalam usia remaja, anak yang bepergian tanpa orang tua atau pendamping atau terposah dari keluarga, penyintas kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, penyintas eksploitasi dan pelecehan seksual dan praktik membahayakan lain, serta anak-anak rentan lain.

Indonesia sendiri tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokolnya sehingga tidak mempunyai UU perlindungan pengungsi yang mengadopsi Konvensi tersebut. Konsekuensinya pada HAM pengungsi adalah selama di Indonesia mereka tidak bisa mendapat pekerjaan formal, akses pendidikan formal, mengikuti skema asuransi kesehatan nasional, dan akses jaminan sosial lainnya. Namun, Indonesia mendukung dan berperan aktif dalam pembuatan naskah *Global Compact for Orderly migration and Refugees* dan *New York Declaration on Refugees and Migrants by the UN General Assembly* selama tahun 2015-2016 (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Untuk kebijakan nasional yang bersinggungan dengan isu pengungsi telah dianalisis secara mendalam dalam publikasi lainnya (Lihat Zayzda, Ash-Shafikh dan Kusuma, 2019). Dasar perlakuan pada warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen atau masuk dengan transportasi tidak resmi adalah UU Imigrasi No. 6 Tahun 2011. UU ini mendasari penggunaan rumah detensi imigrasi untuk menampung pengungsi. Namun dengan perkembangan kedatangan pencari suaka dan meningkatnya kesadaran mengenai hak asasi manusia pengungsi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Perpres ini memberi landasan hukum bagi bantuan oleh pemerintah daerah dan kemitraan dengan Organisasi Internasional. Dalam aspek pertimbangan AGD, Perpres ini menggarisbawahi mengenai pengungsi berkebutuhan khusus, yakni pengungsi yang sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia. Untuk kategori ini dapat dibantu oleh organisasi internasional untuk ditempatkan di luar tempat penampungan. Namun, tidak ada perhatian khusus untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan untuk pemberdayaan pengungsi serta pemenuhan hak pendidikan.

12.3.2 Kondisi pengungsi di Indonesia ditinjau berdasarkan pendekatan berbasis AGD

Analisis gender mengenai pengungsi perempuan di Indonesia belum banyak dibuat, walaupun sudah ada beberapa upaya untuk mendokumentasikannya. Khususnya, telah dilakukan dokumentasi mengenai komunitas pengungsi serta berbagai kelompok dukungan yang telah sukses dibuat pengungsi perempuan. Pengungsi perempuan yang terdaftar di Indonesia terdiri atas beberapa kategori usia. Pada awal tahun 2020, jumlah orang yang terdaftar di UNHCR adalah 13,623 orang, terdiri atas pengungsi dan pencari suaka. Sebanyak 70 % dari semua orang yang terdaftar adalah orang dewasa dan 28 % anak-anak (di bawah 18 tahun), serta 2 per sen lansia (di atas 59 tahun). Dari keseluruhan orang dewasa, sebanyak 26 % adalah perempuan, dan sisanya laki-laki. Dari keseluruhan anak-anak, sebanyak 46 % adalah anak perempuan. Sebanyak 3.659 anak-anak tinggal bersama keluarganya, sementara 89 anak tanpa orang tua atau pendamping, dan 46 anak dirawat oleh orang selain keluarganya (UNHCR Representation in Indonesia, 2020: 1). Belum ada dokumentasi bahwa pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain secara khusus mengimplementasikan GCR.

Berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016, pemerintah Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan bantuan sosial seperti uang bulanan, layanan kesehatan, pendidikan ataupun ijin bekerja. Perpres itu menjelaskan bahwa untuk kebutuhan dasar tersebut akan disediakan oleh organisasi internasional di bidang migrasi. Aktor-aktor yang berperan dalam bantuan untuk pengungsi dan pencari suaka adalah UNHCR Indonesia, Mitra PBB- IOM dan organisasi-organisasi nonpemerintah internasional maupun lokal seperti *Jesuit Refugee Service* (JRS) dan *Church World Service* (CWS), SUAKA, *Human Rights Network Group* dan *Dompot Dhuafa*. Organisasi seperti JRS, CWS, dan *Dompot Dhuafa* fokus kepada pemberian bantuan dan pelayanan, sementara SUAKA dan *Human Rights Network Group* fokus pada advokasi dan khusus SUAKA, pendampingan hukum. Di samping itu, telah berkembang pula komunitas-komunitas yang didirikan oleh pengungsi yang bekerja menyediakan pendidikan maupun pelatihan-pelatihan keterampilan.

Berdasarkan data UNHCR Indonesia awal tahun 2020, pengungsi dan pencari suaka tersebar di beberapa kota di Indonesia. Paling banyak berada di Jakarta dan sekitarnya (terutama Bogor) sebanyak 7.158 orang. Di Sumatera, mereka berada di Medan (1.950 orang), Pekanbaru (988 orang) Tanjung Pinang dan Batam (979 orang). Di Makassar juga terdapat cukup banyak pengungsi yakni 1.774 orang. Lokasi-lokasi lain adalah Surabaya, Semarang, Kupang, Denpasar dan lain-lain (UNHCR Representation in Indonesia, 2020: 1). Untuk tempat tinggal sementara di luar rumah detensi imigrasi, beberapa organisasi seperti IOM dan CWS

membantu menyediakan akomodasi. Hingga awal 2020, IOM telah menempatkan sekitar 8,000 pengungsi dan pencari suaka di akomodasi di *community housing*. Terdapat akomodasi khusus pengungsi dan pencari suaka perempuan yang disediakan oleh CWS (IOM, tanpa tahun.; CWS, 2020).

Untuk dukungan layanan kesehatan, beberapa organisasi yakni CWS, JRS dan IOM memberikan bantuan di bidang layanan kesehatan. IOM memberikan uang bulanan dengan standar pendapatan masyarakat sekitar untuk setiap orang yang mereka tempatkan di *community housing*. CWS juga memberikan bantuan berupa uang belanja untuk mereka yang tidak mampu membeli makanan dan mencari akomodasi untuk dirinya atau keluarganya. Namun, bantuan dari CWS ini tidak diberikan kepada semua pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, terbatas pada mereka yang dianggap paling rentan kondisinya (CWS, 2020; UNHCR Indonesia, tanpa tahun; IOM, tanpa tahun; Jrs.id, tanpa tahun).

Di bidang pendidikan juga tidak ada landasan hukum untuk hak pendidikan pengungsi dan pencari suaka, sehingga mereka tidak bisa bersekolah di sekolah formal di Indonesia. Walaupun ada contoh kasus yang menunjukkan bahwa pengecualian bisa dilakukan. Sebuah Sekolah Dasar di Makassar misalnya menerima anak pengungsi untuk bersekolah di sekolahnya (Hafanti, 2018). Tetapi ini bukan kebijakan yang umum diterima untuk saat ini. Organisasi non-pemerintah termasuk CWS, JRS dan Dompot Dhuafa juga telah membuat inisiatif pendidikan nonformal dan berbagai bentuk kursus atau pelatihan keterampilan, seperti komputer dan menjahit (CWS, 2020; IOM, tanpa tahun; Jrs.id, tanpa tahun, Dompot Dhuafa, tanpa tahun). Sudah ada juga universitas yang menyediakan pelatihan untuk pengungsi yakni Unika Atmajaya Jakarta yang menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk pengungsi (Unika Atma Jaya, 2018).

Namun, perkembangan paling pesat untuk bidang pendidikan datang dari komunitas pengungsi sendiri. Pada tahun 2019, sudah terdapat 11 sekolah komunitas yang dibentuk pengungsi di seluruh Indonesia. Sekolah komunitas pertama adalah *Cisarua Refugees Learning Center* (CRLC) yang didirikan tahun 2014 dan sukses menjadi pusat aktivitas komunitas pengungsi di Cisarua. Pada tahun 2015, sebuah badan amal Australia didirikan untuk membantu pembiayaan CRLC. Peserta kelas CRLC mencakup semua kelompok umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kurikulum pendidikan CRLC cukup baik, terbukti dari beberapa anggota komunitas yang sudah mendapatkan penempatan di negara ketiga berhasil mendaftar di sekolah dengan tingkatan yang sesuai dengan usianya, dan ada yang mendaftar di Universitas (*Global Compact on Refugees*, 2020). Komunitas ini menunjukkan *agency* para pengungsi dengan mereka tidak sekadar pasrah dengan kondisi yang sulit di negara

transit dan mengupayakan pengembangan personalnya (Sampson, Gifford dan Taylor, 2016: 1143), sekolah komunitas ini juga mencerminkan implementasi pendekatan berbasis AGD dengan adanya semua kelompok usia dan gender serta etnis yang mengikuti kelasnya.

Perkembangan komunitas pengungsi di Indonesia juga telah diikuti dengan partisipasi perempuan. Di Bogor khususnya terdapat *Refugee Women's Support Group Indonesia* yang didirikan secara mandiri oleh pengungsi perempuan di sana. Pengungsi perempuan di Bogor berasal dari berbagai kebangsaan dan etnis. Pengungsi secara umum berasal dari Afghanistan (56 %) dan Somalia (10 per sen), yang lain berasal dari Iraq, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Yaman, Palestina, dan negara lainnya, namun tidak ada data khusus mengenai jumlah pengungsi perempuan dari masing-masing kelompok negara asal (UNHCR Representation in Indonesia, 2020: 2). Aktivitas dari kelompok dukungan ini adalah pemberdayaan pengungsi perempuan melalui berbagai kegiatan pelatihan yakni kelas menjahit, kelas kerajinan tangan dan kelas Bahasa Inggris. Pendirinya juga menegaskan bahwa kelas keterampilan bukan hanya mengenai menghasilkan sesuatu, tapi juga menjadi ruang bagi pengungsi perempuan untuk melepaskan stress melalui persahabatan yang terjalin antar-perempuan di sana. Hasil dari penjualan beberapa produk mereka dipasarkan ke Australia, dan para pembuatnya dapat menggunakan hasil penjualannya (Jaffari, tanpa tahun). Pendiri kelompok dukungan ini kemudian turut membantu pembentukan komunitas perempuan serupa di daerah Jakarta. Disana, program yang dibuat terdiri atas kelas memasak, menjahit, yoga dan berkebun (Wardhani, 2019).

Dapat dikatakan bahwa kegiatan kelompok dukungan perempuan ini membantu mereka yang latar belakang kebangsaannya berbeda-beda ini membentuk kesadaran kolektif sebagai pengungsi perempuan. Hal ini dibentuk atas inisiatif sendiri dan dijalankan secara mandiri, kelompok dukungan ini membentuk program-program yang dibutuhkan perempuan baik untuk kesejahteraan mentalnya maupun kesejahteraan komunitasnya. Di samping itu, pelatihan yang diberikan tidak terbatas pada ranah reproduktif dan mencakup ranah produktif, mencerminkan upaya pemberdayaan perempuan. Bersama-sama dengan sekolah-sekolah komunitas yang ada, kelompok dukungan perempuan ini berpotensi mengimplementasikan PoA dalam bidang pemberdayaan.

12.4 Kesimpulan

Di Indonesia yang merupakan negara transit, memang terdapat batasan-batasan dalam akses hak-hak dasar pengungsi. Di saat bersamaan, Indonesia berangsur mengupayakan hak-hak pengungsi dengan caranya sendiri yaitu memberi ruang seluas-luasnya pada organisasi internasional, baik itu organisasi *intergovernmental* maupun organisasi nonpemerintah.

Hal ini selaras dengan prinsip GCR yakni upaya perlindungan pengungsi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Kelemahannya adalah sulit memastikan perlindungan ini dapat bersifat menyeluruh untuk semua pengungsi di Indonesia karena walaupun ada berbagai bentuk bantuan, tidak ada satu mekanisme untuk akses bantuan kesehatan atau untuk bergabung dengan komunitas. Negara menyerahkannya pada jejaring organisasi internasional dalam hal ini UNHCR dan organisasi non-pemerintah. Di samping itu, tiap organisasi memiliki keterbatasan sumber daya sehingga sifat bantuannya juga bertarget.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data-data sekunder dan fokus kepada kesesuaian skema perjanjian internasional, yakni GCR dengan praktik yang terjadi dalam ranah domestik. Sebagai studi pendahulu, tulisan ini bermaksud memberikan gambaran umum mengenai kondisi pengungsi di Indonesia sebagai negara transit ditinjau dari pendekatan berbasis AGD yang ditawarkan dalam GCR. Namun, penggunaan pendekatan ini masih belum mendalam karena masih minimnya informasi mengenai berbagai bentuk kerentanan lintas gender, usia dan kebangsaan. Tulisan ini belum mencakup beberapa area lain dari pendekatan berbasis AGD yakni perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, baik itu pencegahan maupun perlindungan untuk penyintas, serta inklusivitas untuk orang dan anak dengan disabilitas.

Daftar Pustaka

- Church World Service. 3 Januari 2020. *Safety, Medical Care and Classes for Young Refugees in Jakarta*. Diakses dari <https://cwsglobal.org/farah/> pada tanggal 17 Mei 2020.
- Church World Service. tanpa tahun. *Refugee and Migrant Protection*. Diakses dari <https://cws-asia.org/refugee-and-migrant-protection/> pada tanggal 17 Mei 2020.
- Dompethuafa.org. tanpa tahun. *School for Refugees, Sarana Tebar Manfaat Bagi Pengungsi Rohingya*. Diakses dari <http://dompethuafa.org/id/berita/detail/school-for-refugees--sarana-tebar-manfaat-bagi-pengungsi-rohingya> pada tanggal 18 Mei 2020.
- Global Compact on Refugees. 6 Maret 2020. *Cisarua Refugee Learning Center*. Diakses dari <https://globalcompactrefugees.org/article/cisarua-refugee-learning-centre> pada tanggal 17 Mei 2020.
- Hafanti, O. 19 Maret 2018. *Sebuah Sekolah Negeri di Makassar menyambut Pengungsi*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/11439-sebuah-sekolah-negeri-di-makassar-menyambut-anak-anak-pengungsi.html> pada tanggal 17 Mei 2020. <http://ditjenpp.kemendiknas.go.id/arsip/ln/2016/ps125-2016.pdf>

- IOM Indonesia. tanpa tahun. *Migrant Assistance*. Diakses dari <https://indonesia.iom.int/migrant-assistance> pada tanggal 17 Mei 2020.
- Jaffari, K. tanpa tahun. *Our Story*. Diakses dari <https://beyondthefabric.org/pages/our-story> pada tanggal 17 Mei 2020.
- JRS Indonesia. tanpa tahun. *Urban Refugees*. Diakses dari <http://jrs.or.id/en/campaign/urban-refugees/> pada tanggal 17 Mei 2020.
- Kementerian Luar Negeri RI. 6 April 2019. *Humanitarian Issues*. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/en/read/88/halaman_list_lainnya/humanitarian-issues pada tanggal 17 Mei 2020.
- Krystalli, R., Hawkins, A., dan Wilson, K. (2018). 'I followed the flood': a gender analysis of the moral and financial economies of forced migration. *Disasters*, 42, S17-S39.
- Kurniasari, T. 18 Juli 2018. *Pengungsi perempuan bergabung dengan para perempuan Indonesia untuk membangkitkan suara mereka pada Hari Perempuan Sedunia*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/11581-pengungsi-perempuan-bergabung-dengan-para-perempuan-indonesia-untuk-membangkitkan-suara-mereka-pada-hari-perempuan-sedunia.html>
- Missbach, A. (2015). *Troubled transit: asylum seekers stuck in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Missbach, A., Adiputera, Y., Prabandari, A., Critika, G., Swastika, F. Y., dan Darningtyas, R. (2018). *Stalemate: Refugees in Indonesia: Presidential Regulation No 125 of 2016*. Centre for Indonesian Law, Islam and Society, Melbourne Law School, The University of Melbourne. Diakses dari https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/file/0006/2777667/CILIS-Paper-14_Missbach-et-al_final.pdf.
- Olivius, E. (2014). Displacing equality? Women's participation and humanitarian aid effectiveness in refugee camps. *Refugee survey quarterly*, 33(3), 93-117.
- Sampson, R. C., Gifford, S. M., dan Taylor, S. (2016). The myth of transit: The making of a life by asylum seekers and refugees in Indonesia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42(7), 1135-1152.
- Szczepanikova, A. (2009). Beyond 'helping': Gender and relations of power in non-governmental assistance to refugees. *Journal of International Women's Studies*, 11(3), 19-33.

- Tan, N. F. (2016). The status of asylum seekers and refugees in Indonesia. *International Journal of Refugee Law*, 28(3), 365-383.
- Triceseria, A. A. I. D., Zayda, N. A., dan Prabaningtyas, R. F. A New Approach to Refugee's Welfare through the Role of Community: Case Study of Refugee's Community Centre in Sewon. *Global South Review*, 2(1), 1-12.
- UNHCR Indonesia. 2020. Monthly Statistical Report January 2020. Diakses dari <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Indonesia%20Monthly%20Statistical%20Report%20-%20January%202020.pdf> pada tanggal 11 Mei 2020.
- UNHCR Indonesia. tanpa tahun. *Partnership and Community Based Protection*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/en/partnerships-and-community-based-protection> pada tanggal 17 Mei 2020.
- UNHCR. tanpa tahun. *The Global Compact on Refugees*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html> pada tanggal 17 Mei 2020.
- Unika Atma Jaya. 18 September 2018. *Unika Atma Jaya Bersama ILO dan UNHCR Mengadakan Pelatihan bagi Pengungsi*. Diakses dari <https://m.atmajaya.ac.id/web/Konten.aspx?gid=highlightdancid=Unika-Atma-Jaya-Bersama-ILO-dan-UNHCR-Mengadakan-Pelatihan-bagi-Pengungsi> pada tanggal 17 Mei 2020.
- United Nations. 2018. *Report of the United Nations High Commissioner for Refugees: Part II Global Compact on Refugees*. Diakses dari https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf pada tanggal 17 Mei 2020.
- Wardhani, W. K. 26 April 2019. *Community Center Gives Trainings to Empower Refugee Women*. Diakses dari <https://magdalene.co/story/community-center-empowers-refugee-women> pada tanggal 11 Mei 2020
- Zayzda, N. A., Ash-Shafikh, M. H., dan Kusuma, A. S. (2019). Securitization and Desecuritization of Migration in Indonesia: Its Implication to Refugee Rights in the Southeast Asian Region. *Journal of South East Asian Human Rights*, 3, 81.

13. IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:
Riris Ardhanariswari

Abstrak

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia sudah dilaksanakan hanya belum maksimal, secara yuridis adanya Perda No. 19 Tahun 2014 ini tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang lahir sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2016. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas anak-anak juga seharusnya menjadi perhatian bagi Pemda. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, yaitu anggaran yang dialokasikan yang masih sangat minim, belum memiliki rumah pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, akses layanan umum misal di bidang kesehatan yang khusus bagi penyandang disabilitas. Perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas ini sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya karena Perda ini lahir sebelum adanya UU penyandang Disabilitas maka seharusnya Pemda beserta DPRD Kabupaten Banyumas segera membentuk Raperda baru tentang Penyandang Disabilitas, apalagi peraturan pelaksana dari UU Penyandang Disabilitas sudah dikeluarkan.

13.1 Pendahuluan

Tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya pembangunan di daerah juga harus mempunyai tujuan yang sama, termasuk untuk Kabupaten Banyumas. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melindungi Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Indonesia sudah menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Kemudian tahun 2016 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah penyandang cacat mengalami pergeseran, ini merupakan bentuk perubahan paradigma yang terus berkembang. Semula melihat Penyandang Disabilitas melalui pendekatan spiritualisme, yang mana Penyandang Disabilitas dianggap sebagai hukuman/dosa akibat perbuatan yang menyalahi norma masyarakat atau agama. Lalu berkembang menjadi dianggap sebagai orang yang sakit, lalu berkembang menjadi bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk hidup (*civil rights model*) dan terakhir muncul bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat. Paradigma inilah yang meyakini bahwa Penyandang Disabilitas dengan kondisinya yang berbeda tidak bisa dieksklusifkan keberadaannya, namun perlu mewujudkan kondisi yang inklusif di Indonesia.

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Permasalahan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan demikian dapat dimasukkan dalam masalah publik, karena hanya pemerintah sajalah yang dapat memecahkan masalah tersebut, menjadi pihak yang paling berwenang untuk memecahkan masalah, dan diakui para pihak sebagai pihak yang netral dan akan bertindak adil. Untuk itulah maka dilakukan penelitian berkaitan dengan implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

13.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia?

13.3 Metodologi

Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan di gunakan karena penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berfokus pada materi perundang-undangan. Metode pendekatan ini di gunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang di teliti berkisar pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengkaji norma menggunakan konsepsi legistis positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan, memaparkan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang di teliti. Bahan hukum yang di peroleh dengan cara melakukan *inventarisasi* peraturan perundang-undangan. Penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data sekunder, dan metode yang di gunakan untuk proses pengumpulan data ialah dengan studi kepustakaan, *internetbrowsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan dokumen, termasuk di dalmamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar dan dokumen lainnya yang relevan kemudian diidentifikasi dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh. Data primer digunakan untuk mendukung data sekunder yang telah didapatkan. Bahan hukum yang telah di peroleh dan di inventarisir akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada penelitian ini.

13.4 Pembahasan

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah secara terperinci mengantar mengenai hak asasi manusia. Pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi,

dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya setiap orang harus menghormati hak orang lain termasuk hak penyandang disabilitas. Jadi konstitusi Indonesia secara tegas mengatur mengenai hak asasi manusia dalam hal ini termasuk juga untuk penyandang disabilitas.

Pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi manusia secara lebih terperinci diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 menegaskan setiap orang dengan disabilitas memiliki hak atas fasilitasi dan perlakuan khusus. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Indonesia juga sudah mengesahkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011. Hal ini merupakan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Perkembangan yang selanjutnya di Indonesia sejak tanggal 15 April 2020 ada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang mengatur mengenai Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan

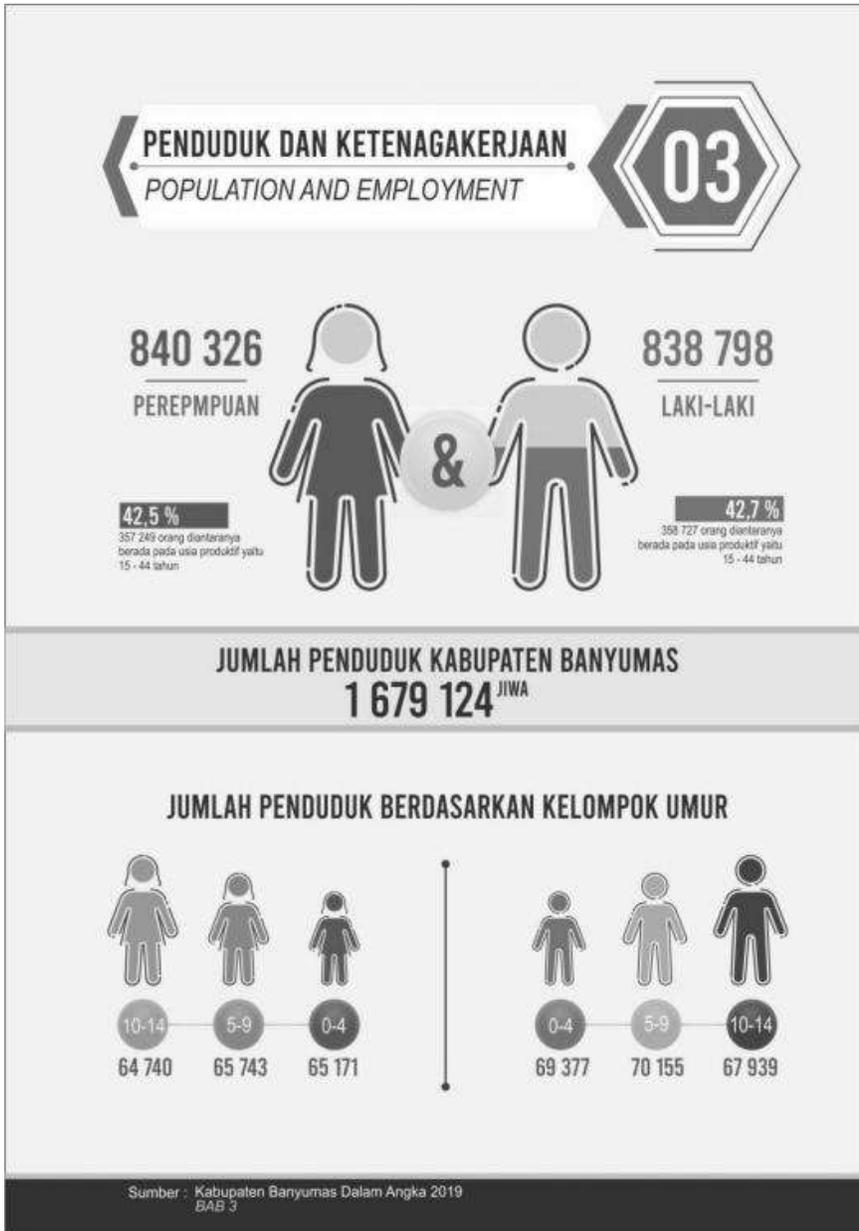
eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. UU No. 8 Tahun 2016 ini menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak penyandang disabilitas yaitu:

- 1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- 2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan
 - d. diskriminasi berlapis; dan
 - e. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- 3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Hak-hak di atas merupakan hak yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas di mana pun termasuk di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan dengan 331 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 1.697.124 jiwa. Lengkapnya dapat dilihat dari Gambar 13.1 di bawah ini.

Gambar 13.1 Jumlah Penduduk Banyumas Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber: Banyumas dalam Angka 2019

Secara lebih terperinci berikut ini adalah data jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan.

Tabel 13.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Kab. Banyumas	824717	831816	838798	825908	833209	840326	1650625	1665025	1679124
Lumbir	21899	21950	21995	22409	22466	22516	44308	44416	44511
Wangon	37778	37944	38101	37876	38051	38215	75654	75995	76316
Jatilawang	29230	29347	29458	29719	29846	29963	58949	59193	59421
Rawalo	23572	23701	23824	23610	23744	23871	47182	47445	47695
Kebasen	29126	29265	29400	28750	28896	29032	57876	58161	58432
Kemranjen	32950	33188	33421	32780	33025	33262	65730	66213	66683
Sumpiuh	25773	25871	25965	25619	25723	25820	51392	51594	51785
Tambak	21513	21562	21606	21346	21400	21447	42859	42962	43053
Somagede	16428	16521	16609	16782	16880	16974	33210	33401	33583
Kalibagor	24383	24555	24722	23987	24162	24330	48370	48717	49052
Banyumas	23246	23299	23347	23401	23460	23512	46647	46759	46859
Patikraja	26976	27248	27518	27008	27288	27562	53984	54536	55080
Purwojati	15880	15949	16015	16013	16086	16155	31893	32035	32170
Ajibarang	47757	48122	48478	47195	47568	47927	94952	95690	96405
Gumelar	23367	23421	23469	22805	22862	22913	46172	46283	46382
Pekuncen	32748	32850	32945	33466	33580	33682	66214	66430	66627
Cilongok	58998	59629	60253	58102	58737	59360	117100	118366	119613
Karanglewass	32023	32511	33000	31225	31709	32191	63248	64220	65191
Kedungbanteng	27809	28073	28332	26789	27050	28305	54598	55123	55637
Baturraden	25624	25964	26302	25897	26247	26593	51521	52211	52895
Sumbang	41033	41598	42160	40754	41325	41889	81787	82923	84049
Kembaran	40369	41049	41730	40163	40848	41532	80532	81897	83262
Sokaraja	42073	42659	43244	42293	42893	43487	84366	85552	86731
Purwokerto Selatan	38059	38520	38976	38451	38925	33393	76510	77445	78369
Purwokerto Barat	25706	25948	26186	26697	26955	27207	52403	52903	53393
Purwokerto Timur	28579	28645	28704	29824	29899	26965	58403	58544	58669
Purwokerto Utara	31818	32427	33038	32947	33584	34223	64765	66011	67261

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tidak dapat diketahui berapa jumlah warga masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Artinya penyandang disabilitas ini adalah bagian dari masyarakat yang harus dilindungi dan dihormati sebagai sesama manusia dan sebagai warga masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terkait dengan Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

Tabel 13.2 Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO	JENIS PMKS	L	P	Unknown	JUMLAH
1	2	3	4		5
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	41	32	0	73
2	Anak Terlantar (AT)	274	230	0	504
3	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	14	4	0	18
4	Anak Jalanan (AJ)	56	9	0	65
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	0	3	1	4
a	Anak dengan Disabilitas Fisik	0	0	0	0
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	170	125	0	295
	a.2. Mata (Tuna Netra)	26	25	0	51
	a.3. Rungu / Wicara (Bisu / Tuli)	98	83	0	181
b	Anak dengan Disabilitas Mental	0	0	0	0
	b.1. Mental Reterdasi (Tuna Grahita)	113	97	0	210
	b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	33	24	0	57
c	Anak dengan Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	58	35	0	93
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	4	0	0	4
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	28	20	0	48
8	Lanjut Usia Terlantar	605	2062	0	2667
9	Penyandang Disabilitas	17	5	0	22
a	Disabilitas Fisik	0	0	0	0
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	1012	583	0	1595
	a.2. Mata (Tuna Netra)	522	435	0	957
	a.3. Rungu / Wicara (Bisu / Tuli)	538	419	0	957
b	Penyandang Disabilitas Mental	0	0	0	0
	b.1. Mental Reterdasi (Tuna Grahita)	490	399	0	889
	b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	595	399	0	994
c	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	133	92	0	225
10	Tuna Susila (TS)	11	63	0	74

NO	JENIS PMKS	L	P	Unknown	JUMLAH
1	2	3	4		5
11	Gelandangan	55	35	0	90
12	Pengemis	48	63	0	111
13	Pemulung	211	38	0	249
14	Kelompok Minoritas / Waria	0	0	0	0
	a Waria	0	0	0	0
	b Gay	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahankaratan (BWBLP)	284	19	0	303
16	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	20	2	0	22
18	Korban Trafficking	1	3	0	4
19	Korban Tindak Kekerasan	0	4	0	4
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	5	0	7
21	Korban Bencana Alam	50	11	0	61
22	Korban Bencana Sosial	24	12	0	36
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	223	2110	0	2333
24	Fakir Miskin	137009	20864	0	157873
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	21	16	0	37
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0
	JUMLAH	142786	28326	1	171113

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data tersebut penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anak dengan kedisabilitas an anak sebanyak 891 anak. Anak dengan kedisabilitas an ini terdiri dari anak dengan disabilitas fisik sebanyak 527 anak, anak dengan kedisabilitas an mental sebanyak 267 anak, dan anak dengan kedisabilitas an fisik dan mental (ganda) sebanyak 93 anak. Kemudian data penyandang disabilitas selain anak-anak sebanyak 5.639 orang. Penyandang disabilitas ini terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). Jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas maka penyandang disabilitas sebanyak 6.530 orang.

Kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan berdasarkan pendekatan hak asasi. Asumsi dasar dari pendekatan hak asasi adalah bahwa individu difabel adalah subjek atau pelaku hukum, dan oleh karenanya pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan individu difabel, tepatnya memastikan bahwa mereka mampu berpartisipasi aktif kehidupan politik sosial dan budaya dengan cara-cara yang terhormat dan perbedaan mereka terakomodasi.

Dalam hal mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan tanggung jawab negara Malinda (2014: 465) memberikan saran:

- 1) Penyandang disabilitas harus optimis untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dengan harapan berkesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak pada sektor negara maupun swasta.
- 2) Pemerintah, pengusaha, LSM, dan kelompok profesi, harus menempatkan kelompok penyandang disabilitas menjadi layaknya teman sendiri, penuh empati, dan memfasilitasi sesuai kapabilitas dan kompetensinya masing-masing. Masyarakat juga harus mendorong keluarga dan teman-temannya penyandang disabilitasnya untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan pekerjaan bagi kehidupan mereka yang lebih layak.
- 3) Para penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya, perlu bantuan hukum dalam upayanya untuk memperoleh hak-haknya juga dalam menyelesaikan perkara yang mungkin dihadapinya baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Oleh karena itu, Hamidi menyebutkan pentingnya pembaharuan hukum berupa kebijakan *affirmative action* bidang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas, meliputi: 1) menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah agar dapat memberi kepastian hukum.

Kabupaten Banyumas secara yuridis sudah memiliki Perda No. 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Perda No. 19 Tahun 2014 ini lahir sebelum adanya UU Penyandang Disabilitas. Ada perbedaan yang prinsip berkaitan yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas dengan yang diatur dalam Perda antara lain macam-macam hak bagi penyandang disabilitas berbeda dengan yang diatur dalam UU. Perda ini masih mendasarkan pada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Artinya Perda No. 19 Tahun 2014 ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Apalagi peraturan pelaksana dari UU Penyandang Disabilitas ini sudah dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Masih ada tanggung jawab bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksana terkait penyandang disabilitas yang belum dibuat oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi dan Rehabilitasi.
- 3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemenuhan Hak Atas Pemukiman, Pelayanan Publik.
- 4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
- 5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih terperinci terkait dengan penyandang disabilitas.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas telah melakukan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi, pemberian pelatihan keterampilan, mengirim ke panti rehabilitasi, konseling, pemberian bantuan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas, antara lain: Workshop penanganan disabilitas, Pelatihan komputer desain grafis untuk disabilitas, Sosialisasi dan simulasi pemungutan suara untuk penyandang disabilitas. Jumlah anak dengan kedisabilitas-an anak sebanyak 891 anak, ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Peran serta dari masyarakat juga dilibatkan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini sudah diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 19 Tahun 2014. Ini merupakan hal yang positif dari Perda tersebut.

Pada kasus anak-anak yang menyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan layanan pendidikan khusus karena tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan dan juga mereka yang memiliki bakat yang istimewa atau anak potensial. Anak-anak seperti ini harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan didorong masuk pada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi pada anak seperti kondisi fisik, mental intelektual, emosional, sosial maupun kondisi lainnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas antara lain anggaran yang dialokasikan yang masih sangat minim, belum memiliki rumah pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, akses layanan umum misal di bidang kesehatan yang khusus bagi penyandang disabilitas.

13.5 Kesimpulan

- 1) Implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia sudah dilaksanakan hanya belum maksimal, secara yuridis adanya Perda No. 19 Tahun 2014 ini tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang lahir sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2016. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas anak-anak juga seharusnya menjadi perhatian bagi Pemda.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, yaitu anggaran yang dialokasikan yang masih sangat minim, belum memiliki rumah pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, akses layanan umum misal di bidang kesehatan yang khusus bagi penyandang disabilitas.

13.6 Saran

Perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas ini sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya karena Perda ini lahir sebelum adanya UU penyandang Disabilitas maka seharusnya Pemda beserta DPRD segera membantu Raperda baru tentang Penyandang Disabilitas, apalagi peraturan pelaksana dari UU Penyandang Disabilitas sudah dikeluarkan.

Daftar Pustaka

- Hamidi, Jazim. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 4 (23): 652 – 671.
- Malinda, Anggun; Ekha Nurfitriana; dan M Yasin Al-Arif. 2014. Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 3 (21).
- Ningsih, Ekawati Rahayu. 2014. Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian kepada Masyarakat di STAIN Kudus. *Jurnal Penelitian*. 8 (1): 71-92.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1998, Jakarta: Ghalia Indah.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 1985, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Triutari, Indah. 2014. Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi: Deskriptif Kuantitatif Pada Penyandang Disabilitas di Universitas Negeri Padang. *E-JUPEKhu (Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus)*. September 2014: 221-229.

Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang, Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)* , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, ISSN 1978-5186.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/02/28/3486-pemilih-penyandang-disabilitas-banyumas-ikuti-sosialisasi-pemilu-2019> diunduh 19 Mei 2020.

<https://suarabanyumas.com/?p=5641> © SuaraBanyumas.com tanggal 29 November 2019.

https://www.banyumaskab.go.id/read/28645/penyandang-disabilitas-ikuti-pelatihan-perdana-tik-di-dinas-kominfo#.XscKs8BS_IU diunduh 20 Mei 2020.

**SUB CHAPTER V:
GENDER, EDUKASI, DAN
KESEHATAN**

14. PERAN REMAJA PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN KURANG ENERGI KRONIK

**Oleh:
Ibnu Zaki**

14.1 Pendahuluan

Kelompok usia remaja merupakan usia dengan terjadi perkembangan psikologi dan pola transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Kelompok usia ini mulai terjadi peralihan dari ketergantungan sosial kepada orang tua menuju keadaan yang relatif lebih mandiri dalam pengambilan keputusan untuk dirinya. Peningkatan pertumbuhan fisik dan biologis menyebabkan mereka membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak dibanding siklus kehidupan sebelumnya. Secara bersamaan pada masa ini, remaja sangat aktif dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan di dalam sekolah maupun diluar sekolah. Oleh karena itu kelompok usia remaja rentan mengalami masalah gizi karena berbagai hal yaitu usia remaja mengalami peningkatan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh sehingga kebutuhan energi diperlukan lebih banyak. Mereka cenderung mengikuti *trend* perubahan gaya hidup dan pola makan. Lebih lanjut jika dalam usia mereka disertai kehamilan maka semakin meningkatkan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.

14.2 Masalah kurang energi kronik pada remaja perempuan

Kurang energi kronik merupakan salah satu masalah gizi kurang yang dihadapi oleh remaja perempuan. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan terjadi lonjakan angka kurang energi kronik yaitu 14,5 % wanita usia subur (berusia 15-49 tahun) kelompok tidak hamil mengalami kurang energi kronik. Angka tertinggi berdasarkan karakteristik umur ditemukan pada kelompok remaja yaitu usia 15-19 tahun sebesar 36,3%. Sedangkan wanita usia subur kategori hamil 17,3 % mengalami kurang energi kronik dengan kelompok remaja (usia 15-19 tahun) memiliki proporsi tertinggi (33,5%). Hal senada terjadi pada angka kurang energi kronik di propinsi Jawa Tengah menunjukkan angka diatas rata-rata nasional baik pada perempuan hamil maupun tidak hamil (20% dan 18,2%) (Kesehatan, Penelitian, dan Kesehatan, 2018). Laporan riset menunjukkan bahwa 55,07 % remaja di wilayah pedesaan Kabupaten Banyumas mengalami kurang energi kronik (Zaki, Sari, dan Farida, 2017).

Kekurangan gizi seperti kurang energi kronik menimbulkan masalah kesehatan seperti morbiditas, mortalitas dan disabilitas. Lebih jauh dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (Almatsier, Soetardjo, dan Soekatri, 2011). Skala yang lebih luas bahwa

kurang gizi menjadi ancaman bagi ketahanan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Saat ini kurang energi kronik menjadi fokus pemerintah oleh karena dampak yang ditimbulkan cukup panjang dan meluas. Kurang energi kronik merupakan salah satu keadaan malnutrisi, dengan remaja kekurangan konsumsi makanan berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan baik secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi (Arisman, 2010). Jika pada periode ini tidak tertangani akan berdampak pada siklus kehidupan selanjutnya yaitu periode dewasa dan kehamilan. Remaja kurang energi kronik dengan kehamilan memiliki risiko tinggi untuk melahirkan anak dengan status gizi kurang dan kesehatan yang buruk seperti berat lahir rendah (BBLR) dan *Stunting* (Kemenkes, 2018). Laporan menunjukkan bahwa 33,33 % kejadian BBLR disebabkan oleh ibu yang mengalami kurang energi kronik (Pujiastuti, 2016).

Rendahnya asupan protein menghambat proses pembentukan hemoglobin dalam tubuh remaja, mengakibatkan muncul masalah gizi kurang lainnya yaitu anemia (Hardinsyah dan Supariasa, 2016). Sari *et al.* Menyampaikan bahwa asupan protein yang rendah berkorelasi dengan kejadian anemia pada remaja perempuan (Sari, Dardjito, dan Anandari, 2016). Masalah anemia berhubungan erat dengan masalah kematian perempuan saat melahirkan. Saat hamil dalam keadaan anemia menyebabkan terjadinya atonia uteri yaitu pendarahan yang parah pada proses persalinan (Brabin, Hakimi, dan Pelletier, 2001).

Penentuan status kurang energi kronik didasarkan pada hasil ukur lingkaran lengan atas < 23,5 cm (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2002). Ketidakseimbangan konsumsi zat gizi yang ditandai dengan pola makan yang tidak seimbang, pola diet ekstrim dalam upaya menurunkan berat badan menjadi penyebab terjadinya kurang energi kronik. Laporan *Crosssectional* menunjukkan asupan energi, lemak, dan protein berkorelasi dengan hasil ukur lingkaran lengan atas (Zaki *et al.*, 2017). Hal senada dilaporkan bahwa asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi, dan seng berkorelasi dengan status gizi berdasarkan lingkaran lengan atas (Muchlisa dan Indriasari, 2013).

14.3 Analisis gender dan pola makan

Masalah ketimpangan gender muncul sebagai akibat konstruksi sosial tentang perempuan di masyarakat. Anggapan bahwa perempuan cantik adalah perempuan dengan tubuh yang kurus berdampak pada pola makan perempuan itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi sejak usia remaja. Kementerian kesehatan menyatakan bahwa penampilan fisik (*body image*) menjadi salah satu masalah utama pada remaja perempuan (Indonesia, 2007). Remaja perempuan saat ini sangat memperhatikan penampilan fisik (*body image*). Mereka sangat memperhatikan perubahan

yang terjadi pada bentuk tubuh serta citra tubuh terhadap dirinya. *Body image* merupakan persepsi seseorang terhadap bentuk, ukuran, berat tubuh dan kepuasan terhadap dirinya baik positif maupun negatif (Cash dan Pruzinsky, 2002). Citra tubuh negatif didefinisikan sebagai penilaian seseorang terhadap bentuk tubuh dirinya berbeda dengan konsep ideal. Situasi ini dominan terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki (Grogan, 2016). Keinginan untuk tampil cantik dan memiliki bentuk tubuh yang dianggap ideal seperti model-model yang menghiasi cover media cetak maupun elektronik sering kali menimbulkan ketidakpuasan akan bentuk tubuhnya, sehingga mereka melakukan diet yang akan mengganggu pola makan yang tidak sehat dan cenderung mengurangi jumlah konsumsi makan. Selain itu adanya keinginan untuk menarik perhatian lawan jenis juga menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Hal ini jika terjadi dalam jangka lama akan terjadi gangguan pola makan secara klinis dan kekurangan gizi yang pada akhirnya terjadi kurang energi kronik (Dhamayanti dan Asmara, 2017). Wardhani menyatakan 69,9 % remaja perempuan yang memiliki *body image* negatif beresiko tiga kali lebih besar mengalami kurang energi kronik (Wardhani, Agustina, dan Marina, 2020).

14.4 Strategi

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam program-program perbaikan status gizi belum berfokus pada perbaikan gizi remaja perempuan. Selama ini masih berfokus pada upaya-upaya perbaikan gizi Ibu, Bayi, dan Balita. Meskipun jika dilihat lebih mendasar permasalahan-permasalahan gizi pada ibu, bayi, dan balita adalah sebagai akibat dari permasalahan gizi pada masa remaja yang tidak tertangani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah gizi remaja adalah memperbaiki pola makan remaja melalui pendidikan gizi, pengoptimalan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja anemia, serta penguatan peran remaja sebagai pendidik sebaya.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa faktor mendasar penyebab masalah kurang energi kronik adalah pengetahuan dan ketrampilan remaja yang rendah terhadap zat gizi khususnya pemantauan status gizi dan pemilihan makanan sehat bergizi seimbang. Selain itu rendahnya asupan makan remaja berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap bahan makanan. Pendidikan gizi merupakan cara paling relevan dan mendasar dengan permasalahan tersebut. Pengetahuan gizi berpengaruh terhadap masalah gizi remaja, dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku konsumsi makanan yang tepat, bergizi, dan seimbang, dan memberikan dasar bagi perilaku gizi yang baik dan benar mengenai kebiasaan makan seseorang (Sedioetama, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan gizi meningkatkan pengetahuan dan

prilaku konsumsi energi serta protein (Zaki dan Sari, 2019). Laenggeng menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pengetahuan gizi dan sikap memilih makanan jajanan (Laenggeng dan Lumalang, 2015). Laporan lain menyatakan hal serupa bahwa pengetahuan gizi berkorelasi positif secara signifikan terhadap praktik pemilihan makanan bergizi yang sesuai kebutuhan (Mawaddah dan Hardinsyah, 2008).

Beberapa jenis intervensi kesehatan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi pada remaja. Akan tetapi jenis intervensi yang sekiranya dapat ditempuh dan memiliki keunggulan yaitu murah, mudah dilakukan, tidak memiliki efek samping, serta berdampak jangka panjang adalah perbaikan prilaku konsumsi makan melalui pendidikan gizi. Kurangnya pengetahuan tentang gizi berdampak kurangnya kemampuan seseorang untuk menerapkan informasi gizi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dalam upaya memperbaiki pola makan yaitu dengan cara memberikan pendidikan gizi. Sebuah studi eksperimen dengan membandingkan pemberian edukasi gizi dan pemberian suplementasi melaporkan bahwa kelompok edukasi gizi lebih efektif memperbaiki masalah gizi anemia (Yusoff, Daud, dan Ahmad, 2012). Laporan lain juga menyatakan pendidikan gizi mampu meningkatkan kadar hemoglobin remaja perempuan (Sari, Subardjo, dan Zaki, 2019). Pendidikan gizi pada anggota pramuka efektif meningkatkan prilaku konsumsi makanan. (Farida, Sari, Sulistyning, dan Zaki, 2020). Laporan lain menyatakan pendidikan gizi mampu memperbaiki prilaku konsumsi jajanan tidak sehat (Zaki, Sari, Farida, dan Sulistyning, 2019).

Remaja putri merupakan salah satu kelompok usia rawan menderita anemia. Kelompok usia ini, perempuan mulai mengalami menstruasi sehingga banyak kehilangan darah dan zat besi kurang lebih 1,3 mg per hari. Sisi lain, remaja perempuan biasanya ingin tampil langsing sehingga asupan makanannya terbatas dan pola makan menyimpang dari prinsip gizi seimbang dengan asupan zat gizi tidak mencukupi kebutuhannya yang meningkat. Sari dalam penelitiannya menemukan bahwa remaja putri yang dengan kadar hemoglobin rendah memiliki asupan zat besi dan protein yang rendah. Rendahnya asupan protein hewani dan hanya mengonsumsi makanan pokok saja menyebabkan asupan zat besi rendah (Sari *et al.*, 2016).

Pemberian tablet tambah darah pada remaja perempuan dianggap menjadi langkah efektif untuk menurunkan angka kejadian anemia defisiensi besi. Pemerintah menetapkan target untuk menurunkan remaja perempuan anemia sebanyak 50% pada tahun 2025, oleh sebab itu sejak tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor HK.03.03/V/0595/2016 yang mengatur tentang pemberian tablet tambah darah pada remaja perempuan usia 12-18 tahun.

Penguatan perilaku remaja perempuan perlu selalu disebarluaskan yaitu dengan melibatkan kelompok teman sebaya. Teman sebaya adalah kelompok remaja dengan tingkat kematangan yang sama. Mereka bisa saling berinteraksi dan menciptakan iklim tertentu. Masa ini remaja menguatkan perannya sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. Termasuk dalam hal ini adalah informasi kesehatan. Oleh karena itu, intervensi kesehatan beberapa melibatkan peran teman sebaya dalam penyampaian pesan kesehatan ataupun membentuk nilai dan perilaku tertentu dalam hal ini difokuskan pada perilaku pola konsumsi gizi seimbang (Indonesia, 2007).

14.5 Penutup

Kelompok remaja perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Angka kejadiannya semakin meningkat setiap periode tahunnya. Kurangnya informasi terhadap pemenuhan gizi merupakan faktor yang mendasari. Akan tetapi konstruksi sosial yang terbentuk dikalangan masyarakat juga turut berperan. Hal – hal tersebut mengakibatkan perubahan perilaku konsumsi tidak sehat. Oleh sebab itu sebagai salah satu strategi pemecahan masalah ini yaitu dengan terus meningkatkan peran remaja perempuan baik yang bersifat internal yaitu untuk dirinya juga bersifat eksternal bagi orang lain.

Daftar Pustaka

- Almatsier, S., Soetardjo, S., dan Soekatri, M. (2011). Gizi seimbang dalam daur kehidupan. *Jakarta: Gramedia pustaka utama*, 92–103.
- Arisman, M. B. (2010). Buku Ajar Ilmu Gizi Dalam Daur Kehidupan. *Edisi-2. Jakarta: EGC*.
- Brabin, B. J., Hakimi, M., dan Pelletier, D. (2001). An analysis of anemia and pregnancy-related maternal mortality. *The Journal of nutrition*, 131(2), 604S-615S.
- Cash, T. F., dan Pruzinsky, T. (2002). *Body Image: A Handbook of Theory, Research and Clinical*. New York: Guilford Publications.
- Dhamayanti, M., dan Asmara, A. (2017). Remaja: Kesehatan dan permasalahannya. *Jakarta: IDAI*.
- Farida, F., Sari, H. P., Sulistyning, A. R., dan Zaki, I. (2020). Pengaruh Pendidikan Gizi terhadap Sikap, Asupan Zat Gizi Makro, dan Air pada Anggota Pramuka. *Nutri-Sains: Jurnal Gizi, Pangan dan Aplikasinya*, 3(2), 60–72.
- Grogan, S. (2016). *Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children*. Taylor dan Francis.
- Hardinsyah, M. S., dan Supariasa, I. D. (2016). Ilmu gizi teori dan aplikasi. *Jakarta: EGC*.

- Indonesia, D. K. R. (2007). Pedoman umum gizi seimbang. *Jakarta: Departemen Kesehatan*.
- Kemenkes, R. I. (2018). Situasi Balita Pendek (stunting) di Indonesia. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 1*.
- Kesehatan, R.-K., Penelitian, B., dan Kesehatan, P. (2018). *Laporan hasil riset Nasional*. RISKESDAS.
- Laenggeng, A. H., dan Lumalang, Y. (2015). Hubungan Pengetahuan Gizi dan Sikap Memilih Makanan Jajanan dengan Status Gizi Siswa SMP Negeri 1 Palu. *Healthy Tadulako, 1*(1).
- Mawaddah, N., dan Hardinsyah, H. (2008). Pengetahuan, Sikap, Dan Praktek Gizi Serta Tingkat Konsumsi Ibu Hamil Di Kelurahan Keramat Jati Dan Kelurahan Ragunan Propinsi DKI Jakarta. *Jurnal Gizi dan Pangan, 3*(1), 30–42.
- Muchlisa, C., dan Indriasari, R. (2013). Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi pada Remaja Putri di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. *Jurnal MKMI, 1*–15.
- Pujiastuti, W. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR). *Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal), 7*(2), 13.
- Sari, H. P., Dardjito, E., dan Anandari, D. (2016). Anemia Gizi Besi Pada Remaja Putri Di Wilayah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kesmas Indonesia, 8*(1), 15–33.
- Sari, H. P., Subardjo, Y. P., dan Zaki, I. (2019). Nutrition education, hemoglobin levels, and nutrition knowledge of adolescent girls in Banyumas district. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics), 6*(3), 107–112.
- Sedioetama, A. D. (2006). Ilmu Gizi Untuk Mahasiswa dan Profesi Jilid 1. *Dian Rakyat, Jakarta*.
- Supariasa, I. D. N., Bakri, B., dan Fajar, I. (2002). Penilaian status gizi. *Jakarta: EGC, 48*–49.
- Wardhani, P. I., Agustina, dan Marina, E. S. (2020). Hubungan Body Image dan Pola Makan Dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Remaja Putri Di SMAN 6 Bogor Tahun 2019. *JPH RECODE, 3*(2), 128–137.
- Yusoff, H., Daud, W. N. W., dan Ahmad, Z. (2012). Nutrition education and knowledge, attitude and hemoglobin status of Malaysian adolescents. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 43*(1), 192.

- Zaki, I., dan Sari, H. P. (2019). Edukasi Gizi Berbasis Media Sosial Meningkatkan Pengetahuan Dan Asupan Energi-Protein Remaja Putri Dengan Kurang Energi Kronik (KEK). *Gizi Indonesia*, 42(2), 111–122.
- Zaki, I., Sari, H. P., Farida, dan Sulistyning, A. R. (2019). Nutrition education based on multi-media can improve nutrition knowledge and unhealthy snacking habits in adolescents. *Ann Trop dan Public Health*, 22(11), S343.
- Zaki, I., Sari, H. permata, dan Farida. (2017). Asupan Zat Gizi Makro dan Lingkar Lengan Atas Pada Remaja Putri di Kawasan Perdesaan Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII" 17-18 November 2017 Purwokerto*. Purwokerto.

15. Remaja dan Pandemi COVID-19

Oleh

Eri Wahyuningsih dan Dyah Woro Dwi Lestari

15.1 Pengantar

Wabah penyakit *coronavirus* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMM). Situasi ini adalah pengumuman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang "kejadian luar biasa yang berisiko mengancam kesehatan masyarakat negara lain melalui penularan penyakit lintas batas negara dan membutuhkan tanggapan internasional yang terkoordinasi". Pengumuman ini dirancang ketika sebuah kejadian bersifat "serius, mendadak, tidak wajar, atau tidak terduga", "dapat memengaruhi kesehatan masyarakat di luar batas negara terdampak", dan "perlu ditanggapi segera oleh berbagai negara". Virus tersebut sekarang telah menyebar ke banyak negara dan wilayah (WHO, 2020a). WHO pertama menyatakan status darurat global terkait penyebaran COVID-19 pada tanggal 30 Januari 2020. Jumlah kasus pada saat itu adalah 82 kasus di seluruh dunia tanpa kasus kematian, selain di Cina (WHO, 2020b).

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh strain baru *coronavirus*. 'CO' adalah singkatan dari *corona*, 'VI' untuk virus, dan 'D' untuk penyakit. Penyakit ini sebelumnya disebut sebagai 'virus *corona* 2019 novel' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang dikaitkan dengan keluarga virus yang sama dengan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) dan beberapa jenis flu biasa. Banyak yang masih belum diketahui tentang virus yang menyebabkan COVID-19, tetapi penularan diidentifikasi terjadi melalui kontak langsung dengan tetesan pernapasan (*druplets*) dari orang yang terinfeksi (dihasilkan melalui batuk dan bersin). Individu juga dapat terinfeksi dari menyentuh permukaan yang terkontaminasi dengan virus lalu menyentuh wajah mereka (misalnya, mata, hidung, mulut). Hal penting bagi masyarakat adalah mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengurangi dampak wabah dan mendukung langkah-langkah pengendalian. Orang yang lebih tua, dan orang-orang dengan kondisi medis kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung, tampaknya lebih berisiko terkena gejala parah. Pengaruh terhadap anak-anak masih terus dipelajari. Orang-orang dari segala usia sangat mungkin untuk terinfeksi virus, tetapi sejauh ini hanya ada beberapa kasus COVID-19 yang dilaporkan di antara anak-anak. Ini adalah virus baru dan pengaruhnya terhadap anak-anak perlu dipelajari lebih lanjut (WHO, 2020a).

Dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat COVID-19. Kehidupan

jutaan anak dan keluarga di dunia, termasuk di Indonesia seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Anak-anak dan remaja tidak hanya tertular COVID-19, tetapi mereka juga termasuk di antara korban yang paling parah terkena dampaknya. Gema COVID-19 akan secara permanen merusak masa depan kita bersama, kecuali jika kita bertindak sekarang untuk mengatasi dampak pandemi pada anak-anak. Analisa UNICEF menunjukkan 99% anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun di seluruh dunia (2,34 miliar) tinggal di salah satu dari 186 negara dengan beberapa bentuk pembatasan gerakan yang berlaku karena COVID-19. Sebanyak 60% anak tinggal di salah satu dari 82 negara dengan *lockdown* penuh (7%) atau sebagian (5%) – yang jumlahnya mencakup 1,4 miliar jiwa muda. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespons pandemi ini bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra lain (UNICEF, 2020b).

15.2 Risiko Remaja terhadap COVID-19

COVID-19 berpengaruh dalam kelangsungan hidup anak, kesehatan, nutrisi dan pembangunan di beberapa Negara (UNICEF, 2020b). Orang muda yang memiliki kemungkinan yang sama seperti orang tua untuk terinfeksi dan tertular penyakit COVID-19. Mereka pun harus secara ketat mengikuti pedoman nasional seputar penyaringan, pengujian, penahanan dan perawatan dan mempraktikkan jarak sosial. Orang-orang muda juga dipengaruhi oleh penutupan kesempatan pendidikan nonformal, yang membuat mereka tidak dapat terlibat secara sosial dengan teman sebaya dan pendidik mereka. Penutupan dan pembatasan gerakan yang berkepanjangan dapat menyebabkan keresahan dan kecemasan emosional tambahan. Masalah perlindungan dan psikososial untuk remaja perlu ditangani pada kasus-kasus pengasuh terinfeksi, dikarantina atau meninggal dunia. Pendidikan, mekanisme dukungan sosial dan akses ke layanan kesehatan perlu dipertahankan dengan orang tua atau wali memainkan peran kunci (UNFPA, 2020).

Banyak anak muda yang rentan, seperti migran muda, pengungsi muda, orang muda tunawisma, mereka yang ditahan, dan orang muda yang tinggal di daerah padat seperti kota atau daerah kumuh, hidup dalam kondisi yang membuat mereka berisiko lebih besar tertular COVID-19. Mereka juga memiliki akses terbatas ke teknologi dan bentuk-bentuk alternatif pendidikan dan informasi, termasuk tentang cara mengurangi paparan COVID-19 (UNFPA, 2020).

Anjuran pencegahan melalui tindakan cuci tangan yang benar terdengar mudah dilakukan. Akan tetapi bagi banyak anak, air dasar,

sanitasi dan fasilitas kebersihan masih di luar jangkauan. Secara global, 40% dari populasi, yaitu 3 miliar orang, masih kekurangan fasilitas cuci tangan dasar dengan sabun dan air yang tersedia di rumah dan ini hampir tiga perempat dari populasi negara-negara yang paling tidak berkembang (UNICEF, 2020b).

Orang muda dengan HIV, yang menanggung beban epidemi HIV global secara tidak proporsional, berada pada risiko yang lebih besar karena sistem kekebalan yang lemah dan ketergantungan pada pasokan rutin untuk pengobatan antiretroviral dan layanan lain yang mungkin tidak diprioritaskan. Cara-cara baru dalam memberikan informasi dan dukungan kepada remaja untuk kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak perlu dibentuk, dalam konteks COVID 19, dengan gangguan sekolah, layanan kesehatan rutin dan pusat tingkat masyarakat (UNFPA, 2020). Hal-hal tersebut harus segera dilakukan, karena tanpa tindakan segera, krisis kesehatan ini berisiko menjadi krisis hak-hak anak (UNICEF, 2020b).

15.3 Dampak Covid 19 terhadap Remaja

15.3.1 Konflik Psikososial

Pandemi penyakit *coronavirus* (COVID-19) telah menjungkirbalikkan kehidupan anak-anak dan keluarga mereka ketika sistem kesehatan melengkung, perbatasan dekat, dan sekolah dan bisnis bangkrut (UNICEF, 2020c). Semua perubahan ini luar biasa dan otonomi serta kemandirian yang didambakan remaja hampir tidak mungkin dicapai ketika sebagian besar tempat, selain rumah mereka sendiri, terlarang. Selain itu nyatakan kecemasan atas apa yang akan terjadi di masa depan. *Coronavirus* telah menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan, keluarga, dan tekanan keuangan. Peristiwa nasional yang traumatis, walaupun jarang dapat menggerakkan remaja dengan cara yang halus dan secara bertahap menghapus perasaan diri mereka. Gejala emosional kehidupan remaja membuat mereka lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Dampak pandemi pada remaja dalam hal kesehatan mental dan prestasi akademik mereka masih terlalu dini untuk diukur, tapi trauma sudah mulai terjadi di kalangan siswa, baik terlihat maupun tidak (Scottie, 2020).

Bagi sebagian orang berada di rumah juga mengakibatkan peningkatan kecemasan (Scottie, 2020). Remaja, terutama remaja perempuan yang sudah cenderung menghadapi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan pasangan intim yang sangat tinggi, dapat mengalami tingkat kekerasan lebih tinggi yang didorong oleh karantina dan isolasi. Remaja yang menjadi orang tua tunggal tidak akan memiliki pilihan selain terus bekerja dan menyediakan untuk anak-anak mereka (UNFPA, 2020).

Namun, di sisi lain, remaja adalah salah satu kelompok individu yang mempunyai kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok umur anak-anak maupun lansia. Sehingga cenderung lebih bisa bertahan ketika terjadi kesakitan dibandingkan kelompok individu lain. Data sementara dari *website Centre of Control Disease – Amerika Serikat* menunjukkan bahwa kelompok umur 5-17 tahun mempunyai kemungkinan 0.1% untuk dirawat di rumah sakit jika terkena COVID-19. Hal ini bisa memberikan gambaran kondisi remaja yang tidak separah lansia ketika terkena virus ini. Kondisi ini bisa menjadikan remaja merasa kebal dan tidak sakit. Padahal saat ini dikenal tipe individu yang OTG (orang tanpa gejala) yang sebenarnya sudah terinfeksi tetapi mempunyai daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak timbul gejala apapun. Selain itu, salah satu kebutuhan remaja yang utama sesuai dengan tugas perkembangannya adalah berinteraksi dengan teman-temannya. Kondisi karantina ini dimungkinkan menimbulkan masalah bagi mereka. Pada satu sisi, terdapat kebutuhan untuk bergerak dan berinteraksi, lalu ada perasaan sehat dan tidak apa-apa. Tapi di sisi lain ada restriksi untuk beraktivitas. Ini merupakan hal yang saling bertentangan dan bisa jadi menimbulkan masalah pada remaja. Ada beberapa remaja yang patuh dan mengikuti aturan untuk tetap di rumah, tetapi ada juga yang punya kecenderungan untuk coba-coba pergi dan memenuhi keinginannya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini kemudian bisa menjadi masalah jika remaja tersebut menjadi OTG karena berpotensi menjadi sumber penularan bagi orang sekitarnya.

15.3.2 Sekolah dari Rumah

Pendidikan formal telah sangat terkena dampak pandemi (UNFPA, 2020c). Sebanyak 107 negara telah menerapkan penutupan sekolah secara nasional pada 18 Maret 2020 sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 (Viner, et al, 2020). Lebih dari 130 negara saat ini telah menutup sekolah di seluruh negeri, berdampak pada hampir 80% siswa di seluruh dunia (Scottie, 2020). Penutupan sekolah secara nasional telah mengganggu pendidikan lebih dari 1,57 miliar siswa atau 91 persen di seluruh dunia (UNICEF, 2020b)

Ini belum pernah terjadi sebelumnya; dunia belum pernah melihat begitu banyak anak keluar dari sekolah pada saat yang bersamaan (Scottie, 2020). Perasaan sedih, khawatir, bingung, takut atau marah adalah normal dalam situasi seperti ini. Kelas telah dilakukan selama berminggu-minggu para guru merasa tertekan untuk menambah beban kursus mereka (Scottie, 2020). Seluruh generasi siswa dapat mengalami kerugian dalam pembelajaran dan potensi mereka. Penutupan sekolah juga menghilangkan akses ke program gizi berbasis sekolah, mendorong tingkat kekurangan gizi (UNICEF, 2020b).

Keunggulan tradisional dari pengalaman sekolah menengah telah hilang pada masa pandemi *coronavirus* ini. Remaja merasa marah, cemas, dan pendiam ketika semua orang terbiasa dengan rutinitas baru di dalam rumah. Identitas mereka retak dalam isolasi dan orang-orang yang mencintai mereka, mengajar mereka dan mempelajarinya takut mereka akan memakai efek pandemi selama bertahun-tahun yang akan datang (Scottie, 2020).

Kondisi lain yang berpengaruh pada diri remaja terkait dengan sekolah adalah adanya pembatalan ujian nasional di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyatakan bahwa keselamatan siswa didik merupakan prioritas sehingga UN yang berpotensi menjadi lokasi berkerumun dan penularan COVID-19. Pembatalan ini bagi sebagian besar menjadikan hal yang menggembirakan tetapi bagi yang lain hal ini mengecewakan, karena kesempatan untuk menunjukkan prestasi di Ujian Nasional tidak bisa dilakukan.

15.3.3 Pengelolaan Stress

Kebutuhan akan layanan kesehatan mental dan konseling sangat penting, karena banyak orang, termasuk orang muda, menghadapi tingkat kecemasan dan stres yang tinggi terkait dengan COVID19. Langkah-langkah yang tepat akan diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan seperti migran muda, pengungsi muda, pemuda dalam tahanan, pemuda penyandang cacat, remaja yang hidup dengan HIV dan remaja yang hidup dalam kemiskinan (UNFPA, 2020c).

Kondisi yang menyertai jarak sosial dapat memperburuk bagian remaja yang menyakitkan hingga titik krisis. Remaja biasanya memiliki suatu reaktivitas tinggi terhadap stres, dianggap hasil dari fluktuasi hormonal dan perubahan dalam perkembangan otak. Remaja biasanya menghabiskan sebagian besar hari-hari mereka di sekolah, menyesuaikan diri dengan teman sebaya mereka yang mereka andalkan untuk membentuk perasaan dan pendapat mereka sendiri. Remaja pada periode isolasi pandemi ini mungkin akan mengalami reorientasi sosial, tapi dari massa ini juga memungkinkan munculnya remaja yang lebih tangguh. Kebersamaan di dalam rumah penting bagi perkembangan emosional. Jadwal makan dan olah raga teratur juga direkomendasikan, selain saran untuk tetap bersikap baik terhadap diri sendiri (Scottie, 2020).

15.4 Remaja dalam Mitigasi Pandemi

Kaum muda dapat menjadi sumber daya penting dalam mengurangi risiko, dan menjangkau masyarakat dalam krisis ini. Kaum muda mewakili sumber daya dan jaringan yang berharga selama krisis dan darurat kesehatan masyarakat. Pemberian pelatihan yang tepat tentang penyakit dan penularannya, akan memungkinkan kaum muda

dapat bekerja bersama dengan otoritas kesehatan untuk memutus rantai infeksi. Terlepas dari ketidaksetaraan digital, generasi anak muda ini lebih terhubung melalui teknologi, media, dan internet daripada generasi lainnya. Pada saat ini jarak sosial dan terkunci, kemudahan orang muda dengan teknologi akan sangat penting dalam menjaga saluran komunikasi terbuka, terinformasi dan mendukung satu sama lain dan komunitas yang lebih besar. Mereka dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang COVID-19 dan mendukung pertukaran informasi tentang pengurangan risiko, upaya nasional dan upaya respon (UNFPA, 2020).

UNICEF meluncurkan agenda global yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang paling rentan dari bahaya akibat pandemi COVID 19. Agenda ini memiliki enam pilar: 1) Menjaga anak-anak tetap sehat; 2) Menjangkau anak-anak yang rentan dengan air, sanitasi dan kebersihan; 3) Buat anak-anak tetap belajar; 4) Mendukung keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan pengasuhan untuk anak-anak mereka; 5) Melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; dan 6) Melindungi anak-anak pengungsi dan migran serta mereka yang terkena dampak konflik (UNICEF, 2020b).

Pernyataan Direktur Eksekutif UNICEF perlu menjadi bahan renungan kita semua: Ketika fokus kita selama periode *lockdown* ini adalah bagaimana menjaga diri kita dan orang yang kita cintai tetap sehat, kita juga harus mengingat jutaan anak yang berisiko menjadi korban yang terlupakan dari pandemi ini. Seperti apa dunia mereka besok, dan seperti apa masa depan mereka nantinya, juga menjadi tanggung jawab kita hari ini (UNICEF, 2020b).

Daftar Pustaka

- Andrew, Scottie. 2020. Why Teens May Never Be The Same After The Pandemic. <https://edition.cnn.com/2020/04/16/us/teens-coronavirus-coping-wellness-trnd/index.html>
- UNFPA. 2020. Coronavirus Disease (COVID-19) Preparedness and Response UNFPA Interim Technical Brief. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Adolescents_and_Young_People_23_March_2020.pdf
- UNICEF. 2020a. Novel coronavirus (COVID-19): Hal-hal yang perlu Anda ketahui, *Cara melindungi diri Anda dan anak-anak Anda*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus>

- UNICEF. 2020b. Pernyataan Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore
<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/jangan-biarkan-anak-menjadi-korban-tersembunyi-pandemi-COVID-19>
- UNICEF. 2020c. COVID-19. <https://www.unicef.org/coronavirus/COVID-19>
- Viner, R.M., Simon J Russell, Helen Croker, Jessica Packer, Joseph Ward, Claire Stansfield, Oliver Mytton, Chris Bonell, Robert Booy. 2020. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30095-X](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X)
[https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642\(20\)30095-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext)
- Voice of Youth (VOY). 2020. Studying at home due to coronavirus? This is how young people around the world are keeping their mood up.
<https://www.voicesofyouth.org/campaign/studying-home-due-coronavirus-how-young-people-around-world-are-keeping-their-mood>
- WHO. 2020a. Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-COVID-19-prevention-and-control-in-schools-march2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4danua=1danua=1
- WHO. 2020b. Pres Conference April 22, 2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

16. *NEW NORMAL* : SEBUAH TANTANGAN BAGI ANAK ANAK DAN ORANG TUA SELAMA DAN PASCA PANDEMI

Oleh:

Diyah Woro Dwi Lestari, S.Psi, M.A dan Eri Wahyuningsih, S.Ked,
M.Kes

16.1 Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, dunia sedang dilanda wabah yang membuat semua perubahan masif di semua sisi kehidupan manusia. Wabah penyakit ini muncul pertama kali di Provinsi Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dengan ditemukannya kasus positif individu yang terkena penyakit mirip flu yang disebabkan oleh virus SARS-COV2. Perkembangan selanjutnya penyakit yang muncul diberi nama *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada bulan-bulan awal kemunculannya, penyakit ini sudah menulari manusia secara cepat. Berdasarkan laporan situasi harian dari WHO sejumlah 278 orang terjangkit penyakit ini di China dan 4 orang di luar China hanya dalam waktu 21 hari sejak awal dilaporkan muncul kasusnya (WHO, 2020a). Penularannya sangat cepat karena pada Mei 2020 sudah terkonfirmasi kasus sejumlah 5.488.825 kasus di seluruh dunia dengan 349,190 orang yang sudah meninggal dunia karena Covid-19 ini (WHO, 2020). Pertambahan kasus dalam sehari pun sangat besar, yaitu sebanyak 84.314 kasus (WHO, 2020a) pada tanggal 27 Mei 2020 ke tanggal 28 Mei 2020. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap penyakit ini, diketahui bahwa walaupun penyakit ini bisa digolongkan sebagai penyakit dengan tingkat keparahan yang relatif tidak parah, tetapi penularannya sangat cepat. Sekarang hampir seluruh negara di dunia menyatakan sudah memiliki kasus positif covid-19 di negara mereka. Sayangnya, sampai dengan saat ini, belum ditemukan vaksin/obat yang terbukti dapat menyembuhkan penyakit ini, sehingga seluruh masyarakat dunia diharapkan dapat berperan serta dalam mencegah penyebaran virus ini (WHO, 2020)

Sebagai tindak lanjutnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2020) menetapkan beberapa prosedur pencegahan bagi negara-negara di dunia untuk mencegah penularan wabah ini. Prosedur yang disarankan adalah melakukan karantina maupun isolasi terhadap masyarakatnya serta melakukan perilaku sehat terkait dengan kebersihan tangan (*Hand Hygiene*). Menurut analisis dari Anderson (2020) di jurnal *Lancet*, karena vaksin juga belum ditemukan maka satu-satunya hal yang dapat dimaksimalkan adalah memberikan sebanyak mungkin edukasi yang benar ke masyarakat terkait covid-19 serta melakukan prosedur karantina mandiri. Proses karantina ini dinilai akan sangat efektif jika dilakukan

secara benar dan menuruti prosedur yang ada. Karantina yang dimaksudkan adalah pembatasan mobilitas warga dalam beraktivitas dan pemantauan kesehatan sendiri, sedangkan isolasi adalah pelarangan mobilisasi secara ketat. Tujuannya agar jumlah individu yang sakit dapat dikendalikan, sehingga penularan dapat dicegah dan mengurangi beban layanan kesehatan dalam menangani kasus. Beberapa negara yang telah melakukan hal ini dan terbukti berhasil menurunkan tren kasus covid-19 adalah Cina dan beberapa negara Eropa. Indonesia sendiri telah menyatakan diri sebagai negara dengan kasus positif covid-19 sejak Maret 2020. Pada awalnya pemerintah hanya menetapkan karantina mandiri bagi para warga negara dan lalu karena terdapat tren peningkatan kasusnya lalu menerapkan PSBB pada beberapa daerah yang diduga menjadi zona merah, seperti Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, terdapat beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB tetap menganjurkan karantina mandiri bagi para warganya. Sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, pemerintah Indonesia melaporkan 23.165 kasus positif dengan 1.418 kasus meninggal (WHO, 2020)

Karantina mandiri, PSBB maupun isolasi mandiri di satu sisi memang memberikan manfaat besar bagi penurunan angka kesakitan karena COVID-19 baik di level nasional maupun internasional. Namun, di sisi lain karantina itu memberikan efek yang dirasa kurang menguntungkan, terutama dari sisi ekonomi dan pendidikan. Dengan adanya karantina, semua sekolah dari level pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi dan pusat perkantoran ditutup untuk waktu yang belum bisa ditentukan (Kemendikbud, 2020). Pegawai Negeri maupun Aparatur Sipil Negara diminta tidak datang ke kantor secara fisik karena adanya anjuran *social distancing* (Kemenaker, 2020). Kegiatan ibadah yang dilakukan secara berkumpul dilarang untuk menghindari potensi penularan (Kemenag, 2020). Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa terdapat sejumlah 1.722.958 pekerja sektor formal di PHK oleh perusahaan sebagai akibat dari wabah COVID-19 ini (Kemenaker, 2020) Hal ini mempengaruhi kondisi ekonomi indonesia yang saat ini sedang berkembang.

Kondisi lain yang terjadi adalah anjuran untuk melakukan penyesuaian mengenai perilaku sehat yang harus dilakukan yaitu melakukan pencegahan berupa mencuci tangan selama 20 detik, menghindari memegang area muka dengan tangan setelah kontak dengan benda/orang lain, menghindari bersalaman dan menggunakan masker dan menerapkan etiket batuk yang baik. Hal ini wajib dilakukan untuk menghindarkan diri dari penularan virus (Kemenkes, 2020)

Bagi anak dan orang tua, kondisi ini memberikan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola kerja dan sekolah membuat aktivitas terpusat di rumah. Pekerjaan yang sifatnya domestik bisa

kemudian bercampur dengan pekerjaan di organisasi untuk para orang tua yang bekerja. Pada orang tua yang tidak bekerja, tantangan muncul terkait dengan bagaimana melakukan pengaturan ulang pengelolaan rumah tangga, ketika semua anggota keluarga berada di rumah dalam 24 jam dengan berbagai aktivitasnya. Bagi anak-anak, salah satu yang perlu diperhatikan adalah mengenai pendidikan mereka. Pendidikan selama masa PSBB/karantina mandiri adalah pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Tantangan yang muncul adalah mendampingi anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dengan sistem online merupakan hal yang relatif baru bagi siswa didik di Indonesia, sehingga tantangan awalnya adalah bagaimana membiasakan dengan sistemnya terlebih dahulu. Selain itu, ada hal terkait dengan pola asuh yang perlu diterapkan kepada anak-anak terkait dengan pembatasan gerak dan akses ke tempat umum untuk kepentingan yang tidak penting. Salah satu kebutuhan anak-anak adalah bermain dan berinteraksi dengan lingkungan sosial secara bebas. Dengan adanya pembatasan ini dan dalam kurun waktu yang cukup lama akan berpengaruh pada aspek sosio-emosional anak, contohnya adalah pada akses anak-anak untuk bertemu dengan teman-temannya. Aktivitas utama anak-anak yaitu bersekolah terganggu dan bagi beberapa anak hal ini membuat mereka terganggu secara emosional karena ketidakmampuan mereka untuk berinteraksi secara bebas dengan teman-temannya di sekolah (Sweeney, 2020). Penerapan perilaku kesehatan baru juga merupakan tantangan bagi anak-anak. Kebiasaan mencuci tangan dan etika batuk serta menggunakan masker merupakan keharusan dalam situasi pandemi ini. Namun, bagi anak-anak hal ini merupakan hal yang perlu untuk dilatihkan, karena selama ini kebiasaan mencuci tangan merupakan perilaku sehat yang masih terus diupayakan untuk dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan tantangan yang besar bagi para orang tua serta pendidik yang berinteraksi langsung dengan anak. Penggunaan masker pada anak juga merupakan tantangan lain yang perlu dijawab oleh semua pihak yang berkepentingan. Pemahaman mengenai mengapa harus menggunakan masker dan rajin mencuci tangan yang harus diberikan kepada anak merupakan hal yang perlu dipikirkan secara cermat. Panduan mengenai bagaimana pengasuhan di rumah telah dikeluarkan oleh KPAI sebagai organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak (KPAI, 2020).

16.2 Tantangan Kenormalan Baru

Beberapa negara di dunia telah mulai mencoba untuk melakukan prosedur pelonggaran karantina dan secara bertahap mengaktifkan kembali kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, hasilnya masih belum menunjukkan hasil positif yang konsisten. Negara seperti China dan

Korea yang mengklaim berhasil mengatasi gelombang pandemi ini (cnnindonesia, 2020) menyatakan bahwa terdapat kasus baru COVID-19 pasca pelonggaran, sehingga kemudian pada daerah daerah yang terdapat kasus baru itu dilakukan karantina kembali. Organisasi kesehatan dunia pada press releasenya di tanggal 25 Mei 2020 menyatakan bahwa bagi sebagian besar wilayah dunia saat ini berada di tengah pandemi dan tidak ada jaminan bahwa setelah suatu daerah mencapai titik tertinggi penemuan kasusnya, angka kejadiannya akan menurun, bahkan dimungkinkan akan muncul puncak tinggi lagi pada satu periode pandemi (WHO, 2020b)

Pada kurun waktu akhir Mei, wacana mengenai kenormalan baru muncul. Istilah kenormalan baru digulirkan oleh pemerintah pusat terkait dengan persiapan untuk membuka kembali semua akses dan pengaktifan kembali kegiatan masyarakat dalam kondisi pandemi. Wacana terkait hal ini cukup menimbulkan kontroversi karena berbagai alasan. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI 2020) bereaksi dengan memberikan edaran mengenai persyaratan yang perlu disiapkan untuk menjamin kesehatan fisik dan mental anak anak pada saat pemerintah menyatakan sekolah kembali dibuka. Menurut IDAI, berdasarkan data yang ada, kasus anak yang terjangkit covid-19 cukup banyak dan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan anak, perlu mengutamakan kebutuhan tumbuh kembang dan kesehatan anak semata. Hal ini disebabkan karena terdapat risiko yang sangat besar bagi anak dapat tertular COVID-19 apabila proses menuju kenormalan baru ini dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2020) juga telah mengeluarkan berita yang berisi himbuan untuk mempertimbangkan kembali rencana pembukaan sekolah bagi anak-anak menimbang saat ini grafik angka kejadian COVID-19 masih tinggi dan perlu adanya persiapan dalam hal bantuan medis agar tidak memunculkan kasus baru.

Secara regulasi, pemerintah perlu untuk mengeluarkan regulasi terkait berbagai prosedur yang harus dilakukan ketika aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan akan diaktifkan kembali, termasuk mengenai perlindungan anak terhadap resiko terjangkit covid-19 apabila nantinya aktivitas sekolah sudah diaktifkan. Anak merupakan kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara. Hal yang perlu dipersiapkan meliputi edukasi mengenai kebersihan tangan, penggunaan masker serta *social distancing* serta penyediaan sarana *hygine* di sekolah dan tempat umum serta pengaturan sarana dan prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kesiapan fasilitas medis sebagai antisipasi jika ada anak terdampak COVID-19 di sekolah.

Anak merupakan aset bangsa dan akan menjadi penentu arah perjalanan bangsa. Melindungi anak berarti pula melindungi bangsa. Di

masa pandemi ini, perlu adanya perlindungan secara menyeluruh bagi anak, terutama terkait dengan kesehatannya, karena penyakit yang saat ini mewabah belum ditemukan obatnya. Menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memikirkan secara serius mengenai bagaimana teknis perlindungan bagi anak agar dapat melakukan aktivitas hariannya secara menyenangkan sekaligus menjamin kesehatan fisik dan psikologis anak Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., dan Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? *Lancet* (London, England), 395(10228), 931–934. [https://e-resources.perpusnas.go.id:2116/10.1016/S0140-6736\(20\)30567-5](https://e-resources.perpusnas.go.id:2116/10.1016/S0140-6736(20)30567-5)
- CNN Indonesia (2020, 9 maret) diakses pada 29 Mei 2020 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200309124548-113-481706/china-dan-korsel-laporkan-penurunan-korban-virus-corona>
- IDAI (2020, 29 Mei) Anjuran-idai-menjelang-akhir-masa-tanggap-darurat-covid-19., diakses pada 29 Mei 2020 dari <http://www.idai.or.id/about-idai/idai-statement/anjuran-idai-menjelang-akhir-masa-tanggap-darurat-covid-19>
- Kemenag (2020, 17 April) diakses pada 29 Mei 2020 dari <https://kemenag.go.id/berita/read/513200/kemenag--ibadah-ramadan-di-rumah--pilihan-yang-harus-diambil->
- Kemenaker (2020, 8 Mei) diakses pada 29 Mei 2020 dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-beri-bantuan-bagi-korban-phk-dan-dirumahkan>
- Kemempn (2020, 16 Maret) diakses pada 29 Mei 2020 dari Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 dengan Kerja di Rumah bagi ASN <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn>
- Kemendikbud, (2020, 24 Maret) diakses pada 29 Mei 2020 diakses pada 29 mei 2020 dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- KPAI (2020, 2 April) diakses pada 29 mei 2020 dari <https://www.kpai.go.id/berita/panduan-mengasuh-anak-di-era-pandemi-covid-19>
- Sweeney, D. (2020). We are all feeling a range of emotions at this time. *Kentucky Teacher*, 1–3.
- WHO (2020b, 25 Mei). Press Conference (video file) diakses pada 29 Mei 2020 dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. UNSOED Press

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto

Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 626070

Email: unsoedpress@unsoed.ac.id

ISBN 978-623-7144-91-5

